PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNG JAWABAN

BUPATI LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
BUPATI LUWU TIMUR

M. AKBAR ANDI LELUASA, S.Sos
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR

luwu timur inspiring

Peduli ki Saya Jaga ki

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 tepat waktu sesuai amanah perundang-undangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 19 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran.

Berdasarkan laporan hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam LKPJ Tahun 2024 ini, telah banyak target kinerja yang tercapai walaupun masih terdapat beberapa capaian yang belum optimal. Harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, agar seluruh target kinerja dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan rekomendasi hasil pembahasan DPRD diharapkan menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun – tahun selanjutnya

Demikian pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, semoga Laporan ini dapat memberi perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa akan datang yang pada akhirnya dapat mewujudkan kolaborasi dan harmonisasi bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malili, 17 Februari 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. Budiman, M.Pd

DAFTAR ISI

		hal
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	DASAR HUKUM	1
	VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	2
	DATA UMUM DAERAH	9
	1. Data geografis wilayah	9
	2. Topografi	10
	3. Kependudukan	10
	4. Pertumbuhan Penduduk	10
	5. Kepadatan Penduduk	12
	6. Struktur Usia Penduduk	13
	7. ASN	15
	8. Jumlah PNS	15
	9. Jumlah PPPK	19
	10. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	21
	11. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	25
	12. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	28
	13. Realisasi Belanja Perangkat Daerah	29
BAB II	**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**	**33**
	1. Perubahan Pendapatan Daerah	34
	2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
	3. Pendapatan Transfer	42
	4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	43
	5. Perubahan Belanja Daerah	46
	6. Belanja Operasi	47
	7. Belanja Modal	48
	8. Belanja Tidak Terduga	51
	9. Belanja Transfer	51
	10. Perubahan Pembiayaan	52
	11. Perubahan Belanja Perangkat Daerah	54
BAB III	**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**	**139**
	3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	**139**
	3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	**143**
	3.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	143
	a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	143
	b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	155
	Dinas Kesehatan	155
	RSUD I Lagaligo	173
	Puskesmas	177

c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ---- 227
d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan ---- 241
e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ---- 244
Satpol PP ---- 244
BPBD ---- 254
Damkar ---- 262
f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial ---- 271
3.2.2 URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR ---- 275
a) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja ---- 275
b) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ---- 284
c) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan ---- 291
d) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan ---- 295
e) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup ---- 300
f) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ---- 311
g) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ---- 319
h) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ---- 327
i) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan ---- 340
j) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika ---- 349
k) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah ---- 354
l) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal ---- 362
m) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga ---- 369
n) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik ---- 373
o) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian ---- 373
p) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan ---- 374
q) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan ---- 375
r) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan ---- 377
3.2.3 URUSAN PILIHAN ---- 382
a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan ---- 382
b) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata ---- 392
c) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian ---- 398
d) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan ---- 415
e) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ---- 417
f) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi ---- 420
3.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN ---- 422
a) Unsur Sekretariat Daerah ---- 422
b) Unsur Sekretariat DPRD ---- 435
3.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ---- 445
a) Unsur Perencanaan ---- 445
b) Unsur Keuangan ---- 454
BKAD ---- 454

Bapenda..... 462
c) Unsur Kepegawaian---------- 468
d) Pendidikan,dan Pelatihan---------- 475
e) Unsur Penelitian dan Pengembangan---------- ---- 479
f) Kesatuan Bangsa dan Politik---------- 481

3.2.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN---------- 490
a) Unsur Pengawasan---------- 490
3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN ---------- 497
a) Unsur Kewilayahan ---------- 497

3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN---------- 562
3.4 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA ---------- 572
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN---------- 581
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN -- 581
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN ---------- 606

BAB V PENUTUP ---------- 619

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan……	4
Tabel 1.2	Capaian Indikator Kinerja Utama……	6
Tabel 1.3	Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur……..	9
Tabel 1.4	Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur……	10
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2019 – 2024……...	11
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024…….	12
Tabel 1.7	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024…….	12
Tabel 1.8	Struktur Usia Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024……...	13
Tabel 1.9	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2024…….	14
Tabel 1.10	Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024…….	15
Tabel 1.11	Jumlah PNS berdasarkan Golongan, Eselon, dan Pendidikan Tahun 2020 –2024…….	18
Tabel 1.12	Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024…….	19
Tabel 1.13	Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2024……...	20
Tabel 1.14	Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2024……	21
Tabel 1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024…….	23
Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024…….	25
Tabel 1.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024……..	26
Tabel 1.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024……	26
Tabel 1.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024……...	27

Tabel 1.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024……..	28
Tabel 1.21	Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan T.A 2024…….	28
Tabel 1.22	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024…….	30
Tabel 2.1	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024……..	34
Tabel 2.2	Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024…….	35
Tabel 2.3	Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024……..	38
Tabel 2.4	Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024…….	42
Tabel 2.5	Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024……	43
Tabel 2.6	Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024…….....	44
Tabel 2.7	Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024……...	46
Tabel 2.8	Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024……..	48
Tabel 2.9	Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024……..…	49
Tabel 2.10	Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024……..……..	51
Tabel 2.11	Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 ……..…	51
Tabel 2.12	Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024……..……	53
Tabel 2.13	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024……	55
Tabel 2.14	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan……	57
Tabel 2.15	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan……	60
Tabel 2.16	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo …….	63
Tabel 2.17	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang……	65

Tabel 2.18	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan……..	69
Tabel 2.19	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja…….	72
Tabel 2.20	Perubahan Program /Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik……	75
Tabel 2.21	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah……	77
Tabel 2.22	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan …….	80
Tabel 2.23	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak……..	81
Tabel 2.24	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup……...	85
Tabel 2.25	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	89
Tabel 2.26	Perubahan Anggaran Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90
Tabel 2.27	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana……..	92
Tabel 2.28	Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan……..	95
Tabel 2.29	Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian……..	97
Tabel 2.30	Perubahan Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu…….	100
Tabel 2.31	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan……..	102
Tabel 2.32	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Perikanan……...	104
Tabel 2.33	Perubahan Anggaran/Kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga…….	107
Tabel 2.34	Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	111
Tabel 2.35	Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian…….	113
Tabel 2.36	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja……..	117
Tabel 2.37	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat Daerah…….	119

Tabel 2.38	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat DPRD ..…….…….	122
Tabel 2.39	Perubahan Anggaran Program Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah……...	126
Tabel 2.40	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah……..	128
Tabel 2.41	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur……...	131
Tabel 2.42	Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2024……...	132
Tabel 2.43	Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Inspektorat…….	134
Tabel 2.44	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Kecamatan Kecamatan Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022…….	137
Tabel 2.45	Perubahan Rincian Anggaran Belanja Puskesmas Puskesmas Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022…….	138
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024……	141
Tabel 3.2	Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024……...	143
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kab. Luwu Timur Tahun 2024……..	275
Tabel 3.4	Urusan Pilihan Kab. Luwu Timur tahun 2024……	381
Tabel 3.5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024……...	421
Tabel 3.6	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024……..	444
Tabel 3.7	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024……...	489
Tabel 3.8	Unsur Kewilayahan Kab. Luwu Timur Tahun 2024.....	485
Tabel 3.9	Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024……..	561
Tabel 3.10	Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024…….	572
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024……	582
Tabel 4.2	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024……	600

Tabel 4.3 Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Dan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024…… 606

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 71 ayat (2) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ Berdasarkan Pasal (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 adalah tolok ukur terhadap pencapaian kinerja pembangunan tahunan yang disusun bersama melalui serangkaian tahapan dan mekanisme berbasis Rencana Kerja Pembangunan yang menjadi pedoman, sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran selanjutnya.

1. 1 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

1.2 Visi dan Misi

Visi pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 Tahap IV. Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur periode 2021 – 2026 adalah :

"**Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**".

Visi tersebut memiliki makna pada setiap pokok visi, yaitu:

Berkelanjutan : Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih Maju : Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi

keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya : mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk menjabarkan visi pembangunan tahun 2021-2026, maka telah dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah, yang terdiri dari:

Misi 1. ***Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh*.** dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli masyarakat

Misi 2. ***Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas.*** dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global.

Misi 3. ***Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik***. dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan public serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Misi 4. ***Menyediakan Infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.*** dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepatuhan multipihak terhadap Rencana Tataruang dan Rencana Wilayah (RTRW),

serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah.

Misi 5. ***Mewujudkan keterntraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.*** Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan.

Misi 6. ***Menjamin Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada agama dan budaya.*** dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagamaan yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia.

Adapun hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan kabupaten Luwu Timur berdasarkan RPJMD kabupaten Luwu Timur 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya			
1	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	Mendorong kontribusi dunia usaha, kesadaran kritis kolektif, dan dukungan sarana/prasarana dalam meningkatkan derajat pendidikan dan literasi, lama hidup dan kesehatan, serta daya beli masyarakat. (St1)
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	Mengoptimalkan pemanfaatan dana dan koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi desa dalam kerangka pemenuhan SDGs Desa (St2)
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	Menguatkan Peran dan Kapasitas Perempuan dalam Pembangunan (St3)
Misi 2 Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas (M2)			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	Meningkatnya realisasi investasi Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	Memanfaatkan teknologi terkini dan spirit milenial dalam meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dengan didukung oleh inovasi daerah dan prasarana/sarana perdagangan(S4)
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perkembangan start-up UMKM berbasis digital yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik (St5)
Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
3	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan dalam menjaga dan memelihara fungsi infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, pemukiman dan perumahan, serta sumberdaya air secara berkualitas diiringi dengan kepatuhan terhadap RTRW (St6)
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	Memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati berbasis kontribusi multi pemangku kepentingan diiringi dengan peningkatan kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim (St7)
Misi 4 Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan tata kelola keungan daerah diiringi dengan peningkatan profesionalisme SDM aparatur berbasis jabatan fungsional (St8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	Meningkatkan akurasi data, kesiapan sarana dan fasilitas, serta kesiapan SDM aparatur diiringi dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi serta standar operasional prosedur dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar dan perbaikan kualitas pelayanan non SPM (St9)
Misi 5 Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)			
5	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	Menguatkan peran kelembagaan masyarakat secara bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta rasa aman dan damai dalam masyarakat (St10)
Misi 6 Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)			
6	Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	Memperkuat peran forum kerukunan umat beragama serta pembinaan mental-spiritual diiringi dengan penguatan modal keragaman etnik dan suku dalam pemajuan kebudayaan (St11)

Tabel 1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya					
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	**Tujuan-1:**				
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1 Angka Kemiskinan	%	6,24	6,55
		Sasaran-1:				
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	74,40	76,44
		Sasaran-2:				
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3 Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Maju	Maju
		Sasaran-3:				
		Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	90,06	90,06**
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas (M2)	**Tujuan-2:**				
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5 Pertumbuhan Ekonomi	%	2.98 - 3,71	3,27*
			6 Rasio Gini	Nilai	0,247	0,392** (belum rilis)
		Sasaran-4				
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2,08	3,25
		Sasaran-5:				

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,80	4,58
3	Menyediaan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	**Tujuan-3:**				
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9 Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai	2,2638	2,1257
		Sasaran-6:				
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10 Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai	75,15	-
		Sasaran-7:				
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	88,35	80,09
			12 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (Tinggi)	133,38 (sedang)
4	Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	**Tujuan-4:**				
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	B*
		Sasaran-8:				
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14 Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD)	Predikat	A (Baik)	A (Baik) 80,4112
			15 Nilai SAKIP Daerah	Predikat	A	B (67,77)
		Sasaran-9:				

No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16 IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai	85,68	99,13
			17 IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	86,23	87,86
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	**Tujuan-5:**				
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)	18 Angka Kriminalitas	Point	0,000473	0,0004525
		Sasaran-10:				
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19 Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	77,21	88,59
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	**Tujuan-6:**				
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20 Indeks kerukunan umat beragama	Nilai	76,00	80,47
			21 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	55,27	55,26 (Sul-Sel)
		Sasaran-11:				
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22 Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	95	100
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%	95	100

*Sumber: **LKPJ Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, data diolah*

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara yang pembentukannya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Ibu kota Kabupaten Luwu Timur adalah Malili, yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah mencapai 6.747,93 Km², berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl).

Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Luwu Timur terletak pada 2°03'00" - 3°03'25" Lintang Selatan, serta 119°28'56" - 121°47'27" Bujur Timur berada pada jalur trans Sulawesi dimana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Marowali Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	(%)
1	2		3	5
1	Burau	Burau	275,40	4,08
2	Wotu	Bawalipu	147,64	2,19
3	Tomoni	Mandiri	274,69	4,07
4	Tomoni Timur	Kertoharjo	44,86	0,66
5	Angkona	Solo	294,93	4,37
6	Malili	Puncak Indah	883,62	13,09
7	Towuti	Langkea Raya	1,926,13	28,54
8	Nuha	Sorowako	859,71	12,74
9	Wasuponda	Ledu-Ledu	834,85	12,37
10	Mangkutana	Wonorejo	1.147,02	17,00
11	Kalaena	Kalaena Kiri	59,08	0,88
Total			**6,747,93**	**100,00**

Sumber data : Dokumen Matek Revisi RTRW Kabupaten Luwu Timur 2022-2042 ,2023

Kabupaten Luwu Timur juga dikenal memiliki danau terdalam di Asia Tenggara yaitu danau Matano yang terletak di Kecamatan Nuha dengan kedalam 590 meter dan berada di peringkat ke 9 dalam daftar danau terdalam di dunia. Selain danau Matano, terdapat 4 danau lainnya yang berada di Kecamatan Towuti yaitu danau Towuti dengan luas 585 km², danau Mahalona dengan luas 25 Km², danau Lontoa dengan 1.71 Km², dan danau Tapparang Masapi. Kabupaten Luwu Timur

juga memiliki sungai yang cukup panjang dimana Sungai Kalaena merupakan sungai terpanjang yaitu 85 km, yang melintas di Kecamatan Kalaena dan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Panjang sungai utama di Kabupaten Luwu Timur tergambar pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 1.4 Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur

Nama Sungai	Daerah Aliran	Panjang Sungai (Km)
1	2	3
Larona	Kec. Nuha	60
Ussu	Kec.Wasuponda dan Malili	30
Cerekang	Kec. Wasponda dan Malili	50
Angkona	Kec. Angkona	48
Kalaena	Kec. Mangkutana, Tomoni dan Kalaena	85
Powosoi	Kec. Mangkutana, Tomoni, Wotu	18
Singgeni	Kec. Burau	24
Bambalu	Kec. Burau	15
Pongkeru	Kec. Malili	33,5

Sumber: Profil Kab Luwu Timur Tahun 2024

1.3.2 Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Timur berada pada kawasan Pegunungan Verbeck yang merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah dataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah dataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili, dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti. Jika dilihat posisi wilayah ini dari permukaan laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu: 0 – 25 m dpl, 25 – 100m dpl, 100 – 500m dpl, 500 – 1000m dpl dan >1000m dpl. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah dataran. Sesuai dengan kondisi topografi, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha dan Kecamatan Towuti didominasi oleh pegunungan berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

1.3.3 Kependudukan

1.3.3.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perpindahan penduduk (mutasi) dari atau/keluar, kelahiran dan kematian. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data semester II Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk, sebanyak 323.422 jiwa. Hal ini berarti terjadi kenaikan sebesar 10.018 jiwa jika

dibandingkan dengan data jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mangkutana	22.437	22.363	22.351	22.551	23,000
2	Nuha	23.755	23.962	24.356	24.486	24,978
3	Towuti	43.597	44.899	46.120	48.076	50,605
4	Malili	43.421	44.096	45.178	45.833	48,132
5	Angkona	25.303	25.432	25.556	25.814	26,406
6	Wotu	33.732	33.925	34.171	24.723	35,640
7	Burau	35.100	35.292	35.303	35.655	36,703
8	Tomoni	26.773	26.930	27.346	27.727	28,654
9	Tomoni Timur	13.649	13.679	13.748	13.900	14,141
10	Kalaena	12.297	12.345	12.259	12.262	12,383
11	Wasuponda	21.975	22.015	22.142	22.357	22,780
	Jumlah	**302.039**	**304.938**	**308.530**	**313.404**	**323.422**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024 (Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester II Tahun 2024)

Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 tercatat sebesar 323.422 jiwa terdiri dari 166.934 jiwa laki-laki dan 156.488 jiwa perempuan. Data ini juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di wilayah tersebut setiap tahunnya, mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang terus berlangsung.

Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Towuti dengan jumlah penduduk yaitu 50.605 jiwa yang terdiri dari 26.831 jiwa laki-laki dan 23.216 jiwa perempuan, di susul kecamatan Malili dengan jumlah penduduk sebesar 48.132 jiwa yang terdiri dari 24.916 jiwa laki-laki dan 23.216 jiwa perempuan .

Jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Luwu Timur berada di Kecamatan Kalaena dengan jumlah penduduk 12.383 jiwa yang terdiri dari 6.257 jiwa laki-laki dan 6.126 jiwa perempuan.

. **Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Mangkutana	11,636	11,364	23,000
2	Nuha	13,471	11,507	24,978
3	Towuti	26,831	23,774	50,605
4	Malili	24,916	23,216	48,132
5	Angkona	13,494	12,912	26,406
6	Wotu	17,832	17,808	35,640
7	Burau	18,636	18,067	36,703
8	Tomoni	14,543	14,111	28,654
9	Tomoni Timur	7,235	6,906	14,141
10	Kalaena	6,257	6,126	12,383
11	Wasuponda	12,083	10,697	22,780
Luwu Timur		**166,934**	**156,488**	**323,422**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024 (Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester I Tahun 2024)

1.3.3.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Angka Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah 47,93 artinya setiap km^2, di huni oleh 47 jiwa.

Persebaran penduduk di setiap kecamatan dapat di lihat pada tabel. Kecamatan Tomoni Timur merupakan kecamatan yang paling padat di wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan kepadatan mencapai 315.23 jiwa/km2. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Mangkutana yaitu 20.05 jiwa/km2.

Tabel 1.7 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)*	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan
1	Mangkutana	1,147.02	23,000	20.05
2	Nuha	859.71	24,978	29.05
3	Towuti	1,926.13	50,605	26.27
4	Malili	883.62	48,132	54.47
5	Angkona	294.93	26,406	89.53

NO	KECAMATAN	Luas Wilayah (Km2)*	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan
6	Wotu	147.64	35,640	241.40
7	Burau	275.40	36,703	133.27
8	Tomoni	274.69	28,654	104.31
9	Tomoni Timur	44.86	14,141	315.23
10	Kalaena	59.08	12,383	209.60
11	Wasuponda	834.71	22,780	27.29
LUWU TIMUR		**6,747.93**	**323,422**	**47.93**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024 (Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester II Tahun 2024)

1.3.3.3 Struktur Usia Penduduk

Pembagian penduduk pada kategori ini akan membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau yang lainnya.

Tabel 1.8 Struktur Usia Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	0 - 4	13,404	12,220	25,624
2	5 - 9	15,742	14,535	30,277
3	10 - 14	15,796	14,640	30,436
4	15 - 19	14,310	13,382	27,692
5	20 - 24	15,898	14,802	30,700
6	25 - 29	14,376	13,376	27,752
7	30 - 34	12,084	11,285	23,369
8	35 - 39	11,683	11,406	23,089
9	40 - 44	12,619	11,925	24,544
10	45 - 49	11,554	10,759	22,313
11	50 - 54	9,522	8,471	17,993
12	55 - 59	6,839	6,220	13,059
13	60 - 64	4,494	4,546	9,040
14	65 -69	3,232	3,410	6,642
15	70 - 74	2,644	2,487	5,131
16	>=75	2,737	3,024	5,761
TOTAL		**166,934**	**156,488**	**323,422**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024 (Data

Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester II Tahun 2024)

Pada Tabel di atas tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk kelompok umur Balita (0-4) sebesar 25,624 jiwa. Hal ini menuntut perhatian pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penanganan penduduk balita terutama dalam segi gizi dan kesehatan. Komposisi penduduk usia anak-anak dan remaja yang berumur 5-19 tahun sebanyak 88,405 jiwa, pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga memberikan perhatian besar berkaitan dengan pendidikan terhadap anak usia sekolah ini.

Rasio Ketergantungan atau *Depency Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020- 2024

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 14 tahun	86.518	86.160	86,481	86.389	86,337
15 - 64 tahun	200.727	203.754	206.492	210.458	219,551
65+	14.794	15.024	15.557	16.557	17,534
Jumlah penduduk Usia tidak Produktif	101.312	101.184	102,038	102.946	103.871
Rasio Ketergantungan	**50.47**	**49,65**	**49,41**	**48.92**	**47.31**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, 2024 (Data Kependudukan Kab. Luwu Timur Semester I Tahun 2024)

Pada tahun 2020, rasio ketergantungan di Kabupaten Luwu Timur tercatat sebesar 50,47, yang berarti untuk setiap 100 jiwa usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 50 jiwa yang belum produktif dan yang di anggap tidak produktif lagi .Angka ini menunjukkan proporsi ketergantungan yang cukup tinggi.

Namun, selama lima tahun berturut-turut, rasio ketergantungan menunjukkan penurunan yang stabil. Pada tahun 2021, rasio ketergantungan menurun sedikit menjadi 49,65. Pada tahun 2022, angka ini kembali turun menjadi 49,41, dan pada tahun 2023, rasio ketergantungan mencapai 48,92. Penurunan berlanjut pada tahun 2024, dengan rasio ketergantungan mencapai 47,31, yang merupakan angka terendah selama periode tersebut.

Perubahan ini mencerminkan tren peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Sebagai contoh, pada tahun 2024, jumlah penduduk usia tidak produktif (103.871) menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan tahun 2020, sementara jumlah penduduk usia produktif meningkat pesat dari 200.727 pada tahun 2020 menjadi 219.551 pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya tren penurunan ketergantungan penduduk di Kabupaten Luwu Timur, yang dapat diartikan sebagai indikasi semakin besarnya kontribusi penduduk usia produktif terhadap perekonomian daerah..

1.3.4. Aparatur Sipil Negera (ASN)

Merujuk pada Pasal (1) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 sebanyak 5.286 orang yang terdiri dari 3.675 orang PNS dan 1.611 orang PPPK. Bertambah 185 orang jika dibandingkan dengan data ASN pada tahun 2023 yaitu sebanyak 5.101 orang

1.3.4.1 Jumlah PNS

PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini tersebar di beberapa unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2024 yang tersebar di beberapa OPD dapat dilhat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.10 Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2024

NO	UNIT KERJA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	SEKRETARIAT DAERAH	81	82	80	78
2	SEKRETARIAT DPRD	22	21	22	23
3	INSPEKTORAT	44	45	48	49
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	56	48	45
5	DINAS KESEHATAN	69	73	73	65
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85	87	88	84
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	19	18	19	18
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40	39	39	39
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9	14	20	21
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20	19	18	17
11	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	27	25	23	23
12	DINAS PERIKANAN	30	24	24	23

NO	UNIT KERJA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22	25	25	25
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	18	18	18
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17	16	15	15
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	19	20	16
17	DINAS PERHUBUNGAN	27	28	27	26
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	21	21	22	19
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	22	23	26	27
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21	19	18	19
21	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23	21	20	21
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30	28	28	25
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	193	196	190	181
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26	26	25	26
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34	27	28	30
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11	24	25	26
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28	27	25	25
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	11	12	14
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	12	13	13
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO	223	228	228	230
31	KEC. BURAU	22	23	19	21
32	KEC. WOTU	22	21	19	19
33	KEC. TOMONI	19	17	15	16
34	KEC. MANGKUTANA	18	18	18	18
35	KEC. TOMONI TIMUR	15	15	14	14
36	KEC. KALAENA	16	17	13	12
37	KEC. ANGKONA	17	19	16	18
38	KEC. MALILI	16	14	13	13
39	KEC. WASUPONDA	16	16	16	15

NO	UNIT KERJA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
40	KEC. NUHA	16	15	14	15
41	KEC. TOWUTI	27	25	20	20
42	KEL. MAGANI	7	8	7	5
43	KEL. MALILI	5	7	8	8
44	KEL. TOMONI	10	11	9	8
45	PUSKESMAS BURAU	43	40	36	39
46	PUSKESMAS WOTU	55	60	58	59
47	PUSKESMAS TOMONI	60	57	59	55
48	PUSKESMAS MANGKUTANA	58	57	56	53
49	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	43	42	42	42
50	PUSKESMAS KALAENA	37	38	40	40
51	PUSKESMAS ANGKONA	41	40	38	38
52	PUSKESMAS LAKAWALI KEC. MALILI	29	37	34	32
53	PUSKESMAS MALILI	74	76	79	79
54	PUSKESMAS LAMPIA KEC. MALILI	35	33	33	32
55	PUSKESMAS WASUPONDA	47	48	46	45
56	PUSKESMAS PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	17	19	18	17
57	PUSKESMAS NUHA	62	62	59	59
58	PUSKESMAS WAWONDULA KEC. TOWUTI	53	55	56	55
59	PUSKESMAS TIMAMPU KEC. TOWUTI	31	32	35	33
60	PUSKESMAS MAHALONA KEC. TOWUTI	21	22	18	16
61	PUSKESMAS BANTILANG KEC. TOWUTI	21	24	22	22
62	PUSKESMAS BONE PUTE	24	33	36	35
63	TAMAN KANAK KANAK (TK)	47	47	45	44
64	SEKOLAH DASAR (SD)	1095	1061	1007	947
65	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	559	530	510	490
	JUMLAH	**3.935**	**3.911**	**3.795**	**3.675**

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2024

Sumber daya manusia ASN Kabupaten Luwu Timur adalah salah faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Distribusi ASN ke beberapa OPD Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan secara proporsional sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus aktif di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebanyak 3.675 Orang. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun 2023 yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain purnabakti, mutasi dan lain-lain. Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon dan

pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11 Jumlah PNS berdasarkan golongan, eselon, dan pendidikan Tahun 2021 – 2024

No	Berdasarkan	Uraian	Jenis Kelamin 2021		Total Tahun 2021	Jenis Kelamin 2022		Total Tahun 2022	Jenis Kelamin 2023		Total Tahun 2023	Jenis Kelamin 2024		Total Tahun 2024
			L	P		L	P		L	P		L	P	
1	Golongan	I	7	1	3935	7	0	3911	6	0	3795	4	0	3675
		II	261	234		202	180		158	123		142	113	
		III	801	1815		827	1826		808	1730		788	1699	
		IV	372	444		378	491		382	588		361	568	
3	Eselon	II-A	1	0	375	1	0	398	1	0	379	1	0	400
		II-B	22	5		25	5		26	5		28	4	
		III-A	41	12		40	13		39	14		37	14	
		III-B	67	34		71	33		67	37		65	36	
		IV-A	67	91		73	99		82	93		76	94	
		IV-B	21	14		22	16		19	24		20	25	
		NON ESELON	1222	2338	3560	1182	2331	3513	1120	2268	3388	1068	2207	3275
4	Pendidikan	SD	9	0	3935	5	0	3911	3	0	3795	2	0	3675
		SLTP	11	2		6	1		5	1		5	1	
		SLTA	273	155		227	120		208	106		197	95	
		DI-DIII	147	554		138	538		129	514		119	496	
		DIV-S1	930	1710		959	1756		931	1736		892	1705	
		S2	70	73		78	82		77	84		77	83	
		S3	1			1	0		1	0		3	0	
5	Fungsional	Ahli	738	1524	2757	741	1652	2936	707	1620	2826	677	1612	2775
		Terampil	226	269		415	128		102	397		99	387	

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2024

Sesuai tabel di atas, pada tahun 2024 eselon II sebanyak 33 orang, eselon III sebanyak 152 orang, dan eselon IV sebanyak 215 orang, dan non eselon sebanyak 3.275 orang. PNS yang menduduki eselon pada tahun 2024 sebanyak 400 orang. Tenaga fungsional berkurang dari 2.826 orang pada tahun 2023 menjadi 2.775 orang pada tahun 2024, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain peralihan pejabat dari pejabat fungsional ke pejabat struktural, mutasi, purnabakti dan meninggal dunia.

Klasifikasi PNS menurut usia berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, memperlihatkan bahwa usia 41 - 45 tahun merupakan usia yang paling banyak dari jumlah seluruh PNS yaitu mencapai 872 orang (23,73 persen). PNS dengan usia

61-65 tahun sebanyak 1 orang (0,03%) merupakan PNS dengan usia yang paling sedikit. Klasifikasi PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12 Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2024

No	Usia	Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin											
		2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	20 - 25	5	9	14	7	18	25	1	7	8	3	6	9
2	26 - 30	45	109	154	55	124	179	42	108	150	28	88	116
3	31 - 35	94	291	385	98	301	399	90	222	312	85	172	257
4	36 - 40	222	640	862	223	641	864	212	624	836	175	544	719
5	41 - 45	288	542	830	289	542	831	271	543	814	280	592	872
6	46 - 50	281	353	634	279	352	631	273	392	665	277	415	692
7	51 - 55	280	343	623	277	343	620	273	356	629	255	340	595
8	56 - 60	218	203	421	186	176	362	191	189	380	191	223	414
9	61 - 65	9	3	12	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Jumlah Total				**3.935**			**3.911**			**3.795**			**3.675**

Sumber: BKPSDM Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, usia pensiun PNS bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan adalah berusia 58 tahun. usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta usia 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Dari tabel 1.9 tersebut diatas, terdapat pengurangan jumlah pegawai pada tahun 2024 sebanyak 120 orang karena sudah memasuki masa pensiun, terdapat juga PNS yang meninggal dunia serta terdapat beberapa Pegawai yang mutasi ke luar daerah.

1.3.4.2 Jumlah PPPK

ASN Kabupaten Luwu Timur dengan status PPPK sampai dengan tahun 2024 berjumlah 1.611 orang. Bertambah 899 orang jika dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 712 orang. Jumlah PPPK berdasarkan kualifikasi jabatan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.13 Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 – 2024

No	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SLTP/ Se derajat		SD/ Se derajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
Tahun 2022																
1	Guru			93	387									93	387	480
Jumlah		**0**	**0**	**93**	**387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93**	**387**	**480**
Tahun 2023																
1	Kesehatan			18	71	17	144							35	215	250
2	Guru			85	318									85	318	403
3	Teknis			24	32			3						27	32	59
Jumlah		**0**	**0**	**127**	**421**	**17**	**144**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147**	**565**	**712**
Tahun 2024																
1	Kesehatan		1	15	85	14	102							29	188	217
2	Guru			5	31									5	31	36
3	Teknis			14	16		6	18	2					32	24	56
Jumlah		**0**	**1**	**34**	**132**	**14**	**108**	**18**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66**	**243**	**309**
Total sampai dengan Tahun 2023		**0**	**1**	**276**	**1025**	**32**	**253**	**21**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**329**	**1282**	**1611**

Sumber: BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah PPPK Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 1.611 orang yang terdiri dari 1.023 orang formasi Guru, 469 orang formasi Tenaga Kesehatan, serta sebanyak 119 orang merupakan formasi Tenaga Teknis. Adapun Rincian jumlah PPPK berdasarkan formasi tahun pengangkatannya adalah sebagai berikut:

1. PPPK Formasi Tahun 2021 per 31 Desember 2024 berjumlah 110 orang Berkurang sebanyak 3 orang dari tahun 2023 yang berjumlah 113 orang dikarenakan 3 orang Pegawai tersebut meninggal dunia. 110 orang tersebut terdiri dari 104 orang Guru, 2 orang Tenaga Kesehatan serta 4 orang Tenaga Teknis;
2. PPPK Formasi Tahun 2022 per 31 Desember 2024 berjumlah 480 orang Berkurang sebanyak 2 orang dari tahun 2023 yang berjumlah 482 orang dikarenakan 2 orang Pegawai tersebut meninggal dunia. 480 orang tersebut semuanya adalah Guru;

3. PPPK Formasi Tahun 2023 per 31 Desember 2024 berjumlah 712 orang Berkurang sebanyak 2 orang dari tahun 2023 yang berjumlah 714 orang dikarenakan 2 orang Pegawai tersebut mengundurkan diri sebagai PPPK. 712 orang tersebut terdiri dari 403 orang Guru, 250 orang Tenaga Kesehatan, serta sebanyak 59 orang adalah Tenaga Teknis;
4. PPPK Formasi Tahun 2024 per 31 Desember 2024 berjumlah 309 orang yang terdiri dari 36 orang Guru, 217 Tenaga Kesehatan, serta 56 orang Tenaga Teknis.

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan bahwa target total Pendapatan sebesar Rp2.034.411.839.027,93 dan target tersebut dapat terealisasi sebesar Rp1.878.538.309.226,83 atau 92,34 persen. Komponen jenis pendapatan tersebut diurai sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah yang memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berkonstribusi 20,89 persen dari total realisasi Pendapatan tahun 2024.

Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.14 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**365.683.777.307,00**	**392.451.676.192,83**	**107,32**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	219.905.665.243,23	258.388.708.147,00	117,50
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.802.736.750,00	2.720.387.580,00	71,54
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	24.705.244.836,00	24,705,244,836.00	100.00
4.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.270.130.477,77	106.637.335.629,83	90,93

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas terlihat bahwa total Anggaran **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp365.683.777.307,00 dengan realisasi sebesar Rp**392.451.676.192,83** atau 107,32

persen yang terdiri dari Pendapatan yang bersumber dari **Pajak Daerah** ditargetkan sebesar Rp219.905.665.243,23 dapat direalisasi sebesar Rp258.388.708.147,00 atau 117,50 persen. Dimana Pajak Daerah yang berkontribusi lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu Pajak Hiburan dengan realiasi 114,43 persen, Pajak Reklame terealisasi 102,36 persen, Pajak Penerangan Jalan terealisasi 101,69 persen dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat terealisasi sebesar 131,80 persen. Untuk Pajak Daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan terdiri dari Pajak Hotel terealisasi 49,37 persen, Pajak Restoran terealisasi 92,81 persen,Pajak Parkir terealisasi 13,06 persen, Pajak Air Tanah terealisasi 41,34 persen, Pajak Sarang Burung Walet terealisasi 0,57 persen, Pajak PBB-P2 terealisasi 96,63 persen dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi 68,52 persen. Untuk **Retribusi Daerah** ditargetkan sebesar Rp3.802.736.750,00 dengan realisasi sebesar Rp2.720.387.580,00 atau 71,54 persen. Dari capaian Retribusi Daerah ini yang tidak tercapai sesuai target di pengaruhi oleh tidak terpenuhinya target Retribusi Jasa Umum yang terealisasi sebesar 76,99 persen dan Retribusi jasa usaha terealisasi sebesar 58,01 persen. Sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu dapat melampaui target dengan realisasi sebesar 101,02 persen. Pendapatan dari **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah** yang dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp24.705.244.836,00 terealisasi sebesar 24,705,244,836.00 atau 100,00 persen, dan **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** yang dianggarkan sebesar Rp117.270.130.477,77 terealisasi sebesar Rp106.637.335.629,83 atau 90,93 persen.

Berdasarkan nilai realisasi, maka kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total Penerimaan PAD dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah. yaitu, persentase tertinggi terdapat pada Pajak Daerah sebesar 65,84 persen, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 27,17 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6,30 persen, dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,69 persen.

Terhadap beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya lebih dari 100 persen dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya jumlah penggunaan material pajak MBLB khususnya kegiatan ekspansi perluasan pengelolaan pertambangan oleh PT. Vale Indonesia Tbk, meningkatnya jumlah kegiatan hiburan khususnya Hiburan tradisional di beberapa wilayah kecamatan, meningkatnya jumlah pemasangan media reklame dan meningkatnya pemakaian listrik sehingga perpengaruh pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada objek pajak daerah. Untuk retribusi daerah yang realisasinya lebih dari 100 persen yang disebabkan meningkatnya kegiatan untuk pelayanan pada pasar di kabupaten luwu timur, meningkatnya arus bolak balik baik orang dan kendaraan di area Pelabuhan, meningkatnya jumlah kunjungan pada objek pariwisata/rekreasi dan penggunaan sarana/prasarana olahraga dan percepatan proses layanan PBG. Selain itu, Pemerintah Daerah senantiasa memaksimalkan penerapan system pembayaran non tunai berbasis QRIS untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah pusat maupun antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan ABPD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.439.779.222.771,00 atau 90,35 persen dari target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.593.495.409.120,93. Target dan Realisasi Pendapatan dari Dana Transfer dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.593.495.409.120,93**	**1.439.779.222.771,00**	**90,35**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.255.234.162.652.87	1.273.722.491.979,00	101,47
4.2.1.01	Dana Perimbangan	1.120.738.398.652,87	1.139.226.727.979,00	101,65
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	338,966,956,352.87	268.670.554.520,00	108,76
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588,649,276,000.00	585.516.185.860,00	99,47
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52,710,503,300.00	50.851.457.837,00	96,47
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140,411,663,000.00	134.188.529.762,00	95,57
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal Daerah	20.916.486.000,00	20.916.486.000,00	100,00
4.2.02.04	Dana Desa	113,579,278,000.00	113.579.278.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	338,261,246,468.06	166.056.730.792,00	49,09
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	321,891,246,468.06	162.577.012.792,00	50,51
4.2.2.02	Bantuan Keuangan	16,370,000,000.00	3.479.718.000,00	21,26

*Sumber : * LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)*

Dari tabel di atas Total Anggaran **Dana Transfe**r Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.593.495.409.120,93 dan terealisasi sebesar Rp1.439.779.222.771,00 atau 90,35 persen. Terdiri dari **Dana Perimbangan** ditargetkan sebesar Rp1.120.738.398.652,87 dan terealisasi sebesar Rp1.139.226.727.979,00 atau 101,65 persen. Dana Transfer berupa **Dana Bagi Hasil** ditargetkan sebesar Rp338,966,956,352.87 persen dan terealisasi sebesar Rp268.670554.520,00 atau 108,76 persen, **Dana alokasi umum (DAU)** ditargetkan sebesar Rp.588,649,276,000.00 terealisasi sebesar Rp585.516.185.860,00 atau 99,47 persen, **Dana alokasi khusus (DAK) Fisik** dianggarkan sebesar Rp52.658.610.700,00 terealisasi sebesar Rp50.851.457.837,00 atau 96,47 persen, **Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik** dianggarkan sebesar Rp140,411,663,000.00 terealisasi sebesar Rp134.188.529.762,00 atau 95,57 persen. dan **Dana Desa** ditargetkan sebesar Rp113,579,278,000.00 terealisasi sebesar Rp113.579.278.000,00 atau 100,00 persen serta Dana Insentif Fiskal Daerah ditargetkan sebesar Rp.20,916,486,000.00 terealisasi sebesar Rp.20,916,486,000.00 atau 100,00 persen

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp338,261,246,468.06 dan terealisasi sebesar Rp166.056.730.792,00 atau 49,09 persen, yang terdiri dari **dana bagi hasil pajak** dianggarkan Rp321,891,246,468.06 dan terealisasi sebesar Rp166.056.730.792,00 atau 49,09 persen dan **bantuan keuangan** dianggarkan sebesar Rp16,370,000,000.00 terealisasi Rp3.479.718.000,00 atau sebesar 17,77 persen.

Untuk Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak yang hanya terealisasi sebesar 50,51 persen disebabkan Transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya sampai dengan periode Mei 2024 sehingga realisasi atas penerimaan ini masih sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur senantiasa melakukan koordinasi/konsultansi dan melakukan secara admnistratif kepada BKAD Provinsi Sulawesi Selatan namun hingga akhir desember 2024 tidak dapat disalurkan sepenuhnya.

3. **Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan ini meliputi 9,81 persen dari total realisasi pendapatan tahun 2024. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.16 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggran 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.3	**Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**75,232,652,600.00**	**46.307.410.263,00**	**61,55**
4.3.01	Pendapatan Hibah	72,811,894,400.00	43.662.279.728,00	59,97
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	10,914,894,400.00	11.486.537.363,00	105,24
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	61,897,000,000.00	32.175.742.375,00	51,98
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.240.758.200,00	2.645.130.525,00	109,27

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas, penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp75,232,652,600.00 dan terealisasi sebesar Rp**46.307.410.263,00** atau 61,55 persen. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp10,914,894,400.00 terealisasi sebesar Rp11.486.537.363,00 atau 105,24 persen yang bersumber dari penerimaan dana hibah readsi dan dana penanggulangan bencana daerah dari BNPB. Untuk Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri ditargetkan sebesar Rp.61,897,000,000.00 terealisasi sebesar Rp32.175.742.375,00 atau 51,98 persen bersumber dari Penerimaan Hibah Listrik dan Hibah hasil penjualan scrap steel dari PT. Vale Indonesia Tbk. Sedangkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan sebesar Rp2,240,758,200.00 terealisasi sebesar Rp2.645.130.525,00 atau 109,27 persen yang bersumber dari penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Non BLUD.

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.121.508.735.985,29,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.954.219.592.611,73 atau mencapai **92,11** persen. Realisasi Komponen Belanja daerah tersebut diurai sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.382.845.496.017,00 dengan realisasi sebesar Rp1.281.324.484.571,16 atau 92,66 persen. Realisasi Belanja Operasi ini meliputi 64,88 persen dari total realisasi belanja Tahun 2023. Uraian realisasi belanja operasi sebagaimana pada tabel

berikut:

Tabel 1.17 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi T.A. 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.1	**Belanja Operasi**	**1.382.845.496.017,00**	**1.281.324.484.571,16**	**101.521.011.445,84**	**92,66**
5.1.1	Belanja Pegawai	634.776.379.254,00	602.826.753.567,20	31.949.625.686,80	94,97
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	648.239.403.380,00	594.695.582.550,36	53.543.820.829,64	91,74
5.1.5	Belanja Hibah	95.715.913.383,00	80.358.448.453,60	15.357.464.929,40	83,96
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.113.800.000,00	3.443.700.000,00	670.100.000,00	83,71

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 20234 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Belanja Berdasarkan tabel di atas, belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp634.776.379,00 terealisasi Rp 602.826.753.567,20 atau 94,97 persen. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp648.239.403.380,00 terealisasi Rp594.695.582.550,36 atau 91,74 persen, Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp95.715.913.383,00 terealisasi Rp80.358.448.453,60 atau 83,96 persen dan Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp. 3.443.700.000,00 dan terealisasi Rp4.113.800.000,00 atau 83,71 persen.

2. **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp379.369.697.356,00 terealisasi sebesar Rp314.738.762.045,88 atau 82,96 persen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal T.A. 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.2	**BELANJA MODAL**	**379.369.697.356,00**	**314.738.762.045,88**	**64.630.935.310,12**	**82,96**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800.000.000,00	799.999.800,00	200,00	100.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.013.424.119,00	53.925.359.193,66	12.088.064.925,34	81,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	134.831.323.884,00	118.813.385.660,24	16.017.938.223,76	88,12
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.550.872.353,00	140.909.321.991,98	34.641.550.361,02	80,27

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.119.077.000,00	238.695.400,00	1.880.381.600,00	11,26

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 20234 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Berdasarkan tabel di atas, belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah yang ditargetkan sebesar Rp800.000.000,00 terealisasi Rp799.999.800,00 atau 100,00 persen. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp66.013.424.119,00 terealisasi Rp53.925.359.193,66 atau 81,69 persen, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp134.831.323.884,00 terealisasi Rp118.813.385.660,24 atau 88,12 persen, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ditargetkan Rp175.550.872.353,00 terelisasi Rp140.909.321.991,98 atau 80,27 persen dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp2.119.077.000,00 terealisasi Rp238.695.400,00 atau 11,26 persen

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealiasi sebesar Rp618.000.000,00 atau 41,20 persen. Realisasi tidak tercapai karena anggarannya hanya bersifat disediakan dan direalisasikan sesuai mekanisme belanja tak terduga antara lain penting dan mendesak, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga T.A. 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.3.	**Belanja Tak Terduga**	**1500.000.000,00**	**618.000.000,00**	**882.000.000,00**	**41,20**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1500.000.000,00	618.000.000,00	882.000.000,00	41,20

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024, Belanja Transfer ditargetkan Rp357,793,542,612,29 terealiasi sebesar Rp357,538,345,994,69 atau 93,93 persen. Realisasi Belanja transfer meliputi 37,42 persen dari total realisasi belanja tahun 2024. Uraian realisasi belanja transfer diurai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer T.A. 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**357.793.542.612,29**	**357.538.345.994,69**	**255.196.617,60**	**99,93**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	24.997.866.029,00	24.819.512.499,60	178.353.529,40	99,92
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	332.795.676.583,29	332.718.833.495,09	76.843.088,20	99,98

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran sebesar Rp(75.681.283.384,90). Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi Keuangan Daerah untuk menutupi selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. dengan rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.21 Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan T.A 2024*)

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**103.570.143.179,56**	**103.570.143.179,56**	**0,00**	**100,00**
6.1.1	Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	103.570.143.179,56	103.570.143.179,56	0,00	100,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	16.473.246.222,20	12.068.120.000,00	4.405.126.222,20	73,26
6.2.1	Penyertaan Modal	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0.00	100,00
6.2.2	Pembayaran Utang	5.473.246.222,20	1.068.120.000,00	4.405.126.222,20	19,52
	Pembiayaan Netto	**87.096.896.957,36**	91.502.023.179,56	4.405.126.222,20	105,06
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0	**15.820.739.794,66**	**15.820.739.794,66**	

Sumber : LRA BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Beberapa hal yang menjadi bagian dari pembentuk SiLPA yaitu tingkat capaian realisasi anggaran belanja tidak mencapai 100 persen, sementara realisasi pendapatan tercapai 100 persen atau lebih.

Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 103.570.143.179,56 dengan realisasi sebesar Rp103.570.143.179,56 atau 100 persen. Jumlah Penerimaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp16.473.246.222,20 dengan realisasi sebesar Rp Rp12.068.120.000,00 atau 73,26 persen.

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

1.3.8. Realisasi Belanja Perangkat Daerah

Realisasi belanja perangkat daerah pada umumnya berada diatas 90 persen. Tingkat realisasi perangkat daerah yang terdiri dari 59 OPD, belum diaudit digambarkan dalam tabel realisasi sebagai berikut;

Tabel 1.22 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024*

NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(4/3)x100
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	377.306.117.425,00	381.597.603.210,00	(4.291.485.785,00)	101,06
2	Dinas Kesehatan	252.616.779.720,00	243.436.242.134,00	9.180.537.586,00	96,37
3	RSUD I Lagaligo	178.737.184.391,00	157.336.800.436,00	21.400.383.955,00	88,03
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	223.761.680.100,00	190.917.660.343,00	32.844.091.757,00	85,32
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30.139.801.700,00	25.901.296.804,00	4.238.504.896,00	85,94
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.834.219.900,00	13.319.594.425,00	514.625.475,00	96,28
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.925.894.209,00	38.636.732.289,00	289.161.920,00	99,26
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.055.467.550,00	4.536.592.284,00	8.518.875.265,34	34,75
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.963.385.828,00	9.693.656.828,04	269.728.999,96	97,29
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.821.027.400,00	12.556.920.991,00	1.264.106.409,00	90,85
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.622.061.065,00	9.580.059.172,00	1.042.001.893,00	90,19
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.358.192.613,00	6.725.103.783,08	633.088.829,92	91,40
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.016.972.211,00	5.799.779.503,00	1.217.192.708,00	82,65
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.956.836.371,00	12.502.056.721,00	2.454.779.650,00	83,59
15	Dinas Perhubungan	19.518.218.364,00	18.109.384.503,10	1.408.833.860,90	92,78
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12.977.880.605,00	12.009.747.444,00	968.133.161,00	92,54
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.909.121.498,00	5.307.027.522,00	602.093.976,00	89,81
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.590.601.525,00	7.100.239.035,34	490.362.489,66	93,54
19	Dinas Perikanan	26.780.307.700,00	24.093.098.656,00	2.687.209.044,00	89,97

NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(4/3)x100
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	22.096.827.122,00	18.680.778.846,00	3.416.048.276,00	84,54
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	87.120.283.914,00	76.459.199.957,33	10.661.083.956,67	87,76
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	30.409.836.596,00	21.842.688.638,41	8.567.147.957,59	71,83
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9.013.502.349,00	7.406.471.731,00	1.607.030.618,00	82,17
24	Sekretariat Daerah	79.534.615.984,00	71.072.893.285,00	8.461.722.699,00	89,36
25	Sekretariat DPRD	50.591.755.255,00	42.064.246.847,00	8.527.508.408,00	83,14
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.698.283.560,00	9.134.486.437,00	1.563.797.123,00	85,38
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	411.889.205.863,29	392.142.469.509	19.746.736.354,29	95,21
28	Badan Pendapatan Daerah	23.757.645.050,00	18.819.048.897,00	4.938.596.153,00	79,21
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.656.329.798,00	11.785.180.485,00	871.149.313,00	93,12
30	Inspektorat	14.661.391.450,00	13.956.550.076,20	704.841.373,80	95,19
31	Kecamatan Burau	3.415.212.850	3.224.340.953,00	190.871.897,00	94,41
32	Kecamatan Wotu	3.308.672.275,00	3.219.564.399,00	89.107.876,00	97,31
33	Kecamatan Tomoni	4.911.963.425,00	4.541.941.257,00	370.022.168,00	92,47
34	Kecamatan Mangkutana	3.065.872.800,00	2.967.031.578,00	98.841.222,00	96,78
35	Kecamatan Tomoni Timur	2.912.577.206,00	2.757.442.912,00	155.134.294,00	94,67
36	Kecamatan Kalaena	2.916.235.300,00	2.887.169.912,00	29.065.388,00	99,00
37	Kecamatan Angkona	3.049.683.900,00	2.905.021.035,00	144.662.865,00	95,26
38	Kecamatan Malili	4.445.199.950,00	4.286.256.962,00	158.942.988,00	96.42
39	Kecamatan Wasuponda	2.977.536.400,00	2.658.289.843,00	319.246.557,00	89,28
40	Kecamatan Towuti	4.094.740.600,00	3.623.393.162,00	471.347.438,00	88,49

NO	OPD	APBD-P	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(4/3)x100
41	Kecamatan Nuha	4.097.190.250,00	3.822.631.743,00	274.558.507,00	93,30
42	Puskesmas Burau	4.224.748.486,00	3.737.167.243,00	487.581.243,00	88,46
43	Puskesmas Wotu	4.989.543.002,00	4.725.185.166,00	264.357.836,00	94,70
44	Puskesmas Mangkutana	4.409.880.523,00	4.203.730.972,00	206.149.551,00	95,33
45	Puskesmas Tomoni	4.278.514.936,00	4.011.278.657,00	267.236.279,00	93,75
46	Puskesmas Tomoni Timur	2.947.595.386,00	2.741.795.698,00	205.799.688,00	93,02
47	Puskesmas Kalaena	3.214.679.636,00	2.976.722.777,00	237.956.859,00	92,60
48	Puskesmas Angkona	4.247.730.109,00	4.037.228.812,50	210.501.296,50	95,04
49	Puskesmas Lakawali	3.294.004.886,00	2,728,408,625.20	185,523,638.80	93.63
50	Puskesmas Parumpanai	2.218.213.036,00	1.925.568.190,00	292.644.846,00	86,81
51	Puskesmas Malili	6.103.110.519,00	5.740.530.299,00	362.580.220,00	94.06
52	Puskesmas Lampia	2.758.666.486,00	2.576.065.581,00	182.600.905,00	93,38
53	Puskesmas Wasuponda	3.903.176.386,00	3,119,198,137.00	284,028,437.00	91.65
54	Puskesmas Nuha	3.219.274.862,00	2.954.795.398,00	264.479.464,00	91,78
55	Puskesmas Wawondula	3.926.765.376,00	3.723.282.029,00	203.483.347,00	94,82
56	Puskesmas Timampu	2.473.849.886,00	2,003,040,414.00	271,897,586.00	88.05
57	Puskesmas Mahalona	2.978.913.926,00	2.650.806.969,00	328.106.957,00	88.99
58	Puskesmas Bantilang	2.594.607.586,00	2.472.451.506,00	122.156.080,00	95,29
59	Puskesmas Bonepute	3.209.148.886,00	3.099.567.752,00	109.581.134,00	96,59

*Sumber : *BKAD Sebelum Final Rekon OPD 2024*

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang memuat rincian-rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 didasarkan pada perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam tahun berjalan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 disusun berdasarkan capaian realisasi pendapatan dan belanja pada semester I Tahun 2024, serta disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Selain itu, perubahan belanja daerah juga dilakukan untuk mengakomodasi pergeseran belanja yang telah terjadi sebelum perubahan APBD. Pergeseran ini merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan setelah APBD Pokok Tahun 2024 disahkan. Beberapa kebijakan tersebut meliputi:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024**, yang mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Negara.
2. **Penyesuaian rekening belanja yang didanai dari Dana Transfer**, sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam **Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 187 Tahun 2024** tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah kepada Daerah Tahun 2024 Tahap I.
3. **Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 176/II/Tahun 2024**, yang menetapkan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2024.
4. **Penyesuaian belanja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit**.
5. **Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024**, yang mengatur petunjuk teknis terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2024.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perubahan APBD Tahun 2024 disusun guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan daerah serta kebijakan pemerintah pusat

.Komposisi Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A. 2024

Uraian	APBD	P-APBD	% Bertambah/ Berkurang (3-2)*100)	%
1	***2***	***3***	***4****=(3-2)*	*5=(4/2x100)*
Pendapatan	**1.910.663.329.895,00**	**2.026.432.839.027,93**	**115.769.509.132,93**	**6,06**
Pendapatan Asli Daerah	391.302.390.695,00	365.683.777.307,00	(25.618.613.388,00)	(6,55)
Pendapatan Transfer	1.466.477.122.000,00	1.593.495.409.120,93	127.018.287.120,93	8,66
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.883.817.200,00	67.253.652.600,00	14.369.835.400,00	27,17
Belanja	**1.986.497.196.736,00**	**2.113.529.735.985,29**	**127.032.539.249,29**	**6,39**
Belanja Operasi	1.303.164.083.591,00	1.382.875.838.532,00	79.711.754.941,00	6,12
Belanja Modal	336.567.635.145,00	371.390.697.356,00	34.823.062.211,00	10,35
Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(57,14)
Belanja Transfer	343.265.478.000,00	357.763.200.097,29	14.497.722.097.29	4,22
Surflus/(Defisit)	**-75.833.866.841,00**	**-87.096.896.957,36**	**(11.263.030.116,36)**	**14,85**
Pembiayaan	**97.833.866.841,00**	**87.096.896.957,36**	**(10.736.969.883.64)**	**(10,97)**
Penerimaan Pembiayaan	86.833.866.841,00	103.570.143.179,56	16.736.276.338,56	19,27
Pengeluaran Pembiayaan	11.000.000.000,00	16.473.246.222,20	5.473.246.222,20	49,76

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaaan bersih dalam periode anggaran berkenaan. Pendapatan tersebut membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Melihat dinamika dan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2024, maka dilaksanakan perubahan pendapatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024 mempertimbangkan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan berdasarkan realisasi PAD sampai dengan Juni 2024 dan proyeksi potensi penerimaan pendapatan sampai dengan akhir tahun.
b. Penyesuaian terhadap silpa tahun anggaran sebelumnya.

c. Penyesuaian Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp.1.910.663.329.895,00 dan sesudah perubahan mengalami kenaikan sebesar 6,06 persen atau Rp.115.769.509.132,93 sehingga menjadi Rp.2.026.432.839.027,93. Adapun perubahan struktur pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	
				Rp.	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.910.663.329.895,00**	**2.026.432.839.027,93**	**115.769.509.132,93**	**6,06**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**391.302.390.695,00**	**365.683.777.307,00**	**(25.618.613.388,00)**	(6,55)
4.1.01	Pajak Daerah	207.090.490.085,00	219.905.665.243,23	12.815.175.158,23	6,19
4.1.02	Retribusi Daerah	8.629.471.620,00	3.802.736.750,00	(4.826.734.870,00)	(55,93)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.391.000.000,00	24.705.244.836,00	(23.685.755.164,00)	(48,95)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	127.191.428.990,00	117.270.130.477,77	(9.921.298.512,23)	(7,80)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.466.477.122.000,00**	**1.593.495.409.120,93**	**127.018.287.120,93**	**8,66**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.192.615.938.000,00	1.255.234.162.652,87	62.618.224.652,87	5,25
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	273.861.184.000,00	338.261.246.468,06	64.400.062.468,06	23,52
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**52.883.817.200,00**	**67.253.652.600,00**	**14.369.835.400,00**	**27,17**
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.463.059.000,00	64.832.894.400,00	14.369.835.400,00	27,17
4.3.02	Dana Darurat	2.420.758.200,00	2.420.758.200,00	0,00	-
Jumlah Pendapatan		**1.910.663.329.895,00**	**2.026.432.839.027,93**	**115.769.509.132,93**	**6,06**

Sumber: BKAD (Data Olahan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

Komponen pendapatan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah digambarkan sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu, yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan daerah.

Dalam Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 secara umum Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan menurun sebesar 6,55 persen atau sebesar Rp.(25.618.613.388,00), yaitu dari Rp.391.302.390.695.00 pada APBD Tahun 2024 menjadi Rp.365.683.777.307.00 pada Perubahan APBD Tahun 2024. Hal tersebut di picu oleh adanya pengurangan target pendapatan pada 3 komponen utama PAD yaitu Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Bertambah berkurang terjadi pada sebagian besar obyek pendapatan dengan memperhatikan tingkat capaian realisasi sampai dengan semester I Tahun 2024 dan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan sampai dengan Desember 2024. Beberapa perubahan target antara lain pada ;

a. Pajak Daerah perubahan dari Rp.207.090.490.085.00 menjadi Rp.219.905.665.243,23. atau meningkat sebesar Rp.12.815.175.158,23 atau 6,19 persen. Penambahan komponen pajak daerah yang sangat signifikan terjadi pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dimana terjadi kenaikan target pajak sebesar 13,62 persen atau sebesar Rp.15.956.015.158,23, dimana target tersebut diasumsikan antara lain diperoleh dari pembayaran atas kurang bayar SPTPD dari PT.Vale Indonesia Tbk, periode Januari sampai dengan Juni 2024 dan objek pajak MBLB lainnya. Namun terdapat pula koreksi target pendapatan pada beberapa objek pajak lainnya yaitu turun Rp.3.140.840.000,00 dengan pertimbangan Penyesuaian realisasi s.d Juni 2024, dan potensi penerimaan dari beberapa wajib pajak yang sudah ada dan beberapa wajib pajak baru.
b. Restribusi Daerah ditargetkan menurun dari Rp.8,629.471.620.00 menjadi Rp.3.802.736.750.00 atau turun sebesar Rp.4.826.734.870,00 atau minus 55,93 persen. Dimana terjadi penurunan pada hampir semua yaitu objek restribusi jasa umum minus 24,50 persen, Restribusi jasa usaha minus 31,92 persen dan restribusi Perizinan tertentu minus 78,15 persen. Salah satu penyebab terjadinya penyesuaian target pendapatan pada retribusi daerah adalah sebagai konsekuensi dari Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam aturan ini disebutkan bahwa Pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan (IMB) dan menggantinya dengan persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan untuk itu OPD teknis Dinas PUPR perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG. Selain itu penurunan Retribusi Daerah juga disebabkan karena masih terdapat jenis retribusi daerah yang baru diterapkan pemungutannya ditahun 2024 sehingga

masih banyak diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dalam penerapannya utamanya pada Retribusi Kepariwisataan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami perubahan target dari Rp.48.391.000.000,00 menjadi Rp.24.705.244.836.00 atau turun sebesar Rp. 23.685.755.164,00 atau minus 48,95 persen. Hal tersebut terjadi pada obyek Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar yang mekanisme pemberian deviden dihitung berdasarkan prosentase kepemlikan saham. Kondisi yang terjadi beberapa Kab/Kota tidak menerima devidennya melalui RKUD tetapi menambah penyertaan modal atas saham yang telah dimiliki sehingga mempengaruhi komposisi saham setiap tahunnya.
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami perubahan target dari Rp.127.191.428.990,00 menjadi Rp.117.270.130.477,77 atau turun sebesar Rp.9.921.298.512,23 atau minus 7,80 persen dari anggaran pokok. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan jasa layanan BLUD. Lebih lanjut Perubahan target pendapatan pada Komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Pendapatan Asli Daerah T.A. 2024

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**391.302.390.695,00**	**365.683.777.307,00**	**(25.618.613.388,00)**	**(6,55)**	
4.1	**Pajak Daerah**	**207.090.490.085,00**	**219.905.665.243,23**	**12.815.175.158,23**	**6,19**	
4.1.01	Pajak Hotel	1.750.000.000,00	1.300.000.000,00	(450.000.000,00)	(25,71)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2024 dan kurangnya tingkat *occupancy* yang disebabkan masih minimnya event-event yang diasumsikan dapat mendatangkan pengunjung. Selain itu lahirnya UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa rumah kost lebih dari 10 kamar tidak lagi menjadi objek pemungutan pajak hotel.
4.1.01.07	Pajak Restoran	13.500.000.000,00	11.500.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(14,81)	Masih sejalan dengan realisasi sd.Juni 2024 dan asumsi penerimaan s.d desember 2024. serta beberapa objek potensial yakni proyek Shotdown PT.Vale Indonesia yang diasumsikan adanya kegiatan layanan cetering akan tetapi mengalami perubahan waktu ke tahun 2025.
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000,00	45.000.000,00	(5.000.000.,00)	(10,00)	Masih sejalan dengan tingkat realisasi dan objek pajak dipengaruhi oleh faktor cuaca dan potensi yang ada.
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.793.085.275,00	1.793.085.275,00	-	0,00	Menargetkan objek pajak baru reklame yang teRp.asang dan yang akan dipeRp.anjang
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	57.241.000.000,00	57.241.000.000,00	-	0,00	Mengikuti tren peningkatan setoran PPJ oleh PT PLN, PT. Vale Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya.

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.1.01.11	Pajak Parkir	484.800.000,00	335.800.000,00	(149.000.000,00)	(30,73)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2024 dan juga menyesuiakan dengan objek pajak ini yang masih kategori baru dan masih dalam proses sosialisasi secara kontinyu kepada wajib pajak
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	81.816.000,00	81.816.000,00	-	0,00	peningkatan volume penggunaan air tanah oleh pengusaha dan bertambahnya wajib pajak baru
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	56.840.000,00	20.000.000,00	(36.840.000,00)	(64,81)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2024 dan juga menyesuiakan dengan objek pajak sarang burung walet yang masih kategori baru dan masih dalam proses sosialisasi secara kontinyu kepada wajib pajak.
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	117.132.948.810,00	133.088.963.968,23	15.956.015.158,23	13,62	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2024 dan adanya beberapa potensi yang diasumsikan diperoleh dari pembayaran atas kurang bayar SPTPD dari PT.Vale Indonesia, Tbk dan objek pajak MBLB lainnya.
4.1.01.15	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	5.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(8,33)	Penyesuaian realisasi s.d juni 2024 dan beberapa piutang pajak PBB-P2 yang diasumsikan tidak terbayarkan ditahun 2024.
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-	0,00	Penyesuaian realisasi s.d juni 2024 dan penyesuaian jumlah rata2 transaksi perbulan
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**8.629.471.620,00**	**3.802.736.750,00**	**(4.826.734.870,00)**	**(55,93)**	Penyesuaian realisasi s.d juni 2023 dan penerimaan dari beberapa wajib pajak yang sudah ada dan beberapa wajib pajak baru..
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	588.334.620,00	444.198.800,00	(144.135.820,00)	(24,50)	Penyesuaian realisasi s.d Juni 2024, dan beberapa objek retribusi jasa umum khususnya parkir yang mengalami penurunan penerimaan.

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.464.337.000,00	2.358.537.950,00	(1.105.799.050,00)	(31,92)	Penyesuaian trend realisasi penerimaan, dan penyesuaian potensi yang ada.serta terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang baru dipungut ditahun 2024 yang masih memerlukan sosialisasi kepada wajib retribusi daerah
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.576.800.000,00	1.000.000.000,00	(3.576.800.000,00)	(78,15)	Penurunan pada retribusi PBG yang dulunya IMB, dimana OPD teknis PUPR masih perlu menyesuaikan persyaratan teknis dalam pengelolaan retribusi PBG
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**48.391.000.000,00**	**24.705.244.836,00**	**(23.685.755.164,00)**	**(48,95)**	
4.1.03.02	Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	48.391.000.000,00	24.705.244.836,00	(23.685.755.164,00)	(48,95)	Penurunan target disebabkan asumsi peresentase saham meningkat dengan adanya penambahan modal, namun dalam perjalanannya terdapat kabupaten/kota yang menambah penyertaan modalnya dan ada yang tidak mengambil devidennya tetapi menambah penyertaan modalnya pada PT. Bank Sulselbar
4.1.04	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**127.191.428.990,00**	**117.270.130.477,77**	**(9.921.298.512,23)**	**(7,80)**	
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		0		0,00	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah		0		0,00	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.05	Jasa Giro	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	0,00	Menyesuaikan karena jasa giro yang diterima menyesuaikan dengan kondisi kas setiap bulannya
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas		0		0,00	Menyesuaikan dengan penerimaan yang

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					disetorkan ke kas daerah
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah		0		0,00	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	227.462.724,77	227.462.724,77	0,00	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	122.191.428.990,00	112.042.667.753,00	(10.148.761.237,00)	(8,31)	Penurunan target disebabkan oleh karena melihat trend penerimaan yang sudah diasumsikan akan mengalami penurunan atau tidak terealisasi.
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		0		0,00	peningkatan jumlah jasa layanan pada PKM
4.1.04.20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		0		0,00	Menyesuaikan dengan penerimaan yang disetorkan ke kas daerah

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD 2024)

2.1.2. Pendapatan Transfer

Dalam Perubahan Penjabaran APBD untuk Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp.1.466.477.122.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp.1.593.495.409.120,93 atau mengalami kenaikan 8,66 persen yaitu sebesar Rp.127.018.287.120,93. Pendapatan Transfer secara umum terdiri dari 2 komponen pendapatan yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana perimbangan (DAU,DBHD,DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Dana Fiskal, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Selanjutnya Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Uraian pendapatan transfer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perubahan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.466.477.122.000,00**	**1.593.495.409.120,93**	**127.018.287.120,93**	**8,66**	
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.192.615.938.000,00**	**1.255.234.162.652,87**	**62.618.224.652,87**	5,25	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.067.419.166.000,00	1.120.738.398.652,87	53.319.232.652.87	5,00	Kenaikan tersebut menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi kurang/lebih salur untuk dana bagi hasil tahun 2024
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	285.119.885.000,00	338.966.956.352,87	53.847.071.352.87	18,89	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	588.649.276.000,00	588.649.276.000,00	-	-	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.238.342.000,00	52.710.503.300,00	(527.838.700,00)	(0,99)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140.411.663.000,00	140.411.663.000,00	-	-	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	-	-	
4.2.01.05	Dana Desa	109.966.378.000,00	113.579.278.000,00	3.612.900.000,00	3,29	
4.2.01.06	Dana Fiskal	15.230.394.000,00	20.916.486.000,00	5.686.092.000,00	37,33	
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**273.861.184.000,00**	**338.261.246.468.06**	**64.400.062.468,06**	23,52	
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**261.361.184.000,00**	**321.891.246.468.06**	**60.530.062.468.06**	**23,16**	
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.200.000.000,00	26.200.000.000,00	7.000.000.000,00	36,46	
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.165.000.000,00	21.165.000.000,00	6.000.000.000,00	39,56	
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.900.000.000,00	49.900.000.000,00	7.000.000.000,00	16,32	
4.2.02.01.01.0	Pendapatan Bagi	166.096.184.000,00	206.626.246.468,06	40.530.062.468.06	24,40	peningkatan

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
004	Hasil Pajak Air Permukaan					penerimaan DBH dari pemrov atas penggunaan air permukaan
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	-	Menyesuaikan SK Gubernur terkait pajak rokok 2024
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**12.500.000.000,00**	**16.370.000.000,00**	**3.870.000.000,00**	**30,96**	
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	12.500.000.000,00	16.370.000.000,00	3.870.000.000,00	30,96	Menyesuaikan SK Gubernur yang keluar dalam tahun berjalan

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD)

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar Rp.52.883.817.200,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp.67.253.652.600,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.14.369.835.400,00 atau 27,17 persen.

Uraian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**52.883.817.200,00**	**67.253.652.60000**	**14.369.835.400,00**	**27,17**	
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**50.463.059.000,00**	**64.832.894.400,00**	**14.369.835.400,00**	**28,48**	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.559.059.000,00	2.935.894.400,00	376.835.400,00	14,73	Penyesuaian pendapatan hibah dari pemerintah pusat
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	47.904.000.000,00	61.897.000.000,00	13.993.000.000,00	29,21	menyesuaikan dengan jumlah rata2 penerimaan dari PT. PLN dan potensi dari hasil lelang scrab/besi tua tahun 2023 oleh PT. Vale Indonesia Tbk
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**2.420.758.200,00**	**2.420.758.200,00**	**-**	**-**	
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.420.758.200,00	2.420.758.200,00	-	-	

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

Perubahan Pendapatan pada penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditopang oleh kinerja Perangkat Daerah yang mengelolah sumber-sumber Pendapatan yaitu 19 OPD mengalami perubahan target pendapatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Pendapatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Dinas Kesehatan	2.420.758.200,00	2.762.328.006,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas (3 PKM yang belum BLUD)
2	Puskesmas Burau	2.458.000.000,00	2.458.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
3	Puskesmas Wotu	2.676.000.000,00	2.773.700.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
4	Puskesmas Mangkutana	2.135.400.000,00	2.368.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
5	Puskesmas Tomoni	2.188.000.000,00	2.407.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
6	Puskesmas Tomoni Timur	1.263.000.000,00	1.273.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
7	Puskesmas Kalaena	1.570.000.000,00	1.528.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
8	Puskesmas Angkona	1.880.601.000,00	1.880.601.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
9	Puskesmas Lakawali	1.145.000.000,00	1.508.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
10	Puskesmas Malili	2.847.559.390,00	3.750.841.357,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
11	Puskesmas Lampia	938.000.000,00	1.092.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
12	Puskesmas Wasuponda	2.004.000.000,00	2.004.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
13	Puskesmas Nuha	1.495.000.000,00	1.508.110.250,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
14	Puskesmas Wawondula	1.964.362.500,00	2.026.362.500,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
15	Puskesmas Mahalona	1.045.906.100,00	1.304.123.956,00	Retribusi Jasa Pelayanan
				Kesehatan Di Puskesmas
16	Puskesmas Bantilang	1.397.000.000,00	1.116.000.000,00	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
17	RSUD I LAGALIGO	95.183.600.000,00	83.272.391.414,77	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.793.125.000,00	1.120.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kebersihan (Penyedotan Kakus) Retribusi Pemakaian Alat Retribusi Perizinan Tertentu
19	Dinas Perumahan,	742.242.000,00	739.200.000,00	Retribusi Penyewaan

No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Bangunan Rumah Susun dan Kios Tipe B Rusunawa
20	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi	76.800.000,00	-	Retribusi Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing
21	Dinas Lingkungan Hidup	405.916.000,00	100.000.000,00	Retribusi Pengujian Parameter Lingkungan
22	Dinas Perhubungan	542.500.000,00	211.048.000,00	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Restribusi Pelayanan Fasilitas di terminal dan pelabuhan, restribusi pelayanan ke Pelabuhan
23	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	400.000.000,00	161.000.000,00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Tempat Kegiatan Usaha (Kios Tipe B), Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Penyewaan Bangunan
24	Dinas Perikanan	524.900.000,00	524.900.000,00	Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, Penyediaan parkir khusus,Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	468.000.000,00	468.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Bibit atau Benih Tanaman (IKB)
26	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	505.209.620,00	296.198.800,00	Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
27	Sekretariat Daerah	145.779.000,00	157.189.950,00	Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Retribusi Penyewaan Tanah
28	Badan Keuangan dan	1.471.477.122.000,00	1.598.495.409.120,93	Pendapatan Transfer
	Aset Daerah			Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah
29	Badan Pendapatan Daerah	305.944.549.085,00	309.443.804.479,23	Pendapatan Pajak Daerah, Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) Atas Penyertaan Modal Pada BUMD, Lain-

No	Perangkat Daerah	APBD	APBD-P	Jenis pendapatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
30	Kecamatan Malili	25.000.000,00	25.200.000,00	Retribusi Kios Tipe A Pujasera Malili
Total Pendapatan		**1.910.663.329.895,00**	**2.026.432.839.027,93**	

Sumber; BAPENDA (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.2. Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Perubahan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur No. 78 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 , memuat selisih bertambah berkurang pada 4 komponen Belanja Daerah tersebut. Total anggaran belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.127.032.539.249,29 atau 6,39 persen dari rencana belanja daerah yang ditetapkan pada APBD Pokok 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelampauan asumsi Silpa tahun sebelumnya yang tetapkan dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2023 serta perubahan asumsi pendapatan tahun berjalan yang perlu dialokasikan dalam tahun berkenaan. Perubahan komponen Belanja digambarkan sebagai berikut

Tabel 2.7
Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	**BELANJA**	**1.986.497.196.736,00**	**2.113.529.735.985,29**	**127.032.539.249,29**	**6,39**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.303.164.083.591,00**	**1.382.875.838.532,00**	**79.711.754.941,00**	**6,12**
5.1.01	Belanja Pegawai	615.012.659.762,00	634.806.221.769,00	19.793.562.007,00	3,22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.029.653.605,00	648.239.903.380,00	48.210.249.775,00	8,03
5.1.05	Belanja Hibah	84.417.970.224,00	95.715.913.383,00	11.297.943.159,00	13,38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.703.800.000,00	4.113.800.000,00	410.000.000,00	11,07
5.2	**BELANJA MODAL**	**336.567.635.145,00**	**371.390.697.356,00**	**34.823.062.211,00**	**10,35**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	385.000.000,00	800.000.000,00	415.000.000,00	107,79
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.080.375.276,00	66.013.424.119,00	14.933.048.843,00	29,23

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp.)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.089.523.040,00	134.831.323.884,00	(5.258.199.156,00)	(3,75)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.887.383.329,00	167.571.872.353,00	24.684.489.024,00	17,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.030.353.500,00	2.119.077.000,00	88.723.500,00	4,37
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00	55.000.000,00	(40.000.000,00)	(42,11)
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**(2.000.000.000,00)**	**(57,14)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(57,14)
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**343.265.478.000,00**	**357.763.200.097,29**	**14.497.722.097,29**	**4,22**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.572.100.000,00	24.967.523.514,00	3.395.423.514,00	15,74
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.693.378.000,00	332.795.676.583,29	11.102.298.583,29	3,45

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.2.1. Belanja Operasi

Perubahan Komponen Belanja Operasi direncanakan terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp.1,303.164.083.591,00 bertambah sebesar 6,12 persen atau Rp.79.711.754.941,00 sehingga menjadi Rp.1,382.875.838.532,00. Perubahan pada masing-masing jenis belanja operasi sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai mengalami perubahan menjadi Rp.634.806.221.769,00 meningkat 3,22 persen atau bertambah Rp.19.793.562.007,00
b. Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan menjadi Rp.648.239.903.380,00 meningkat 8,03 persen atau Rp.48.210.249.775,00
c. Belanja Hibah mengalami perubahan menjadi Rp.95.715.913.383,00 meningkat 13,38 persen atau Rp.11.297.943.159,00
d. Belanja Bantuan Sosial mengalami perubahan menjadi Rp.4.113.800.000,00 atau meningkat 11,07 persen atau Rp.410.000.000,00

Tabel 2.8
Perubahan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.303.164.083.591,00**	**1.382.875.838.532.,00**	**79.711.754.941,00**	**6,12**	
5.1.01	Belanja Pegawai	615.012.659.762,00	634.806.221.769,00	19.793.562.007,00	3,22	Penambahan alokasi belanja untuk Gaji dan Tunjagan PPPK, Tambahan Penghasilan ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.029.653.605,00	648.239.903.380,00	48.210.249.775,00	8,03	Penambahan alokasi belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Obat-Obatan, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Beasiswa
5.1.05	Belanja Hibah	84.417.970.224,00	95.715.913.383,00	11.297.943.159,00	13,38	Penambahan alokasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.703.800.000,00	4.113.800.000,00	410.000.000,00	11.07	Penambahan alokasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.2.2. Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp.34.823.062.211,00 atau 10,35 persen sehingga menjadi Rp. 371.390.697.356,00. Belanja Modal terdiri dari 6 jenis komponen belanja sebagai berikut :

a. Belanja Tanah sebelumnya 385.000.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp.800.000,000,00 atau 107,79 persen yang diperuntukkan untuk penambahan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.
b. Belanja Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami perubahan menjadi

Rp.66.013.424.119,00 meningkat 29,23 persen atau Rp.14.933.048.843,00 yang antara lain diperuntukan untuk antara lain Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Kendaraan, Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dan Belanja Modal Komputer.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami perubahan menjadi Rp.134.831.323.884,00 minus 3,75 persen atau Rp.5.258.199.156,00 Belanja Modal Bangunan Kesehatan, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami perubahan menjadi Rp.167.571.872.353,00 meningkat 17,28 persen atau Rp.24.684.489.024,00 yang dialokasikan untuk Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Jalan Lainnya, Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor tersebar di wilayah Kab. Luwu Timur.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan menjadi Rp.2.119.077.000,00 meningkat 4,37 persen atau Rp.88.723.500,00 yaitu penambahan Belanja Modal Bahan PeRp.ustakaan Tercetak.
f. Belanja Modal Aset Lainnya mengalami perubahan menjadi Rp.55.000.000,00 minus 42,11 persen atau Rp.40.000.000,00 yaitu Melakukan penyesuian Alokasi Bantuan Tak Terduga pada belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berdasarkan Realisasi Belanja.

Tabel 2.9
Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.2	**BELANJA MODAL**	**336.567.635.145,00**	**371.390.697.356,00**	**34.823.062.211,00**	**10,35**	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	385.000.000,00	800.000.000,00	415.000.000,00	107,79	Penambahan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.080.375.276,00	66.013.424.119,00	14.933.048.843,00	29,23	Penambahan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Kendaraan, Belanja Modal Alat Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar,

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, dan Belanja Modal Komputer
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.089.523.040,00	134.831.323.884,00	(5.258.199.156,00)	(3,75)	Penyesuaian kontrak Belanja Modal Bangunan Kesehatan, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.887.383.329,00	167.571.872.353,00	24.684.489.024,00	17,28	Penambahan pada Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Jalan Lainnya, Belanja Modal Bangunan Air Irigasi, Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor tersebar di wilayah kab. Luwu timur
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.030.353.500,00	2.119.077.000,00	88.723.500,00	4,37	Penambahan Belanja Modal Bahan PeRp.ustakaan Tercetak
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.000.000,00	55.000.000,00	(40.000.000,00)	(42,11)	Penyesuaian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan menjadi Rp.1,500,000,000,- atau berkurang sebesar 57,14 persen.

Tabel 2.10
Perubahan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(RP.)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,500,000,000**	**1.500,000,000**	**(2.000,000,000)**	**(57,14)**	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000	1.500,000,000	2.000,000,000	(57,14)	Melakukan penyesuian Alokasi Bantuan Tak Terduga pada belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berdasarkan Realisasi Belanja.

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah. Alokasi Belanja Transfer naik sebesar 4,22 persen atau Rp.14.497.722.097,29 sehingga menjadi Rp.357.763.200.097,29.

Tabel 2.11
Perubahan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/(Berkurang)		Keterangan
				(RP.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**343.265.478.000,00**	**357.763.200.097,29**	**14.497.722.097,29**	**4,22**	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.572.100.000,00	24.967.523.514,00	3.495.423.514,00	15,74	Penyesuaian alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa berdasarkan SK Bupati No 306/F-05-8

						Tahun 2024 Tentang besarnya penetapan bagi Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing masing desa tahun 2024
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.693.378.000,00	332.795.676.583,29	11.102.298.583,29	3,45	Penyesuaian Dana Desa berdasarkan penetapan PMK, Penyesuaian Alokasi Dana Desa (Penganggarannya Paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang di anggarkan Kab. Kota dalam APBD), Penyesuaian Alokasi Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada desa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur NO 17/ F-04/1/ Tahun 2024 dan Bantuan Keuangan Keuangan untuk Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Kepala Desa

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.3. Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank SulselBar dan Perusahaan Air Minum Daerah.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Tahun 2024 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (Silpa) sebesar **Rp.103.570.143.179,5, atau melampaui Rp.16.736.276.338,56 atau 19,27 persen** asumsi silpa yang ditetapkan pada APBD pokok. Naiknya penerimaan pembiayaan ini berdasarkan hasil Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan pada perubahan tahun 2024, arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada perubahan ditargetkan sebesar Rp.**16.473.246.222,20** mengalami kenaikan sebesar Rp.**5.473.246.222,20** atau **49,76** persen. Berikut di sajikan Target Pembiayaan sebelum perubahan dan sesudah Perubahan pembiayaan pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024.

Tabel. 2.12
Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**86.833.866.841,00**	**103.570.143.179,56**	**16.736.276.338,56**	**19,27**	
6.1.01	Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa)	86.833.866.841,00	103.570.143.179,56	16.336.276.338,56	19,27	Penambahan anggaran menyesuaikan silpa tahun sebelunya
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**11.000.000.000,00**	**16.473.246.222,20**	**5.473.246.222,20**	**49,76**	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	-	Kebijakan penambahan investasi pada Bank Sul-Selbar
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	5.473.246.222,20	5.473.246.222,20	-	

Sumber; BKAD (Data Olah Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2024)

2.4. Perubahan Belanja Perangkat Daerah

Seiring dengan peningkatan pendapatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024 serta penggunaan silpa tahun sebelumnya, terjadi perubahan alokasi anggaran pada seluruh perangkat daerah. Persentase Peningkatan anggaran terbesar terjadi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada beberapa OPD antara lain pada Dinas Kesehatan dan Puskemas, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.13
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	APBD	APBD-P	Bertambah/Berkurang		% pagu OPD Terhadap Total APBD-P
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*	*6=(5/3)x100*	*7*
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	372.940.933.725,00	377.306.117.425,00	4.365.183.700,00	1,17	17,85
2	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	297.277.277.326,00	317.609.203.633,00	20.331.926.307,00	6,84	15,03
3	RSUD I Lagaligo	174.829.865.153,00	178.737.184.391,00	3.907.319.238,00	2,23	8,46
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.901.835.750,00	223.761.680.100,00	18.859.844.350,00	9,20	10,59
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	23.085.801.700,00	30.139.801.700,00	7.054.000.000,00	30,56	1,43
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.564.219.900,00	13.834.219.900,00	270.000.000,00	1,99	0,65
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.851.659.559,00	38.925.894.209,00	1.074.234.650,00	2,84	1,84
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.172.606.050,00	5.076.467.550,00	(96.138.500,00)	(1,86)	0,24
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8.691.385.828,00	9.963.385.828,00	1.272.000.000,00	14,64	0,47
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.725.805.200,00	13.821.027.400,00	1.095.222.200,00	8,61	0,65
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.462.511.065,00	10.622.061.065,00	159.550.000,00	1,52	0,50
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.042.932.613,00	7.358.192.613,00	315.260.000,00	4,48	0,35
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.461.302.211,00	7.016.972.211,00	555.670.000,00	8,60	0,33
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.549.661.371,00	14.956.836.371,00	407.175.000,00	2,80	0,71
15	Dinas Perhubungan	18.636.939.064,00	19.518.218.364,00	881.279.300,00	4,73	0,92
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.929.891.555,00	12.977.880.605,00	2.047.989.050,00	18,74	0,61
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TeRp.adu Satu Pintu	5.388.300.498,00	5.909.121.498,00	520.821.000,00	9,67	0,28

NO	OPD	APBD	APBD-P	Bertambah/Berkurang		% pagu OPD Terhadap Total APBD-P
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4-3)*	*6=(5/3)x100*	*7*
18	Dinas PeRp.ustakaan dan Kearsipan	7.032.817.525,00	7.590.601.525,00	557.784.000,00	7,93	0,36
19	Dinas Perikanan	22.820.307.700,00	26.780.307.700,00	3.960.000.000,00	17,35	1.27
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	22.571.849.125,00	22.096.827.122,00	(475.022.003,00)	(2,10)	1,05
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	81.615.687.214,00	87.120.283.914,00	5.504.596.700,00	6,74	4,12
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	30.140.567.596,00	30.409.836.596,00	269.269.000,00	0,89	1,44
23	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7.897.427.349,00	9.013.502.349,00	1.116.075.000,00	14,13	0,43
24	Sekretariat Daerah	66.689.405.984,00	79.534.615.984,00	12.845.210.000,00	19,26	3,76
25	Sekretariat DPRD	46.488.337.755,00	50.591.755.255,00	4.103.417.500,00	8,83	2,39
26	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.076.339.560,00	10.698.283.560,00	621.944.000,00	6,17	0,51
27	Badan Keuangan dan Aset	384.432.239.656,00	411.889.205.863,29	27.456.966.207,29	7,14	19,49
28	Badan Pendapatan Daerah	19.457.645.050,00	23.757.645.050,00	4.300.000.000,00	22,10	1,12
29	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.964.329.798,00	12.656.329.798,00	692.000.000,00	5,78	0,69
30	Inspektorat	13.666.351.300,00	14.661.391.450,00	995.040.150,00	7,28	0,69
31	Kecamatan	37.130.962.556,00	39.194.884.956,00	2.063.922.400,00	5,56	1,85
TOTAL		**1.986.497.196.736,00**	**2.113.529.735.985,29**	**127.032.539.249,29**	**6,39**	**100.00**

2.4.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum Perubahan sebesar Rp..372.940.933.725,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp..377.306.117.425,00 bertambah Rp.4.365.183.700,00 atau 1,17 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.328.005.082.425,00 sesudah perubahan R.p331.574.936.477,00 Belanja Modal sebelum perubahan Rp..44.935.851.300,00 dan sesudah perubahan Rp.45.731.180.948,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 14
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA.2024

No	Progran/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	%	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**371.444.313.825**	**371.556.051.675**	**111.737.850**	**0,03**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**257.082.521.270**	**257.887.185.962**	**804.664.692**	0,31	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	249.133.800	286.741.200	37.607.400	15,10	Ada Penambahan Anggaran Untuk Belanja ATK,Bahan Cetak,dan Perjalanan Dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.102.715.020	252.600.264.162	497.549.142	0,20	Ada penambahan pada kegiatan ini terdiri dari belanja penambahan gaji pokok PNS,Tambahan tunjangan keluarga PNS dan PPPK,Tunjangan fungsional PPPK,dan perjalanan dinas
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.074.868.700	1.116.686.850	41.818.150	3,89	Ada penambahan Anggaran pada kegiatan ini yaitu belanja ATK,kertas cover,perjalanan dinas dan bimtek
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	927.790.750	1.244.580.750	316.790.000	34,14	Ada penambahan anggaran pada kegiatan ini yaitu belanja surat kabar dan perjalanan dinas untuk RAKOR
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah	1.547.600.000	1.478.500.000	(69.100.000)	(4,46)	pengurangan anggaran yaitu

No	Progran/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	%	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					pengadaan sarana Gedung kantor yaitu Pembangunan musholah dinas pendidikan
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.283.000	755.283.000	25.000.000	3,42	penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan tagihan listrik
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	450.130.000	405.130.000	(45.000.000)	(10,00)	pengurangan pada kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan
	Pemerintahan Daerah					
2	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**114.361.792.555**	**116.837.321.563**	**2.475.529.008**	**2,16**	
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	73.610.856.819	74.821.471.757	1.210.614.938	1,64	penambahan pada kegiatan ini adalah Pembangunan peRp.ustakaan sekolah,pembangunan WC,pagar,halaman,pengadaan mebel,minat bakat,dan Pembangunan ruang kelas baru
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	28.885.781.076	29.854.725.146	968.944.070	3,35	penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah Pembangunan ruang guru,Pembangunan pagar,musholah,halaman,rehab rehab ruang kelas dan pengadaan mebel
2.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.072.564.660	9.334.216.660	261.652.000	2,88	penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah rehab ruang guru,pengadaan mebel dan pengadaan alat praktik
2.4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	2.792.590.000	2.826.908.000	34.318.000	1,23	Adapun penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan dana BOP kesetaraan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**1.617.169.900,00**	**2.249.463.900,00**	**614.044.000**	**37,97**	
3	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**1.415.164.900**	**2.029.208.900**	**614.044.000**	**43,39**	
3.1	Pelestarian Kesenian	1.415.164.900	2.029.208.900	614.044.000	43,39	penambahan

No	Progran/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang	%	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					anggaran pada kegiatan ini adalah belanja ATK,kertas cover,makan minum,honorarium narasumber,pakaian olah raga,jasa
.4	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**71.999.600**	**80.159.600**	**8.160.000**	**11,33**	
4.1	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	71.999.600	80.159.600	8.160.000	11,33	Penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan jasa pelatih penari dan perjalanan dinas
5	**Program Pembinaan Sejarah**	**30.020.400**	**30.020.400**	**0**	**0,00**	
5.1	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.020.400	30.020.400	0	0,00	
6	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**99.985.000**	**110.075.000**	**10.090.000**	**10,09**	
6.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99.985.000	110.075.000	10.090.000	10,09	penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah perjalanan dinas
Total Belanja		**372.940.933.725**	**377.306.117.425**	**4.365.183.700**		

Sumber ; Data Olah DPPA Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024

2.4.2. Dinas Kesehatan

Alokasi Belanja pada Dinas Kesehatan sebelum Perubahan sebesar Rp.236.966.074.630,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.252.616.779.720,00 bertambah Rp.15.650.705.090,00 atau 6,60 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.203.593.821.630,00 sesudah perubahan Rp.217.621.856.133,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.33.372.253.000,00 dan sesudah perubahan Rp.34.994.923.587,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan TA.2024

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**124.087.947.776**	**131.846.039.539**	**7.758.091.763**	**6,25**	
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.074.250	171.228.110	9.846.140	(5,44)	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.067.211.844	124.356.014.067	7.288.802.223	6,23	Penambahan untuk TPP ASN selama 1 bulan dan penambahan perjalanan dinas luar Provinsi
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.995.000	72.995.000	29.000.000	65,92	penambahan perjalanan dinas luar Provinsi
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9.240.000	9.240.000	-	0,00	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	433.136.100	439.516.000	6.379.900	1,47	Penambahan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.009.510	628.954.290	112.944.780	21,89	Penambahan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.573.611.000	1.936.131.000	362.520.000	23,04	
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.661.270.072	3.612.561.072	(48.709.000)	(1,33)	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	602.400.000	619.400.000	17.000.000	2,82	Penambahan untuk pembelian obat suntik anti rayap
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**106.218.244.854**	**114.376.988.181**	**8.158.743.327**	**7,68**	

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.213.517.100	39.200.647.187	1.987.130.087	5,34	Penambahan untuk pemasangan KWH dan penyusunan dokumen amdal Rumah Sakit I We Cudai, dan reviu DED Rumah Sakit Towuti, Penambahan untuk pembelian komputer 18 unit komputer, pembangunan SPAL PKM Malili dan Rehab Pagar PKM Angkona serta perbaikan instalasi lintrik PKM Malili dan pengurangan sisa kontrak, penambahan dana insentif fiskal
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.921.447.754	75.067.110.994	6.145.663.240	8,92	Penambahan dana insentif fiscal, pembelian catrige TCM perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	45.000.000	45.070.000	70.000	0,16	
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.280.000	64.160.000	25.880.000	67,61	Penambahan anggaran untuk pengurusan visitasi Rumah Sakit I We Cudai
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**5.692.838.000**	**5.515.838.000**	**(177.000.000)**	**(3,11)**	
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	55.730.500	55.730.500	-	0,00	
3.2	Perencanaan	5.191.600.000	5.127.710.000	(63.890.000)	(1,23)	Pengurangan

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					anggaran untuk tenaga upah jasa sesuai dengan yang lulus PPPK
3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	445.507.500	332.397.500	(113.110.000)	(25,39)	Pengurangan anggaran dana BOK
4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**502.431.000**	**502.431.000**	**-**	**0,00**	
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	107.350.000	107.350.000	-	0,00	
4.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	144.856.000	144.856.000	-	0,00	
4.3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	250.255.000	250.255.000	-	0,00	
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**464.613.000**	**375.483.000**	**(89.130.000)**	**(19,18)**	
5.2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	**464.613.000**	**375.483.000**	**(89.130.000)**	(19,88)	
	Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Total Belanja		**236.966.074.630**	**252.616.779.720**	**15.650.705.090**	**6,60**	

*Sumber; Data olah DPPA **Dinas Kesehatan TA. 2024***

2.4.3. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo

Alokasi Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo sebelum Perubahan sebesar Rp.174.829.865.153,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.178.737.184.391,00 bertambah Rp.3.907.319.238,00 atau 2,23 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.153.346.931.851,00 sesudah perubahan

Rp. 157.755.160.704,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.21.482.933.302,00 dan sesudah perubahan Rp.20.982.023.687,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.16
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo TA.2024

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**145.360.453.230**	**139.873.875.390**	**(5.486.577.840)**	**-3,8**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.520.000	61.629.500	2.109.500	3,5	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas.
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.783.253.230	41.089.362.605	1.306.109.375	3,3	Penambahan Anggaran Belanja Gaji Pokok PNS, Tunjangan Keluarga PNS, Pembulatan Gaji ASN, dan Tambahan Penghasilan ASN
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.725.000	20.500.000	7.775.000	61,1	Penambahan belanja ATK,Kertas & Cover, Benda Pos, Makanan & Minuman, dan Perjalanan dinas
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.136.355.000	9.717.060.000	(419.295.000)	(4,1)	Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Upah Jasa), Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
1.5	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.000.000	276.681.871	91.681.871	49,6	Penambahan Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.5	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.183.600.000	88.708.641.414	(6.474.958.586)	(6,8)	Pengurangan Belanja Barang & Jasa BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD,

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**28.969.411.923**	**38.199.669.001**	**9.230.257.078**	**31,9**	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.016.300.945	14.702.246.597	2.685.945.652	22,4	Penambahan Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Umum, Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah, Belanja Modal Alat Kedokteran THT, Belanja Modal Alat Kedokteran Mata, Belanja Modal Alat Kedokteran Anak, Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik, dan Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.953.110.978	23.497.422.404	6.544.311.426	38,6	Penambahan Anggaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan,
3	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**	**500.000.000**	**663.640.000**	**163.640.000**	**32,7**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	663.640.000	163.640.000	32,7	Penambahan Anggaran Belanja ATK, Kertas & Cover, Belanja Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Narasumber, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya, Belanja

NO	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah / Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Sewa Hotel, dan Belanja Bimbingan Teknis,
Total Belanja		**174.829.865.153**	**178.737.184.391**	**3.907.319.238**	**2,23**	

*Sumber; Data olah DPPA **Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo TA. 2024***

2.4.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum Perubahan sebesar Rp.204.901.835.750,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.223.761.680.100,00 bertambah Rp.18.859.844.350,00 atau 9,20 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.47.751.248.662.00 sesudah perubahan Rp.50.595.612.236,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.157.150.587.088.00 dan sesudah perubahan Rp.173.166.067.864,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2024

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**204.901.835.750**	**223.761.680.100**	**18.859.844.350**	**9,20**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.134.095.424**	**12.703.414.463**	**569.319.039**	**4,69**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.819.290	192.469.290	14.650.000	8,24	Adanya penambahan anggaran belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas perdis
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.289.556.292	9.062.202.231	(227.354.061)	(2,45)	Adanya penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.255.000	53.434.500	23.179.500	76,61	Adanya penambahan anggaran belanja barang pakai habis dan perjalanan dinas

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	146.064.000	180.981.500	34.917.500	23,91	Adanya penambahan anggaran belanja bimbingan teknis dan perjalanan dinas
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	703.513.240	1.311.896.840	608.383.600	86,48	Adanya penambahan anggaran belanja modal untuk beberapa pengadaan barang
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.000.000	241.280.000	78.280.000	48,02	Adanya penambahan anggaran belanja modal untuk beberapa pengadaan barang
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	447.656.402	447.918.902	262.500	0,06	Adanya penyesuaian anggaran belanja kertas dan cover
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.176.231.200	1.213.231.200	37.000.000	3,15	Adanya penyesuaian anggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)**	**10.791.107.748**	**12.017.527.920**	**1.226.420.172**	**11,37**	
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.532.800.837	7.734.042.778	1.201.241.941	18,39	Adanya penambahan anggaran belanja modal bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.258.306.911	4.283.485.142	25.178.231	0,59	Adanya penyesuaian anggaran belanja pada beberapa sub kegiatan

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**17.240.460.000**	**16.816.870.413**	**(423.589.587)**	**(2,46)**	
3.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	17.240.460.000	16.816.870.413	(423.589.587)	(2,46)	Adanya pengurangan anggaran belanja karena penyesuaian nilai kontrak
4	**Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional**	**2.699.750.000**	**2.699.750.000**	**-**	**0,00**	
4.1	Pengembangan Sistem dan Pegelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.699.750.000	2.699.750.000	-	**0,00**	
5	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**212.914.000**	**212.914.000**	**-**	**0,00**	
5.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	212.914.000	212.914.000	-	**0,00**	
6	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	**13.451.270.000**	**16.241.964.000**	**2.790.694.000**	**20,75**	
6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.451.270.000	16.241.964.000	2.790.694.000	20,75	Adanya penambahan anggaran belanja modal bangunan pembawa air kotor
7	**Program Pengembangan Permukiman**	**5.211.835.000**	**5.171.563.322**	**(40.271.678)**	**(0,77)**	
7.1	Penyelarasan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5.211.835.000	5.171.563.322	(40.271.678)	(0,77)	
8	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**44.323.775.000**	**46.165.250.249**	**1.841.475.249**	**4,15**	
8.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	44.323.775.000	46.165.250.249	1.841.475.249	4,15	Adanya penyesuaian anggaran belanja pada beberapa belanja terkait pengadaan bangunan gedung
9	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	**9.165.500.000**	**9.699.317.670**	**533.817.670**	**5,82**	
9.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	9.165.500.000	9.699.317.670	533.817.670	5,82	Adanya penambahan anggaran belanja terkait penataan bangunan gedung
10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**86.098.856.500**	**98.257.103.515**	**12.158.247.015**	**14,12**	

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	86.098.856.500	98.257.103.515	12.158.247.015	14,12	Adanya penambahan anggaran belanja modal jalan kabupaten
11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**1.496.069.778**	**1.373.439.778**	**(122.630.000)**	**(8,20)**	
11.1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	959.082.880	843.497.880	(115.585.000)	(12,05)	Adanya penyesuaian anggaran belanja pada beberapa belanja terkait kegiatan pelatihan tenaga konstruksi
11.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	54.902.518	46.572.518	(8.330.000)	(15,17)	Adanya pengurangan anggaran belanja perjalanan dinas
11.3	Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	482.084.380	483.369.380	1.285.000	0,27	Adanya penyesuaian anggaran belanja pada beberapa belanja terkait kegiatan yang diselenggarankan
12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**2.076.202.300**	**2.402.564.770**	**326.362.470**	**15,72**	
12.1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.680.556.300	1.590.919.770	(89.636.530)	(5,33)	Adanya pengurangan anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak dan belanja perjalanan dinas
12.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	52.045.000	32.665.000	(19.380.000)	(37,24)	Adanya penyesuaian anggaran belanja pada beberapa belanja terkait kegiatan yang diselenggarankan

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
13.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	343.601.000	778.980.000	435.379.000	126,71	Adanya penambahan anggaran belanja terkait honorarium pokja perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka review rtrw propinsi
Total Belanja		**204.901.835.750**	**223.761.680.100**	**18.859.844.350**	**9,20**	

2.4.5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alokasi Belanja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebelum Perubahan sebesar Rp.23.085.801.700,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.30.139.801.700,00 bertambah Rp.7.054.000.000,00 atau 30,56 persen, Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.,7.812.626.700,00 sesudah perubahan Rp.5.772.938.748,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.15.273.175.000,00 dan sesudah perubahan Rp.24.366.862.952,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA.2024

No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.604.112.950**	**4.687.535.874**	**83.422..924**	**1,81**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148.932.700	179.412.700	30.480.000	20,47	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas yang direncanakan untuk kegiatan evaluasi perangkat daerah yang terlaksana diluar kabupaten Luwu Timur
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.056.629.050	2.766.301.974	(290.327.076)	(9,50)	Pengurangan gaji menyesuaikan

No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
						kebutuhan
i1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.065.000	19.065.000	-	0,00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.119.600	7.799.600	1.680.000	27,45	Penambahan anggaran honorarium bendahara penerimaan
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.258.200	229.838.200	88.580.000	62,71	Penambahan anggaran untuk rencana diklat penyusunan Dokumen Renstra dan Pengurus barang
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.907.300	**731.867.300**	270.960.000	58,79	Penambahan anggaran belanja pengadaan printer, tangga dan TV diruang rapat, perjalanan dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.050.0.00	202.100.000	(27.950.000)	(12,15)	Penyesuaian harga dengan belanja yang ada pada E-katalog
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.161100	200.161100	-	0,00	
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.990.000	350.990.000	10.000.000	2,93	Penambahan untuk biaya administrasi dan biaya pengawasan
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**1.820.090.500**	**650.830.500**	**(1.169.260.000)**	**(64,24)**	
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	65.094.500	100.114.500	35.020.000	53,80	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk identifikasi pemenuhan data SPM
2.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.100.000.000	-	(1.100.000.000)	(100,00)	Tidak ada SK penetapan status bencana pada tahun 2024
2.3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	585.740.000	465.740.000	(120.000.000)	(20,49)	Penyesuaian anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan
2.4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	69.256.000	84.976.000	15.720.000	22,70	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas diluar daerah
3	**Program Kawasan Permukiman**	**3.162.149.350**	**4.912.828.690**	**1.750.679.340**	**55,36**	
3.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	108.583.500	246.343.500	137.760.000	126,87	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas diluar daerah

No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.053.565.850	4.666.485.190	1.612.919.340	52,82	Penambahan anggaran pembuatan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan One-One Desa Matompi Kec. Towuti dan operasional untuk sosialisasi dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP.2KPKPK), perjalanan dinas untuk identifikasi calon penerima manfaat bedah rumah Kelurahan
4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)**	**12.724.375.000**	18.666.068.736	**5,941,693,736**	46,70	
4.1	penyelenggaraan PSU Perumahan	12.724.375.000	18.666.068.736	5,941,693,736	46,70	Penambahan anggaran untuk kegiatan baru dalam rangka capaian penanganan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
5	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**5.162.500**	**4.086.500**	**- (1.076.000)**	**(20,84)**	
5.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam DaerahKabupaten/Kota	5.162.500	4.086.500	- (1.076.000)	(20,84)	Pengurangan anggaran karena menyesuaikan kebutuhan dan waktu sisa anggaran pengurangan dalam bentuk perjalanan dinas, makan minum dan atk
6	**Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**510.826.000**	**975.676.000**	**464.850.000**	**91,00**	
6.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	510.826.000	975.676.000	464.850.000	91,00	Penambahan anggaran untuk belanja modal

No	Program / Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
	oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					pengadaan tanah ruang publik Wewangriu
7	**Program Pengelolaan Tanah Kosong**	**90.225.400**	**84.680.400**	**(5.545.000)**	**(6,15)**	
7.1	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	90.225.400	84.680.400	(5.545.000)	(6,15)	Menyesuaikan kebutuhan
8	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**	**5.080.000**	**3.415.000**	**(1.665.000)**	**(32,78)**	
8.1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	5.080.000	3.415.000	(1.665.000)	(32,78)	Menyesuaikan kebutuhan dan waktu sisa pelaksanaan kegiatan
9	**Program Penatagunaan Tanah**	**163.780.000**	**154.680.000**	**(9.100.000)**	**(5,56)**	
9.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	163.780.000	154.680.000	(9.100.000)	(5,56)	Menyesuaikan kebutuhan dan waktu sisa pelaksanaan kegiatan
Total Belanja		**23.085.801.700**	**30.139.801.700**	**7.054.000.000**	**30,56**	

*Sumber : Data DPPA **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan TA.2024***

2.4.6. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja sebelum Perubahan sebesar Rp.13.564.219.900,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 13.834.219.900,00 bertambah Rp.270.000.000,00 atau 1,99 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.13.375.584.900,00 sesudah perubahan Rp.13.668.584.900,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.188.635.000,00 dan sesudah perubahan Rp.165.635.000,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Satuan Polisi pamong Praja TA.2024

No.	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**5.612.124.399**	**5.962.993.659**	**350.869.260**	**6,25**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	138.097.000	138.097.000	-	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.449.165.349	4.668.256.809	219.091.460	4,92	Adanya rencana mutasi 2 orang PNS ke Satpol pp, tambahan 2 orang PPPK baru dan kekurangan penganggaran TPP sebanyak 1 Bulan yang pada anggaran pokok di

No.	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						anggarkan selama 13 bulan dengan perhitungan TPP gaji 13 dan 14 dibayar 50% yang kemudian mengalami perubahan aturan yang seharusnya dibayarkan 100% sehingga anggarannya ditambahkan 1(satu) bulan.
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.713.700	30.713.700	-	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.834.400	129.821.050	(50.013.350)	(27,81)	Anggaran yang disediakan untuk diklat PPNS untuk 1 orang pejabat Eselon 3 di lakukan pergeseran dikarenakan yang bersangkutan mengikuti diklat PKA
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.312.150	591.352.700	178.040.550	43,08	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah, luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi banyak yang belum terakomodir dalam anggaran pokok sehingga dilakukan pergeseran pada perubahan anggaran
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.235.000	109.735.000	8.500.000	8,40	Anggaran yang ditambahkan ini diperuntukkan untuk pengadaan Meja dan kursi kerja
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.657.800	86.758.400	(6.899.400)	(7,37)	Pengurangan anggaran dilakukan setelah dilakukan rasionalisasi terhadap anggaran yang disediakan untuk pembayaran listrik dan PDAM pada kantor/barak Satpol PP yang mengalami penurunan pemakaian.
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.109.000	208.259.000	2.150.000	1,04	Pergeseran anggaran dilakukan dikarenakan terdapat kendaraan roda yang belum terakomodir anggaran pemeliharaanya pada anggaran pokok dikarenakan terbatasnya pagu.

No.	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**7.952.095.501**	**7.871.226.241**	**(80.869.260)**	**(1,02)**	
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.489.504.550	7.375.899.290	(113.605.260)	(1,52)	Terdapat kekosongan tenaga upahjasa trantibum selama 6 bulan sebanyak 19 orang dan perekrutan tenaga pengganti dilakukn pada bulan juni sehingga anggaran yang disediakan untuk pembayaran gaji upahjasa tenaga trantibum sebanyak 19 orang selama 6 bulan dilakukan pergeseran
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	378.548.401	430.284.401	51.736.000	13,67	Penambahan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan KLA dan KLS yang belum terakomodir pada anggaran pokok
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	84.042.550	65.042.550	(19.000.000)	(22,61)	Pada anggaran pokok disediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas PPNS namun pada perubahan anggaran dilakukan pergeseran dikarenakan PPNS yang mau diikutkan harus mengikuti dklat PKA
Total Belanja		**13.564.219.900**	**13.834.219.900**	**270.000.000**	**1,99**	

Sumber : Data olah DPPA ***Satuan Polisi Pamong Praja TA.2024***

2.4.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum Perubahan sebesar Rp.37.851.659.559,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.38.925.894.209,00 bertambah Rp.1.074.234.650,00 atau 2,84 persen. Rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.36.568.774.559,00 sesudah perubahan Rp.37.128.294.209,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.282.885.000,00 dan sesudah perubahan Rp.1.797.600.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
Perubahan Program /Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	**4,026,200,184**	**4,657,692,679**	**631,492,495**	**15.68**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*75,353,003*	*58,859,003*	*(16,494,000)*	*(21.89)*	Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pengurangan anggaran pada kegiatan ini adalah anggaran perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*1,986,362,901*	*1,999,260,181*	*12,897,280*	*0.65*	Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Penambahan anggaran yaitu persiapan gaji selama 2 (dua) bulan (Nopember dan Desember) untuk 2 orang ASN P3K pelantikan periode April 2024
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*8,139,900*	*1,619,900*	*(6,520,000)*	*(80.10)*	Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan. Pengurangan anggaran pada kegiatan ini adalah anggaran perjalanan dinas
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*59,822,100*	*88,002,100*	*28,180,000*	*47.11*	kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini meliputi anggaran kontribusi bimtek dan dan perjalanan dinas bimtek pada sub kegiatan bimtek dan implementasi peraturan perundang-undangan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*447,337,280*	*553,101,495*	*105,764,215*	*23.64*	kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini meliputi belanja peralatan dan perlengkapan kantor (laptop dan gorden kantor); belanja perjalanan dinas pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	*1,240,385,000*	*1,736,600,000*	*496,215,000*	*40.00*	kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini meliputi pengadaan kendaraan dinas/operasional lapangan (2 unit Mobil Toyota Avansa) untuk **Kejaksaan Negeri Malili** dan 2 unit Motor untuk kendaraan operasional kantor; **serta**

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pengadaan 1 unit AC)
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	*106,300,000*	*85,600,000*	*(20,700,000)*	*(19.47)*	kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Pengurangan anggaran pada anggaran perubahan 2024 dikarenakan anggaran untuk 1 (satu) orang tenaga upah jasa keamanan yang beralih menjadi tenaga administrasi pada Badan Kesbangpol
1.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	*102,500,000*	*134,650,000*	*32,150,000*	*31.37*	kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada **sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya** yaitu penataan ruang arsip kantor
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**1,291,192,300**	**1,296,215,300**	**5,023,000**	**0,39**	
2.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1,291,192,300	1,296,215,300	5,023,000	*0.39*	kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan anggaran untuk perjalanan dinas
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**30,734,119,565**	**30,816,266,720**	**82,147,155**	**0.27**	
3.1	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	30,734,119,565	30,816,266,720	82,147,155	*0.27*	kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan anggaran hibah bantuan keuangan partai politik periode 2024 - 2029 (selama 4 bulan ditahun 2024)
4	**Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**58,543,600**	**58,395,600**	**(148,000)**	**(0.25)**	
4.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	58,543,600	58,395,600	(148,000)	*(0.25)*	kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan. Pengurangan anggaran pada kegiatan ini adalah pengurangan anggaran untuk belanja perjalanan dinas
5	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,**	**588,557,460**	**589,977,460**	**1,420,000**	**0.24**	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Sosial dan Budaya					
5.1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	588,557,460	589,977,460	1,420,000	*0.24*	kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan anggaran untuk **perjalanan dinas**
6	**Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**1,153,046,450**	**1,507,346,450**	**354,300,000**	**30.73**	
6.1	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	1,153,046,450	1,507,346,450	354,300,000	*30.73*	kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan. Penambahan anggaran pada kegiatan ini adalah penambahan anggaran untuk **Belanja Operasional anggota FORKOPIMCAM yang bersumber dari bantuan keuangan propinsi sulawesi selatan**
	Total Belanja	**37.851.659.559**	**38.925.894.209**	**1.074.234.650**	**2,84**	

*Sumber ; Data olah DPPA **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2024***

2.4.8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.5.172.606.050,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.5.076.467.550,00 berkurang Rp.96.138.500,00 atau 1,86 persen. Dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.3.967.218.550,00 sesudah perubahan Rp.4.290.967.550,00 Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.205.387.500,00 dan sesudah perubahan Rp.785.500.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana TA.2024

No	Progran/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	**3.539.355.020**	**3.740.477.020**	**201.122.000**	**5,68**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.067.880	87.369.880	7.302.000	9,12	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas dan pengurangan anggaran belanja pada makan dan minum rapat
1.2	Administrasi Keuangan	2.145.998.382	2.006.189.082	(139.809.300)	(6,51)	Penambahan

No	Progran/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Perangkat Daerah					anggaran perjalanan dinas
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.326.300	20.326.300	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.500.000	75.440.000	39.940.000	112,51	Penambahan anggaran perjalanan dinas dan biaya kontribusi
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	396.921.800	541.562.300	144.640.500	36,44	Penambahan anggaran BBM , bahan bacaan dan Penambahan anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk mengakomodir perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebelum perubahan anggaran dan agenda perjalanan dinas yang direncanakan pada akhir tahun
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	658.000.000	659.600.000	1.600.000	0,24	Penambahan anggaran untuk BM. Pengadaan lemari perlengkapan 1 unit dan lemari amplifier 1 unit untuk Musollah Kantor BPBD dan penyesuaian sisa belanja /sisa SPK/Kontrak
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.820.658	78.889.458	(931.200)	(1,17)	Penyesuaian realisasi anggaran
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	122.720.000	271.100.000	148.380.000	120,91	Penambahan anggaran untuk perbaikan perahu karet 3 unit yang rusak berat dan pemeliharaan gedung musollah kantor BPBD
2	**Program Penanggulangan Bencana**	**1.633.251.030**	**1.335.990.530**	**(297.260.500)**	**(18,20)**	
2.1	Kegiatan Kegiatan Pelayanan Informasi	116.395.070	116.395.070	0	0,00	

No	Progran/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	*%*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Rawan Bencana					
	Kabupaten/Kota					
2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	257.723.360	257.297.360	(426.000)	(0,17)	Penyesuaian realisasi anggaran
2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	752.737.140	772.688.140	19.951.000	2,65	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk mengakomodir kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana banjir bandang di Kab. Luwu
2.4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	506.395.460	189.609.960	(316.785.500)	(62,56)	Penambahan anggaran untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait Penilaian IKD Tahun 2024 dan Penambahan anggaran untuk BM. Rekonstruksi Bangunan Pengaman Jembatan Desa Kawata dan Rekonstruksi Tanggul Banjir Sungai Desa Lauwo yang bersumber dari Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Tahun 2024
Total Belanja		**5.172.606.050**	**5.076.467.550**	**(96.138.500)**	**(1,86)**	

Sumber : Data Olah DPPA Badan Penanggulangan Bencana TA.2024

2.4.9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alokasi Belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebelum Perubahan sebesar Rp.8.691.385.828,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.9.963.385.828,00, bertambah Rp.1.272.000.000,00 atau 14,64 persen, dengan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.8.527.885.828,00 sesudah perubahan Rp.9.103.579.828,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.163.500.000,00 dan sesudah perubahan Rp.859.806.000,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 2.22
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan TA.2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.468.687.900**	**4.713.415.500**	**1.244.727.600**	**35,88**	
1.1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.484.100	108.824.100	(13.660.000)	(11,15)	Penyesuaian anggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.548.059.395	2.941.912.275	393.852.880	15,46	Penambahan anggaran Gaji dan tunjangan, penambahan perjalanan dinas
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	31.880.250	31.880.350	100	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	147.690.430	163.216.700	15.526.270	10,51	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.975.675	478.117.925	204.142.250	74,51	Penambahan anggaran untuk belanja bohlamp dan perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	499.086.000	499.086.000	0,00	Merupakan sub kegiatan tambahan pada perubahan anggaran
						tahun 2024, yaitu Pengadaan 1 unit mobil operasional kepala Dinas damkar dan penyelamatan
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.228.050	81.108.150	(4.119.900)	(4,83)	Penambahan anggaran untuk belanja tagihan air dan tagihan Listrik dan Penyesuaian untuk gaji cleaning service karena pada Dinas Damkar dan penyelamatan tidak ada cleaning service
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.370.000	409.270.000	149.900.000	57,79	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan unit pemadam kebakaran dan pemeliharaan/rehab Gedung kantor atau bangunan lainnya
2	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**5.222.427.928**	**5.249.970.328**	**27.542.400**	**0,53**	
2.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	5.079.585.858	4.990.277.658	(89.308.200)	(1,76)	Penyesuaian anggaran belanja untuk gaji petugas damkar yang telah berubah status dari upah jasa menjadi tenaga pppk dan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kabupaten/Kota					Penambahan anggaran untuk BBM mobil damkar dan operasional dan sapras pemadam kebakaran
2.2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	11.413.900	11.413.900	0	0,00	
2.3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	11.546.480	11.546.480	0	0,00	
2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	58.704.690	58.694.690	(10.000)	(0,02)	
2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	61.177.000	178.037.600	116.860.600	191,02	Penambahan pengadaan saRp.ras penyelamatan
Total Belanja		**8.691.385.828**	**9.963.385.828**	**1.272.000.000**	**14,64**	

Sumber ; Data Olah DPPA ***Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan TA.2024***

2.4.10. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi Belanja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum Perubahan sebesar Rp.12.725.805.200,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.13.821.027.400,00 atau bertambah Rp.1.095.222.200,00 atau 8,61 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.11.566.865.200,00 sesudah perubahan Rp.12.722.487.400,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.158.940.000,00 dan sesudah perubahan Rp.1.098.540.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**4.448.883.549**	**4.329.580.080**	**(119.303.469)**	**(2,68)**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	134.106.000	244.086.053	109.980.053	82,01	Penambahan Anggaran untuk perjalanan dinas
1.2	Administrasi	3.257.232.789	2.555.480.467	(701.752.3220	(21,54)	Penyesuaian Anggaran

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Keuangan Perangkat Daerah					Belanja pegawai untuk jabatan yang kosong
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.530.000	99.530.000	40.000.000	67,19	Penambahan anggaran untuk rekening belanja kursus singkat/pelatihan bimbingan teknis PNS karena ada beberapa BIMTEK yang direncanakan akan dilaksanakan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473.213.760	721.602.560	248.388.800	52,49	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas luar daerah
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.700.000	276.200.000	68.500.000	32,98	Penambahan anggaran belanja untuk pengadaan desain taman dan belanja modal filing kabinet, mesin pompa air, tandon air, kamera
						digital
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.310.000	109.750.000	440.000	0,40	Penambahan anggaran belanja untuk air kantor
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.791.000	322.931.000	115.140.000	55,41	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan yang rusak
2	**Program Pemberdayaan Sosial**	**4.486.037.009**	**5.086.990.809**	**600.953.800**	**13,40**	
2.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	4.486.037.009	5.086.990.809	600.953.800	13,40	Penambahan anggaran untuk bantuan KUBE
	Kabupaten/Kota					
3	**Program Rehabilitasi Sosial**	**1.070.972.955**	**1.152.904.280**	**81.931.325**	**7,65**	
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.070.972.955	1.152.904.280	81.931.325	7,65	Penambahan anggaran untuk pengantaran ODGJ
4	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**409.266.100**	**513.966.100**	**104.700.000**	**25,58**	
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	409.266.100	513.966.100	104.700.000	25,58	Penambahan anggaran untuk belanja ATK untuk sosialisasi DTKS, pengadaan baju olahraga operator desa,

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						penambahan transport 1 pendamping PKH.
5	**Program Penanganan Bencana**	**205.528.650**	**323.360.690**	**117.832.040**	**57,33**	
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	205.528.650	323.360.690	117.832.040	57,33	Penambahan anggaran karena dana yang digunakan untuk bencana habis, sedangkan masih ada dana untuk bencana belum teralokasi
6	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**250.000.000**	**346.608.000**	**96.608.000**	**38,64**	
6.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	250.000.000	346.608.000	96.608.000	38,64	Penambahan anggaran untuk persiapan seminar kabupaten
	Kabupaten/Kota					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
7	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**307.148.371**	**389.649.371**	**82.501.000**	**26,86**	
7.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	101.077.521	101.077.521	0	0,00	
	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					
7.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	206.070.850	288.571.850	82.501.000	40,04	Penambahan anggaran untuk HUT DWP dan kegiatan kegiatan Hari Ibu.
8	**Program Perlindungan Perempuan**	**1.020.880.616**	**1.020.880.616**	**99.999.954**	**9,80**	
8.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	359.248.046	359.248.000	(46)	0,00	
8.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	661.632.570	761.632.570	100.000.000	15,11	Penambahan anggaran untuk belanja makan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					minum karena Jumlah kasus yang ada pada UPTD PPA mengalami peningkatan
9	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**60.486.100**	**62.956.100**	**2.470.000**	**4,08**	
9.1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.486.100	62.956.100	2.470.000	4,08	Penambahan anggaran pada kegiatan sosialisasi PUSPAGA
10	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**40.774.800**	**40.774.800**	**0**	**0,00**	
10.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.774.800	40.774.800	0	0,00	
11	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**425.827.050**	**453.356.600**	**27.529.550**	**6,46**	
11.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.388.700	184.388.250	29.999.550	19,43	Penambahan anggaran untuk kegiatan pendampingan peningkatan kapasitas Tim Gugus Tugas KLA terkait KHA, sosialisasi Perbup SOP penanganan kasus anak terintegrasi dan sosialisasi Perda KLA
11.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	271.438.350	268.968.350	(2.470.000)	(0,91)	Penyesuaian anggaran dialihkan ke kegiatan sosialisasi PUSPAGA
Total Belanja		**12.725.805.200**	**13.821.027.400**	**1.095.222.200**	**8,61**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TA 2024***

2.4.11. Dinas Lingkungan Hidup

Alokasi Belanja pada Dinas Dinas Lingkungan Hidup sebelum Perubahan sebesar Rp.10.462.511.065,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.10.622.061.065,00

atau bertambah Rp.159.550.000,00 atau 1,52 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.10.009.711.065,00 sesudah perubahan Rp.10.288.196.065,00. Belanja Modal sebelum perubahan Rp.452.800.000,00 dan sesudah perubahan Rp.333.865.000,00

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	persen	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**4.504.854.000**	**5.050.975.350**	**546.121.350**	**12,12**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.960.000	168.646.000	40.686.000	31,80	Penambahan anggaran untuk belanja kertas, tinta printer,alat tulis kantor, bahan computer dan perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.694.909.612	3.473.221.582	(221.688.030)	(6,00)	Penyesuaian anggaran gaji dan tunjangan tahun 2024,
						Penambahan anggaran TPP masing-masing ASN sebanyak 1 bulan dan pembayaran TPP untuk PPPK 2 orang x 10 bulan, Kenaikan honorarium PPK SKPD & bendahara pengeluaran
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Skpd	19.155.000	19.155.000	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.015.000	272.854.900	202.839.900	289,71	Penambahan anggaran untuk belanja cetak administrasi kepegawaian, Makan minum rapat verifikasi pengajuan jabatan fungsional di KLHK Jakarta, Honorarium narasumber tim verifikasi pengajuan jabatan fungsional DLH di KLHK jakarta yang terdiri atas 7 orang dan penambahan perjalanan dinas diklat teknis fungsional PNS

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	persen	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						sebanyak 2 orang dan bimtek ASN sebanyak 9 orang
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.199.100	487.917.500	233.718.400	91,94	Penambahan anggaran makan minum jamuan tamu dan perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.500.000	276.865.000	191.365.000	223,82	Penambahan anggaran untuk belanja 2 unit (Ruang amdal + bidang persampahan), TV, 1 unit tugu adipura, 7 unit Laptop, 1 unit PC printer, Scanner, UPS, microphone wareless, baterai drone, tas drone, lemari, kursi, meja rapat, ruang arsip
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.409.288	164.609.368	6.200.080	3,91	Penambahan untuk belanja tagihan air, belanja Listrik, lampu tugu adipura
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.706.000	187.706.000	93.000.000	98,20	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan laptop, pemeliharaan kolam lindih di TPA
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**523.786.690**	**395.036.690**	**(128.750.000)**	**(24,58)**	
2.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Kabupaten/Kota	523.786.690	395.036.690	(128.750.000)	(24,58)	Penyesuaian anggaran Penambahan anggaran untuk transfortasi narasumber
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**1.120.964.575**	**682.594.575**	**(438.370.000)**	**(39,11)**	
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	1.024.569.625	586.199.625	(438.370.000)	(42,79)	Penyesuaian anggaran belanja untuk pengujian sampel udara, biaya jasa pembuatan peta tutupan lahan, biaya belanja bahan kimia. Penambahan anggaran belanja botol sampel air, Sewa Perahu untuk pengambilan sampel air di danau towuti dan Matano, Perjalanan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	persen	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						dinas
3.2	Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lh Kabupaten/Kota	96.394.950	96.394.950	0	0,00	
4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**147.908.860**	**177.547.810**	**29.638.950**	**20,04**	
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	147.908.860	177.547.810	29.638.950	20,04	Penambahan anggaran untuk belanja bahan bangunan dan konstruksi kegiatan RHL, belanja herbisida, BBM untuk penebangan pohon, belanja cetak spanduk dan banner untuk peringantan hari-hari lingkungan hidup, belanja alat-alat listrik RTH, makan minum rapat tenaga penebangan,
5	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan**	**59.854.010**	**44.804.010**	**(15,050.000)**	**(25,14)**	
	Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)					
5.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	59.854.010	44.804.010	(15,050.000)	(25,14)	Penyesuaian anggaran perjalanan dinas
6	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**74.505.000**	**97.425.000**	**22.920.000**	**30,76**	
6.1	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.505.000	97.425.000	22.920.000	30,76	Penambahan anggaran perjalanan dinas
7	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**	**87.289.900**	**45.289.900**	**(42.000.000)**	**(48,12)**	
7.1	Pengakuan Mha, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	87.289.900	45.289.900	(42.000.000)	(48,12)	Pengurangan anggaran makan minum rapat, jasa tenaga ahli pembuatan peta
8	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**26.659.950**	**26.759.950**	**100.000**	**0,38**	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	persen	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	26.659.950	26.759.950	100.000	0,38	
9	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk**	**56.264.950**	**70.044.950**	**13.780.000**	**24,49**	
	Masyarakat					
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.264.950	70.044.950	13.780.000	24,49	Penambahan anggaran makan minum rapat, Hadiah untuk pemenang lomba
10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**51.508.000**	**57.488.000**	**5.980.000**	**11,61**	
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	51.508.000	57.488.000	5.980.000	11,61	Penambahan nagaran perjalanan dinas
11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**3.808.915.130**	**3.974.094.830**	**165.179.700**	**4,34**	
11.1	Pengelolaan Sampah	3.808.915.130	3.974.094.830	165.179.700	4,34	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk sosialisasi terkait pemgelolaan persampahan sampai ke tingkat kel/desa, Belanja Modal Mesin Babat 5 unit, Chiansaw 2 unit
Total Belanja		**10.462.511.065**	**10.622.061.065**	**159.550.000**	**1,52**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Lingkungan Hidup TA.2024***

2.4.12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum Perubahan sebesar Rp.7.042.932.613,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.7.358.192.613,00 atau bertambah Rp.315.260.000,00 atau 4,48 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.5.977.882.613,00 sesudah perubahan Rp.6.007.933.897,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.065.050.000,00 dan sesudah perubahan Rp.1.350.258.716,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA.2024

NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	persen	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**	**5.581.884.078**	**5.922.644.078**	**340.760.000**	**4,48**	
1.1	Perencanaan, pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.774.400	42.104.400	(2.670.000)	(5,96)	Penyesuaian anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.584.597.733	2.620.466.013	35.868.280	1,39	Penambahan anggaran TPP PNS dari 13 bulan menjadi 14 bulan dan Gaji ,Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.116.095	27.116.095	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.708.100	111.708.100	30.000.000	36,72	Penambahan anggaran pada kontribusi bimtek
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.938.950	1.080.991.950	2.053.000	0,19	Penambahan anggaran untuk perbaikan instalasi listrik.
1.6	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.065.050.000	1.350.258.716	285.208.716	26,78	Penambahan anggaran untuk pembelian kursi tunggu, meja pelayanan, Camera, Scanner,PC untuk perekaman dan pencetakan pembelian Laptop untuk pelayanan mobile
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.648.800	552.948.804	(9.699.996)	(1,72)	Penyesuaian anggaran untuk kebutuhan internet kantor berdasarkan kontrak dengan Telkomsel
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	137.050.000	137.050.000	0	0,00	
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**437.531.700**	**403.891.700**	**(33.640.000)**	**(7,69)**	
2.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	437.531.700	403.891.700	(33.640.000)	(7,69)	Penyesuaian anggaran dilakukan akibat diterimanya tenaga upah jasa yang lulus seleksi PPPK sejumlah 92 orang termasuk pendamping dan pelatih
3	**Program Pencatatan Sipil**	**458.091.635**	**487.231.635**	**29.140.000**	**6,36**	
3.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	458.091.635	487.231.635	29.140.000	6,36	Penambahan anggaran untuk mencapai target nasional terkait kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun

NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	persen	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**114.060.000**	**135.060.000**	**21.000.000**	**18,41**	
4.1	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan penyajian Database Kependudukan	45.870.000	66.870.000	21.000.000	45,78	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk koordinasi terkait hak akses pemanfaatan data kependudukan
4.2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.190.000	68.190.000	0	0,00	
5	**Program Pengelolaan Propil Kependudukan**	**451.365.200**	**409.365.200**	**(42.000.000)**	**(9,31)**	
5.1	Penyusunan Propil Kependudukan	451.365.200	409.365.200	(42.000.000)	(9,31)	Penyesuaian anggaran dilakukan akibat diterimanya tenaga upah jasa yang lulus seleksi PPPK
Total Belanja		**7.042.932.613**	**7.358.192.613**	**315.260.000**	**4,48**	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil TA.2024

2.4.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alokasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp.6.461.302.211,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.7.016.972.211,00 atau bertambah Rp.555.670.000,00 atau 8,60 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.5.434.566.299,00 sesudah perubahan Rp.5.864.315.361,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.026.735.912,00 dan sesudah perubahan Rp.1.152.656.850,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Perubahan Anggaran Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4,616,968,611**	**4,710,216,971**	**93,248,360**	**2.02**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89,935,360	125,235,360	35,300,000	39.25	Penambahan Anggaran) untuk kegiatan Studi Tiru/Coaching Clinic Perencanaan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,668,883,589	2,404,648,611	(264,234,978)	(9.90)	Penurunan anggaran disesuaikan dengan pembayaran gaji dan tunjangan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Pegawai DPMD (15 PNS & 2 PPPK)
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16,182,800	24,042,800	7,860,000	48.57	Penambahan Anggaran untuk kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang akan dikoordinasikan ke Luar Daerah Dalam Propinsi
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86,781,950	131,941,950	45,160,000	52.04	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk Bimtek salah satunya yaitu Bimtek Renstra , Bimtek Kepegawaian dan Bimtek penyelenggaraan hukum administrasi pemerintahan
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400,661,000	605,027,400	204,366,400	51.01	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Dalam Daerah
						untuk melakukan koordinasi dan konsultasi (pergeseran dari anggaran Gaji)
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,031,535,912	1,127,056,850	144,431,850	14,00	Penambahan Anggaran untuk belanja Ipad 3 Unit, Drone 1 unit, PC 2 Unit dan Scanner 1 unit (pergeseran)
14,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,078,000	144,654,000	(17,424,000)	(10.75)	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,910,000	147,610,000	(13,300,000)	(8.27)	
2	**Program Penataan Desa**	**42,717,446**	**28,557,446**	**(14,160,000)**	**(33.15)**	
2.1	Penyelenggaraan Penataan Desa	42,717,446	28,557,446	(14,160,000)	(33.15)	
3	**Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**714,307,684**	**834,726,324**	**120,418,640**	**16.86**	
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	714,307,684	834,726,324	120,418,640	16.86	Penambahan Anggaran (dari Pergeseran) untuk melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan Pengukuhan PeRp.anjangan Masa Jabatan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Kepala Desa dan BPD sesuai dengan amanat UUD Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UDD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**1,087,308,470**	**1,443,471,470**	**356,163,000**	**32.76**	
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,087,308,470	1,443,471,470	356,163,000	32.76	penambahan anggaran kegiatan Jambore PKK di Solo dan BKK stunting dari provinsi
Total Belanja		**6.461.302.211**	**7.016.972.211**	**555.670.000**	**8,60**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA.2024***

2.4.14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelum Perubahan sebesar Rp.14.549.661.371,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.14.956.836.371,00, atau bertambah Rp.407.175.000,00 atau 2,80 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.13.866.977.371,00 sesudah perubahan Rp.14.223.148.636,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.682.684.000,00 dan sesudah perubahan Rp.733.687.735,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.27
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	***2***	***3***	***4***	*5*	*6*	***7***
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.590.625.821**	**4.790.064.221**	**199.438.400**	**4,34**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.040.950	65.594.950	8.554.000	15,00	penambahan anggaran perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.100.962.821	3.060.673.886	(40.288.935)	(1,30)	Penyesuaian Anggaran

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Karena Ada 2 Orang Pegawai yang pindah dan Pensiun Dini
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.289.750	16.153.750	(136.000)	0,00	Penyesuaian Anggaran Karena ada Belanja ATK yang tidak dibelanjakan Lewat E Purchase
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.525.950	58.689.950	23.164.000	65,20	Penambahan anggaran disesuaikan dengan dasar surat belanja Perjalanan dinas,
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.934.350	742.689.685	184.755.335	33,11	Penambahan anggaran untuk belanja Belanja Modal laptop, Keyboard tablet, Speaker, perjalanan dinas dan makan minum tamu
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	563.244.000	548.712.000	(14.532.000)	(2,58)	Penyesuaian Anggaran karena sisa Kontrak dan untuk penambahan belanja untuk Kursi Pimpinan dan belanja Modal Lemari
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.178.000	112.790.000	6.612.000	6,23	Penambahan anggaran untuk Belanja Listrik yang mengalami kenaikan pemakaian
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.450.000	184.760.000	31.310.000	20,40	Penambahan Anggaran untuk perbaikan kendaraan dinas roda empat
2	**Program Pengendalian**	**465.204.250**	**454.912.850**	**(10.291.400)**	**(2,21)**	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Penduduk					
2,1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	74.940.100	74.940.100	0	0,00	
2.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	390.264.150	379.972.750	**(10.291.400)**	(2,64)	Penyesuaian anggaran untuk belanja AYK, Cetak, Kertas dan Cobver, Bahan Komputer dan makan Minum Rapat dan perjalanan dinas
3	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)**	**7.356.220.300**	**7.595.763.300**	**239.543.000**	3,26	
3.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.055.579.500	1.084.099.500	28.520.000	2,70	penambahan anggaran untuk belanja ATK, Makan Minum dan perjalanan dinas
3.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.645.289.000	1.688.864.000	43.575.000	2,65	penambahan anggaran untuk belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum karena adanya
						Kenaikan Upah PPKBD dan Sub PPKBD
3.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	799.161.800	816.639.800	7.478.000	0,94	penambahan anggaran untuk belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Jasa Dekorasi Panggung dan Jassa Peliputan dalam Kegiatan Pelayanan KB Serentak
3.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3.856.190.000	4.006.160.000	149.970.000	3,89	Penambahan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas karena Utk Belanja ini tidak ada dipokok

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						kegiatan DASHAT ke Desa-desa dan Honorarium Narasumber
4	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks**	**2.137.611.000**	**2.116.096.000**	**(21.515.000)**	**(1,01)**	
4.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	683.260.000	665.875.000	(17.385.000)	(2,54)	Penyesuaian anggaran untuk kegiatan lain
4.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.454.351.000	1.450.221.000	(4.130.000)	(0,28)	Penyesuaian anggaranuntuk kegiatan lain
Total Belanja		14.549.661.371	**14.956.836.371**	**407.175.000**	**2,80**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana TA.2024***

2.4.15. Dinas Pehubungan

Alokasi Belanja pada Dinas Perhubungan sebelum Perubahan sebesar Rp.18.636.939.064,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.19.518.218.364,00 atau bertambah Rp.881.279.300,00 atau 4,73 persen. Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.12.841.766.214,00 sesudah perubahan Rp.13.585.068.364,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.5.795.172.850,00 dan sesudah perubahan Rp.5.933.150.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Perubahan Anggaran Program/ Kegiatan Dinas Perhubungan TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.602.208.414**	**5.113.522.214**	**511.313.800**	**11,11**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.785.700	106.180.700	18.395.000	20,95	Penambahan anggaran untuk belanja Bahan Cetak, bahan komputer dan perjalanan dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.249.339.564	3.419.256.239	169.916.675	5,23	Penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan P3K dan belanja perjalanan dinas
1.3	Administrasi Barang Milik	15.451.100	19.651.100	4.200.000	27,18	Penambahan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Daerah pada Perangkat Daerah					anggaran untuk belanja Honor Pengurus Barang
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.522.800	10.522.800	0	0,00	
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.043.050	92.043.050	21.000.000	29,56	Penambahan anggaran untuk Belanja Kursus Bimtek
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.613.900	656.094.300	151.480.400	30,02	Penambahan anggaran untuk Belanja Bahan Bakar, bahan cetak, koran nasional dan perjalanan dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.250.000	366.650.000	89.400.000	32,5	Penambahan anggaran untuk belanja Meja dan Kursi dan gedung kantor baru
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.172.300	147.514.025	23.341.725	18,80	Penambahan anggaran untuk belanja tagihan air dan air kantor
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.030.000	295.610.000	33.580.000	12,82	Penambahan anggaran untuk pemeliharaan duoble cabin
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**13.273.595.500**	**13.664.213.200**	**390.617.700**	**2,94**	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.579.819.250	5.906.059.250	326.240.000	5,84	Penambahan anggaran untuk tagihan listrik PJU
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.563.560.000	2.637.080.000	73.520.000	2,87	Penambahan anggaran untuk rehabilitasi papan Nama Terminal Tarengge
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	30.814.900	31.774.900	960.000	3,12	
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.278.000	196.128.000	(4.150.000)	(2,07)	Pengurangan anggaran pada pemeliharaan software alat PKB
2.5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	462.257.300	482.749.300	20.492.000	4,43	Penambahan anggaran perjalananan dinas
2.6	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.354.544.300	4.328.100.000	(26.444.300)	(0,61)	Pengurangan anggaran untuk belanja jasa sopir bus sekolah yang tidak terbayarkan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.321.750	82.321.750	0	0,00	
3	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**761.135.150**	**740.482.950**	**(20.652.200)**	**(2,71)**	
3.1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	249.336.900	229.504.100	(19.832.800)	(7,95)	Pengurangan anggaran untuk belanja pemeliharaan kapal
3.2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	511.798.250	510.978.850	(819.400)	(0,16)	Pengurangan anggaran untuk belanja pemeliharaan dermaga
Total Belanja		**18.636.939.064**	**19.518.218.364**	**881.279.300**	**18,74**	

*Sumber : Data Olah DPPA **Dinas Perhubungan TA.2024***

2.4.16. Dinas Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian

Alokasi Belanja pada Dinas Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian sebelum Perubahan Rp.10.929.891.555,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp.12.977.880.605,00 atau bertambah Rp.2.776.410.000,00 atau 28,40 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.10.613.846.555,00 sesudah perubahan Rp.12.336.565.605,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.316.045.000,00 dan sesudah perubahan Rp.641.315.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Komunikasi, Informatikan, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Perubahan Anggaran Program /Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.163.171.235**	**4.759.860.885**	**596.689.650**	***14,33***	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.480.455	111.684.305	(7.796.150)	(6,53)	Pengurangan sebesar 6.53% pada sub kegiatan Penyusunan perencanaan perangkat daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.920.676.348	3.081.440.740	160.764.392	5,50	Penambahan Anggaran sebesar 5,50% untuk sub

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.486.800	27.196.240	(2.290.560)	(7,77)	Pengurangan sebesar 7.77% pada sub kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	200.000	0	(200.000)	(100,00)	Pengurangan sebesar 100% karena tidak ada PAD pada Tahun Anggaran 2024 UU no. 1 tahun 2022 ttg hubungan keuangan pusat dan daerah
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.804.682	190.394.650	115.589.968	154,52	Penambahan Anggaran sebesar 154,52% Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Bimtek sertifikasi keamanan siber)
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.737.950	485.679.950	180.942.000	59,38	Penambahan Anggaran sebesar 59.38% pada sub kegiatan : - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.045.000	398.815.000	135.770.000	51,61	Penambahan Anggaran sebesar 51,61% untuk sub kegiatan Pengadaan Mebel (Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat) dan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film dan Belanja Modal Personal Computer)

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.850.000	297.250.000	3.400.000	1,16	Penambahan Anggaran sebesar 1.16% untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeloharaan alat studio dan pemeliharan Komputer unit)
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.890.000	167.400.000	10.510.000	6,70	Penambahan Anggaran sebesar 6,70% untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeloharaan alat studio dan pemeliharan Komputer unit)
2	**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**	**3.410.595.920**	**4.290.470.920**	**879.875.000**	**25,80**	
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.410.595.920	4.290.470.920	879.875.000	25,80	Penambahan Anggaran di APBD P sebesar 25,80% untuk kegiatan Publikasi di media televisi yang dikerja samakan dengan CNN dan Penambahan iklan Benner untuk media Online
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**2.966.106.000**	**3.537.530.400**	**571.424.400**	**11,36**	
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.435.735.500	2.712.509.900	276.774.400	11,36	Penambahan untuk belanja Upgrade FO dan pengurangan belanja pemeliharaan jaringan serta pengurangan perjalanan dinas
3.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	530.370.500	825.020.500	294.650.000	55,56	Penambahan anggaran sebesar 55,56% untuk sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (pembangunan 5 aplikasi)
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**300.179.400**	**300.179.400**	**0**	**0,00**	
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	300.179.400	300.179.400	0	0,00	
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**89.839.000**	**89.839.000**	**0**	**0,00**	
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	89.839.000	89.839.000	0	0,00	
	Daerah Kabupaten/Kota					
Total Belanja		**10.929.891.555**	**12.977.880.605**	**2.047.989.050**	**18,74**	

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian TA.2024

2.4.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi Belanja pada Penanaman Modal Dan Pelayanan TeRp.adu Satu Pintu sebelum Perubahan sebesar Rp.5.353.800.498,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.5.909.121.498,00 atau bertambah Rp.520.821,000.00 atau 9,67 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.5.353.800.498,00 sesudah perubahan Rp.5.868.121.498,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.34.500.000,00 dan sesudah perubahan Rp.41.000.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Perubahan Program/ Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TeRp.adu Satu Pintu TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.885.422.758**	**4.032.749.378**	**147.326.620**	**3,79**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.525.350	82.865.350	(2.660.000)	(3,11)	Penyesuaian anggaran Perjalanan Dinas
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.082.393.335	3.122.261.823	39.868.488	1,29	Penambahan Anggaran untuk Gaji dan TPP P3K
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.416.150	17.416.150	0	0,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.694.000	122.414.000	33.720.000	38,02	Penambahan Anggaran Perjalanan Dinas
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.835.085	455.455.085	99.620.000	28,00	Penambahan anggaran untuk pengadaan
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.000.000	15.500.000	(500.000)	(3,13)	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.308.838	133.586.970	(22.721.868)	(14,54)	Penyesuaian anggaran penggunaan Listrik, Konsumsi listrik atau internet ternyata lebih rendah dari yang diproyeksikan
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.250.000	83.250.000	0	0,00	
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**277.398.700**	**297.398.700**	**20.000.000**	**7,21**	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	62.399.000	82.399.000	20.000.000	32,05	Penambahan anggaran perjalanan dinas
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	214.999.700	214.999.700	0	0,00	
3	**Program Promosi Penanaman Modal**	**432.637.590**	**742.131.970**	**309.494.380**	**71,54**	
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	432.637.590	742.131.970	309.494.380	71,54	Penambahan anggaran untuk Kegiatan Temu Bisnis di Surabaya
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**316.309.450**	**340.309.450**	**24.000.000**	**7,59**	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara TeRp.adu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	316.309.450	340.309.450	24.000.000	7,59	Penambahan anggaran perjalanan dinas
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**452.532.000**	**472.532.000**	**20.000.000**	**4,42**	
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	452.532.000	472.532.000	20.000.000	4,42	Penambahan anggaran perjalanan dinas
6	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**24.000.000**	**24.000.000**	0	0,00	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.000.000	24.000.000	0	0,00	
Total Belanja		**5.388.300.498**	**5.909.121.498**	**520.821.000**		

Sumber : Data Olah DPPA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TeRp.adu Satu Pintu TA.2024

2.4.18. Dinas Perpsustakaan dan Kearsipan

Alokasi Belanja pada Dinas PeRp.ustakaan dan Kearsipan sebelum Perubahan sebesar Rp.7.032.817.525,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.7.590.601.525,00 atau bertambah Rp.557.784.000,00 atau 7,93 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.6,049.051.525,00 sesudah perubahan Rp.6.317.112.025,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.983.766.000,00 dan sesudah perubahan Rp.1.273.489.500,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas PeRp.ustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas PeRp.ustakaan Dan Kearsipan TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERP.USTAKAAN					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.775.226.575**	**6.106.471.575**	**331.245.000**	**5,74**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.755.650	144.425.650	2.670.000	1,88	Penambahan anggaran pada belanja makan dan minum rapat dan belanja perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.812.967.725	3.809.708.725	(3.259.000)	(0,09)	Anggaran berkurang pada belanja gaji pokok ASN, tunjangan jabatan ASN, tunjangan fungsional PPPK, belanja tunjangan beras PPPK, dan belanja tambahan penghasilan ASN
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.329.200	20.329.200	0	0,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.230.000	99.095.000	33.865.000	34,17	Penambahan anggaran pada belanja bimbingan teknis, belanja dan belanja perjalanan dinas biasa
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.078.000	390.084.000	111.006.000	39,78	Penambahan anggaran pada belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah Penambahan anggaran pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan perjalanan dinas
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	824.166.000	1.025.166.000	201.000.000	24,39	Penambahan anggaran pada belanja modal alat rumah tangga lainnya dan belanja modal taman
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.420.000	310.283.000	(21.137.000)	(6,38)	Penguran anggaran pada belanja tagihan iair dan belanja tagihan listrik

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.280.000	307.380.000	7.100.000	2,36	Penambahan anggaran pada belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor
2	**Program Pembinaan PeRp.ustakaan**	**845.449.950**	**1.104.654.100**	**259.204.150**	**30,66**	
2.1	Kegiatan Pengelolaan PeRp.ustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	590.508.950	616.584.100	26.075.150	4,42	Penambahan anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja honorarium narasumber, belanja sewa kendaraan bermotor penumpang dan belanja sewa hotel
2.2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254.941.000	488.070.000	233.129.000	91,44	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, makanan dan minuman jamuan tamu,belanja jasa juri perlombaan/pertandingan , belanja jasa tata rias, belanja jasa penyelenggaraan acara, belanja jasa sewa kendaraan bermotor penumpang, belanja sewa hotel dan belanja perjalanan dinas biasa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
3	**Program Pengelolaan Arsip**	**365.530.000**	**332.864.850**	**(32.665.150)**	**(8,94)**	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000	76.000.000	0	0,00	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	0	0,00	
3.3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	279.530.000	246.864.850	(32.665.150)	(11,69)	Pengurangan anggaran belanja makanan dan minuman jamuan tamu, honorarium narasumber, belanja

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						jasa tata rias, belanja sewa peralatan studio, belanja sewa hotel, dan belanja perjalanan dinas biasa
4	**Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**	**40.521.000**	**40.521.000**	**0**	**0,00**	
4.1	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	40.521.000	40.521.000	0	0,00	
5	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**6.090.000**	**6.090.000**	**0**	**0,00**	
5.1	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	6.090.000	6.090.000	0	0,00	
Total Belanja		**7.032.817.525**	**7.590.601.525**	**557.784.000**	**7,93**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas PeRp.ustakaan Dan Kearsipan TA.2024***

2.4.19. Dinas Perikanan

Alokasi Belanja pada Dinas Perikanan sebelum Perubahan Rp.22.820.307.700,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp.26.780.307.700,00 atau bertambah Rp.3.960.000.000,00 atau 17,35 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.18.325.347.700,00 sesudah perubahan Rp.22.287.067.700,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.4.494.960.000,00 dan sesudah perubahan Rp.4.493.240.000,00. Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Perikanan TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4,858,557,700.00**	**5,079,417,700.00**	**220,860,000.00**	**4.55**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107,179,500.00	122,989,500.00	15,810,000.00	14.75	Penambahan Anggaran Pada Belanja Perjalanan Dinas
1.2	Kegiatan	3,527,517,450.00	3,562,822,450.00	35,305,000.00	1.00	Penambahan Anggaran Pada Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						ASN serta Belanja Perjalanan Dinas
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	52,858,000.00	52,858,000.00	-0	0.00	
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangat Daerah	14,849,000.00	14,849,000.00	0	0.00	
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110,841,850.00	110,841,850.00	0	0.00	
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	567,351,900.00	736,196,900.00	168,845,000.00	29.76	Penambahan Anggaran Pada Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, serta Belanja Perjalanan Dinas
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	0	0.00	
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271,700,000.00	272,600,000.00	900,000.00	0.33	Penambahan Anggaran Pada Belanja Tagihan Air
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,260,000.00	146,260,000.00	0	0.00	
2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**9,911,437,800.00**	**12,427,617,800.00**	**2,516,180,000.00**	**25.39**	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan	9,675,542,500.00	12,145,712,500.00	2,470,170,000.00	25.53	Penambahan Anggaran Pada Belanja

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan					Perjalanan Dinas, Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	175,895,300.00	215,905,300.00	40,010,000.00	22.75	Penambahan Anggaran Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60,000,000.00	66,000,000.00	6,000,000.00	10.00	Penambahan Anggaran Pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**6,417,026,200.00**	**7,627,026,200.00**	**1,210,000,000.00**	**18.86**	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	233,330,200.00	303,635,200.00	70,305,000.00	30.13	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	74,612,000.00	74,612,000.00	0	0.00	
4	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	**78,266,500.00**	**71,336,500.00**	**(6,930,000.00)**	**(8.85)**	
4.1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan	78,266,500.00	71,336,500.00	(6,930,000.00)	(8.85)	Pengurangan Anggaran pada Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**926,414,480.00**	**976,414,480.00**	**50,000,000.00**	**5.40**	
5.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	1,555,019,500.00	1,574,909,500.00	19,890,000.00	1.28	Penambahan Anggaran Pada Belanja Perjalanan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil					Dinas Biasa
5.2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	189,275,000.00	195,115,000.00	5,840,000.00	3.09%	Penambahan Anggaran Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	1,240,655,500.00	1,226,355,500.00	(14,300,000.00)	(1.15)	Pengurangan Anggaran pada Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
Total Belanja		**22.820.307.700**	**26.780.307.700**	**3.960.000.000**	**17,35**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Perikanan TA.2024***

2.4.20. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi Belanja pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebelum Perubahan sebesar Rp.22.571.849.125,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.22.096.827.122,00 atau berkurang Rp.475.022.003,00 atau 2,10 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.13.405.321.125,00 sesudah perubahan Rp.14.361.564.114,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.9.166.528.000,00 dan sesudah perubahan Rp.7.735.263.008,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Perubahan Anggaran/Kegiatan
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.530.323.325**	**4.809.577.964**	**279.254.639**	**6,16**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.969.450	157.129.450	57.160.000	57,18	Penambahan pada Belanja Perjanlanan Dinas Biasa
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	3.355.404.798	3.279.505.237	(75.899.561)	(2,26)	Pengurangan pada belanja Gaji

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Daerah					disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.894.050	54.244.050	33.350.000	159,61	Penambahan pada Belanja Perjalanan Dinas biasa, Belanja mamin tamu, belanja mamin rapat, Belanja jasa Tenaga Ahli untuk inivasi Tas si dora
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.337.400	196.296.400	61.959.000	46,12	Penambahan pada belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Kursus singkat/Pelatihan
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.392.627	672.627.827	266.235.200	65,51	Penambahan pada Belanja Kursi Kerja, Belanja Alat Komunikasi (Tablet) dan Belanja Personal Komputer, Belanja Bahan Cetak (Baliho), Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.800.000	369.200.000	(72.600.000)	(16,43)	Pengurangan Belanja Penambahan daya dan Penyambungan Baru Listrik, belanja tagihan Listrik, belanja upah Tenaga Kontrak dengan perjanjian kerja
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.525.000	80.575.000	9.050.000	12.65	Penambahan pada Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja pemeliharaan printer, laptop dan televisi.
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**9.711.374.800**	**8.164.968.808**	**(1.546.405.992)**	**(15,92)**	
2.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	9.066.194.800	7.462.009.808	(1.604.184.992)	(17,69)	Pengurangan pada belanja Cetak, Belanja jasa tata rias, Belanja Sewa Hotel dan belanja perjalanan dinas biasa, belanja modal lanjutan pembangunan gedung pemuda
2.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	645.180.000	702.959.000	57.779.000	8,96	penambahan pada belanja honorarium, belanja sewa alat bantu lainnya dan belanja perjalanan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						dinas biasa
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**5.338.404.000**	**5.467.719.000**	**129.315.000**	**2,42**	
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.793.000.000	1.826.000.000	33.000.000	1,84	penambahan pada belanja Alat tlus kantor, krtas dan cover, belanja cetak, sevenir/cendra mata, belanja honorarium, belanja sewa alat bantu lainnya, belanja sewa peralatan studio dan belanja perjalanan dinas biasa
3.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.185.606.000	1.271.921.000	86.315.000	7,28	Penambahan belanja Cetak, Belanja barang untuk dijual /diserahkan kepada masyarakat, belanja makan dan minum tamu , pakaian olahraga,belanja jasa tenaga pendidikan dan belanja perjalanan dinas biasa
3.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12.500.000	22.500.000	10.000.000	80,00	Penambahan pada Belanja Perjalanan dinas biasa
3.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.871.710.000	1.871.710.000	0	0,00	
3.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	475.588.000	475.588.000	0	0,00	
4	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0,00**	
4.1	**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	500.000.000	500.000.000	0	0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
5	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**1.064.807.000**	**1.763.611.350**	**698.804.350**	**65,63**	
5.1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	647.307.000	733.860.800	86.553.800	13,37	Penambahan pada belanja Alat tulis kantor,Kertas dan

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						cover, bahan cetak, bahan komputer,mamin rapat, honorarium penyuluh/pendamping an, jasa tenaha ahli, belanja sewa kapal terbang, sewa hotel dan perjalanan dinas biasa
5.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	417.500.000	1.029.750.550	612.250.550	146,65	Penambahan pada belanja pemeliharaan Objek wisata pantai ujung suso, land mark, pemeliharaan bangunan gedung - bangunan gedung tempat kerja bangunan fasilitasi umum dan perjalanan dinas biasa
6	**Program Pemasaran Pariwisata**	**1.211.450.000**	**1.175.460.000**	**(35.990.000)**	**(2,97)**	
6.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.211.450.000	1.175.460.000	(35.990.000)	(2,97)	Pengurangan anggaran belanja bahan pameran, bahan cetak, benja jasa tenaga ahli (video dan dokumntasi, belanja kursus singkat/pelatihan dan perjalanan dinas biasa.
7	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**215.490.000**	**215.490.000**	**0**	**0,00**	
7.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	165.790.000	165.790.000	0	0,00	
7.2	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	49.700.000	49.700.000	0	0,00	
Total Belanja		**22.571.849.125**	**22.096.827.122**	**(475.022.003)**	**(2,10)**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga TA.2024***

2.4.21.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Alokasi Belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelum Perubahan sebesar Rp.81.615.687.214,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.87.120.283.914,00 atau bertambah Rp.5.504.596.700,00 atau 6,74 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.78.276.117.214,00 sesudah perubahan Rp.82.794.163.914,00. Belanja Modal sebelum perubahan Rp.3.339.570.000,00 dan

sesudah perubahan Rp.4.326.120.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Perubahan Anggaran Program /Kegiatan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA.2024

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**	**541,730,000**	**671,330,000**	**129,600,000**	**23.92**	
1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	541,730,000	671,330,000	129,600,000	23.92	Penambahan anggaran untuk paket pembangunan lantai jemur
2	**Program Peningkatan Diserfikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**-**	**680,356,450**	**680,356,450**	**100.00**	
2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	223,834,400	298,534,400	74,700,000	33.37	Penambahan untuk kegiatan Inflasi
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	77,060,090	77,055,760	(4,330)	(0.01)	Dialihkan anggarannya ke sub kegiatan lain
2.3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	307,776,290	304,766,290	(3,010,000)	(0.98)	Dialihkan anggarannya ke sub kegiatan lain
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**24,179,900**	**24,179,900**	**-**	**0.00**	
3.1	Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	24,179,900	24,179,900	-	0.00	
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**41,822,400**	**41,822,400**	**-**	**0.00**	
4.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	41,822,400	41,822,400	-	0.00	
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**30,939,460,457**	**30,995,733,693**	**56,273,236**	**0.18**	
5.1	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran ,Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	324,399,500	380,911,500	56,512,000	17.42	Penambahan untuk koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,294,756,007	24,043,332,242	(1,251,423,765)	(4.95)	Dialihkan ke sub perencanaan
5.3	Kegiatan Administrasi	306,298,000	299,944,000	(6,354,000)	(2.07)	Dialihkan ke sub

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Kepegawaian Perangkat Daerah					kegiatan lainnya
5.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	93,246,950	952,266,450	859,019,500	921.23	Penambahan untuk Pengadaan TV dan mesin pencacah untuk pembuatan kompos
5.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,834,170,000	2,990,570,000	1,156,400,000	63.05	Penambahan Untuk penataan halaman, rumah kompok untuk BPP Tomoni
5.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,431,920,000	443,899,500	(988,020,500**)**	(69.00)	Pengurangan gaji Upahjasa 7 bulan
5.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,884,810,000	1,884,810,000	-	0.00	
6	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**21,438,287,250**	**22,923,409,042**	**1,485,121,792**	**6.93**	
6.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	12,234,365,050	13,219,698,550	985,333,500	8.05	Penambahan Untuk pembelian alsintan alat panen
6.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan,Tumbuhan,Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4,709,037,200	4,285,882,992	(423,154,208)	(8.99)	Pengurangan anggaran UPT IKB untuk pembelian silo dreyer, Pengurangan perjalanan dinas
6.3	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	4,494,885,000	5,417,827,500	922,942,500	20.53	Penambahan Penggunaan anggrana untuk bibit ternak
7	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**21,025,849,526**	**25,079,489,526**	**4,053,640,000**	**19.28**	
7.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	21,025,849,526	25,079,489,526	4,053,640,000	19.28	
8	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**943,068,500**	**975,628,500**	**32,560,000**	**3.45**	
8.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan,Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	878,618,500	900,398,500	21,780,000	2.48	Penambahan Pembelian obat ternak
8.2	Kegiatan Penerapan Dan	64,450,000	75,230,000	10,780,000	16.73	Penambahan

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					untuk perjalanan dinas
9	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**894,912,000**	**878,240,703**	**(16,671,297)**	**(1.86)**	
9.1	Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	894,912,000	878,240,703	(16,671,297)	(1.86)	Anggarannya dilaihkan ke sub kegiatan lainnya
10	**Program Penyuluhan Pertanian**	4,509,866,300	4,850,093,700	**340,227,400**	7.54	
10.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	4,509,866,300	4,850,093,700	340,227,400	7.54	Penambahan pagu untuk kegiatan readsi
Total Belanja		**81.615.687.214**	**87.120.283.914**	**5.504.596.700**	**6,74**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan TA.2024***

2.4.22. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Alokasi Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian sebelum Perubahan sebesar Rp.30.140.567.596,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.30.409.836.596,00 atau bertambah Rp.269.269.000,00 atau 0,89 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.9.031.581.596,00 sesudah perubahan Rp.9.971.510.118,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.21.108.986.000,00 dan sesudah perubahan Rp.20.438.326.478,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.35
Perubahan Anggaran Program/Kegiatan
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.763.872.015**	**5.188.731.014**	**424.859.000**	**8,92**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.951.800	86.951.800	-	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.790.745.133	3.876.512.333	85.767.200	2,26	Penambahan Gaji pokok dan tunjanagan untuk PNS dan PPPK serta pembahan TPP untuk PPPK
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.045.000	19.045.000	-	0,00	
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	8.524.000	8.524.000	-	0,00	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.135.000	161.325.000	72.190.000	80,99	Penambahan untuk belanja Kursus singkat/pelatihan dan penambahan belanja perjalanan dinas luar dan dalam provinsi
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.575.031	644.838.831	202.281.800	45,71	Penambahan belanja langgana jurnal/surat kabar/majalah dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.386.000	94.386.000	25.000.000	36,03	Penambahan belanja alat rumah tangga (Televisi) dan belanja personal komputer (Tablet)
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.708.050	132.828.050	(5.880.000)	(4,43)	Pengurangan anggaran dari belanja tagihan listrik
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.820.000	164.320.000	45.500.000	38,29	Penambahan perbaikan kendaraan roda 4, berupa sukucadang, pelumas,dan servis
2	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**24.839.000**	**24.839.000**	**-**	**0,00**	
2.1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota	24.839.000	24.839.000	-	0,00	
3	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**194.263.000**	**181.553.000**	**(12.710.000)**	**(6,54)**	
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	194.263.000	181.553.000	(12.710.000)	(6,54)	Pengurangan belanja makanan dan minuman Rapat, belanja jasa juri perlombaan, hadiah lomba dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
4	**Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**	**72.915.760**	**72.915.760**	**-**	**0,00**	
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.915.760	72.915.760	-	0,00	
5	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**188.821.801**	**188.821.801**	**-**	**0,00**	
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi	188.821.801	188.821.801	-	0,00	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
6	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**254.002.922**	**254.002.922**	**-**	**0,00**	
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	254.002.922	254.002.922	-	0,00	
7	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha MikrO (UMKM)**	**604.527.000**	**604.527.000**	**-**	**0,00**	
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	604.527.000	604.527.000	-	0,00	
8	**Program Pengembangan UMKM**	**281.950.200**	**384.540.200**	**102.590.000**	**36,39**	
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	281.950.200	384.540.200	102.590.000	36,39	Penambahan belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, Bahan komputer dan perjalanan dinas Dalam dan luar daerah
9	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**21.677.134.400**	**21.107.898.400**	**(569.236.000)**	**(2,63)**	
9.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21.335.420.000	20.731.013.808	(604.406.192)	(2,83)	Pengurangan belanja pembangunan pasar tomoni,
9.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	341.714.400	376.884.592	35.170.192	10,29	Penambahan belanja pakaian dinas pengelolah pasar,dan tagihan air PDAM pasar Malili dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.
10	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**512.832.156**	**645.883.156**	**133.060.000**	**25,95**	
10.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	485.933.600	608.623.600	122.690.000	25,25	Penambahan belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja subsidi bahan pokok yang diserahkan kepada kemasyarakat
10.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.889.556	37.259.556	10.370.000	38,57	Penambahan belanja Perjalanan dinas dalam Daerah
11	**Program Pengembangan**	**304.431.443**	**333.337.443**	**28.906.000**	**9,50**	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ekspor					
11.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	304.431.443	333.337.443	28.906.000	9,50	Penambahan belanja Sewa stan dan desain Stan Pameran dan kelengkapannya
12	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**157.336.100**	**157.336.100**	**-**	**0,00**	
12.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	157.336.100	157.336.100	-	0,00	
13	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**1.009.325.800**	**1.153.675.800**	**144.350.000**	**14,30**	
13.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.009.325.800	1.153.675.800	144.350.000	14,30	Penambahan belanja pada sewa stan pameran serta desainnya dan Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi serta perjalanan dinas luar daerah luar
14	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri**	**19.640.000**	**37.090.000**	**17.450.000**	**88,85**	
14.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (Iui), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipui), Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Kewenangan Kabupaten/Kota	19.640.000	37.090.000	17.450.000	88,85	Penambahan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
15	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**74.655.000**	**74.655.000**	**-**	**0,00**	
15.1	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Unyuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Kab/ Kota	74.655.000	74.655.000	-	0,00	
Total Belanja		**30.140.567.596**	**30.409.836.596**	**269.269.000**	**0,89**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian TA.2024***

2.4.23. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Alokasi Belanja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebelum Perubahan sebesar Rp.7.897.427.349,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.9.013.502.349,00 atau bertambah Rp.1.116.075.000,00 atau 14,13 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.7.435.177.349,00 sesudah perubahan Rp.8.268.752.349,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.462.250.000,00 dan sesudah perubahan Rp.744.750.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA.2024

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.822.760.749**	**5.098.352.849**	**275.592.100**	**5,71**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.404.245	162.504.245	36.100.000	28,56	Penambahan Anggaran untuk makan dan minum rapat, Perjalanan Dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.769.436.092	3.705.474.192	(63.961.900)	(1,70)	Pengurangan Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan 1 orang dengan kelas jabatan 7
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.360.700	15.360.700	0	0,00	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.327.460	101.827.460	19.500.000	23,69	Penambahan Belanja Biaya Kontribusi dan Perjalanan dina
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.233.600	558.687.600	196.454.000	54,23	Penambahan Belanja Racun Rumput, perjalanan dinas dalam dan luar daerah
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.250.000	301.750.000	87.500.000	40,84	Penambahan Belanja 1 unit Rak Besi, mesin babat, AC, Laptop, PC dan Printer
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.562.652	156.562.652	0	0,00	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.186.000	96.186.000	0	0,00	
2	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**1.255.227.000**	**1.755.226.900**	**499.999.900**	**39,83**	
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.255.227.000	1.755.226.900	499.999.900	39,83	Penambahan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebanyak 60 orang untuk pelatihan dasar operator alat berat
3	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**362.231.150**	**338.231.150**	**(24.000.000)**	**(6,63)**	
3.1	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	246.258.350	234.258.350	(12.000.000)	(4,87)	Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sesuai dengan jumlah tenaga upah jasa yang ada

No	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
3.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	47.976.900	35.976.900	(12.000.000)	(25,01)	Pengurangan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sesuai dengan jumlah tenaga upah jasa yang ada
3.3	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	67.995.900	67.995.900	0	0,00	
4	**Program Hubungan Industrial**	**533.200.800**	**532.988.800**	**(212.000)**	**(0,04)**	
4.1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	133.978.150	133.916.150	(62.000)	(0,05)	Pengurangan Belanja Sewa Hotel
4.2	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	399.222.650	399.072.650	(150.000)	(0,04)	Pengurangan Belanja Honorarium Tim TRC HI, perjalanan dinas
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
5	**Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**	**82.476.650**	**102.476.650**	**20.000.000**	**24,25**	
5.1	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	82.476.650	102.476.650	20.000.000	24,25	Penambahan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah
`6	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**332.641.350**	**405.771.350**	**73.130.000**	**21,98**	
6.1	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	332.641.350	405.771.350	73.130.000	21,98	Penambahan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah
7	**Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**	**508.889.650**	**780.454.650**	**271.565.000**	**53,36**	
7.1	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	508.889.650	780.454.650	271.565.000	53,36	Penambahan Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, Belanja Jasa pembuatan DED pembangunan Pasar, serta untuk penambahan belanja pembuatan parit keliling lanjutan di SKPC 1 Koromalai dan Desa Kalosi
Total Belanja		**7.897.427.349**	**9.013.502.349**	**1.116.075.000**	**14,13**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja TA.2024***

2.4.24. Sekretariat Daerah

Alokasi Belanja pada Sekretariat Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.66.689.405.984,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.79.534.615.984,00 atau bertambah Rp.12.845.210.000,00 atau 19,26 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.64.756.155.984,00 sesudah perubahan Rp.76.999.198.196,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.933.250.000,00 dan sesudah perubahan Rp.2.535.417.788,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat Daerah TA.2024

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**30.155.880.197**	**32.103.020.197**	**1.947.140.000**	**19.26**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.190.500	182.796.500	(394.000)	(0,22)	Pengurangan pada belanja cetak, makan minum rapat, dan perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.904.649.439	12.485.986.951	(418.662.488)	(3,24)	Pengurangan belanja jasa tenaga administrasi, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan PNS, tunjangan fungsional dan fungsional umum PNS, tunjangan beras PNS, dann tunjangan PPH PNS
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	108.533.200	91.773.200	(16.760.000)	(15,44)	Pengurangan belanja perjalanan dinas
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	29.300.000	31.970.000	2.670.000	9,11	Penambahan perjalanan dinas
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	318.208.575	379.758.575	61.550.000	19,34	Penambahan belanja makan minum rapat, jasa kontribusi asosiasi, sewa

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						kendaraan bermotor penumpang, dan sewa hotel
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.073.344.605	3.756.989.005	683.644.400	22,24	Penambahan belanja bahan lainnya, langganan jurnal/surat
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.515.250.000	2.216.417.788	701.167.788	46,27	Penambahan belanja modal kendaraan dinas operasional, kursi rapat pejabat, alat pendingin, kamera zoom meeting, dan personal computer
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.862.658.684	1.809.858.684	(52.800.000)	(2,83)	Pengurangan belanja tagihan telpon
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.598.395.000	2.648.995.000	50.600.000	1,95	Penambahan belanja pemeliharaan kendaraan dinas bermotor perorangan
1.10	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.363.580.394	4.323.582.394	960.002.000	28,54	Penambahan belanja makan minum jamuan tamu dan perjalanan dinas
1.11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.775.100.000	1.767.600.000	(7.500.000)	(0,42)	Penguranan belanja jasa tenaga pelayanan umum, dan jasa tenaga kebersihan
1.12	Kegiatan Penataan Organisasi	1.117.363.300	1.117.305.600	(57,700)	(0,01)	Penguranan belanja bahan cetak, makan minum rapat, makan minum jamuan tamu, dan honorarium
1.13	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.306.306.500	1.289.986.500	(16.320.000)	(1,25)	Pengurangan belanja tagihan telpon
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**33.890.836.900**	**44.546.696.900**	**10.655.850.000**	**31,44**	

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	485.279.000	469.349.000	(15.930.000)	(3,28)	Penguranan belanja makan minum rapat, dan perjalanan dinas
2.2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.407.310.400	43.136.850.400	10.729.540.000	33,11	Penambahan belanja pakaian jas/safari, honorarium narasumber, hadiah yang bersifat perlombaan, hibah Lembaga ibadah dan rumah ibadah, honorarium tim pelaksana kegiatan, perjlanan dinas dan beasiswa
2.3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	896.441.500	840.761.500	(55.680.000)	(6,21)	Pengurangan belanja makan minum aktivitas lapangan, honorarium pemberi keterangan ahli, sewa kendaraan bermotor penumpang, sewa kapal terbang, dan sewa hotel
2.4	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	101.806.000	99.736.000	(2.070.000)	(2,03)	Pengurangan belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas
3	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**2.642.688.887**	**2.884.898.887**	**242.210.000**	**9,17**	
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	55.316.410	521.424.100	(31.740.000)	(5,74)	Pengurangan belanja makan minum rapat, dan perjalanan dinas
3.2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	112.218.640	150.428.640	38.210.000	34,05	Penambahan belanja perjalanan dinas
3.3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan	1.884.245.847	2.083.245.847	199.000.000	10.56	Penambahan honorarium

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Jasa					UKPBJ, dan perjalanan dinas
3.4	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	93.060.300	129.800.300	36.740.000	39.48	Penambahan belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas
Total Belanja		**66.689.405.984**	**79.534.615.984**	**12.845.210.000**	**19,26**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Sekretariat Daerah TA.2024***

2.4.25.Sekretariat DPRD

Alokasi Belanja pada Sekretariat DPRD sebelum Perubahan sebesar Rp.46.488.337.755,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.50.591.755.255,00 atau bertambah Rp.4.103.417.500,00 atau 8,83 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.44.275.087.755,00 sesudah perubahan Rp.47.786.332.655,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.2.213.250.000,00 dan sesudah perubahan Rp.2.805.422.600,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.38
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Sekretariat DPRD TA.2024

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	4	5	6	7	8
1	**Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**28.555.558.694**	**28.712.131.819**	**156.573.125**	**0,55**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.811.650	**96.551.650**	**33.740.000**	53,72	Penambahan Anggaran pada belanja perjalanan Dinas Biasa
1.2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	**3.535.236.369**	**3.201.858.274**	**(333.378.095)**	(9,43)	Pengurangan Anggaran pada rincian belanja gaji pokok PNS, PPPK ,dan Belanja Tunjangan PNS dan PPPK
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**24.093.850**	**38.593.850**	**14.500.000**	60,18	Penambahan Anggaran belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan (Kekurang Honorarium

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
						Bendahara Barang Pada Thn 2023 dan 2024) Belanja Bahan Cetak
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**581.744.550**	**734.013.950**	**152.269.400**	26,17	Anggaran bertambah pada rician belanja Bimbingan Teknis Dan beanja Dinas Biasa
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.643.296.000**	**1.884.513.600**	**241.217.600**	14,68	Penambahan Anggaran belanja pada belanja Modal Personal Computer Dan belanja Modal Peralatan Komputer, Belanja Perjalanan Dinas Biasa
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**2.148.950.000**	**2.520.851.000**	**371.901.000**	17,31	penambahan anggaran pada belanja Modal Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga (Home Use) dan belanja perjalanan dinas biasa
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**878.469.100**	**873.139.100**	**(5.330.000)**	(0,61)	Pengurangan Anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Keamanan
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**667.280.000**	**754.320.000**	**87.040.000**	13,04	Penambahan Anggaran pada rincian belanja Alat Angkutan Darat Bermotor, kenderaan dinas bermotor, belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal dan belanja Pemeliharaan - Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**17.765.677.175**	**17.433.090.395**	(332.586.780)	(1,87)	Pengurangan Anggaran pada rincian belanja Uang presentase DPRD, Belanja tunjangan keluarga DPRD, Belanja Uang Paket, Belanja Tunjangan Jabatan,Tunjangan belanja Alat Kelengkapan DPRD dan belanja Alat kelengkapan Lainnya DPRD Belanja Tunjangan intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja tunjangan jaminan kematian
1.10	Layanan Administrasi DPRD	**1.248.000.000**	**1.175.200.000**	(72.800.000)	(5,83)	Pengurangan Anggaran pada belanja bahan-bahan lainnya
2	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd**	**17.903.779.061**	**21.848.623.436**	**3.944.844.375**	**22,03**	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**2.702.699.086**	**3.598.397.286**	**895.698.200**	33,14	Penambahan Anggaran.pada rincian belanja Bahan cetak Belanja Benda dan belanja perjalanan dinas dalam negeri
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**1.323.654.550**	**699.760.000**	**(623.894.550)**	(47,13)	Anggaran berkurang pada belanja bahan cetak Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja perjalanan dinas biasa
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**5.777.079.325**	**8.526.409.050**	**2.749.329.725**	47,59	Penambahan Anggaran pada rincian belanja bahan-bahan lainnya belanja Alat Tulis Kantor belanja

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ Berkurang		Keterangan
				Rp.	%	
						kertas dan cover, dan belanja benda pos, Belanja Bahan Komputer, dan belanja perjalanan dinas biasa
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.189.120.000	2.189.120.000	0	0,00	
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.368.538.900	1.388.107.400	19.568.500	1,43	Penambahan anggaran pada rincian Belanja Kertas dan Cover Belanja Bahan Cetak Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	0	0,00	
2.7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.445.300.000	1.445.300.000	0	0,00	
2.8	Fasilitasi Tugas DPRD	3.049.521.200	3.953.663.700	904.142.500	29,65	penambahan anggaran pada rincian belanja Alat Tulis Kantor Belanja Benda Pos, dan Belanja Jasa tata rias Belanja Sewa alat Bantu Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar 880.800.000
Total Belanja		**46.488.337.755**	**50.591.755.255**	**4.103.417.500**	**8,83**	

Sumber : Data Olah DPPA **Sekretariat DPRD *TA.2024***

2.4.26.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.10.076.339.560,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.10.698.283.560,00 atau bertambah Rp.621.944.000,00 atau 6,17 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.10.076.339.560,00 sesudah perubahan Rp.10.317.783.560,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.0,00 dan sesudah perubahan Rp.380.500.000,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Perubahan Anggaran Program Kegiatan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangunan Daerah TA.2024

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.564.513.760**	**6.075.438.960**	**510.925.200**	**9,18**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.200.000	131.550.000	26.350.000	25,05	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.628.282.760	4.438.577.960	(189.704.800)	(4,10)	Pengurangan anggaran pada belanja gaji pegawai dan TPP
1.3	Kegiatan Administrasi BMD Perangkat Daerah	13.315.000	13.315.000	0	0,00	
1.4	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	147.900.000	245.990.000	98.090.000	66,32	Penambahan anggaran pada belanja biaya kontribusi Bimtek
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.626.000	588.316.000	168.690.000	40,20	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	380.500.000	380.500.000	0,00	Penambahan anggaran untuk belanja modal peralatan kerja
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.760.000	146.760.000	0	0,00	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.430.000	130.430.000	27.000.000	26,10	Penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan pemeliharaan ruang rapat
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	2.153.410.300	1.934.364.300	(219.046.000)	(10,17)	
2.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.514.890.350	1.300.853.350	(214.046.000)	(14,13)	Pengurangan anggaran pada belanja bahan cetak, belanja souvenir/cindera mata, makan minum tamu, makan minum rapat, honorarium narasumber, belanja jasa tata rias, sewa gedung dan bangunan, dan perjalanan dinas
2.2	Kegiatan Analisis Data dan	135.699.150	135.690.150	(9.000)	(0,01)	Pengurangan

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					anggaran pada belanja bahan cerat, bahan komuputer, makan minum rapat dan honor narasumber
2.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	502.820.800	497.820.800	(5.000.000)	(0,99)	engurangan anggaran pada belanja jasa tenaga ahli,
3	**Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.255.235.500**	**1.455.300.300**	**200.064.800**	**15,94**	
3.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	569.830.000	609.895.000	40.065.000	7,03	Penambahan anggaran untuk belanja makan minum rapat, dan perjalanan dinas
3.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	447.150.000	375.779.700	(71.370.300)	(15.96)	Pengurangan anggaran untuk belanja bahan komputer, makan minum rapat, sewa kendaraan bermotor penumpang, sewa hotel dan perjalanan dinas
3.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	238.255.500	469.625.600	231.370.100	97,11	Penambahan anggaran untuk belanja makan minum rapat, honor narasumber, sewa tempat pertemuan, dan belanja perjalanan dinas
4	**Program Pengembangan dan Penelitian**	**1.103.180.000**	**1.233.180.000**	**130.000.000**	**11,78**	
4.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penkajian Peraturan	270.000.000	301.100.000	31.100.000	11,52	Penambahan anggaran pada belanja jasa konsultasi berorientasi layanan
4.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	120.600.000	115.877.500	(4.722.500)	(3,92)	Pengurangan anggaran pada belanja bahan cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas
4.3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	361.800.000	343.247.000	(18.553.000)	(5,13)	Pengurangan anggaran pada belanja bahan cetak, makan minum rapat dan perjalanan dinas
4.4	Kegiatan Pengembngan Inovasi dan teknologi	350.780.000	472.955.500	122.175.500	34,83	Penambahan anggaran pada belanja bahan cetak, belanja

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
						souvenir/cindera mata, makan minum rapat, belanja jasa konsultasi berorientasi layanan, dan perjalanan dinas
Total Belanja		**10.076.339.560**	**10.698.283.560**	**621.944.000**	**6,17**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangunan Daerah TA.2024***

2.4.27. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.384.432.239.656,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.411.889.205.863,29 atau bertambah Rp.27.456.966.207,29 atau 7,14 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.383.416.239.656,00 sesudah perubahan Rp.410.873.205.863,29, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.016.000.000,00 dan sesudah perubahan Rp.1.016.000.000,00, Belanja Tak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp.3.500.000.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.1.500.000.000,00, Belanja Transfer sebelum perubahan Rp.343.265.478.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp.357.763.200.097,29.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.40 berikut ini;

Tabel 2.40
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**32.921.804.816**	**47.134.793.876**	**14.212.989.060**	**43,17**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.470.450	185.190.450	15.720.000	9,28	Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi
1.2	Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.012.442.266	43.704.551.326	13.692.109.060	45.62	Penambahan gaji PPPK (Formasi 2024), penambahan Belanja TunjanganPPh/Tunjangan Khusus PNS, penambahan Belanja Iuran JaminanKesehata

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						n PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
1.3	Kegiatan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.090.000	17.090.000	0	0,00	
1.4	Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	634.272.400	714.317.400	80,045.000	12,62	Penambahan Belanja Bimbingan Teknis (Biaya Kontribusi)
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	720.211.200	795.326.200	75.115.000	10.43	Penambahan belanja surat kabar, penambahan anggaran pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan perjalanan dinas luar daerah
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.688.500	237.688.500	0	0,00	
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.130.630.000	1.480.630.000	350.000.000	30,96	Penambahan pada belanja Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan
2	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**346.761.838.300**	**363.440.422.447,29**	**16.678.584.147**	**4,81**	
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.567.904.300	1.730.749.400	162.845.100	10,39	Penambahan belanja cetak (foto copy) dan belanja makan minum rapat
2.2	Kegiatan dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	711.789.500	799.873.750	88.084.250	12,38	Penambahan anggaran pada belanja bahan komputer dan perjalanan dinas luar daerah
2.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah	1.216.666.500	1.646.599.200	429.932.700	35,34	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah, penambahan anggaran Honorarium

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan belanja sewa Transportasi Udara Tim Pendamping LKPD
2.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	343.265.478.000	359.263.200.097.29	15.997.722	4,66	Penambahan anggaran belanja pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.248.596.540**	**1.313.989.540**	**65.393.000**	**5,24**	
3.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.248.596.540	1.313.989.540	65.393.000	5,24	Penambahan anggaran belanja pada rekening Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, perjanalanan dinas luar daerah, belanja ATK, Belanja kertas dan cover, bahan komputer serta makan dan minum rapat
Total Belanja		**380.932.239.656,00**	**411.889.205.863,29**	**30.956.966.207,29**	**8,13**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Badan Keuangan dan Aset Daerah TA.2024***

2.4.28. Badan Pendapatan Daerah

Alokasi Belanja pada Badan Pendapatan Daerah sebelum Perubahan sebesar Rp.19.457.645.050,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.23.757.645.050,00 atau bertambah Rp.4.300.000,00 atau 22,10 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.18.112.475.050,00 sesudah perubahan Rp.19.833.450.036,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.1.345.170.000,00 dan sesudah perubahan Rp.3.924.195.014,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur TA.2024

NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**16.161.179.050**	**19.896.015.764**	**3.734.836.714**	**23,11**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.779.300	91.502.694	13.723.394	17,64	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.244.464.860	13.999.927.611	755.462.751	5,70	Penambahan anggaran untuk belanja TPP objektif lainnya dan perjalanan dinas
1.3	Kegiatan Adminsitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.581.000	14.512.470	931.470.	6,86	Penyesuaian anggaran honor pengurus barang sesuai SBM
1.4	Kegiatan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.841.000	449.255.375	112.414.375	33,37	Penambahan anggaran untuk
						belanja kontribusi Bimtek TAPD, Bintek Penyusunan Renstra dan Bimtek DPRD
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.608.370	933.315.730	252.707.360	37,13	Penambahan anggaran untuk belanja komponen belanja Listrik, harga koran dan perjalanan dinas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.345.170.000	3.924.195.014	2.579.025.014	191,72	Penambahan anggaran untuk belanja pengadaan PC, Printer , tangga dan video wall
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.954.520	292.526.870	20.572.350	7,56	Penambahan anggaran untuk belanja internet
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.780.000	190.780.000	0	0,00	

NO	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.296.466.000**	**3.861.629.286**	**565.163.286**	**17,14**	Penambahan anggaran untuk belanja perjalanan dinas untuk kegiatan ETPD, kegiatan coaching clinik perkada PDRD, Kegiatan sosialisasi pajak sarang burung walet di 11 Kecamatan, Kegiatan penyerahan reward kepada wajib pajak tahun 2023
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.296.466.000	3.861.629.286	565.163.286	17,14	
Total Belanja		**19.457.645.050**	**23.757.645.050**	**4.300.000.000**	**22,10**	

Sumber : Data Olah DPPA Badan Pendapatan Daerah TA.2024

2.4.29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebelum Perubahan sebesar Rp.11.964.329.798,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.12.656.329.798,00 atau bertambah Rp.692.000.000,00 atau 5,78 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.11.578.732.405,00 sesudah perubahan Rp.12.180.406.778,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.385.597.393,00 dan sesudah perubahan Rp.475.923.020,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2024

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.513.256.548**	**5.593.197.528**	**54.440.980**	**0,99**	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.457.500	290.238.500	20.781.000	7,71	penambahan anggaran ATK, kertas cover, bahan komputer dan perjalanan dinas
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.614.059.305	3.470.455.008	(143.604.297)	**(3,97)**	Pengurangan Anggaran sesuai dengan jumlah pegawai yang ada pada BKPSDM.
1.3	Kegiatan Administrasi Barang	13.817.000	13.817.000	0	0,00	

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
	Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.735.350	270.935.350	41.200.000	17,93	Penambahan anggaran belanja perjalanan dinas dan konstribusi bimtek
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.169.000	674.709.000	101.540.000	17,72	Penambahan anggaran komponen Alat Listrik, belanja peralatan dan bahan kebersihan, belanja cetak Spanduk dan cetak branding motor
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.397.393	321.123.020	67.225.627	29,43	Penambahan anggara untuk 1 unit kendaraan dinas roda 2, belanja modal Mebel, meja kerja dan Perencanan /Design Perluasan Aula Gedung Kantor
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.117.000	235.917.000	(7.200.000)	(2,96)	Pengurangan anggaran 1 orang upah jasa dan tagihan listrik
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.504.000	316.002.650	(25.501.350)	(7,47)	Pengurangan anggaran pemeliharaan kendaraan belanja, belanja pajak kendaraan dinas suku cadang, dan pemeliharaan peralatan kantor
2	**Program Kepegawaian Daerah**	**3.352.975.250**	**3.237.975.170**	**(115.000.080)**	**(3,43)**	
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	820.260.250	986.161.650	165.901.400	20,23	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan penambahan anggaran ATK, kertas cover, bahan komputer, mamin rapat dan perjalanan dinas, dan belanja jasa tenaga administrasi 2 orang
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	934.305.000	713.532.820	(220.772.180)	(23,63)	Pengurangan belanja bahan cetak, alat tulis kantor, makan minum tamu, belanja jasa dan perjalanan dinas.
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	1.224.199.000	1.211.746.200	(12.452.800)	(1,02)	Pengurangan anggaran pada belanja beasiswa

No	Program/ Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
						tugas belajar dan belanja perjalanan dinas
2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	374.211.000	326.534.500	(47.676.500)	(12,74)	Pengurangan anggaran belanja cetak, bahan computer, makan dan minum rapat dan perjalanan dinas.
	Pendidikan Dan Pelatihan					
3	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**3.098.098.000**	**3.825.157.100**	**727.059.100**	**23,47**	
3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.506.459.500	2.240.518.600	734.059.100	48,73	Penambahan anggaran untuk kegiatan magang pendampingan sistem merit, diklat manajemen kepegawaian, bimtek renstra dan belanja perjalanan dinas
3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.591.638.500	1.584.638.500	(7.000.000)	(0,44)	Pengurangan anggaran pada belanja jasa tenaga administrasi 1 orang
Total Belanja		**11.964.329.798**	**12.656.329.798**	**692.000.000**	**5,78**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia TA.2024***

2.4.30. Inspektorat

Alokasi Belanja pada Inspektorat sebelum Perubahan sebesar Rp.13.666.351.300,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp.14.661.391.450,00 atau bertambah Rp.995.040.150,00 atau 7,28 persen. Perubahan rincian Belanja Operasi sebelum perubahan Rp.13.617.554.500,00 sesudah perubahan Rp.14.612.594.650,00, Belanja Modal sebelum perubahan Rp.48.796.800,00 dan sesudah perubahan Rp.48.796.800,00.

Rincian perubahan anggaran program kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Perubahan Anggaran Program / Kegiatan Inspektorat TA.2024

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.227.385.260**	**10.115.925.416**	**888.540.156**	**22,08**	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.853.765	298.595.265	(50.258.491)	(14,41)	Penyesuaian anggaran Anggaran untuk memenuhi

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
						kebutuhan lainnya
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.821.616.751	7.736.155.407	914.538.656	13,41	Anggaran Bertambah dikarenakan adanya kenaikan Gaji dan Kenaikan Jabatan Fungsional
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	981.424.344	973.804.344	(7.620.000)	(0,78)	Penyesuaian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan lainnya
1.4	Administrasi Umum Perangkat daerah	827.887.400	839.767.400	11.880.000	1,43	Penambahan anggaran untuk Honorarium Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan yang sebelumnya tidak dianggarkan
1.5	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	158.433.000	158.433.000	-	-	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.170.000	109.170.000	20.000.000	22,43	Penanbahan anggaran untuk pemeliharaan gedung terhadap perbaikan Plafon
						bocor
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**3.254.148.040**	**3.359.398.040**	**105.250.000**	**2,89**	
2.1	Penyelenggaraan pengawasan internal	2.681.657.140	2.794.407.140	112.750.000	4,20	Penambahan anggaran untuk Honorarium 2 orang Anggota Tim PPSD serta Anggaran beberapa kegiatan yang belum terakomodir
2.2	Penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	572.490.900	564.990.900	(7.500.000)	(1,31)	Penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan lainnya
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**1.184.818.000**	**1.186.068.000**	**1.250.000**	**0,11**	

NO	Program/Kegiatan	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)		Keterangan
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3.1	Pendampingan dan Asistensi	1.184.818.000	1.186.068.000	1.250.000	0,11	Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan
Total Belanja		**13.666.351.300**	**14.661.391.456**	**995.040.150**	**7,28**	

Sumber : Data Olah DPPA ***Inspektorat TA.2024***

2.4.31. Kecamatan

Perubahan Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Kecamatan secara umum disebabkan oleh penyesuaian atas realisasi belanja selama tahun berjalan dalam upaya mengotimalkan realisasi di akhir tahun. Pada perubahan anggaran seluruh kecamatan melakukan penambahan alokasi anggaran yang antara lain pada penyediaan penunjang administrasi perkantoran berupa penyesuaian gaji dan tunjangan, penyediaan makan minum dan rapat-rapat koordinasi, selain itu ada 9 kecamatan melakukan penambahan belanja modal seperti peralatan kantor maupun penyediaan mobiler rumah dinas camat yang merupakan bangunan baru sebagaimana yang terjadi di kecamatan Mangkutana. Perubahan belanja pada kecamatan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.44
Perubahan Komponen Anggaran Belanja Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	APBD			APBD-P			Keterangan	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Bertambah/ Berkurang (Rp.)	%
1	Burau	3.151.365.850	79.600.000	3.230.965.850	3.209.312.850	205.900.000	3.415.212.850	184.247.000,	5,70
2	Wotu	3.025.372.275	36.000.000	3.061.372.275	3.201.422.275	107.250.000	3.308.672.275	247.300.000	8,08
3	Tomoni	4.759.463.425	82.500.000	4.841.963.425	4.808.963.425	103.000.000	4.911.963.425	70.000.000	1,45
4	Mangkutana	2.770.862.800	48.010.000	2.818.872.800	2.984.975.800	80.897.000	3.065.872.800	247.000.000	8,76
5	Tomoni Timur	2.529.977.206	140.900.000	2.670.877.206	2.670.427.206	242.150.000	2.912.577.206	241.700.000	9,05
6	Kalaena	2.704.085.300	54.150.000	2.758.235.300	2.749.235.300	167.000.000	2.916.235.300	158.000.000	5,73
7	Angkona	2.711.483.900	100.700.000	2.812.183.900	2.947.483.900	102.200.000	3.049.683.900	237.500.000	8,45
8	Malili	4.059.166.550	142.830.000	4.201.996.550	4.290.369.950	154.830.000	4.445.199.950	243.203.400	5,79
9	Wasuponda	2.749.336.400	25.000.000	2.774.336.400	2.855.036.400	122.500.000	2.977.536.400	203.200.000	7,32
10	Towuti	3.592.518.600	270.450.000	3.862.968.600	3.832.540.600	262.200.000	4.094.740.600	231.772.000	6,00
11	Nuha	4.021.190.250	76.000.000	4.097.190.250	4.021.190.250	76.000.000	4.097.190.250	0,00	0,00

Sumber : Penjabaran APBD (data olah) Tahun Anggaran 2024

2.4.32. Puskesmas

Alokasi belanja pada puskesmas dipengaruhi oleh perubahan dana kapitalis dan non kapitasi pada masing-masing puskesmas. Perubahan alokasi belanja operasi dan belanja modal pada puskesmas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.45
Perubahan Rincian Anggaran Belanja Puskesmas
Se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024

NO	Perangkat Daerah	APBD			APBD-P			Keterangan	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Bertambah/ Berkurang	%
1	Puskesmas Burau	3.819.190.386	122.900.000	3.942.090.386	3.798.518.486	426.230.000	4.224.748.486	282.658.100	7,17
2	Puskesmas Wotu	4.436.473.002	326.600.000	4.763.073.002	4.531.904.993	457.638.009	4.989.543.002	226.470.000	4,75
3	Puskesmas Mangkutana	3.770.162.386	248.900.000	4.019.062.386	4.048.280.523	361.600.000	4.409.880.523	390.818.137	9,72
4	Puskesmas Tomoni	3.683.841.386	235.000.000	3.918.841.386	3.986.139.936	292.375.000	4.278.514.936	359.673.550	9,18
5	Puskesmas Tomoni Timur	2.800.406.586	76.200.000	2.876.606.586	2.857.686.586	89.908.800	2.947.595.386	70.988.800	2,47
6	Puskesmas Kalaena	2.985.020.986	182.800.000	3.167.820.986	2.982.689.636	231.990.000	3.214.679.636	46.858.650	1,48
7	Puskesmas Angkona	3.632.394.686	218.200.000	3.850.594.686	3.950.010.109	297.720.000	4.247.730.109	397.135.423	10,31
8	Puskesmas Lakawali	2.508.183.386,	314.250.000	2.822.433.386	2.834.204.886	459.800.000	3.294.004.886	471.571.500	16,71
9	Puskesmas Parumpanai	1.990.460.386	155.686.000	2.146.146.386	2.007.952.036	210.261.000	2.218.213.036	72.066.650	3,36
10	Puskesmas Malili	4.618.606.452	350.000.000	4.968.606.452	5.432.310.519	670.800.000	6.103.110.519	1.134.504.067	22,83
11	Puskesmas Lampia	2.354.200.536	141.800.000	2.496.000.536	2.527.156.486	231.510.000	2.758.666.486	262.665.950	10,52
12	Puskesmas Wasuponda	3.664.176.386	153.000.000	3.817.176.386	3.616.626.386	286.550.000	3.903.176.386	86.000.000	2,25
13	Puskesmas Nuha	2.963.023.412	135.000.000	3.098.023.412	2.992.774.862	226.500.000	3.219.274.862	121.251.450	3,91
14	Puskesmas Wawondula	3.651.756.076	140.000.000	3.791.756.076	3.744.465.376	182.300.000	3.926.765.376	135.009.300	3,56
15	Puskesmas Timampu	2.162.292.386	117.850.000	2.280.142.386	2.179.499.886	294.350.000	2.473.849.886	193.707.500	8,50
16	Puskesmas Mahalona	2.457.160.286	156.650.000	2.613.810.286	2.721.223.926	257.690.000	2.978.913.926	365.103.640,	13,97
17	Puskesmas Bantilang	2.784.249.586	60.000.000	2.844.249.586	2.511.957.586	82.650.000	2.594.607.586	(249.642.000)	(8,78)
18	Puskesmas Bonepute	2.603.368.386	291.400.000	2.894.768.386	2.833.768.886	375.380.000	3.209.148.886	314.380.500	10,86

Sumber : Data Olah DPPA Puskemas TA.2024

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom yang didasarkan pada prinsip otonomi. Sejak berlakunya kebijakan ini, pemerintah kabupaten telah melaksanakan berbagai program pembangunan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah program yang belum sepenuhnya mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Salah satu alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah dengan menetapkan Indikator kinerja setiap tahun perencanaan. Pencapaian indikator makro pembangunan mencerminkan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha mencapai 30.392 miliar rupiah. Sementara Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010 meningkat dari tahun sebelumnya 17,928 miliar menjadi 18.515 miliar rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 44,00 persen menurun dibandingkan Tahun 2023 yang mencapai 50,30 persen. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan signifikan, dari 22,25 persen pada tahun 2023 menjadi 25,90 persen pada tahun 2024. Laju pertumbuhan PDRB 2024 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami percepatan menjadi 4,40 persen, nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur sebesar 3,27 persen. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya 16,74 persen menjadi 1,67 persen dan hal tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur, karena dominasi sektor tambang pada ekonomi Luwu Timur yang sangat besar. Hal sebaliknya terjadi pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan dari 1,19 persen tahun 2023 menjadi 3,25 persen di Tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja positif pada sektor

perekonomian daerah dalam tahun berjalan dalam upaya meningkatkan peran kontribusi PDRB pada sektor ekonomi non tambang.

Capaian makro daerah untuk angka kemiskinan menunjukkan adanya penurunan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur Maret 2024 sekitar 20,7 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan sekitar 0,87 ribu jiwa jika dibandingkan kondisi Maret 2023. Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 6,55 persen juga turun, yaitu sebesar 0,38 persen dari Maret 2023. Selanjutnya dijelaskan bahwa besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan penduduk Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur yaitu sebesar Rp460.356 per kapita/bulan dengan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,06 persen. Hal tersebut menunjukkan perubahan dalam biaya hidup masyarakat.

Dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berimplikasi positif pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana pada Agustus 2024 sebesar 4,58 persen, turun sebesar 0,84 persen poin dibanding Agustus 2023 sebesar 0,94 poin atau dengan capaian 5,42 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,58 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 5 orang penganggur.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 154.988 orang, naik sebanyak 6.209 orang dari Agustus 2023. Penduduk usia kerja di Luwu Timur pada Agustus 2024 sebanyak 231.443 orang, naik sebanyak 4.308 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 162.431 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 69.012 orang. Komposisi angkatan kerja penduduk Luwu Timur pada Agustus 2024 terdiri dari 154.988 orang penduduk bekerja dan 7.443 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 5.131 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 6.209 orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 1.078 orang. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, kategori Pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 42,14 persen, kategori Manufaktur sebesar 18,78 persen dan kategori Jasa sebesar 39,08 persen.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dari sisi

Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan. Capaian IPM tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2024 capaian IPM Kabupaten Luwu Timur sebesar 76,44 persen atau kategori tinggi, angka ini tumbuh 0,60 poin dibanding tahun 2023 sebesar 75,84. Pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur, ditopang oleh Usia Harapan Hidup (UHH) yang meningkat menjadi 74,55 tahun atau naik 0,23 poin atau 0,29 persen dari capaian 2023 yaitu 74,32, Rata-rata lama sekolah yang juga naik 0.01 poin menjadi 8,94 tahun pada tahun 2024 atau 0,11 persen dari capaian 2023 yaitu 8,93 tahun. Harapan Lama sekolah (HLS) juga tumbuh positif menjadi 13,18 Tahun 2024 atau naik 0.17 poin atau 1,3 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 13,01 tahun**.** Pengeluaran Riil perkapita meningkat Rp.416.000,00 menjadi Rp13,867,000,00 atau naik 3,9 persen dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar Rp13,451,000,00. Peningkatan IPM didukung oleh seluruh indikator pembentuknya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 menunjukkan tren yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, dimana capaian nilai gini ratio Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 sebesar 0,392 atau turun sebesar 0,074 poin dari tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 belum dapat dirilis sampai kondisi pelaporan.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Capaian dibandingkan tahun sebelumnya
				Target RKPD	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	9,66	2.98 - 3,71	3,27*	100	Melambat dibandingkan tahun sebelumnya
2	Angka Kemiskinan	Persen	6,93	6,24	6,55	95,03	Lebih baik 0,38 poin
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,42	2.80	4,58	36,42	Lebih baik 0,84 poin
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,84	74,40	76,44	102,74	Meningkat 0,6 poin (Kategori Tinggi)
5	Pendapatan Perkapita						
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Juta Rupiah	99,49	72,55	93,97*	129	Melebihi target
	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Juta Rupiah	58,10	58,10	57,24*	98,52	Tinggi
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,392	0,247	0,392*	43,06	Angka 2023, 2024 belum rilis

*Sumber : *BPS setelah di olah 2024*

Disamping itu capaian dalam penyelenggaraan Pemerintahan tercermin pula dari beberapa penghargaan yang diterima dalam bentuk prestasi, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional antara lain :

1. Opini BPK terhadap Kinerja Keuangan Tahun 2023 dengan Predikat WTP oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.
2. Penghargaan ADIPURA Tahun 2024 Kategori Kota Kecil dan Penghargaan KALPATARU, Penghargaan Proklim untuk 13 desa di Luwu Timur dan Penghargaan Adiwiyata Nasional untuk 7 Sekolah Dasar dan Menengah di Luwu Timur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
3. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya Tahun 2024, Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya Tahun 2024 dan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori : Madya Tahun 2024 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI
4. Penghargaan Anugrah Perkebunan Indonesia 2024 oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia
5. Penghargaan Best Disaster & Crisis Management 2024 (Terdepan Dalam Menangani Bencana) oleh CNN Indonesian Award 2024
6. Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tinggi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dengan Nilai 86,04 (Zona Hijau) oleh Ombudsman
7. Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Kategori Utama Dalam Pencapaian UHC Word Tahun 2024 dari Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manuasia dan Kebudayaan Republik Indonesia
8. Kabupaten Inovatif (Penilaian IGA Tahun 2024) dari Kementerian Dalam Negeri.
9. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024, dengan predikat PEDULI (98,13) dari Kemenkumham RI diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

3.2 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.2.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Urusan pelayanan dasar terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024, untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pelaksanaan Wajib Urusan Dasar										
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
1	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**									
	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Dan Prasarana Di Setiap Jenjang Pendidikan	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD**	**100**	**67,04**	**%**	**67,0**	**Bila dilihat dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 94,54%,mengalami peningkatan ditahun 2024 untuk angka partisipasi sekolah sebesar 98,72%, penempatan target pada indikator program mengikuti renstra 2021-2025 tetapi pada saat evaluasi SAKIP tahun**	**disarankan agar mengikuti target realisasi tahun sebelumnya dikarenakan dianggap relevan dalam pencapaian kinerja.**	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								2024 target ini dianggap tidak relevan dalam menghitung pencapaian kinerja.		
			Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	99	%	**99**			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertam	100	87,5	%	**87,5**	Bila dilihat dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,73%,mengalami peningkatan ditahun 2024 untuk angka partisipasi sekolah sebesar 87,75%, penempatan target pada indikator program mengikuti renstra 2021-2025 tetapi pada saat evaluasi SAKIP tahun 2024 target ini dianggap tidak relevan dalam menghitung pencapaian kinerja.	sehingga disarankan agar mengikuti target realisasi tahun sebelumnya dikarenakan dianggap relevan dalam pencapaian kinerja.	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100	100	%	**100**			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase SD/MI terakreditasi minimal B**	**88,64**	**76**	**%**	**85**	**Tidak mencapai target karena dari 175 Satuan Pendidikan SD masih ada**	**Untuk meningkatkan Akreditasi pada**	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								42 SD yang terakreditasi dibawah B sementara Akreditasi dilakukan 5 tahun sekali	**satuan pendidikan SD hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melengkapi sarana prasarana penunjang sehingga pada penilaian akreditasi berikutnya dapat memperoleh nilai yang lebih baik**	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5	5	Ruang	**100**			
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	Ruang	**100**			
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3	3	Ruang	**100**			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	19	19	Unit	**100**			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Ruang	**100**			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Ruang	**100**			
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	52	52	Paket	**100**			
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	13	13	Paket	**100**			
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12	12	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	173	173	pesert a Didik	**100**			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	429	429	Org	**100**			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	430	430	Org	**100**			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	173	173	Satuan Pendid ikan	**100**			
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	173	173	Satuan Pendid ikan	**100**			
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	7	7	Ruang	**100**			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	Dok	**100**			
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	6.091	6.091	. Paket	**100**			
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34	34	Ruang	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	13	Ruang	**100**			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Presentase SMP/MTs terakreditasi minimal B**	**88,4**	**84,31**	%	**95,4**	**Tidak mencapai target karena dari 51 Satuan Pendidikan SMP masih ada 8 yang terakreditasi dibawah B sementara Akreditasi dilakukan 5 tahun sekali**	**Untuk meningkatkan Akreditasi pada satuan pendidikan SMP hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melengkapi sarana prasarana penunjang sehingga pada penilaian akreditasi berikutnya dapat memperoleh nilai yang lebih baik**	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	1	Ruang	**100**			
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	3	Ruang	**100**			
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1	1	Ruang	**100**			
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	5	Ruang	**100**			
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1	1	Ruang	**100**			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	12	Unit	**100**			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	7	Ruang	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kelas Sekolah								
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit	**100**			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	27	27	Paket	**100**			
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	1	Paket	**100**			
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	1	Unit	**100**			
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50	50	Pesert a Didik	**100**			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	192	202	Org	**105,5**			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	860	860	Org	**100**			
		Pembinaan Kelembagaan	Jumlah Sekolah Menengah	50	50		**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dan Manajemen Sekolah	Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			Satuan Pendidikan				
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54	54	Satuan Pendidikan	**100**			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	Dok	**100**			
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	4	Ruang	**100**			
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4.892	4.892	. Paket	**100**			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	2	Ruang	**100**			
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase TK terakreditasi minimal B**	**71,42**	**67,7**	%	**94,8**	**Tidak mencapai target karena dari 192 PAUD/TK masih ada 62 PAUD/TK yang terakreditasi dibawah B sementara Akreditasi dilakukan 5 tahun sekali**	**Untuk meningkatkan Akreditasi pada satuan pendidikan PAUD/TK hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melengkapi sarana prasarana penunjang sehingga pada penilaian akreditasi berikutnya dapat memperoleh nilai yang lebih baik**	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8	8	Unit	**100**			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7	7	Paket	**100**			
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	9.939	9.939	. Paket	**100**			
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	18	18	Paket	**100**			
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	19	19	Org	**100**			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.200	1.200	. Org	**100**			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	189	189	Satuan Pendidikan	**100**			
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	190	190	Satuan Pendidikan	**100**			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	2	Ruang	**100**			
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	4	Ruang	**100**			
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	13	13	Unit	**100**			
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase kelulusan warga belajar paket A, B, dan C Presentase PKBM terakreditasi minimal B**	**96,6**	**96,6**	%	**100**			
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10	10	Satuan Pendidikan	**100**			
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	1	Dok	**100**			
	Menerapkan Perencanaan Urusan Pendidikan Berbasis Kinerja	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**97,02**	**%**	**97,0**			
	Melakukan Pendampingan Serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Urusan Pendidikan	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	7	7	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja	10	10	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perangkat Daerah	Perangkat Daerah							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**99,22**	**%**	**99,2**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.593	2.552,75	Org/bulan	**98,4**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	Dok	**100**			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dok Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	3	Dok	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	426	426	Org	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	105	105	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	11	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bangunan Kantor								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73	73	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26	26	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	75	75	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.132	4.132	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.200	1.200	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	42	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250	3.250	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	86	86	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62	62	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	**Dinas Kesehatan**									
	Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat Serta Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**93,2**	**%**	**93,2**	**Tidak mencapai target karena dari 12 indikator SPM Kesehatan yang dilaksanakan masih ada 6 indikator yang belum mencapai target**	**Melakukankerja sama dengan lintas sektor (DPMD dan desa) terutama dalam penyediaan bahan medis habis pakai seperti strip kolesterol**	
	Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten kota**	**80**	**80**	**%**	**100**			
	Peningkatan Upaya Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana / Kedaruratan Di Kabupaten Luwu Timur	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:0	2	2	Unit	**100**			
	Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah bangunan baru rumah dinas medis dan paramedis	1	1	Unit	**100**			
	Penyediaan Dan Peningkatan Mutu Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Bangunan Baru	7	7	Unit	**100**			
	Peningkatan Promosi Kesehatan, Penyehatan Lingkungan, Perbaikan Status Gizi Masyarakat Serta	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4	4	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak									
	Peningkatan Kapabillitas Kelembagaan, Koordinasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1	1	Unit	**100**			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7	7	Unit	**100**			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat - Alat Kesehatan / Penunjang Rumah Sakit	18	18	Unit	**100**			
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	480	422	Unit	**87,9**	Tidak semua alat puskesmas yang di rencanakan untuk di kalibrasi karena terkendala pada pembagian jadwal dari BPFK	; Masih ada 7 Puskesmas yg blm dikalibrasi, anggaran yg tersedia di 2025 fokus di 7 PKM	
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	18	18	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		ke Fasilitas Kesehatan								
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	%	**100**			
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	79	%	**79,0**	Kunjungan penderita hipertensi belum sesuai standar, untuk pengukuran tekanan darah pasien normal tiga kali dalam setahun	Menyiapkan obat hipertensi sesuaijumlah penderita di wilayah kerja puskesmas	
			Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	98	%	**98,0**	BMHP strip kolesterol masih kurang danbtidak sesuai dengan sasaran	Berkordinasi Denga Dinas PMD agar Penyediaan BMHP Strip Kolesterol Lansia dapat di anggarakan melaui Dana Desa	
			Persentase Org dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	%	**100**			
			Persentase Org dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar	100	100	%	**100**			
			Persentase Org usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	61	%	**61,0**	BMHP untuk skrining tidak sesuai jumlah sasaran (GDS) sebagai	Memaksimalkan penginputan capaian skrining	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								syarat skrining Belum maksimalnya kolaborasi antara puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD (tempat praktek Mandiri Dokter)	pada Layanan dan jejaring Puskesmas (Rumah sakit, klinik swasta) Kesesuaian BMHP dengan jumlah sasaran Kerjasama dengan desa dalam penyediaan BMHP strip kolesterol	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	%	**100**			
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	94	%	**94,0**	Balita yang sudah lengkap imunisasinya sudah tidak rutin ke posyandu setiap bulan Ada beberapa warga yang keluar daerah ketika jadwal posyandu	Meningkatkan peran lintas sektor Seperti TP-PKK, Babinsa, Kerua RT/RW, Toma Toga untuk mennngerakkan Ibu-ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu setiap bulan. 2) Maelakukan sweeping kunjungan rumah bagi balita yang tidak datang ke Posyandu	
			Persentase bayi baru lahir yang	100	98	%	**98,0**	Ada kematian bayi	Meningkatkan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar					sebelum usia 28 hari dan Warga lutim jika sudah melahirkan ada yang pulang ke rumah orang tuanya sehingga sulit dipantau kesehatan bayinya	Pelayanan Baru lahir dengan pendekatan MTBM sebagai salah satu upaya untuk menurrunkan anagka kematian neonatal, Meiningkatkan pemantauan ibu pasaca persalina termasuk bayinya, baik dikunjungi langsung kerumahnya atau melalui media WA atau telfon jika ibu keluar daerah	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100	100	%	**100**			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	97	%	**97,0**	Banyak kehamilan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah atau terlalu dekat jarak kehamilan dengan kehamilan sebelumnya sehingga ibu malu untuk memeriksakan kehamilannya lebih awal (trisemester pertama) '- Ada beberapa	1) Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan terutama pada usia anak, dengan aktif melakukan Sosiallisasi Pendewasaan usia Perkawiana, Ksehatan Reproduksi baik di	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								puskesmas yang tenaga dokternya belum terlatih USG (yang pernah terlatih USG tapi di mutasi atau pergi sekolah)	Sekolah maupun di Posyandu Remaja. 2) Pelatihan USG Bagi Dokter Puskesmas yang belum Terlatih karena USG pada Ibu hamil merupakan syarat pelayana Ibu hamil sesuai standar dengan standar kuantital 6 kali kunjungan selama kehamilan satu kali pemeriksaan pada trisemester pertama, dua kali pada trisemester kedua dan tiga kali pada trisemester ke tiga	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.258	4.125	Org	**96,9**	Banyak kehamilan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah atau terlalu dekat jarak kehamilan dengan kehamilan sebelumnya sehingga ibu malu untuk memeriksakan kehamilannya lebih awal (trisemester pertama)	1) Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan terutama pada usia anak, dengan aktif melakukan Sosiallisasi Pendewasaan usia Perkawiana, Ksehatan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								'- Ada beberapa puskesmas yang tenaga dokternya belum terlatih USG (yang pernah terlatih USG tapi di mutasi atau pergi sekolah)	Reproduksi baik di Sekolah maupun di Posyandu Remaja. 2) Pelatihan USG Bagi Dokter Puskesmas yang belum Terlatih karena USG pada Ibu hamil merupakan syarat pelayana Ibu hamil sesuai standar dengan standar kuantital 6 kali kunjungan selama kehamilan satu kali pemeriksaan pada trisemester pertama, dua kali pada trisemester kedua dan tiga kali pada trisemester ke tiga	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.258	4.251	Org	**99,8**	Ada persalinan yang tiba - tiba diluar dari tapsiran persalinan . Ada persalinan pada anak remaja yang kehamilannya dirahasikan sehingga melahirkan sendiri dirumah	1) Meningkatkan Edukasi kepada Ibu dan keluarganya tentang tanda-tanda persalinan, dan pentingnya persalinanan di fasilitas kesehatan. 2) Setiap Ibu hamil	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									ada bidan pendamping yang bertanggung jawab mulai Ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.942	4.169	Org	**84,4**	Ada kematian bayi sebelum usia 28 hari dan Warga lutim jika sudah melahirkan ada yang pulang ke rumah Org tuanya sehingga sulit dipantau kesehatan bayinya		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.759	23.240	Org	**93,9**	Balita yang sudah lengkap imunisasinya sudah tidak rutin ke posyandu setiap bulan Ada beberapa warga yang keluar daerah ketika jadwal posyandu	Meningkatkan peran lintas sektor Seperti TP-PKK, Babinsa, Kerua RT/RW, Toma Toga untuk menggerakkan Ibu-ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu setiap bulan. 2) Maelakukan sweeping kunjungan rumah bagi balita yang tidak datang ke Posyandu	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	13.635	13.635	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pendidikan Dasar	Kesehatan Sesuai Standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181.588	110.919	Org	**61,1**	BMHP untuk skrining tidak sesuai jumlah sasaran (GDS) sebagai syarat skrining, Belum maksimalnya kolaborasi antara puskesmas dengan klinik pratama dan TPMD (tempat praktek Mandiri Dokter)	1. Memaksimalkan penginputan capaian skrining pada Layanan dan jejaring Puskesmas (Rumah sakit, klinik swasta) 2. Kesesuaian BMHP dengan jumlah sasaran 3. Kerjasama dengan desa dalam penyediaan BMHP strip kolesterol	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20.191	19.658	Org	**97,4**	BMHP strip kolesterol masih kurang danbtidak sesuai dengan sasaran		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.450	9.794	Org	**78,7**	Kunjungan penderita hipertensi belum sesuai standar, untuk pengukuran tekanan darah pasien normal tiga kali dalam setahun		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.871	3.871	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Org yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Org dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	557	557	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah kegiatan pendampingan	5.281	5.281	Kali	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	pelacakan kasus TB pada kelompok berisiko							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.933	5.933	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4	4	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3	3	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18	18	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	48	48	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20	20	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18	18	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52	52	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3	3	Org	**100**			
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pelayanan	20	20	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	60	57	Dok	**95,0**	Adanya pengurangan jumlah kepesertaan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 setelah dilakukan rekon data antara Dinas Kesehatan, disdukcapil dan BPJS Kesehatan serta ada kompensasi kelebihan bayar oleh BPJS Kesehatan selama 3 bulan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 mandiri	tetap menyiapkan laporannya meskipun ada kompensasi bayar sehingga tetap tersedia dokumen pelaporan	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11	11	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	18	18	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	18	Unit	**100**			
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	Unit	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Org yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58	59	Org	**101,7**			
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan ("%) %**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengelolaan Sistem	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Informasi Kesehatan	Sistem Informasi Kesehatan 1 Dok							
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan (''%) %**	**125**	**125**	**%**	**100**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2	2	Unit	**100**			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten**	**82,41**	**82,41**	**%**	**100**			
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan (''%)**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	756	929	Dok	**122,88**			
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase rata - rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan (''%)**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan dan	Jumlah Dok Hasil Perencanaan dan	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	2	Dok	**100**			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SDMK yang ditingkatkan kompetensinya (''%)**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan/ kompetensi tenaga kesehatan	76	76	kali	**100**			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase fasilitas pelayanan farmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (''%)**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat pengawasan	50	50	Lokasi	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (''%)**	**42**	**42**	**%**	**100**			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120	120	Dok	**100**			
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan**	**42**	**42**	**%**	**100**			
		Pemeriksaan Post Market pada Produk	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman	120	120	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan UKBM**	**127**	**127**	**Desa/ kelurahan**	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22	22	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah								
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	Kali	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap kinerja yang disusun	10	10	Dok	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1158	1.159	Org/bulan	**100,1**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap keuangan persemester	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Karya Tulis Ilmiah	43	43	karya tulis ilmiah	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**98,32**	**%**	**98,3**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	96	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	15	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	510	450	Kali	**88,2**	Kegiatan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh TPAD pada bulan oktober karena adanya		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								keterlambatan dana transfer dari Provinsi Sulawesi Selatan		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	5	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel	jumlah mebel	23	23	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43	43	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.444	4.444	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang	**Persentase Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23	23	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	47	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			
2	**RSUD I LAGALIGO**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Cakupan pelayanan kesehatan rujukan**	**24,5**	**30**	**%**	**122,4**			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan sarana,prasarana dan alat kesehatan/ alat penunjang medik rumah sakit**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	198	198	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	457	440	Unit	**96,3**	Ada pemeliharaan alkes (Alkes X-Ray mobile) tidak	Percepatan pelaksanaan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					terlaksana karena alat dibutuhkan tidak tersedia (kosong)	kegiatan dan melakukan MoU pemeliharaan alkes	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pasien rujukan yag dilayani**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7	7	Dok	**100**			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Tersedianya Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pelatihan/Bimtek**	**61,5**	**61,5**	**%**	**100**			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentasi tenaga kesehatan mengikuti pelatihan/ bimtek**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	381	381	Org	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**83,33**	**%**	**83,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		KABUPATEN/KOTA								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	8	8	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	355	353	Org/bulan	**99,4**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	7	Lap	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**75**	**75**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	Dok	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa	Jumlah Lap Penyediaan Jasa	2	2	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	30	Unit	**100**			
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD yang berjalan dengan baik**	**13,5**	**9,7**	**%**	**71,9**	Penurunan kunjungan pasien sebesar 3,8% Kunjungan pasien ada penurunan disebabkan : 1. Adanya pelayanan yang tidak berjalan karena dokter penanggung jawan tida ada (Spesialis Rehab Medik),2. Adanya pengetattan pemberlakuan aturan pelayanan rujukan oleh BPJS. 3. Jumlah spesialis tertentu kurang sehingga kadang pelayanan ditutup	1. Melakukan komunikasi & koordinasi dengan bagian terkait untuk MoU 2. Melakukan sosialisasi peraturan BPJS dan petugas meningkatkan komunikasi efektif ke pasien 3. Menambah jumlah dokter spesialis tertentu	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3	**Puskesmas Burau**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**95,35**	**%**	**95,35**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**	**100**	**95,35**	**%**	**95,35**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397	397	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	379	279	Org	**73,6**	1. Proyeksi jumlah ibu bersalin yang ditentukan terlalu tinggi sehingga tidak dapat mencapai target 100%. Untuk	agar kedepannya lebih teliti lagi dalam menentukan target kinerja tahun berikutnya.	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								mengatasi permasalah tersebut 2. Terdapat kegiatan Transport Calon Pendonor Darah untuk Mendukung P4K dari dan/ke UTD yang tidak terealisasi		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kader kesehatan remaja terlatih	0	0	Org	**0,0**			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.094	2.091	Org	**99,9**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50	50	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	412	412	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal	1	0	Lap	**100**	Tidak ada terjadi kasus		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30	30	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
4	**Puskesmas Malili**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**94**	**%**	**94,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%) ("%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan**	**100**	**94**	**%**	**94,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486	486	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	464	342	Org	**73,7**	Tidak melakukan penyesuaian target	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian ibu bersalin tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.259	6.076	Org	**83,7**	Melakukan perbaikan untuk menyinkronkan dengan data target dan realisasi	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 432 Org	432	432	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	540	469	Org	**86,9**	berkurang nya kasus		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pelayanan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Lap	2	2	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	75	Org	**93,8**	Jumlah pasien penderita Tb sudah yang ada yang sembun sehingga sudah tidak ada pengawasan	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian sebelumnya	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15	15	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**	.		
5	**Puskesmas Lampia**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**89**	%	**89,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%)**	**100**	**89**	**%**	**89,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156	146	Org	**93,6**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149	139	Org	**93,3**	Tidak melakukan penyesuaian target.Ada persalinan yang menyebrang ketahun berikutnya dan ada ibu hamil yang pulang kekampung untuk melahirkan	melakukan pendekatan dengan ibu hamil untuk melaporkan persalinannya setelah melahirkan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	884	884	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	15	15	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tuberkulosis	Pelayanan Sesuai Standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	1	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan PuskesmaS	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15	11	Org	**73,3**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	1	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6	**Puskesmas Wasuponda**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**95**	%	**95,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**	**100**	**95**	**%**	**95**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	268	403	Org	**150,4**	Jumlah pasien ibu hamil lebih tinggi dari target karena banyak pasien ibu hamil dari luar daerah	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	221	48	Org	**21,7**	Pemeriksaan Ibu Hamil K1 dilakukan di Puskesmas sedangkan Kasus KIV	dilakukan pendataan ulang pada ibu yang	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								Banyak yang pindah tempat tinggal keluar kabupaten	melaksanakan persalinan di luar daerah yang sebelumnya terdata di wilayah kerja Puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kader kesehatan remaja terlatih	280	355	Org	**126,8**	Kesalahan pada penginputan target		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah kegiatan pendampingan pelacakan kasus TB pada kelompok berisiko	231	272	Kali	**117,7**	Kesalahan pada penginputan target		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	301	48	Org	**15,9**	Pasien Merasa Malu untuk dilakukan Pemeriksaan HIV	Malakukan Sosialisasi bahaya dari penyakit tersebut ketika tidak ditangani dengan cepat	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	2	Dok	**200,0**	penyediaan anggaran yg terlalu besar sedangkan kasus pemberian PMT berkurang	Melakukan perbaikan untuk menyinkronkan dengan data target dan realisasi	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2	2	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2	2	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	2	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4	1	Org	**25,0**	Kasus HIV Menurun		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2	2	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3	3	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Desa/ Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7	**Puskesmas Nuha**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**0**	%	**0,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**	**100**	**0**	**%**	**0,0**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa	474	474	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	437	414	Org	**94,7**	Tidak Melakukan perbaikan target	Untuk melakukan penyesuaian target sesuai capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar	471	456	Org	**96,8**	Tidak terlaksananya	Untuk	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					sasaran posyandu remaja dikarenakan jumlah sasaran tidak sesuai perencanaan	menyesuaikan target kinerja sesuai capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	2	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	2	Dok	**200,0**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2	2	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	0	Dok	**0,0**	Belum terjalinnya kerja sama dengan TPMD diwilayah setempat		
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	0	Lap	**100**	Tidak ada terjadi kasus kipi dalam artian bahwa petugas melakukan tidakan sesuai SOP sehingga tidak terjadi KIPI		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35	35	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan	5	5	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		HIV (ODHIV)	kesehatan sesuai standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**	Akibat keterlambatan kegiatan PMT berpengaruh pada jumlah kunjungan ibu hamil, balita T dan berat badan kurang yang dipantau		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Desa/ Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	1	Dok	**50**	Kegiatan Kunjungan rumah kader ILP yang hanya terlaksana 3 desa dari 5 jumlah desa, dikarenakan keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan	Untuk mencermati proyeksi target pada saat perubahan anggaran agar capaian kinerja dapat di maksimalkan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
8	**Puskesmas Wawondula**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**89,42**	%	**89,42**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa**	**100**	**89,42**	**%**	**89,42**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	303	294	Org	**97,0**	Pindah domisili/alamat dimana awalnya ibu hamil tercatat sebagai sasaran di PKM Wawondula namun karena ibu hamil pindah alamat ke luar wilayah kerja PKM Wawondula	Untuk menyesuaikan target kinerja sesuai capaian tahun sebelumnya	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								sehingga tidak bisa dilaporkan sebagai realisasi kinerja		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294	293	Org	**99,7**	Pindah domisili/alamat dimana awalnya ibu hamil tercatat sebagai target di PKM Wawondula namun karena ibu hamil pindah alamat ke luar wilayah kerja PKM Wawondula sehingga tidak diketahui dimana ibu hamil tsb melakukan persalinan (di faskes atau non faskes)	Untuk menyesuaikan target kinerja sesuai capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.365	2.528	Org	**106,9**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	284	284	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	382	382	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pelayanan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	0	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40	40	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4	4	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
9	**Puskesmas Timampu**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**86,3**	%	**86,3**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan**	**100**	**86,3**	**%**	**86,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167	147	Org	**88,0**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153	134	Org	**87,6**	Tidak melakukan perbaikan proyeksi target	dengan menurunkan angka proyeksi sesuai situasi dan kondisi wilayah kerja atau tidak menggunakan data proyeksi melainkan data real	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	971	971	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	126	117	Org	**92,9**	Tidak ada kasus mangkir TB	Meningkatkan skrining TB terutama pada populasi beresiko dan meningkatkan edukasi tentang TB	
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Org Terduga Menderita HIV	1	0	Org	**100**	Tidak ada kasus		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5	5	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	8	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8	8	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10	10	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	3	3	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18	17	Org	**94,4**	Adanya pasien yang pindah tempat saat pengobatan..sehingga perlunya meminta data kontak pasien dan keluarga	Untuk mencermati proyeksi target pada saat perubahan anggaran agar capaian kinerja dapat di maksimalkan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7	7	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 3 Dok	3	3	Dok	**100**			
		PROGRAM	**Persentase desa/ kelurahan siaga**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**aktif**							
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan UKBM**	**3**	**3**	kelurahan	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			
10	**Puskesmas Mahalona**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Cakupan pelayanan kesehatan rujukan**	**100**	**99,6**	%	**99,6**			
			Persentase capaian SPM bidang Kesehatan 100 Persen	100	99,6	%	**99,6**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%)**	**100**	**99,6**	**%**	**99,6**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%100 %							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	119	110	Org	**92,4**	Tidak melakukan penyesuaian target. Ada target K4 yang menyebrang tahun	Untuk mencermati proyeksi target pada saat perubahan anggaran agar capaian kinerja dapat di maksimalkan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149	129	Org	**86,6**	Jumlah Ibu hamil selama tahun 2024 adalah 149, sementara yang bersalin sampai desember 2024 129 orang karena ibu yang terdata hamil di 2024 akan tercatat di 2025	Untuk mencermati proyeksi target pada saat perubahan anggaran agar capaian kinerja dapat di maksimalkan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	993	993	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org terduga tuberculosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	113	113	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Org Terduga Menderita HIV	3	3	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20	20	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13	15	Org	**115,4**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM**	**128**	**128**	Desa/	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**(Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**			Kel				
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			
11	**Puskesmas Bantilang**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**0**	%	**0,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%) ("%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ("%) Persentase ODGJ**	**100**	**0**	**%**	**0,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	231	138	Org	**59,7**	jumlah proyeksi target terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah realisasi ibu hamil pada tahun 2024,	menetapkan target indikator tahun selanjutnya sesuai dengan proyeksi dari capaian jumlah ibu hamil tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95	137	Org	**144,2**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	844	3.223	Org	**381,9**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	59	172	Org	**291,5**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	86	182	Org	**211,6**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan	Jumlah Dok Operasional Pelayanan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Puskesmas	Puskesmas							
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5	0	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15	15	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3	2	Org	**133**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Desa/ Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
12	**Puskesmas Bonepute**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**96,6**	%	**96,6**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiw**	**100**	**96,6**	**%**	**96,6**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250	250	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	725	625	Org	**86,2**	pada saat dilakukan kegiatan siswa yang	akan di lakukan sweping bagi siswa	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pendidikan Dasar	Kesehatan Sesuai Standar					menjadi sasaran tidak hadir di sekolah, dan beberapa siswa juga tidak di izikan orang tuanya untuk di lakukan vaksinasi	yang berhalangan, dan akan di giatkan promosi kesehatan bagi orang tua siswa.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80	80	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200	200	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	12	12	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	12	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30	30	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV)	10	10	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan) 9 128 Desa/Kel**	**128**	**128**	Desa/ Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah bimbingan teknis dan supervisi UKBM beserta kadernya	12	12	Kali	**100**			
13	**Puskesmas Wotu**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**94,7**	%	**94,7**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan**	**100**	**94,72**	**%**	**94,7**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kabupaten/Kota	**pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiw**							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	683	650	Org	**95,2**	Untuk Tahun berikutnya lebih teliti dalam melihat DPA, sehingga tidak terjadi kesalahan berulang. Diharapakn tahun berikutnya semua sasaran bisa tercapai	Untuk mencermati proyeksi target pada saat perubahan anggaran agar capaian kinerja dapat di maksimalkan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	651	651	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.396	5.270	Org	**82,4**	Beberapa anak sekolah tidak datang saat dilakukan pemeriksaan berkala maupun sweeping.	Untuk Tahun berikutnya di lakukan sosialisasi kepada siswa, guru dan orang tua/wali murid agar program kesehatan berjalan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									dengan baik, sehingga semua sasaran bisa tercapai dan terlaksana dengan baik	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	80	80	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	682	682	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	12	12	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	12	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	0	Lap	**100**	tidak ada kasus		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36	36	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6	6	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Desa/ Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14	**Puskesmas Mangkutana**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**	**100**	**100**	**%**	**100**	**OK**		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	391	341	Org	**87,2**	Beberapa ibu hamil melakukan kontrol kesehatan di bidan praktek, rumah sakit, praktek obgin, dan di luar daerah (tidak di puskesmas)	Akan berkoordinasi dengan bidan desa, praktek mandiri setempat maupun rumah sakit untuk pendataan dan penjaringan ibu hamil yang tidak	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									berobat di puskesmas	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	373	328	Org	**87,9**	Beberapa ibu bersalin melahirkan di rumah sakit, karena rujukan atau langsung ke rumah sakit. tidak bersalin di puskesmas	Akan berkoordinasi dengan rumah sakit untuk pendataan dan penjaringan ibu hamil yang bersalin di rumah sakit	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.063	2.044	Org	**99,1**	Beberapa anak sekolah tidak datang saat dilakukan pemeriksaan berkala maupun sweeping. Termasuk Org tua yang tidak setuju anaknya diberikan tindakan	Dilakukan sweeping berulang untuk siswa yang belum mendapat skrining serta edukasi kepada orang tua yang melakukan penolakan skrining	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	525	309	Org	**58,9**	Kurangnya kasus kontak pasien (dalam artian baik)		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	442	439	Org	**99,3**	Hasil skrining kontak pasien terduga tidak sebanyak target (dalam artian baik)		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	1	1	Dok	**93,8**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tidak Menular	Tidak Menular							
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2	2	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26	24	Org	**92,3**	Tidak semua kasus membutuhan pengawasan pendampingan obat karena pasien rajin ke puskesmas kontrol, jadi petugas TB tidak perlu ke rumah pasien		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3	0	Org	**0,0**	Tidak ada pasien yang putus obat. Pasien rajin kontrol ke puskesmas (dalam artian baik)		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Kel	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			
15	**Puskesmas Tomoni**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**80,25**	%	**80,3**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (''%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiw**	**100**	**80,25**	**%**	**80,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480	412	Org	**85,8**	jumlah ibu hamil yang kurang	menetapkan target indikator tahun selanjutnya sesuai dengan proyeksi dari capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	459	373	Org	**81,3**	banyak bumil yang bersalin di BPS	menetapkan target indikator tahun selanjutnya sesuai dengan proyeksi dari capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.502	1.502	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	385	210	Org	**54,5**	Kurangnya Org yg mau melakukan pemeriksaan TBC	menetapkan target indikator tahun selanjutnya sesuai dengan proyeksi dari capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	917	490	Org	**53,4**	Kurangnya Org yg mau melakukan pemeriksaan HIV karena malu	menetapkan target indikator tahun selanjutnya sesuai dengan proyeksi dari capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5	5	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Org	40	40	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	10	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Kel	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**(Desa/kelurahan)**							
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			
16	**Puskesmas Tomoni Timur**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**93**	%	**93,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%) ("%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ("%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan**	**100**	**93**	**%**	**93,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pelayanan kesehatan jiwa 100%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	259	259	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247	242	Org	**98,0**	Tidak melakukan penyesuain target. Terdapat kegiatan calon pendonor darah untuk mendukung P4K dari dan/ke UTD yang tidak terealisasi yang menyebabkan capaian kinerja tidak tercapai	menetapkan target indikator tahun selanjutnya sesuai dengan proyeksi dari capaian tahun sebelumnya	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.872	2.458	Org	**85,6**	Tidak melakukan penyesuaikan target	Untuk melakukan penyesuaian target sesuai realisasi tahun berjalan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	230	169	Org	**73,5**	terdapat kegiatan pelacakan kasus mangkir TBC yang tidak memenuhi target	Untuk lebih optimal dalam melakukan pelacakan kasus sesuai target	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	304	304	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pelayanan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16	16	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	1	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	(UKBM)							
17	**Puskesmas Kalaena**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**91**	%	**91,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**100**	**91**		**91,0**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	170	170	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155	155	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.211	1.211	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	262	173	Org	**66,0**	Target Skrining TB yang tidak tercapai karena beberapa terduga TB yang tidak bersedia diambil sputumnya untuk pemeriksaan lebih lanjut	Meningkatkan kegiatan skrining TB pada pasien yang beresiko TB seperti pada kasus DM, HIV, Lansia, Ibu Hamil, dan penyakit menular yang melemahkan sistem	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									imunitas, serta meningkatkan pelacakan pada pasien positif TB untuk menemukan kasus kontak erat.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	170	170	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21	21	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4	4	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			
18	**Puskesmas Angkona**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Cakupan pelayanan kesehatan rujukan**	**100**	**95**	%	**95,0**			
			Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100	95	%	**95**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan**	**100**	**95**	**%**	**95,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kabupaten/Kota	**pelayanan kesehatan sesuai standar (''%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (''%) (''%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (''%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156	156	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah kegiatan Audit Maternal Perinatal tingkat Kabupaten	149	149	Kali	**100**			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	411	411	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah kader kesehatan remaja terlatih	884	884	Org	**100**			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	811	811	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240	240	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Org Terduga Menderita HIV	20	20	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang menerima Bantuan Operasional Kesehatan	1	1	Puskesmas	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	0	Lap	**100**	Tidak ada kasus KLB Pasca Imunisasi		
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15	15	Org	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	1	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**85**	%	**85,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		KESEHATAN								
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**109**	Kel	**85,2**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	Dok	**100**			
19	**Puskesmas Lakawali**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**93,43**	%	**93,43**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%) ("%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%) Persentase ibu hamil**	**100**	**93,43**	**%**	**93,43**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (''%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%							
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216	181	Org	**83,8**	Jumlah ibu hamil pada tahun 2024 lebih sedikit dari target proyeksi (Capaian tahun sebelumnya).	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian ibu hamil tahun sebelumnya.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	199	158	Org	**79,4**	Jumlah ibu bersalin pada tahun 2024 lebih sedikit dari target proyeksi (Capaian tahun sebelumnya).	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian ibu bersalin tahun sebelumnya.	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.259	2.587	Org	**35,6**	Kesalahan pada penginputan target	Untuk melakukan penyesuaian target sesuai realisasi tahun berjalan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	161	90	Org	**55,9**	Sebagian terduga TB tidak mau di periksa sputumnya	Untuk melakukan penyesuaian target sesuai realisasi tahun berjalan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	267	131	Org	**49,1**	Kesalahan pada penginputan target	Untuk melakukan penyesuaian target sesuai realisasi tahun berjalan	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25	20	Org	**80,0**	Indeks penemuan kasus TB msh kurang krn sebagian terfuga TB tidak mau diperiksa untuk penegakan diagnosa.	dengan melakukan penjemputan sputum secara langsung dari rumah pasien terduga TB tersebut. Sehingga untuk kedepannya sasaran dapat di capai sesuai target.	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Org dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	1	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dok hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
20	**Puskesmas Parumpanai**									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian SPM bidang Kesehatan**	**100**	**0**	%	**0,0**			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%) ("%) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ("%) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa 100%**	**100**	**0**	**%**	**0,0**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115	114	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	110	61	Org	**55,5**	Tidak ada Kasus Yang membutuhkan Donor Darah		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah kader kesehatan remaja terlatih	0	0	Org	**0,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pendidikan Dasar								
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665	665	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org Terduga Tuberkulosis	Jumlah Org Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12	12	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Org dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Org Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2	2	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	Dok	**100**	Tidak sampai 100% karena berdasarkan kasus penyakit		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	1	Dok	**100**			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dok Operasional Pelayanan Puskesmas	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Lap Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Org dengan Tuberkulosis	Jumlah Org dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9	9	Org	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dok hasil pengelolaan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan Reproduksi	pelayanan kesehatan reproduksi							
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dok hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase desa/ kelurahan siaga aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa/kelurahan) (Desa/kelurahan)**	**128**	**128**	Kel	**100**			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dok Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air**	**49,5**	**50,21**	%	**101,4**			
			Rasio jaringan irigasi	9,28	12,82	Angka	**138,1**			
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang infrastruktur pengaman sungai dan pantai**	**76,65**	**77,75**	Km	**101,4**			
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	3	3	Unit	**100**			
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	33	23,5	KM	**71,2**	Anggaran yang direalisasikan sesuai realisasi fisik di lapangan	Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi untuk meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan serta Meningkatkan kualitas koordinasi	
		Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0,08	0,11	KM	**137,5**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,94	1,75	KM	**186,2**			
		Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,25	0,49	KM	**196,0**			
		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1	1	Unit	**100**			
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 0,1 KM	0,1	2,74	KM	**2740,0**			
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang jaringan irigasi kondisi baik**	**83,57**	**83,58**	Km	**100**			
		Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	2	2	Bendung	**100**			
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,35	0,47	KM	**134,3**			
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,21	0,25	KM	**119,0**			
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,29	0,52	KM	**179,3**			
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	3	Bendung	**100**			
		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	19	19	DI	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	4	4	Lembaga	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi**	**61,48**	**61,52**	%	**100,1**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan**	**38.194**	**38.274**	RT	**100,2**			
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10	10	Detik	**100**			
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1,5	2	Liter/Detik	**133,3**			
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2	2	Unit	**100**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun**	**70,33**	**0**	%	**0,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana/prasarana persampahan yang disediakan**	**24**	**24**	Unit	**100**			
		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	13	13	Unit	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman**	**4,62**	**9,15**	RT	**198,1**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman**	**9.192**	**8.840**	RT	**96,2**			
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100	101	Tangga	**101,0**			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase saluran drainase dalam kondisi baik**	**93,62**	**94,26**	%	**100,7**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air**	**43,11**	**51,73**	Km	**120,0**			
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	10.465	15.845,92	M	**151,4**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	4	12	Sistem Drainase Perkotaan	**300,0**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)**	**4,62**	**9,15**	**%**	**198,1**			
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman**	**9.192**	**8.840**	RT	**96,2**			
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	1	1	Liter/Detik	**100**			
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	328	328	Tangga	**100**			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rasio kepatuhan IMB kabupaten**	**90,85**	**91,06**	Angka	**100,2**			
			Persentase bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun	100	142,86	%	**142,9**			
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,	**Jumlah bangunan yang Ber-IMB 5.128**	**5.128**	**5.245**	Unit	**102,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11	11	Dok	**100**			
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	31	137	PBG	**441,9**			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase Luas RTH publik yang ditata**	**0,29**	**0,29**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan	**Luas RTH publik yang di tata**	**73,73**	**73,73**	Ha	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								
		Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dok Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	11	11	Dok	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase jalan kabupaten kondisi baik**	**36,92**	**36,92**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang jalan kondisi baik**	**823,19**	**823,19**	Km	**100**			
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	43,67	43,67	KM	**100**			
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2,08	2,08	KM	**100**			
		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4	4	Jembatan	**100**			
		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	17	14	Jembatan	**82,4**	Dalam pelaksanaan triwulan 4 saat ini terealisasi 14 unit, terdapat 3 jembatan yang masih dalam proses pelaksanaan saat tahun anggaran sudah selesai, Penumpukan SPJ di detik-detik terakhir menyebabkan sistem SIPD menjadi lambat karena lonjakan akses pengguna yang tinggi dan jaringan yang tidak stabil,	Monitoring, evaluasi secara terus menerus, dan berkesinambungan kepada bidang-bidang , untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya serta Meningkatkan kualitas koordinasi antar Bidang	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2.234,16	2.234,16	KM	**100**			
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2,5	2,5	KM	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**94,11**	**84,74**	Angka	**90,0**			
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja	100	100	Angka	**100**			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifikat**	**894**	**788**	Org	**88,1**			
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100	125	Org	**125,0**			
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	31	36	Lembaga	**116,1**			
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100	61	Org	**61,0**	Berdasarkan Koordinasi dan Konsultasi tentang permintaan kerjasama pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar & Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sul-Sel sesuai petunjuk dan jadwal kegiatan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar yaitu Rekrutmen calon peserta, reservasi tempat kegiatan dan proses		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								korespondensi dengan BJKW VI Makassar & Dinas BMBN Prov. Sul-Sel. Setelah dilakukan evaluasi anggaran di bagian keuangan, sehingga adanya pembatasan kegiatan untuk dilaksanakan sepenuhnya., Proses negosiasi dengan kementerian baru terlaksana di tw4 namun adanya efisiensi anggaran, Menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate**	**100**	**100**	%	**100**			
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	7	7	Informasi	**100**			
	+	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah SDM yang terlatih bersertifikat**	**30**	**68**	Org	**226,7**			
		Pembinaan Tertib Usaha,	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	30	68	Lemba	**226,7**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk			ga				
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100	109	Usaha	**109,0**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Persentase kesesuaian penataan ruang**	**49,24**	**40,09**	%	**81,4**			
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Persentase penetapan rencana tata daerah/rencana rinci tata ruang**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dok Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dok administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	2	Dok	**200,0**			
		Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	4	0	Publikasi	**0,0**	Akun PPTK tidak terrsedia pada SIPD Penatausahaan Keuangan, pemasangan papan plank peringatan di kecamatan Nuha dan Towuti oleh Kementerian ATR/BPN		
		Koordinasi dan Sinkronisasi	**Persentase kegiatan sosialisasi yang dlaksanakan**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dok Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	3	3	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang**	**100**	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dok Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4	4	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	4	37	Kasus	**925,0**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**90,94**	**%**	**90,9**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	16	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	87	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Lap	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('')**	**100**	**62,5**	**%**	**62,5**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Org	5	5	Org	**100**			
		Bimbingan Teknis	Jumlah Org yang Mengikuti	9	3	Org	**33,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**73,68**	**%**	**73,7**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	1	Paket	**25,0**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21	4	Paket	**19,0**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	8	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95	95	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**91,3**	**91,3**	**91,3**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	6	6	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	dan dibayarkan Perizinannya							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106	94	Unit	**88,7**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**									
	Standar Pelayanan Minimal Perumahan	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang**	**100**	**100**	%	**100**			
	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Hunian Kawasan Permukiman Yang Layakdan Perbaikan RumahTidak Layak Huni (Rtlh) Khususnya Pada Kawasan Permukiman Kumuh		rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100	100	%	**100**			
	Penyediaan Infrstrupsu Kawasan Perumahan	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dok hasil pendataan identifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/Kota yang akan dibangun dan direhabilitasi serta Jumlah Dok Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang**	**2**	**2**	100 %	**100**			
		Pendataan Rumah Sewa	Jumlah Dok Data Rumah Sewa	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus							
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dok Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4	4	Dok	**100**			
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Jumlah permohonan perizinan pengembangan perumahan**	**3**	**3**	rekomedasi	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Lap hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4	4	Lap	**100**			
	+	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Rasio rumah layak huni**	**18,64**	**19,31**	Angka	**103,6**			
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	47,37	45,37	%	**95,8**			
	+	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dok pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi Jumlah Dok pendukung terkait izin**	**4**	**4**	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi 1 Dok Dok							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Lap Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4	4	Lap	**100**			
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Dok pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi Jumlah Dok pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi 1 Dok Dok**	**1**	**1**	Dok	**100**			
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dok Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2	1	Dok	**50**	Belum siapnya Dok yang akan diterbitkan Perdanya, sehingga belum bisa diajukan untuk tahap selanjutnya	Direncanakan kembali pada tahun 2025 untuk proses penyempurnaan Dok untuk selanjutnya untuk diusulkan kembali untuk penyusunan Perda	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh**	**45**	**43,1**	Ha	**95,8**			
			Cakupan layanan rumah layak huni yangterjangkau	16,88	16,88	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.587	1.587	Rumah	**100**			
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	43,1	43,1	Ha	**100**			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU**	**19,3**	**19,3**	%	**100**			
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU Jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU**	**12**	**12**	lingkungan	**100**			
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1	1	Lokasi	**100**			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	**Satuan Polisi Pamong Praja**									
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**100**	**97,32**	%	**97,3**			
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Dan Cegah Dini , Pembinaandan Penyuluhan, Pelaksanaan		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100	100	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan									
	Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyrakat Dan Unsur Rakyat Terlatih Lainnya		Persentase Penegakan Perda	100	100	%	**100**			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peresentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**100**	**91,97**	%	**92,0**			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia(Sdm) Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15	15	Dok	**100**			
	Peningkatan Koordinasi Dengan Provinsi Lain Dan Kabupaten/Kota Dan Instansi Vertikal Lainnya Terkait	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dok yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26	26	Dok	**100**			
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120	120	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Peningkatan Kualitas Teknis Anggota Satpol Pp	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1	1	Dok	**100**			
	Peningkatan Kemampuan Dan Pemahaman Masyarakat Terkait Produk Hukum Daerah Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Penyuluhan Peraturan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dok SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	20	20	Dok	**100**			
	Peningkatan Kemampuan Penyidik Pns Dan Anggota Satpol Pp Dalam Penegakan Peraturan Daerah	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Lap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	158	158	Lap	**100**			
	Meningkatkan Pelayanan Dan Tertib Administrasi Perencanaan, Keuangan,Barang Milik Daerah,Kepegawaian,Umum Dan Sarana Dan Prasarana Penunjang	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Lap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	173	173	Lap	**100**			
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka	Jumlah Lap Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Perkada yang Terlayaniumlah Lap pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	98	44	Unit	**44,9**	terdapat belanja modal dan belanja barang/jasa lainnya yang ditambahkan pada perubahan anggaran namun dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga pengadaan tersebut tertunda dan tidak direalisasikan pada tahun Anggaran 2024	; akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya apabila tersedia anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana Trantibum dan untuk meningkatkan mutu layanan SPM	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26	26	Lap	**100**			
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Lap Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	5	5	Lap	**100**			
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap	56	56	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Persentase PPNS yang berkompoten**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Lap Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2	2	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**97,41**	**97,41**	**97,4**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Lap	11	11	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	Org/b	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						ulan				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Lap	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang diadminitrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja adminidtrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**96,67**	**%**	**96,7**	Pelaksanaan bimtek renstra yang direncanakan akan dilaksanakan triwulan IV ditunda pelaksanaannya karena adanya refocosing anggaran.		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dok Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	39	Org	**97,5**	terdapat belanja honorarium yang tidak direalisasikan dikarenakan Narasumber bukan berasal dari instansi lain melainkan dari kantor Satpol PP sehingga bila di bayarkan akan menyalahi aturan	akan dilakukan kajian ulang terkait penganggaran belanja honorarium narasumber apabila sosialisasi yang akan dilakukan tahun berikutnya	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12	11	Org	**91,7**	Bimtek renstra yang direncanakan untuk dilaksanakan setelah perubahan ditunda pelaksanaanya dalam rangka refocusing anggaran dan beberapa kegiatan diklat lainnya yang juga dilakukan penundaan sebagaimana telah dilaporkan ke BKAD pada tanggal 15 oktober 2024	dianggarakan pada tahun anggaran berikutnya mengingat bimtek ini sangat penting untung dilaksanakan	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**90,06**	**%**	**90,1**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 241 Paket	241	201	Paket	**83,4**	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan karena anggaran bersifat disediakan	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan ini sehingga tidak	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									menjadi silfa	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 191 Paket	191	191	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket	10	9	Paket	**90,0**	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan karena anggaran bersifat disediakan	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan ini sehingga tidak menjadi silfa	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket	10	9	Paket	**90,0**	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan karena anggaran bersifat disediakan	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan ini sehingga tidak menjadi silfa	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 72 Dok	72	72	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**80**	**85,19**	**%**	**106,5**			
		Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	27	23	Unit	**85,2**	terdapat belanja modal	akan dianggarkan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Mesin Lainnya	Lainnya yang Disediakan					yang ditambahkan pada perubahan anggaran namun dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga pengadaan tersebut tertunda dan tidak direalisasikan pada tahun Anggaran 2024	pada tahun anggaran berikutnya apabila tersedia anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	Unit	**0,0**		tidak ada pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Satpol PP selama tahun 2024	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan karena anggaran bersifat di sediakan	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan ini sehingga tidak menjadi silfa	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	60	Lap	**100**	Realisasi belanja berdasarkan Tagihan rekening	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									ini sehingga tidak menjadi silfa	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	Lap	**100**	Belanja jasa Cleaning service selama 4 bulan tidak direalisasikan karena ybs mengundurkan diri	Mengusulkan penggantian tenaga Cleaning service pada Tahun Anggaran 2025	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjangan urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persen**	**100**	**95,68**	**%**	**95,7**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91	93	Unit	**102,2**	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan karena anggaran bersifat disediakan	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan ini sehingga tidak menjadi silfa	
		Pemeliharaan/Rehabilita	Jumlah Gedung Kantor dan	2	2	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	6	Unit	**85,7**	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Pemeliharaan karena anggaran bersifat disediakan	memerintahkan penanggungjawab sub kegiatan agar menghitung dengan rinci lagi kebutuhan untuk sub kegiatan ini sehingga tidak menjadi silpa	
2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**									
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100**	**100**	%	**100**			
	(1).Penetapan Regulasi Dalam Mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	%	**100**			
	(2).Menyelenggarakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana,		Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100	100	%	**100**			
	(3).Pemenuhan Informasi Kebencanaan Sebagai Early Warning Sistem Terhadap Ancaman Bencana Yang Ada,	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**0,08**	**0,08**	%	**100**			
	(4).Peningkatan Upaya Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana,	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi	250	250	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun							
	5).Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pada Saat Tanggap Darurat Bencana,	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**4,36**	**4,357**	%	**99,9**			
	(6).Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pasca Bencana,	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4	4	Kawasan	**100**			
	(7).Mengoptimalkan Bimbingan, Pendidikan Dan Pelatihan Serta Pembinaan Teknis Bagi Aparatur Dan Masyarakat Tentang Penanggulangan Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50	37	Org	**74,0**	Disediakan anggaran untuk membiaya 50 org peserta namun yang terealisasi hanya 37 Org sehingga realisasi kinerja hanya 74%. Jumlah peserta disesuaikan dengan jumlah TRC-BPBD yang ada.	Untuk segera menyusun TRC tingkat kabupaten	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250	250	Org	**100**			
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100	100	Org	**100**			
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah Lap layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya							
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender**	**100**	**100**	%	**100**			
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dok Lap Kaji Cepat	2	2	Dok	**100**			
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	100	%	**100**			
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	%	**100**			
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan**	**100**	**33**	%	**33,0**			
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3	1	Dok	**33,3**	Direncanakan penyusunan Perbup RPB, KRB dan SOP. Namun tidak terealisasi dan Perbup RPB dan KRB masih dalam bentuk draft karena rekomendasi akhir terkait Dok tersebut baru	Menjadi pertimbangan untuk tetap diajukan penyusunan Perbup KRB dan RPB di tahun berikutnya	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								terbit diakhir November 2024 sehingga realisasi kinerja 0%.		
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	1	Keg	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**92,92**	**92,92**	**92,9**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	2 Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	2 Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	2 Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	10 Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan	**Persentase administrasi keuangan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perangkat Daerah	**yang terselenggara dengan baik**							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	15	Org/bulan	**93,8**	Capaian kinerja hanya 93,75 karena terdapat beberapa jabatan fungsional penyetaraan yang belum terisi ASN	Memaksimalkan ASN yang ada untuk pelaksanaan tupoksi BPBD	
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	12	Org	**80,0**	Realisasi kinerja hanya 80 karena beberapa jadwal bimtek yang direncanakan tidak terlaksana terkendala adanya efisiensi anggaran yang dilakukan. Penggunaan anggaran bimtek disesuaikan dengan undangan atau pemanggilan peserta	Tetap melakukan identifikasi rencana pelaksanaan bimtek untuk tahun berikutnya	
		Administrasi Umum	**Persentase rata-rata capaian**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perangkat Daerah	**kinerja administrasi umum PD**							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8	8	Jenis	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	20	19	Jenis	**95,0**	Tw 2:Keterlambatan penyusunan SPJ keuangan, dimana Terdapat SPJ senilai Rp 3.235.000,- yang baru akan diGU-kan awal Juli 2024.Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor; Realisasi kinerja hanya 95 karena terdapat 1 jenis logistik kantor yang tidak direalisasikan dengan pertimbangan kondisi alat kebersihan tersebut masih baik.	; Tw 2:Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan; Untuk tetap melakukan identifikasi kebutuhan logistik kantor sesuai kebutuhan	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	60	Jenis	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lap	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi**	**100**	**91**	**%**	**91,0**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	3	Unit	**75,0**	Realisasi kinerja hanya 75 dimana dari 4 unit peralatan dan mesin yang direncanakan, yang terealisasi hanya 3 unit yaitu pengadaan PC sedang pengadaan mesin babat 1 unit tidak terealisasi karena terkendala keterlambatan proses di e-catalog	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi dan percepatan realisasi belanja melalui e-catalog diawal tahun	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Lap	**100**	Realisasi kinerja hanya 99,75. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima.	Untuk tetap melakukan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar sesuai SOP.	
		Penyediaan Jasa	Jumlah Lap Penyediaan Jasa	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**98,71**	**%**	**98,7**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	6	Unit	**46,2**	Tidak Ada	Untuk tetap mengidentifikasi kondisi kendaraan dinas agar siap pakai	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	38	Unit	**146,2**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	Unit	**50**	Disediakan anggaran untuk membiayai 2 unit gedung yaitu kantor BPBD dan pemeliharaan Musollah Kantor BPBD. Dan terealisasi hanya pemeliharaan kantor BPBD . Hal ini karena dilakukan efisiensi anggaran pemeliharaan musollah setelah verifikasi dan evaluasi TAPD dengan pertimbangan adanya keterlambatan dana	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor dan menganggarkan kembali untuk pemeliharaan Musollah di tahun berikutnya.	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								transfer yang berisiko kemungkinan tidak dapat terbayarkan diakhir tahun. Dan bilamana anggaran tersedia diakhir desember maka terkendala waktu yang singkat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga realisasi kinerjanya hanya 50.		
3	**Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan**									
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran**	**13,5**	**10,97**	Menit	**81,3**			
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	4	Lap	**100**			
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	Dok	**100**			
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	1	Dok	**100**			
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10	10	Org	**100**			
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala	3	3	Desa/ Kelurahan	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			(Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya							
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	50	50	Unit	**100**			
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	1	Dok	**100**			
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	**Persentase bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran**	**15**	**43,75**	%	**291,7**			
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dok yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	1	Dok	**100**			
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dok yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	1	Dok	**100**			
		Investigasi Kejadian	**Persentase jumlah kejadian**	**100**	**70**	%	**70,0**	Investigasi berdasarkan		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kebakaran	**kebakaran yang diinvestigasi**					kejadian		
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dok yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1	1	Dok	**100**			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran**	**34,37**	**8,66**	%	**25,2**	Target pada renstra setiap tahun selalu mningkat, target capaian pada Dok DPA adalah tetap berdasarkan anggaran yang disediakan	Penyesuaian antara jumlah target dan jumlah anggaran	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550	550	Org	**100**			
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	11	11	Desa/ Kelura ha n	**100**			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada	Jumlah Lap Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia								
		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1	1	Lap	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3	3	Unit	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**99,93**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	Lap	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	43	43	Org	**100**			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Rekonsiliasi dan Penyusunan Lap Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pegawai PD yang dilayani Persentase Pegawai PD yang dilayani**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	Dok	**100**			
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dok Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	Dok	**100**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	Org	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35	35	Org	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	10	10	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (') Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (') Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa	**Persentase pemenuhan jasa**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia (') Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit	11	11	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin	80	80	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara 80 Unit							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit	1	1	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit	1	1	Unit	**100**			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	**Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial**	**44,14**	**0**	%	**0,0**			
	Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Ppks Terhadap Pelayanan Sosial Dasar Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis lainnya**	**20**	**36**	%	**180,0**			
	Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Ppks Terhadap Pelayanan Sosial Dasar Dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	800	767	Keluarga	**95,9**	3 klp tidak realisasi karena tidak memasukkan proposal (3 klp = 33 KK)	Memperbaharui sistem verifikasi yang telah ada agar lebih baik dalam menyeleksi Penerima Manfaat, namun tanda dukungan instansi dalam proses verifikasi hal tersebut tidak dapat berjalan dengan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									baik.	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti**	**100**	**100**	%	**100**			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar**	**100**	**120,29**	%	**120,3**			
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Org yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	49	Org	**98,0**	1 Org Penerima Sudah Tidak Ada di Luwu Timur (SK Perubahan)		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	Org	**100**			
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	105	171	Org	**162,9**			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			jaminan sosial							
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM**	**100**	**100**	Org	**100**			
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	149.427	148.647	Org	**99,5**			
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.990	8.945,00	Keluarga	**99,5**			
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	%	**100**			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat**	**100**	**165,71**	%	**165,7**			
		Penyediaan Makanan	Jumlah Org yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	250	580	Org	**232,0**			
		PROGRAM	**Prosentase Taman Makam**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Pahlawan yang dipelihara**							
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**3**	**3**	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	3	Makam	**100**			

3.2.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informasi Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Penanaman Modal, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Persandian, Bidang Statistik, Bidang Kebudayaan, Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024, untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pelaksanaan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Urusan Dasar										
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja									
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**75,7**	**47,43**	%	**62,7**			
	Perbaikan iklim investasi dan peluang usaha Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi yang responsif Gender**	**213**	**120**	Org	**56,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kerja									
	Kerjasama Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja antara Pemerintah Daerah dan Swasta	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	**213**	120	Org	**56,3**	Dari 153 Target Peserta Pelatihan K3 yang terdiri dari 60 Org peserta pelatihan dasar operatoralat berat kerjasama LPKS, 23 Org peserta pelatihan K3 umum, dan 70 Org peserta pelatihan/sertifikasi K3 SIO, hanya sebanyak 60 Org yang mendapatkan pelatihan. Pelatihan K3 SIO kepada 93 Org lainnya ditunda dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.		
	Pembinaan syarat-syarat kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan**	**29,01**	**35,2**	%	**121,3**			
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kesempatan kerja/penempatan tenaga kerja**	**1.290**	**1.733**	Org	**134,3**	Pagu Anggaran ini bersifat disediakan,	Tetap dilakukan Koordinasi dengan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								yaitu Fasilitasi Pekerja Migran Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah. Tahun 2024 ditargetkan sebanyak 4 Org sedangkan realisasi sebanyak 1. PMI tersebut adalah PMI yang bekerja di Vietnam. Dipulangkan pada Triwulan II Tahun 2024 dengan alas an meninggal dunia karena sakit.	Pihak Imigrasi Makassar.	
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80	80	Org	**100**			
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60	60	Org	**100**			
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase Informasi Lowongan kerja yang disebarluaskan**	**100**	**100**	disebarluaskan 100 %	**100**			
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	4.500	4.923	Org	**109,4**			
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kerja Indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang difasilitasi**	**100**	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Pelindungan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi	4	1	Org	**25,0**	Hanya ada 1 PMI asal	Tetap dilakukan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	dan Ditingkatkan Kompetensinya					Kab. Luwu Timur yang difasilitasi terkait kepulangan	koordinasi terkait ada atau tidaknya aduan tenaga kerja asal Luwu Timur yang bermasalah di luar negeri pada kantor Imigrasi di Makassar. Dana bersifat disediakan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun**	**25,5**	**26,21**	%	**102,8**			
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pekerja/buruh terdaftar yang menjadi peserta program Jamsostek**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15	15	Perusahaan	**100**			
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	36	36	Lap	**100**			
		Pencegahan dan Penyelesaian	**Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**difasilitasi dan dimediasi**							
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	2	Perkara	**100**			
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	38	38	Perkara	**100**	Realisasi kinerja sesuai data jumlah perkara/kasus yang terlaporkan dan tercatat pada dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Realisasi keuangan tidak tercapai oleh karena Efisiensi Anggaran. Anggaran tersebut adalah anggaran perjalanan dinas, ATK, makan minum dan honorarium.		
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	32	32	Asosiasi dan Serikat	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				Pekerja				
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	Lembaga	**100**			
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13.000	12.885	Org	**99,1**	Realisasi kinerja sesuai data jumlah tenaga kerja yang masuk dan terdaftar pada dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Realisasi keuangan tidak tercapai oleh karena Efisiensi Anggaran. Anggaran tersebut adalah anggaran perjalanan dinas, ATK, makan minum dan honorarium.		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**97,16**	**%**	**97,2**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	25	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Lap Administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	8	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	9	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**95**	**66**	**%**	**69,5**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	3	Unit	**75,0**	Target Realisasi Kinerja Sebanyak 3 Unit Mebel dan yang terealisasi hanya 2 Unit. Realisasi kinerja dan keuangan tidak tercapai oleh		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								karena Efisiensi Anggaran.		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21	12	Unit	**57,1**	Target Realisasi Kinerja Sebanyak 21 Unit Peralatan dan Mesin, sedangkan yang terealisasi hanya 12 Unit. Realisasi kinerja dan keuangan tidak tercapai oleh karena Efisiensi Anggaran.		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**95**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	20	20	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	31	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1	1	1	Unit	**100**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah**	**74,65**	**74,67**	%	**100**			
	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	25,35	25,32	%	**99,9**			
	Peningkatan Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah prasyarat prasarat PUG yang terpenuhi**	**41**	**41**	SKPD	**100**			
	Peningkatan Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	41	41	SKPD	**100**			
	Perencanaan dan Penganggaran yang	**Pemberdayaan Perempuan Bidang**	**Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD**	**9**	**3**	Org	**33,3**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Responsif Gender	**Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								
	Peningkatan Upaya-Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	114	57	Dok	**50**			
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	41	41	Organisasi	**100**			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Prosentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu**	**81,82**	**100**	%	**122,2**			
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengaduan/Lap yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu**	**15**	**12**	kasus	**80,0**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**11**	**20**	kasus	**181,8**			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40	40	Org	**100**			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Prosentase layanan pembelajaran keluarga**	**0,01**	**0,01**	%	**100**			
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga**	**50**	**50**	Org	**100**			
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah data gender yang diolah**	**1**	**1**	Dok	**100**			
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Prosentase indikator KLA yang terpenuhi**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak**	**1**	**1**	kali	**100**			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1	1	Organisasi	**100**			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten**	**1**	**1**	Lembaga	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**98**	**%**	**98,0**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/	16	16	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**0**	**%**	**0,0**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	7	Org	**70,0**	Disiapkan BIMTEK Renstra dan BIMTEK Fungsional tapi tidak jadi dilaksanakan.		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**108**	**%**	**108,0**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	5	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	11	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415	615	Lap	**148,2**			
		Pengadaan Barang Milik	**Persentase BMD-PD penunjang**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**yang terpenuhi**							
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	11	11 Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	41	Unit	**87,2**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	1. Pengembangan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cakupan pegelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan**	**100**	**100**	%	**100**			
	2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa atau komunitas.	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah Presentase ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan daerah ('%)**	**100**	**100**	%	**100**			
	3. Pengembangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal maupun upaya pengembangankawasan rumah pangan lestari (KRPL).	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	5	3	Unit	**60,0**	2 Gapoktan penerima sudah mendatkan kegiatan yang sama pada tahun 2022 - Curah hujan cukup tinggi sehingga sedikit menghambat pekerjaan pada saat pengecoran lantai jemur	Pada anggaran perubahan terdapat 2 gapoktan tidak di realisaskan karena gapoktan tersebut telah mendapatkan di tahun 2022	
	4. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mut ketersediaan pangan yang beragam dan	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	0	unit	**0,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerja sama pemerintah masyarakat dan swasra.									
	5. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**100**	**100**	%	**100**			
	6. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah Kebutuhan Pangan Pokok**	**33.800**	**33.800**	Ton	**100**			
	7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	29	29	Lap	**100**			
	8. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang muut dan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	5	5	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	keamanan panga.									
	9. Penguatan kelembagaan melalui kordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan keamanan pangan.	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	5	5	Unit	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1	1	Lap	**100**			
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	Dok	**100**			
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3	3	Ton	**100**			
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	16	16	Ton	**100**			
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	1	Dok	**100**			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Jumlah Desa Rentan rawan pangan**	**2**	**2**	Desa	**100**			
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Presentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten**	**100**	**100**	%	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1	1	Lap	**100**			
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu**	**100**	**100**	peserta	**100**			
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase pengawasan keamanan pangan pangan segar daerah yang dilaksanakan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Persentase penyelesaian kasus tanah negara**	**100**	**100**	%	**100**			
	Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan pendataan dalam pemenuhan pelayanan pertanahan	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus yang terdaftar**	**5**	**6**	Kasus	**120,0**			
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	6	Acara	**120,0**			
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Persentase luas lahan yang dibebaskan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Luas lahan kebutuhan pembangunan kabupaten pertahun pada tahun n**	**2.331**	**2.331**	m2	**100**			
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Persentase pengamanan tanah kosong aset Pemda**	**100**	**100**	%	**100**			
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi 15 Bidang**	**10**	**10**	Bidang	**100**			
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah bidang tanah yang dilakukan pengamanan melalui pengadaan sarana prasarana	15	15	Bidang	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**Persentase izin lokasi**	**100**	**100**	lokasi 100 %	**100**			
		Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Jumlah permohonan izin lokasi yang terdaftar**	**3**	**2**	izin	**66,7**	Penatapan lokasi fungsi bagunan OPD (Instansi), kegiatan disediakan jika ada pengusulan dari instansi yang membutuhkan		
		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah izin lokasi yang ditangani	2	2	Izin	**100**			
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Persentase luas lahan bersertifikat**	**40,35**	**60,81**	%	**150,7**			
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas lahan bersertifikat yang difasilitasi**	**100**	**99**	%	**99,0**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	9	9	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG	**Persentase Penunjang Urusan**	**100**	**90,87**	**%**	**90,9**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dok perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	3	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang	**Persentase Barang Milik Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan**							
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah realisasi PAD Perangkat Daerah**	**739.200.000**	**200.672.000**	**Rupiah**	**27,1**	Lemahnya sistem administrasi pendapatan dan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penagihan	Implementasi sistem informasi berbasis digital untuk pengelolaan	
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah	2	2	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Rumah Tangga	Tangga yang Disediakan							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjuang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43	43	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa administrasi perkantoran	9	9	bulan	**100**			
		Pemeliharaan Barang	**Jumlah barang milik daerah**	**84**	**84**	**unit**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	70	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
	Dinas Lingkungan Hidup									
	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dok perencanaan lingkungan**	**100**	**100**	%	**100**			
	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Dok Perencanaan lingkungan yang disediakan**	**2**	**2**	Dok	**100**			
	Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dok KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	Dok	**100**			
	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dok KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Meningkatkan jumlah pela ku usaha/kegiatan yang me lengkapi usaha/ kegiatannya dengan Dok lingkungan	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase perbaikan kualitas air udara dan tutupan lahan**	**1**	**0,97**	%	**97,0**	**Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebesar 77,93 dengan kategori baik, namun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya baik dari segi kualitas air, udara dan tutupan lahan (IKA, IKU dan IKL).**	**Memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan serta bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan terkait perbaikan kualitas Lingkungan Hidup**	
	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dok Lingkungan yang dihasilkan**	**4**	**4**	Dok	**100**			
	Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh (Adipura)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dok Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4	4	Dok	**100**			
	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1	Dok	**100**			
	Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Luas lahan yang di rehabilitasi**	**37**	**37**	Ha	**100**			
	Meningkatkan pengelolaan tutupan lahan	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang	37	37	Ha	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			menjadi kewenangan kabupaten/kota							
	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH yang tertangani dengan baik**	**100**	**100**	%	**100**			
	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah RTH yang tertangani dengan baik**	**15**	**24**	RTH	**160,0**			
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	19,64	19,64	Ha	**100**			
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase penghasil limbah B3 yang diawasi**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Usaha yang taat pengelolaan limbah B3**	**45**	**45**	Keg	**100**			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	6	Dok	**120,0**	1. Beberapa Pelaku Usaha Pemilik Izin Pengelolaan Limbah B3 belum rutin melaporkan neraca pengelolaan limbah B3 per triwulan/semester. 2. Adanya arahan integrasi penyimpanan limbah B3 ke dalam Persetujuan	Melakukan sosialisasi dan memberikan pembinaan kepada Pemilik Izin terkait Pengelolaan Limbah B3	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								Lingkungan, sehingga masih dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada para pemilik Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk segera menyusun Rincian Teknis sebelum izin pengelolaan limbah B3nya berakhir. 3. Terputusnya komunikasi karena seringnya pergantian manajemen pada perusahaan. 4. Para pemilik izin kurang proaktif untuk berkomunikasi terkait pengelolaan limbah B3 yang dilakukan kepada DLH. 5. Kurangnya kesadaran pemilik izin pengelolaan limbah B3 untuk melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	**Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan**	**50**	**70**	%	**140,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang dibina dan di awasi**	**30**	**32**	usaha/Keg	**106,7**			
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15	19	Dok	**126,7**			
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30	32	Usaha	**106,7**			
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	**Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisonal**	**3**	**0**	MHA	**0,0**	hasil pertemuan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan	Percepatan Revisi Rancangan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Identifikasi, Verifikasi, Validasi	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PPLH						Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Luwu Timur masih perlu di revisi Kembali	dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kab. Luwu Timur	
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Jumlah MHA yang terdata**	**16**	**0**	MHA	**0,0**			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**100**	**100**		**100**			
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kelompok masyarakat yang dibina**	**15**	**16**	kelompok	**106,7**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase penghargaan lingkungan yang diterima**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah penghargaan yang di berikan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3	3	Entitas	**100**			
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase masalah lingkungan yang diselesaikan**	**50**	**100**	%	**200,0**			
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase Masalah Lingkungan yang Teregistrasi**	**50**	**100**	%	**200,0**			
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan	4	6	Pengaduan	**150**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani							
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2	2	Perkara	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**74**	**71,28**	%	**96,3**			
		Pengelolaan Sampah	**Persentase sampah yang di kelola 74 Persen**	**74**	**0**	%	**0,0**			
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	80	80	Kelompok	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	1		**100**			
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah	24.888,00	23.498,53	Ton	**94,4**	- Kurangnya Sarana dan prasarana pengangkut	Pengusulan untuk penambahan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					sampah, sementara volume sampah setiap harinya meningkat - Kondisi kendaraan pengangkut sampah sebagian besar sudah tua, sehingga sering mengalami kerusakan	sarana dan prasarana pengangkut sampah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**98,24**	**%**	**98,2**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**		**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	Org/bul	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						an				
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17	18	Org	**105,9**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**50**	**%**	**50**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penggandaan								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	300	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**83**	**%**	**83,2**	dengan adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa item belanja yang tidak terealisasi		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70	67	Unit	**95,7**	dengan adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa item belanja yang tidak terealisasi		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	7	Unit	**36,8**	dengan adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat beberapa item belanja yang tidak terealisasi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	**100**			
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Peningkatan jumlah pelayanan ke desa-desa dengan sistem jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Luwu Timur	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**	**98,21**	**99,73**	%	**101,5**			
	Peningkatan jumlah pelayanan ke desa-desa dengan sistem jemput	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yangmemiliki KIA Persentase penerbitan Kartu**	**60**	**54,14**	%	**90,2**	Data yang tersedia saat ini masih mengacu pada DKB Semester I,		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Luwu Timur		**keluarga Persentase Penerbitan Kartu Keluarga**					sehingga belum mencerminkan perubahan terbaru.		
	Melakukan kerjasama dengan OPD, lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekamanan KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 Tahun	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dok Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok Atas Pendaftaran Penduduk	4	4	Dok	**100**			
	Melakukan kerjasama dengan OPD, lintas OPD, kerjasama dengan instansi Kesehatan / Puskesmas / Rumah Sakit untuk pasien bersalin, untuk langsung dikoordinir pembuatan akta kelahirannya. Selain itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk melakukan perekamanan KTP bagi pelajar yang baru berusia 17 Tahun	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lap Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6	6	Lap	**100**			
	Membuka jalur komunikasi	Pencatatan,	Jumlah Dok Pencatatan,	3	3	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	saran/aduan/konsultasi melalui berbagai jalur komunikasi, seperti SMS, whatsapp), yang dapat membantu menyelesaikan berbagi Masalah	Penatausahaan dan Penerbitan Dok atas PeLap Peristiwa Kependudukan	Penatausahaan dan Penerbitan Dok Atas PeLap Peristiwa Kependudukan							
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan penerbitan akta kelahiran**	**100**	**100**	%	**100**	Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 99,03 realisasi 100 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Juni Tahun 2024 sebanyak 1.781 Jiwa dan Jumlah kelahiran juni ditahun 2024 sebanyak 1,781 dikali 100%		
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Kepemilikan Akta Kelahiran ("%)**	**99**	**98,07**	%	**99,1**	Data yang tersedia saat ini masih mengacu pada DKB Semester I, sehingga belum mencerminkan perubahan terbaru.		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok atas PeLap Peristiwa Penting	Jumlah Dok Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dok Atas PeLap Peristiwa Penting	4	4	Dok	**100**			
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	4	Layanan	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**100**	**100**	%	**100**			
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dok Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5	2	Dok	**40,0**	Kurangnya komunikasi atau koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab atas data kependudukan (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dengan OPD lainnya sehingga menghambat realisasi PKS.	Membentuk forum atau tim koordinasi khusus untuk memastikan komunikasi yang lebih efektif antara instansi terkait.	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Cakupan Masyarakat (warga) yang mendapatkan Informasi administrasi Kependudukan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lap Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	Lap	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Cakupan data kependudukan yang disediakan**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase Data Kependudukan yang disusun**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3	3	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	18	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	18	18	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	6	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14	14	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	84	84	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51	50	Unit	**98,0**	Adanya belanja alat bantu yaitu kursi roda yang pengadaannya tertunda di sebabkan keterlambatan dalam proses ekatalog	Melakukan evaluasi terhadap pengadaan peralatan dan mesin lainnya agar proses pembelanjaannya melalui e-katalog dapat lebih efisien dan tepat waktu	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	17	Unit	**63,0**	Rasionalisasi anggaran dan ketidakresponsifan penyedia dalam proses negosiasi disebabkan oleh terjadinya fluktuasi harga	Melakukan evaluasi terhadap pengadaan peralatan dan mesin lainnya agar proses pembelanjaannya melalui e-katalog dapat lebih efisien dan tepat waktu	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	5	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	83	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Peningkatan penataan desa**	**80**	**80**	%	**100**			
	Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase terlaksananya Persentase terlaksananya Penataan Desa**	**75**	**75**	%	**100**			
	Memantapkan peran Lembaga pemerintah desa dan Lembaga masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1	0	Desa	**0,0**	Tahun 2024 Ada 11 Desa yang mengusulkan pemekaran desa, setelah dilakukan verifikasi lapangan dan kelengkapan data pendukung, terdapat 9 Desa yang memenuhi	Melakukan monitoring verifikasi yang memenuhi data pendukung pemekaran desa	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								persyaratan dasar (Luas wilayah dan Jumlah Penduduk) untuk pemekaran desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa adapun kendala yang dihadapi adalah Morotarium pemekaran desa belum dicabut Kemendagri sampai dengan tahapan Pemi		
	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan , aset dan penyusunan Lap kinerja	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang tertib administrasi desa**	**80**	**80**	%	**100**			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Desa yang tertib administrasi Persentase Desa yang tertib administrasi dan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dok Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	2	Dok	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5	5	Dok	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	125	125	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	125	125	Dok	**100**			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	100	Org	**80,6**	Tidak terpenuhinya kuota Aparatur Desa sebagai peserta yang mengikuti pelatihan	Tetap melakukan identifikasi rencana pelaksanaan bimtek untuk tahun berikutnya	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dok Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	125	125	Dok	**100**			
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Lap Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20	28	Lap	**140,0**	Realisasi Kinerja sebesar 140% karena sifatnya disiapkan sesuai permintaan Pemerintah Desa untuk memfasilitasi desa ketika ada Perangkat Desa yang lowong/kosong, maka diadakan Seleksi Perangkat Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang lowong/kosong tersebut.	Tetap melakukan identifikasi rencana pelaksanaan bimtek untuk tahun berikutnya	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dok Profil Desa yang tersusun	1	1	Dok	**100**			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	124	124	Org	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	**Persentase lembaga desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa**	**75**	**75**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi desa dalam pembangunan desa**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dok Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4	4	Dok	**100**			
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	Lap	**100**			
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	3	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 3 Dok	3	3	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lap	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan	Jumlah Org yang Menerima Gaji	17	17		**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tunjangan ASN	dan Tunjangan ASN			Org/bulan				
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	Org	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	16	Org	**160,0**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi	6	6	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	28	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	132	132	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	11	11	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256	256	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjuang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	6	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	9	Unit	**100**			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintahan Daerah	**pemerintahan daerah**							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit	16	16	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	30	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	Unit	**66,7**	Ada 3 gedung kantor yang menjadi aset DPMD yaitu kantor DPMD, kantor PKK dan Kantin PKK. Hal ini bersifat dipersiapkan apabila ada gedung kantor atau bangunan lainnya yang akan dipelihara.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor DPMD, Kantor PKK dan Kantin PKK dalam menganggarkan di tahun berikutnya.	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Rata rata jumlah anak per keluarga**	**2**	**2**	Anak	**100**			
	"Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (daerah perkotaan, dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas"	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)**	**2**	**0**	Dok	**0,0**			
	Peningkatan intensitas Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, di seluruh wilayah (daerah perkotaan, dan daerah tertinggal terpencil dan perbatasan/galcitas	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	24	0	Organisasi	**0,0**	Pelaksanaan sosialisasi kependudukan tidak terlaksana dikarenakan Belum ada Jadwal kesiapan pakar kependudukan sebagai narasumber kegiatan tersebut	Percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya	
	Peningkatan Pembinaan kepada keluarga, Kelompok Tribina, PIK-R dan Kelompok UPPKA di setiap Kecamatan	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1	1	Keg	**100**			
	Peningkatan Kinerja Program Perangkat Daerah	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Lap Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	1	0	Keg	**0,0**	Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari Pusat,	Agar PPTK lebih mencermati realisasi belanja untuk	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Berencana)					propinsi dan Daerah,Namun keterbatasan sumber daya dan waktu sehingga tidak terlaksana di tingkat Kabupaten	mengantisipasi SILPA akhir tahun dan Perencanaan Kegiatan disesuaikan Dengan Rencana Aksi kegiatan	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	1	Dok	**100**			
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	1	Lap	**100**			
		Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern conraceptive prevalance rate/mCPR)**	**60,5**	**71,34**	%	**117,9**			
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	40,81	36,74	%	**90,0**	Faktor yang akan menpengaruhi adalah faktor inividu pemakai dan faktor dari program yang berkaitan dengan kualitas pelayanan : 1. Faktor umur, jumlah anak, tingkat pendidikan, tempat	Meningkat kegiatan Penyuluhan KIE dimasyarakat tentang program KB dan alat KB agar masyarakat paham dengan baik, Meningkat koordinasi Lintas	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								tinggal, tahapan keluarga, tujuan dan alasan ber-KB memiliki hubungan yang erat terhadap pemilihan dan penggunaan MKJP. 2. Pelaksanaan program KB MKJP di Luwu Timur sudah terlaksana dengan baik namun belum maksimal. 3. Sosialisasi Program KB sudah dilakukan namun belum maksimal 4. Ketersediaan kualitas tenaga penyuluh KB (PLKB) di Luwu Timur masih kurang memadai. 5. Faktor yang menghambat program KB terutama dalam pemakaian alat kontrasepsi MKJP adalah adanya ketakutan masyarakat untuk mengunakan, pada pemakaian IUD ada rasa malu karena harus membuka organ intim, serta takut akan efek samping atau akibat pemasangan alat	sektor serta terus meningkatkan kualitas pelayanan KB di Masyarakat.	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								kontrasepsi MKJP,,		
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,01	8,14	%	**147**			
			Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	25,6	35,41	%	**138,3**			
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	1	Lap	**100**			
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	1	Lap	**100**			
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	1	Lap	**100**			
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Elektronik serta Media Luar Ruang	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3	3	Dok	**100**			
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	40	40	Organisasi	**100**			
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 5	581	581	Org	**100**			
		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20	20	Organisasi	**100**			
		Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Lap Hasil Penguatan	1	1		**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1							
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	Lap	**100**			
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Org yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11.500	13.247	Org	**115,2**			
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK**	**100**	**100**	Jumlah	**100**			
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	1	Dok	**100**			
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	128	128	Unit	**100**			
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	61	61	Kampung	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Rata-rata usia Kawin Pertama**	**20**	**20**	tahun	**100**			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**71**	**71**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Org Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Org Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	1	Lap	**100**			
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	1	Lap	**100**			
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25	25	Unit	**100**			
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-	Jumlah Lap Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga/UPPKA)							
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	7	7		**100**			
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**100**	%	**100**			
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	1	Lap	**100**			
		Pemantauan Data dan	Cakupan Pemantauan Data dan	3	3	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3	3	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	6	6	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	Org/Bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dok	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Org	2	2	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**1000**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bangunan Kantor								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	60	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	20	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa	Jumlah layanan jasa Komunikasi,	48	48	Jenis	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi							
			Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96	96	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
	Dinas Perhubungan									
	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan**	**74,56**	**74,56**	%	**100**			
	Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan		Persentase Angkutan umum yang laik jalan	99,21	99,21	%	**100**			
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik**	**100**	**100**	%	**100**			
	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2	2	Unit	**100**			
	Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara 240 Unit	60	60	Unit	**100**			
	Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Org (L/P) yang terangkut melalui terminal (Org)**	**227.251**	**230576**	Org	**101,5**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	masyarakat									
	Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	73,32	73,32	Unit	**100**			
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3	3	Unit	**100**			
	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan**	**15**	**15**	Titik	**100**			
	Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan titik parkir 250 kali	250	250	kali	**100**			
	Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan wajib uji yang laik jalan (Unit) Jumlah kendaraan yang diuji (Unit)**	**2.700**	**2710**	Unit	**100,4**	Telah dilakukan penyesuaian target pada anggaran perubahan karena pada awal bulan September unit pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diberi sanksi larangan operasi dari Kementerian Perhubungan, sehingga	Telah dilaksanakan tahapan-tahapan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan sehingga pada tahun 2025 Pengujian Kendaraan Bermotor dapat kembali	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								target 3135 unit kendaraan yg laik jalan dirubah menjadi 2700 unit, dimana telah dilakukan pengujian terhadap 2273 unit kendaraan sampai akhir Agustus, dan sisa target sebanyak 437 unit merupakan akendaraan wajib uji domisili Kab. Luwu Timur yang melakukan numpang uji d Kabupaten lain	dilaksanakan	
	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis perhubungan	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	**2.700**	**2710**	kali	**100,4**			
	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada Dok perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11	11	Unit	**100**			
	Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**	**Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang dikeluarkan**	**22**	**22**	Rekomendasi	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	melaksanakaan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat Lap pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu	**Kabupaten/Kota**								
	Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan menejemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	18	18	kali	**100**			
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Org (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (Org)**	**391.600**	**391.820**	Org	**100,1**			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Org dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	27	27	Unit	**100**			
		Penerbitan Izin	**Persentase kepemilikan KIR**	**0,01**	**0,01**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyelenggaraan Angkutan Org dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**angkutan Wajib Uji (%) Rasion ijin trayek**							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Org dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek)	24	24	kali	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase Kapal yang laik berlayar di danau**	**26,33**	**26,33**	%	**100**			
			Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	94,52	94,52	%	**100**			
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Org PerOrgan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kapal yang laik beroperasi di laut (unit)**	**252**	**252**	Unit	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan	Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata	24	24	kali	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kabupaten/Kota								
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Jumlah Org (L/P) / Barang yang terangkut melalui dermaga ASDP (Org/kg)**	**52.825**	**52.825**	org/Kg	**100**			
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan yang dioperasikan / dipelihara	3	3	Unit	**100**			
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Lap Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	24	24	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	27 Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dok	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5	5	5	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Org							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	40	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	8	Unit	**100**			
		Pengadaan Gedung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau	2	2	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200	1200	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	Org	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**95**	**95**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38	38	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2	2	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian									
	Menciptakan keterbukaan informasi dan akses informasi kepada masyarakat	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang terpublikasikan**	**100**	**100**	%	**100**			
	Memberikan jaminan terhadap kualitas infrastrukturjaringan	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase publikasi informasi pembangunan pemerintah daerah melalui media dan kelompok informasi masyarakat**	**100**	**100**	%	**100**			
	Menciptakan system informasi komunikasi yang terintegrasi terpadu, dinamis dan terkoordinasi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	Dok	**100**			
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dok Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	1	Dok	**100**			
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	30	30	Layanan	**100**			
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	71	71	Org	**100**			
	Penguatan Terhadap Akuntabilitas Keuangan, pengelolaan aset daerah dan kinerja secara transparan	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**persentase pengelolaan domain, jaringan internet dan e-government pemerintah daerah**	**100**	**100**	%	**100**			
	Sinergi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan,pelaksanaan	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh**	**persentase pengelolaan domain dan koneksi jaringan internet OPD se Kabupaten luwu timur**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	terhadap monev terhadap kinerja	**Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	Dok	**100**			
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	95	95	Unit	**100**			
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**persentase pengelolaan pemerintahan berbasis egovermnet yang dikelola**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8	10	Unit	**125,0**			
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dok Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran &**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**evaluasi tepat waktu ('')**							
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lap	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	22	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah	**perangkat daerah**							
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 18 Dok	18	18	18 Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Org	9	9	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar (') Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**75**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dok	4	4	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah								
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia 4 Unit	4	4	unit	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit	3	1	unit	**33,3**	Sub Kegiatan Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat tidak sepenuhnya terealisasi	hal ini dikarenakan pengadaan lemari arsip dan arsip pejabat tidak sesuai harga dengan yang ada pada DPA (lebih tinggi harga di DPA dari pada harga beli) sehingga belanja modal lemari dan arsip pejabat masih tersisa	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit	5	5	unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan persen**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan lainnya yang terpenuhi 4 Jenis	4	4	Jenis	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Urusan Pemerintahan Daerah	**yang terpelihara dengan baik**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9	unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	9	unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	unit	**100**			
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								
	Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi melalui penguatan kelembagaan koperasi	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi**	**10,22**	**0%**	%	**0,0**			
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di sektor koperasi, perdagangan, UMKM dan perindustrian	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	0	Usaha	**0,0**	Kegiatan tidak dilaksanakan disebabkan adanya efisiensi anggaran	agar ditahun selanjutnya dalam menyusun anggaran lebih prioritas pada kegiatan yang mendesak	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang professional dan kompeten	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas**	**34,44**	**34,1**	%	**99,0**			
	Peningkatan akses pembiayaan dan skema kerjasama	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota**	**82,15**	**34,68**	%	**42,2**			
	Peningkatan akses pembiayaan dan skema kerjasama Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	156	380	Usaha	**243,6**			
	Meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan usaha koperasi dan UMKM (termasuk pemanfaatan IT)	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi sehat**	**34,34**	**33,76**	%	**98,3**			
	Peningkatan evaluasi dan peLap keuangan yang transparan dan akuntabel	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya**	**31,87**	**33,82**	%	**106,1**			
		Pelaksanaan Penilaian	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang	15	15	Usaha	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan							
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan**	**14,12**	**14,59**	%	**103,3**			
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota**	**14,12**	**14,59**	%	**103,3**			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30	30	Org	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi**	**5,64**	**5,78**	%	**102,5**			
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen , standarisasi dan strukturisasi usaha**	**5,64**	**5,78**	%	**102,5**			
		Peningkatan Produktivitas, Nilai	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses	20	20	Usaha	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**50**	**51,52**	%	**103,0**			
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Jumlah wirausaha baru berskala mikro**	**37**	**39**	WUB	**105,4**			
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60	20	Usaha	**33,3**	Adanya Efisiensi anggaran, sehingga dianggarkan hanya 20 pelaku usaha sedang target restra sebanyak peserta sebanyak 60 pelaku usaha	agar lebih cermat dalam menetapkan Target Kinerja.	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	45	40	Usaha	**88,9**	Hanya 40 pelaku usaha yang difasilitasi dalam kemudahan perizinan, kurang dari target yang seharusnya 45 pelaku usaha.	Diharapkan lebih aktif dipelaku usaha untuk memberi pemahaman tentang kemudahan mendapatkan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									Perizinan sehingga tercapai target yang direncanakan	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70	70	Usaha	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	95	97	Org	**102,1**			
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	258	263	Usaha	**101,9**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Rasio pertumbuhan skala usaha mikro**	**5,19**	**5,19**	%	**100**			
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase peningkatan skala usaha mikro**	**7,36**	**7,6**	%	**103,3**			
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	12	13	Usaha	**108,3**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**97**	**97**	**97**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan, Penganggaran dan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Evaluasi tepat waktu**							
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	3	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18 Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		PeLap Pengelolaan	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Retribusi Daerah	Daerah							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	3	Org	**75,0**	Kurangnya Peserta pelatihan Badan Metrologi Legal untuk Penera sehingga tidak mencapai target	agar lebih proaktif mencari informasi tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	9	Org	**180,0**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	11	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	20	30	Jenis	**150**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	60	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230	199	Lap	**86,5**			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	50	Dok	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	5	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500 Lap	1500	1.559	Lap	**103,9**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	45	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	Unit	**200,0**			
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional**	**45**	**78**	Investor	**173,3**			
	Pembuatan Dok kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi**	**100**	**100**	%	**100**			
	Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kemudahan Penanaman Modal								
	Penggunaan Pelayanan Perizinan berbasis IT dan penyederhanaan Proses/SOP Perizinan dan nonperizinan	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase jenis potensi yang disusun dalam Peta Potensi kabupaten (%)**	**100**	**100**	%	**100**			
	Melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan perusahaan PMA/PMDN	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dok	1	1	Dok	**100**			
	Penyediaan data dan informasi bidang Penanaman Modal yang Valid dan kredibel	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN**	**3.800.000 .000.000**	**3.327.337 .640.056**	Rupiah	**87,6**			
	Peningkatan evaluasi dan peLap keuangan yang transparan dan akuntabel	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan**	**5**	**3**	MoU	**60,0**			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	2	Dok	**66,7**	Tidak melakukan perbaikan target	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian sebelumnya	
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3	3	Dok	**100**			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Ketepatan waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP**	**75**	**94,29**	%	**125,7**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000	7.177	Pelaku Usaha	**119,6**			
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	34	Pelaku Usaha	**136,0**			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam PeLap Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	**80**	**84**	%	**105,0**			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelaku usaha yang Menyampaikan LKPM**	**90**	**100**	%	**111,1**			
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9	9	Usaha.	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Usahanya								
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	244	253	Usaha	**103,7**			
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15	6	Usaha	**40,0**	Tidak melakukan perbaikan target	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian sebelumnya	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Data Base yang Valid**	**1**	**1**	Dok	**100**			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2	2	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG	**Persentase Penunjang Urusan**	**95**	**98**	**%**	**102,8**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lap	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Lap keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang	**Persentase Lap BMD pada**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan**							
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah ya ng diadministrasikan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dok	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Org	13	17	Org	**130,8**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuhi**	**100**	**97,82**	**%**	**97,8**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	0	Paket	**0,0**	Rasionalisasi Anggaran	akan menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	3	3	Jenis	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	60	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perundang-undangan	yang Disediakan							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350	350	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemrintah Daerah yang diadakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	1	Unit	**33,3**	Rasionalisasi Anggaran	Akan menyusun perencanaan yang lebih rinci dan realistis sesuai kebutuhan	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	9	9	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47	47	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga									
	Peningkatan Daya Saing di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**38,83**	**39**	%	**100,4**			
	Peningkatan Daya Saing di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, sukarelawan dan kepeloporan pemuda**	**90**	**87**	%	**96,7**			
	Peningkatan Daya Saing di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	3	3	Org	**100**			
		Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Wirausaha Pemuda	30	30	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30	30	Org	**100**			
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	6	5	Unit	**83,3**	Terjadi keterlamatan pekerjaan untuk gedung pemuda dgn realisasi progres sebesar 80%	Pekerjaan tetap dilanjutkan pada tahun 2025 dengan menerapkan denda keterlambatan	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Meningkatnya Pembinaan OKP di Kabupaten Luwu Timur**	**90**	**91**	%	**101,1**			
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7	7	Dok	**100**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Persentase tingkat prestasi olahraga**	**85,71**	**73,7**	%	**86,0**			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi	**Persentase meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan/sarana dan prasarana**	**95**	**86**	%	**90,5**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**yang terstandarisasi**							
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5	5	Unit	**100**			
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota**	**95**	**48**	%	**50,5**			
		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	Dok	**100**			
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30	30	Org	**100**			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**	**100**	**100**	%	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	1	Dok	**100**			
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	**95**	**95**	%	**100**			
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dok Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2	2	Organisasi	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dok Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	2	2	Dok	**100**			
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase pembinaan dan pembinaan olahraga rekreasi**	**95**	**95,1**	%	**100,1**			
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lap Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2	2	Lap	**100**			
		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1	1	Dok	**100**			
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0	0	Dok				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**persentase gugus depan yang aktif**	**95**	**95**	%	**100**			
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase pembinaan kepramukaan di Luwu Timur**	**90**	**90**	%	**100**			
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	Organisasi	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian									
	Membangun data statistik sektoral yang akuntable	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**persentase statistik sektoral yang diselenggarakan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10	10	Dok	**100**			
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1	1	Dok	**100**			
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian									
	Menciptakan keamanan sistem informasi	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41	41	Daerah	**100**			
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan									
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan**	**85**	**85**	%	**100**			
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase budaya lokal yang di kelola**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6	6	Objek	**100**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**persentase sanggar seni budaya yang dibina**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase sanggar seni dan paduan suara yang dibina**	**80**	**80**	%	**100**			
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	24	24	Org	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pembinaan Sejarah Lokal	**Persentase Sejarah Lokal yang**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**dibina**							
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dok Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**8**	**8**	lokasi	**100**			
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8	8	Objek	**100**			
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
	DInas Perpustakaan dan Kearsipan									
	Pengembangan perpustakaan sebagai destinasi wisata baca	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan jumlah Org mengakses perpustakaan yang responsive gender**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat Persentase peningkatan pemustaka**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3	3	Layanan	**100**			
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam	10	10	Perpustakaan	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan							
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3	3	Layanan	**100**			
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	599	599	Eksemplar	**100**			
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	2	Dok	**100**			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pembudayaan gemar membaca**	**100**	**100**	%	**100**			
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4	4	Lokus	**100**			
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Org yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	8	8	Org	**100**			
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20	20	Perpustakaan	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
	DInas Perpustakaan dan Kearsipan									
	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar nasional kearsipan	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku**	**100**	**100**	%	**100**			
	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar nasional kearsipan	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku**	**100**	**100**	%	**100**			
	Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai standar nasional kearsipan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	6.500	6.500	Berkas	**100**			
	Peningkatan kualitas pelayanan SKPD	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	48	48	Lap	**100**			
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase arsip statis yang dikelola**	**100**	**100**	%	**100**			
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1.500	1.500	Arsip	**100**			
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2	2	Lap	**100**			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Persentase arsip perangkat daerah yang dimusnahkan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.500	2.500	Arsip	**100**			
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	**Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**25**	**25**	%	**100**			
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	**Persentase perizinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	15	15	Arsip	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah								
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11	11	Org	**100**			
		Administrasi Umum	**Persentase Rata- Rata Capaian**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perangkat Daerah	**Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjuang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	89	89	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	71	71	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa	**Persentase Rata-Rata Capaian**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	7	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	30	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			

3.2.3 URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri dari urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Pariwisata, bidang Pertanian, bidang Perdagangan, bidang Perindustri dan bidang Transmigrasi . Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024 untuk Urusan Pilihan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Urusan Pilihan
Kab. Luwu Timur tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Urusan Pilihan										
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
	Dinas Perikanan									
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Produksi Perikanan Tangkap**	**10.267,00**	**10.481,44**	Ton	**102,1**			
	"Akselerasi Peningkatan Usaha Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan Lingkungan Strategis."	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap**	**100**	**98,77**	%	**98,8**	**Kinerja tidak mencapai 100 persen dikarenakan adanya 1 unit sarana usaha perikanan tangkap yang tidak terealisasi (berkas administrasi kelompok Biwan yang tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses)**		
	Pengembangan usaha perikanan tangkap dan Pembinaan dan pendampingan pada	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4	4	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	kelompok nelayan									
	Peningkatan sarana dan Prasarana budidaya dan Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	8	8	Unit	**100**			
	Penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai aturan hukum dan UU perikanan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	69	68	Unit	**98,6**	Terdapat 1 unit tidak terealisasi karena salah satu berkas administrasi Kelompok Biwan Desa Bawalipu belum lengkap sehingga tidak dapat diproses sebagai penerima bantuan		
	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dan Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20	20	Org	**100**			
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12	12	Kelompok	**100**			
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar**	**86**	**100**	%	**116,3**			
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	Layanan	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Produksi Perikanan Budidaya**	**378.997,00**	**385.613,16**	Ton	**101,7**			
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12	12	Kelompok	**100**			
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	30	30	Kelompok	**100**			
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan**	**100**	**94,74**	%	**94,7**	**Kinerja tidak mencapai 100 persen dikarenakan adanya 3 unit sarana dan prasarana pembudidaya yang tidak terealisasi.**		
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	4	Dok	**100**			
		Penyediaan Prasarana	Jumlah Prasarana Pembudidayaan	16	15	Unit	**93,8**	Terdapat 1 unit yang	Pemberian	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					tidak terealisasi yaitu pembangunan jembatan tambak dusun tabaroge karena akses material ke lokasi yang sulit dan tingginya air pasang di laut sehingga sampai 31 Desember 2024 progres pekerjaan baru mencapai 18,62 persen	kesempatan (adendum kontrak) hingga 28 Januari 2025 (50 hari kalender)	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	41	39	Unit	**95,1**	2 unit tidak terealisasi yaitu sarana budidaya air payau (pakan mandiri) Kelompok Bina Karya dan sarana budidaya air tawar Kelompok Usaha Baru. Kelompok Bina Karya tidak terealisasi karena teknologi Kelompok tani tidak siap untuk kegiatan percontohan pembuatan pakan ikan dengan teknologi baru, sedangkan untuk Kelompok Usaha Baru disebabkan proses pengadaan KJA tidak memiliki waktu yang cukup untuk dilaksanakan di Bulan Desember.		
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah	4	4	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan							
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1.000	1.000	Ha	**100**			
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kp Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**	**96**	**96**	%	**100**			
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	4	Dok	**100**			
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Produksi Hasil Pengolahan Ikan**	**565**	**561,68**	Ton	**99,4**	**Kinerja tidak mencapai 100 persen dikarenakan kurangnya ketersediaan bahan baku, sebagian besar kelompok**		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								pengolahan masih tergolong UKM yang belum memiliki pasar yang luas, serta adanya pelaku usaha yang beralih profesi.		
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4	4	Dok	**100**			
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya**	**83**	**83**	%	**100**			
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10	10	Usaha	**100**			
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	**Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan**	**73**	**73**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**kecil yang berkembang**							
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5	1	Pelaku Usaha	**20,0**	Terdapat 4 pelaku usaha yang tidak terfasilitasi karena tidak mampu memenuhi kelengkapan Dok yang dibutuhkan (SKT dan Lap produksi)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar 96**	**100**	**90,34**	**90,34**	**90,3**	**Kinerja tidak mencapai 100 persen dikarenakan adanya 1 kegiatan yaitu administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang tidak mencapai target (pihak ketiga yang tidak mampu membayar sewa dan kurangnya produksi bibit yang dihasilkan BBI)**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			DPA-SKPD							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	**100**	**13,1**	**13,1**	**13,1**	Pendapatan Dinas Perikanan pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan disebabkan pihak ketiga yang menyewa gudang rumput laut belum mampu menyetorkan biaya sewa sebagaimana dalam surat		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								penetapan dikarenakan pihak penyewa mengalami kendala keuangan pada akhir tahun. Sedangkan Pendapatan pada sector Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tidak mencapai target disebabkan kurang produksi benih ikan yang dihasilkan Balai Benih Ikan (BBI) akibat Hama dan Penyakit sehingga.		
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dok	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Org	8	8	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	12	12	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bangunan Kantor								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket	6	6	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket	20	20	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dok	48	48	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	1 Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	23	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	40	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	**100**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga									
	Peningkatan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata**	**43,48**	**0**	%	**0,0**			
	Peningkatan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase meningkatnya penyusunan Dok pengembangan desitinasi pariwisata**	**85**	**85**	%	**100**			
	Peningkatan Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1	1	Lokasi	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kedisiplinan Aparatur Perangkat Daerah	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase meningkatnya peningkatan objek pariwisata**	**65**	**65**	%	**100**			
		Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	7	7	Unit	**100**			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur**	**90,91**	**109,09**	%	**120,0**			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata**	**80**	**75**	%	**93,8**			
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1	2	Dok	**200,0**			
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dok Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	1	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4	6	Keg	**150**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dok Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2	2	Promosi	**100**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur**	**36,07**	**36,07**	%	**100**			
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**60**	**27,78**	%	**46,3**			
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1	0	Lap	**0,0**			
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	90	25	Org	**27,8**	Tidak melakukan perbaikan target	Untuk melakukan proyeksi target secara terukur kedepan	
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Lap Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	1	Lap	**100**			
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif**	**70**	**0**	%	**0,0**			
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi	Jumlah Org yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor	20	6	Org	**30,0**	Tidak melakukan perbaikan target	Untuk melakukan proyeksi target	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Subsektor Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif						secara terukur kedepan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar 98**	**98**	**98%**	**%**	**100**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pers+C454:F482entase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	Kali	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	Lap	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**124,28**	**124,28**	**124,3**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	23,75	Org/bulan	**99,0**			
		Koordinasi dan	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	10	Org	**142,9**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	17	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	6	Paket	**200,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	19	Paket	**95,0**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.074	1.074	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yg terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit	14	21	Unit	**150**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit	45	32	Unit	**71,1**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit	1	1	Unit	**100**			
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	Penyediaan benih yang berkualitas, Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian, Perbaikan jaringan irigasi, Percetakan sawah dan optimalisasi lahan, Bantuan bibit buah dan sayur, Pengadaan sarana dan prasarana, Pengendalian OPT, Pengawasan dan sertifikasi benih, Pengadaan ternak, Pemberian dukungan sarana dan prasarana, pembinaan masyarakat peternakan.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produktivitas kelapa sawit**	**9,6**	**7,86**	Ha	**81,9**	**Kurangnya petani melakukan pemupukan, serta adanya pengaruh iklim yang menyebabkan intensitas panen menurun** **> Input produksi yang tidak tersedia secara stabil sehingga mempersulit akses bagi petani** **>Sumber daya manusia petani pengelola belum optimal dalam penerapan paket teknologi budidaya**	**> Memperkuat kelembagaan petani sawit untuk memperkuat posisi tawar** **> Mendampingi petani dalam mengakses produk pupuk organi sebagai alternatif** **> Meningkatkan kapasitas penyuluh dan melakukan pengawasan, monev terhadap target kinerja penyuluh secara melekat**	
			Jumlah Populasi Unggas	999.529	726.254	Ekor	**72,7**	Tingginya harga pakan dan sangat fluktuatif Tidak tersedia pakan local alternatif	Mengusulkan fasilitasi rekomendasi penyediaan pakan alternatif	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Jumlah Produktivitas padi	7,16	6,62	Ha	**92,5**	- tingkat kesuburan tanah pada areal sawah yang mulai menurun (produktifitas rendah) - Tingginya curah hujan dan adanya dampak perubahan iklim sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan kesuburan tanaman padi. -Adanya serangan OPT seperti tikus, kresek, wereng - Kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian. -Banyak petani yang mengalami kesulitan dalam meperoleh akses modal untuk membeli pupuk, benih unggul. - penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak seusai dengan anjuran - tingginya curah hujan dan dampak perubahan iklim	Mengusulkan dan fasailitasi alternatif penyediaan sarana pertanian sebagai alternatif dalam pengawalan dalam peningkatan produksi.	
			Jumlah Populasi ternak Kecil	30.462	8.760	ekor	**28,8**	Ternak kambing menurun karena jumlah pemotongan untuk kebutuhan terus meningkat sedngkan	Mendorong penyediaan bibit kambing/babi berkualitas tinggi melalui program	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								jumlah kelahirannya cenderung stagnan Angka penurunan ternak babi sangat drastis akibat merebaknya wabah ASF	sertifikasi dan pelatihan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas ternak	
			Jumlah Populasi ternak besar	25.109	10.144	ekor	**40,4**	- adanya faktor penyakit PMK- Jumlah pemotongan ternak sapi untuk kebutuhan konsumsi angkanya 3 kali lebih banyak dari jumlah kelahiran - angka kelahiran ternak sapi dan kerbau belum maksimal - keterbatasan lahan sumber hijauan pakan ternak serta penggembalaan ternak semakin meningkat karena di gunakan untuk lahan usaha (aloh fungsi lahan)	Melakukan pengawasan terhadap ternak besar agar terhindar dari penyakit PMK. Mengusulkan fasilitasi alternatif penyediaan pakan local alternatif	
			Jumlah Produktivitas lada	0,99	0,42	Ha	**42,4**	> Faktor iklim yang ekstrim menyebabkan pertumbuhan pathogen cukup tinggi menyebabkan serangan penyakit yang variative. Kurangnya petani melakukan pemupukan, serta pengaruh iklim yang	Mengoptimalkan SDM petani dalam berbudidaya lada yang baik dan benar	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								menyebabkan intensitas panen menurun sehingga provitas tanaman lada menurun.		
			Jumlah Produktivitas kakao	0,86	0,3	Ha	**34,9**	Faktor iklim yang ekstrim menyebabkan pertumbuhan pathogen cukup tinggi menyebabkan serangan penyakit yang variative. Kurangnya petani dalam melakukan pemupukan serta adanya iklim yang menyebabkan intensitas panen menurun sehingga provitas tanaman kakao belum dapat memberikan hasil yang maksimal karena efek pemupukan baru dapat dilihat setelah 6 bulan pemupukan. - tingkat kesuburan dan struktur tanah sangat mempengaruhi produksi jagung Ketersediaan dan penggunaan varietas unggul benih (VUB) yang relatif masih rendah sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan benih	Melakukan kegiatan intensifikasi tanaman kakao dan pemberian pupuk secara berimbang	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								yang memiliki potensi produksi rendah, tidak tahan terhadap hama dan penyakit serta perubahan cuaca		
			Jumlah Produktivitas Jagung	6,71	5,12	Ha	**76,3**	- tingkat kesuburan dan struktur tanah sangat mempengaruhi produksi jagung Ketersediaan dan penggunaan varietas unggul benih (VUB) yang relatif masih rendah sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan benih yang memiliki potensi produksi rendah, tidak tahan terhadap hama dan penyakit serta perubahan cuaca	Agar dapat menfasilitasi benih unggul dan melakukan pendampingan . Mengusulkan fasailitasi alternatif penyediaan pupuk organic sebagai alternatif Pengawalan	
			Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertania	100	100	%	**100**			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	presentase tersalurnya pupuk subsudi sesuai kuota dan tepat sasaran	42600	35390,32	%	**83,1**	- untuk pengadaan rice transplater tidak terlaksana sebanyak 16 unit dikarenakan penyedia rice transplanter yang akan diadakan berdasarkan	; - terus melakukan monitoring terhadap pendata kecamatan agar segera melengkapi Dok SKT dan titik koordinat untuk	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								hasil verifikasi kelompok tani banrangnya tersedia di indonesia tanggal 20 desember dan dalam kondisi belum perakitan, sedangkan rice transplanter merk lain ada yang unitnya tidak cukup barangnya baik untuk wilayah makassar dan pusat serta belum memiliki TKDN (PSP). - penebusan pupuk NPK formula khusus masih sangat kecil disebabkan adanya kecenderungan petani untuk tidak menebus pupuk tersebut karena harga HET nya yang relatif lebih mahal di banding NPK Phonska dan terdapat beberapa wilayah yang kurang sesuai untuk penggunaan pupuk ini. (PSP) - kegiatan pendataan kebun kelapa sawit belum dapat tercapai dan masih terus dilakukan monitoring terhadap petugas pendata untuk melengkapi Dok	selanjutnya diterbitkan STDB - untuk Dok RAD dilakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka menyelesaikan perumusan RAD selanjutnya dilakukan uji publik dan penertiban Dok RAD-KSB (BUN) - anggaran jagung dipindahkan lada kegatan yang lain di APBD perubahan tahun 2024	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								persyaratan seperti surat keterangan tanah dan titik koordinat kemudian selanjutnya diterbitkan STDB. - untuk penerbitan Dok RAD masih dalam tahap penyusunan Dok RAD dan berlanjut sampai dengan tahun 2025 - pengadaan benih jagung sebanyak 525 Ha tidak dilaksanakan karena pada tahun 2024 kab. luwu timur mendapatkan alokasi bantuan benih dari APBN kementri		
			Jumlah alsintan yang diadakan	432	416	Unit	**96,3**	- Terdapat jenis alsintan yang tidak dapat direalisasikan/ dibelanjakan dikarenakan tidak adanya penyedia yang menyanggupi pengadaan rice transflanter sebanyak 16 unit, tetapi jenis pengadaan alsintan yang lainnya terselesaikan.	Kelompok penerima manfaat telah diverifikasi dan juga sudah terdaftar pada simluhtan Jenis alsintan berupa transflanter tidak Terdapat jumlah alsintan yang di belanjakan yaitu ditahun ini sbb : Handspreyer sebanyak 163 unit, Handtraktor sebanyak 57 Unit,	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									Alkon sebanyak 11, Mist Blower sebanyak 114 Unit, Power Spreyer sebanyak 64 Unit, Mesin babat sebanyak 5 Unit, Traktor roda 4 sebanyak 4 Unit, Combine Harvester sebanyak 6 unit	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kegiatan PSP yang didampingi	6	6	Keg	**100**	- Target kegiatan pendataan kebun sawit sebanyak 2.000 STDB tidak tercapai karena saat ini masih sementara proses kelengkapan Dok STDB seperti SKT dan pengisisan titik koordinat pada aplikasi (BUN) - Dok RAD belum dapat diselesaikan di tahun ini karena masih dalam tahap perumusan masalah (BUN) - masih kurangnya alat combine harvaster jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian secara keseluruhan yang ada di luwu timur dan di tambah lagi dengan banyaknya	; - melakukan melakukan monitoring terhadap petugas pendataan untuk melengkapi Dok yang di maksud (BUN)	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								jumlah kerusakan alat di karenakan usia. (TPH) - sulitnya petani dalam mendapatkan BBM (Solar) (TPH)		
			Jumlah kegiatan TPH yang didampingi	2	2	Keg	**100**			
			Jumlah kegiatan perternakan yang didampingi	4	4	Keg	**100**			
			Jumlah kegiatan perkebunan yang didampingi	4	4	Keg	**100**			
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi yang di produksi IKB	129.800	95.000	Kg	**73,2**	penyesuaian harga dipasaran dengan harga yang ada di DPA. Sehingga terjadi pengurangan volume belanja disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia Masih kurangnya sarana yang digunakan dalam proses pengolahan benih padi	Menyesuaikan dengan ketersediaan jenis sarana yang digunakan dalam proses pengemasan dan penjualana benih padi	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4	4	Dok	**100**			
		Pemanfaatan SDG	Jumlah kolam perendaman merica	1	1	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Hewan/Tanaman	yang dibangun							
			Jumlah lahan perkebunan yang diidentifikasikan, direhab dan diremajakan	429,45	429,45	Ha	**100**			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	Dok	**100**			
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**presentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (Persen)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	25109	23000	ekor	**91,6**	terdapat negosiasi pada saat akan terjadi kontrak dengan rekanan dan terdapat 2 kelompok yang tidak terealisasi	Percepatan proses pengadaan mengantisipasi perlambatan proses kontrak	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**100**	**97,22**	%	**97,2**			
		Pembangunan Prasarana Pertanian	**presentase pembangunan prasarana pertanian**	**100**	**111,99**	%	**112,0**			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1	Unit	**100**			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	84	114	Unit	**135,7**			
		Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	35	30	Unit	**85,7**	Terdapat 1 paket jides tidak dilaksanakan karena	- direalisasikan di tahun anggaran	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara					lokasi tersebut berada ditengah sawah sehingga kesulitan memasukkan material	2025 - Penambahan RMU akan membantu proses pascapanen di tingkat petani	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner**	**100**	**99,46**	veteriner	**99,5**			
			Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	1,3	1,3	%	**100**			
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4	4	Lap	**100**			
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	1	1	Usaha	**100**			
		PROGRAM	**presentase pengendalian dan**	**100**	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**penanggulanagn bencana pertanian**							
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**presentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**95**	**83,8**	%	**88,2**			
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase pengendalian tingkat serangan OPT Perkebunan	95	95	%	**100**	- pada sub kegiatan pengendalian OPT ini dari target 2.500 Ha yang terealisasi seluas 1.510,77 Ha atau 60,43% hal ini di sebabkan kuota premi subsidi dari APBN sebesar 80% telah habis. Dari luasan 1.510,77 Ha, seluas 24,22 Ha di Kecamatan Angkona mengalami puso yang disesbabkan OPT (Tikus) yang terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok cipta karya seluas 9,52 Ha, kelompok Dewi uma seluas 6,15 Ha dan kelompok jaya makmur seluas 8,75 Ha. (PSP) - Wilayah luwu timur endemik hama tikussehingga sulit untuk memberantas habis tikus - petani kurang kompak	; - terbatsanya pelaksanaan kegiatan di karenakan adanya keterbatasan anggaran (Bun) - sebagian anggaran OPT Perkebunan belum terealisasi (SP2D LS belum terbit) (Bun) - untuk pengadaan Insektisida tidak dibelanjakan karena ada alokasi dari pusat dan digeser ke kegiatan peningkatan kapasitas POPT di rencanakan di bulan oktober.	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								mengikuti jadwal tanam serempak yang telah di tetapkan - petani masih kurang dalam melakukan gerakan pengendalian hama tikus (Gropyokan) maupun pengendalian lainnya - pengadaan sarana dan sarana pengendalian masih terbatas		
			Luas Lahan pertanian yang diasuransikan	2.500	1.510,77	Ha	**60,4**	Hal ini disebabkan kuota premi subsidi dari APBN sebesar 80% telah habis. Dari luasan 1.510,77 Ha, seluas 24,22 Ha di Kecamatan Angkona mengalami puso yang disebabkan OPT (tikus) yang terdiri dari 3 kelompok yaitu kelompok cipta karya seluas 9,52 Ha, kelompok Dewi Uma seluas 6,15 Ha dan kelompok jaya karya makmur seluas 8,75 Ha dan telah dibayarkan polisnya	penyuluh pertanian harus melalukan pendaftaran lebih awal agar lahan pertanian milik petani dapat tercover semua	
			Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan yang telah dikendalikan	95	95	%	**100**			
			Jumlah Luas Serangan Organisme	595	1.127,20	Ha	**189,4**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan							
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Cakupan Bina Kelompok Tani**	**58,57**	**23,97**	%	**40,9**			
			Presentase Penyuluhan Pertanian	100	100	%	**100**			
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	11	Unit	**100**			
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126	126	Unit	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**93**	**%**	**93,0**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			DPA-SKPD							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198	197	Org/bulan	**99,5**	Terdapat 1 (satu) Org pegawai yang pensiun		
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	15	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	18	Org	**85,7**	direalisasikan sesuai dengan jumlah pegawai yang melakukan bimtekyang ada - Menyesuaikan surat masuk untuk kegiatan bimtek		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bangunan Kantor								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	201	172	Dok	**85,6**	Menyesuaikan bahan bacaan yang masuk		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	3	Lap	**75,0**	Refocusing anggaran		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	Lap	**100**	Refocusing anggaran		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan PerOrgan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	0	1	Unit	**0,0**	Menyesuaikan dengan harga kendaraan dinas eselon 2 yang diadakan		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14	14	Unit	**100**			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29	29	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	164	143	Unit	**87,2**	Menyesuaikan usulan kendaraan dinas yang dapat diperbaiki (Mengganti suku cadang, service, dan membayar pajak)		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103	79	Unit	**76,7**	adanya rekofusing anggaran di TW IV sehingga untuk belanja pemeiharaan laptop, printer dan komputer di batasi		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	2	Unit	**33,3**	Efisiensi anggaran		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
	Penguatan sarana/ prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi**	10	**9,32**	%	**93,2**			
	Peningkatan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan**	4	**3**	pasar	**75,0**			
	Pemenuhan barang dan jasa sesuai standar nasional dan internasional	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	3	Unit	**75,0**			
	Peningkatan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan**	70	**100**	%	**142,9**			
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dok Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**	7,8	**3,67**	%	**47,1**			
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali**	44	**48,71**	%	**110,7**			
		Pemantauan Harga dan	Jumlah Lap Pemantauan Harga dan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11	11	Lap	**100**			
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida**	100	**73,85**	%	**73,9**			
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Lap Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal	60	55	Lap	**91,7**	Tidak melakukan perbaikan target	menentukan target kinerja tahun berikutnya sesuai proyeksi capaian sebelumnya	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Persentase peningkatan nilai ekspor**	15	**12,21**	%	**81,4**			
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang**	40	40	%	**100**			
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	5	Usaha	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5	5	Usaha	**100**			
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5	5	Usaha	**100**			
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5	5	Produk	**100**			
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP**	5	**4,17**	%	**83,4**			
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi**	70	**63,06**	%	**90,1**			
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	945	912	Unit	**96,5**			
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian									
	Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan**	1	**1**	Dok	**100**			
	Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dok revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi**	1	**1**	Dok	**100**			
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik di sektor koperasi,	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rencana Pembangunan Industri	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	perdagangan, UMKM dan perindustrian									
	Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	3	Dok	**300,0**			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	1	Dok	**100**			
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali**	54,54	**53,91**	%	**98,8**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang	1	2	Dok	**200,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar**	10	**1000%**	%	**100**			
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)**	53,85	**50**	%	**92,9**			
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	1	Dok	**100**			
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dok Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja									
	Pengembangan usaha ekonomi dan pendapatan asli desa	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase penetapan kawasan transmigrasi**	100	**100**	%	**100**			
	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Luas kawasan transmigrasi yang dicanangkan**	60	**60**	Ha	**100**			
	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dok Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	1	Dok	**100**			
	Peningkatan Kerjasama antar Daerah dan Peningkatan Kualitas Calon Warga Transmigran	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	60	60	Hektar	**100**			
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang dibangun**	60	**60**	Ha	**100**			
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah KK warga transmigran yang ditempatkan**	30	**30**	KK	**100**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	11	11	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah PeLap Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1	1	Dok	**100**			
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	30	30	Keluarga	**100**			
		Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	38	38	Keluarga	**100**			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase masyarakat transmigran yang dibina**	100	**100**	%	**100**			
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	**Jumlah satuan pemukiman transmigran yang dikembangkan**	1	**1**	Kawasan	**100**			
		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	92	92	Keluarga	**100**			
		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	1	Permukiman	**100**			

3.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur pendukung urusan pemerintahan yaitu unsur Sekretariat Daerah dan unsur Sekretariat DPRD.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024, untuk Unsur Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
1	**SEKRETARIAT DAERAH**									
	Sekretariat Daerah									
	1. Pemberian pelayanan secara optimal kepada masyarakat.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan**			%				
	2. Melaksanakan pendampingan kepada perangkat daerah dalam Menyusun regulasi yang implementatif di daerah.	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan**	4	**4**	Rekomendasi	**100**			
	Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dok Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4	4	Dok	**100**			
	Peningkatan Akuntabiitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Lap Kinerja serta Peningkatan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	50	25	Dok	**50**	masih terdapat segmen batas desa belum mencapai kesepakatan antar desa yang	mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan referensi dalam	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional							berbatasan, disaimping itu kurangnya informasi dan data yang dapat dijadikan referensi 2. Penyesuaian Kecamatan Angkona dan Kalena terkendala regulasi PP 17 tahun 2018 pasal 3 ayat 2 terkait persyaratan dasar (jumlah minimal desa setiap kecamatan).	penetapan dan penegasan batas desa 2) melakukan koordinasi dengan Biro Pemerintahan Prov. Sulsel dan Kemendagri terkait tindak lanjut penyesuain kecamatan	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan**	4	**4**	Rekomendasi	**100**			
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5	5	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dok Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2	2	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	Jumlah Dok Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Masyarakat	Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi hukum yang dilaksanakan**	100	**115,62**	%	**115,6**			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun secara ideal	400	478	Perbup	**119,5**			
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9	10	Kasus	**111,1**			
		PenDoktasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang DiDoktasi	400	465	Dok	**116,3**			
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang dihasilkan**	20	**26**	PKS	**130,0**			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4	4	Dok	**100**			
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Lap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan**	4	**4**	Rekomendasi	**100**			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	Dok	**100**			
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Lap Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	4	Lap	**100**			
		Perencanaan dan	Jumlah Dok Hasil Perencanaan dan	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil							
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan**	4	**4**	Rekomendasi	**100**			
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Lap Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12	12	Lap	**100**			
		Pengelolaan Evaluasi dan PeLap Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Evaluasi dan PeLap Pelaksanaan Pembangunan	12	12	Lap	**100**			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan**	100	**100,66**	%	**100,7**			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	12	Dok	**100**			
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dok Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	12	Dok	**100**			
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Org yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	51	Org	**102,0**			
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan**	4	**4**	Rekomendasi	**100**			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**93,55**	**%**	**93,6**	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar tidak mencapai target disebabkan beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target yakni penyediaan Gaji, pengadaan dan pemeliharaan Barang milik daerah.**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	4	4	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan**	**100**	**96,1**	**96,1**	**96,1**	**Persentase rata-rata capaian kinerja**		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			perangkat daerah					**administrasi keuangan Perangkat Daerah tidak maksimal disebabkan subkegiatan penyediaan Gaji tidak memenuhi target karena beberapa kekosongan staf pegawai yang masih kosong hingga akhir periode**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96	86	Org/bulan	**89,6**	Capaian tidak maksimal disebabkan diantaranya adalah terdapat 1 Org pegawai yang pindah ke kementerian desa dan 1 Org meninggal dunia, serta direncanakan untuk beberapa kekosongan staf.	Selanjutnya akan lebih memaksimalkan perencanaan berikutnya.	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9	9	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang	Jumlah Lap Penatausahaan Barang	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD							
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('')**	**100**	**109,33**	**%**	**109,3**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29	29	Org	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	32	Org	**128,0**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**98,39**	**%**	**98,4**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD tidak memenuhi target disebabkan terdapat beberapa subkegiatan yang mendukung kegiatan ini tidak mencapai target salah satunya karena adanya pengerjaan rehabilitas gedung kantor bupati sehingga salah satu paket logistik tidak**		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								diadakan.		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	40	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket	7	7	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 52 Paket	52	50	Paket	**96,2**	paket yang tidak terealisasi merupakan penyediaan pengharum elektrik toilet dan ruangan pada sekretariat daerah dan rumah jabatan pimpinan daerah, yang tidak direalisasikan karena gedung kantor Bupati sementara dalam pengerjaan rehabilitasi. sedangkan yang lainnya yang tidak realisasi adalah anggaran yang sifatnya disediakan untuk belanja jasa dekorasi dan tatarias jika terdapat acara ceremonial pemerintah Daerah.	Akan dilakukan penyesuaian pada Anggaran berikutnya.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket	11	10	Paket	**90,9**	Salah satu target yang tidak realisasi adalah kartu ucapan hari-hari	akan disesuaikan pada penganggaran berikutnya	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								raya besar keagamaan, hal ini tidak digunakan karena lebih menggunakan secara digitalisasi. serta belanja lainnya yang tersisa adalah belanja cetak amplop biasa dan amplop tinta emas untuk Bupati yang tidak digunakan lebih banyak menggunakan cetak print out oleh pengguna.		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1.980 Dok	1.980	1.980	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100**	**66,7**	**%**	**66,7**	**Persentase BMD yang diadakan tidak mencapai target karena beberapa tidak diproses karena adanya efisiensi anggaran**		
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	104	98	Unit	**94,2**	Meja kerja dan meja rapat tidak realisasi	Akan dilakukan pengusulan pada	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								disebabkan adanya efisiensi anggaran.	penganggaran berikutnya.	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34	19	Unit	**55,9**	Pengadaan yang tidak dilaksanakan adalah CCTV di Rujab Sekda dan Dispenser untuk rrumah jabatanPimpinan serta 4 unit Laptop yang dilakukan efisiensi anggaran.	Akan dilakukan pengusulan pada penganggaran berikutnya.	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	2	Unit	**50**	Pembangunan tidak dilaksanakan akibat adanya efisiensi anggaran.	Akan dilakukan pengusulan pada penganggaran berikutnya.	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**82,35**	**%**	**82,4**	**Persentase Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik tidak mencapai target disebabkan beberapa barang tidak dilakukan pemeliharaan karena**		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								kondisi gedung kantor bupati sedang dilakukan renovasi serta beberapa barang tidak dipelihara karena tidak ada pengajuan dari pengguna		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	40	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	2	Unit	**66,7**	Salah satu unit bus pemda sudah tidak bisa dilakukan pemeliharaan karena kondisi sudah rusak berat.	Rencana akan dilakukan hibah atau lelang.	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	77	59	Unit	**76,6**	Pemeliharaan interior tempat tidur Bupati dan sebagian lainnya pemeliharaan sofa pada Kantor Bupati yang tidak terlaksana disebabkan karena kondisi gedung kantor Bupati dalam pengerjaan Rehabilitasi.	Akan direncanakan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	115	Unit	**88,5**	Pemeliharaan ini bersifat disediakan dan penggunaan berdasarkan kebutuhan pengguna.		
		Pemeliharaan/Rehabilitas	Jumlah Gedung Kantor dan	10	8	Unit	**80,0**	Beberapa tidak	Akan dilakukan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.	pengusulan pada penganggaran berikutnya.	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Laopran Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**75**	**%**	**75,0**	**Persentase Lap administrasi Dana Operasional KDH/WKDH tidak mencapai target karena salah satu subkegiatan yang mendukung persentase ini tidak mencapai target karena KDH/WKDH tidak melaksanakan medical checkup**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	Org/Bulan	**100**			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9	9	Paket	**100**			
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Org yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8	0	Org	**0,0**	Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Bupati, Wakil Bupati beserta istri dan 2 (dua) Org anak ini tidak digunakan karena fasilitas RSUD tidak memadai di samping itu SDM terkait sedang dalam pendidikan.	akan dilaksanakan pada penganggaran berikutnya	
		Penyediaan Dana	Jumlah Org yang Menerima Dana	2	2		**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Org/Bulan				
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Rujab dan Mess**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7	8	Paket	**114,3**			
		Penataan Organisasi	**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan**	**65,05**	**66,54**	**Nilai**	**102,3**			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dok Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12	12	Dok	**100**			
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	2	Lap	**100**			
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dok Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	0	Dok	**0,0**	LHE Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian PANRB	Masih menunggu LHE Reformasi Birokrasi rilis oleh KemenpanRB	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dok Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Kinerja	Jumlah Dok Koordinasi dan Penyusunan Lap Kinerja Pemerintah	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintah Daerah	Daerah							
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah kegiatan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan yang hasilkan**	**765**	**765**	**keg**	**100**			
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Keprotokolan	255	255	Lap	**100**			
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	Lap	**100**			
		PenDoktasian Tugas Pimpinan	Jumlah Lap PenDoktasian Tugas Pimpinan	255	255	Lap	**100**			
2	**SEKRETARIAT DPRD**									
	Sekretariat DPRD									
	Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Kegiatan Legislasi yang difasilitasi**	100	**83,58**	%	**83,6**	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Kegiatan	Akan melakukan Evaluasi kinerja internal terkait penentuan target	
	Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	100	**92,31**	%	**92,3**	**pada Kegiatan Pembentukan Peraturan ranperda tidak mencapai target dikarenakan Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan**		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								dan Pembahasan Ranperda penentuan target pada anggaran pokok tinggi dan pada saat perubahan anggaran tidak melakukan pengurangan target		
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dok Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13	12	Dok	**92,3**	Target 13 Ranperda dan Terealisasi 12 Ranperda dikarenakan pada saat perubahan anggaran tidak melakukan pengurangan target.		
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dok Kajian Perundang-Undangan	13	12	Dok	**92,3**			
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran**	100	**100**	%	**100**			
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dok Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	2	Dok	**100**			
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	2	Dok	**100**			
		Pembahasan APBD	Jumlah Dok Hasil Pembahasan APBD	1	1	Dok	**100**			
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dok Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	1	Dok	**100**			
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dok Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	Dok	**100**			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan**	100	**100**	%	**100**			
		Pengawasan Urusan	Jumlah Lap Hasil Pengawasan	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4	4	Lap	**100**			
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	4	Lap	**100**			
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lap Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dok Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lap Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	Dok	**100**			
		Pembahasan Lap Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Lap Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1	1	Dok	**100**			
		Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase peningkatan kapasitas DPRD**	100	**100**	%	**100**			
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dok Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	3	Dok	**100**			
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Org dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	3	Org	**100**			
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	6	6	Org	**100**			
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dok Rencana Kerja DPRD	1	1	Dok	**100**			
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	100	**100**	%	**100**			
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dok Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3	3	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dok Hasil Pelaksanaan Reses	65	65	Dok	**100**			
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Peresentase Pelaksanaan Kode Etik**	100	**100**	%	**100**			
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3	3	Lap	**100**			
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Persentase pembahasan kerjasama daerah**	100	**100**	%	**100**			
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dok Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	27	27	Dok	**100**			
		Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	100	**92**	%	**92,0**	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capian Kinerja tidak mencapai Target.	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2025	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80	67	Dok	**83,8**	Jumlah Dok Koordinasi dan Konsultasi Pelasanaan Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan Target 80 Dok dan terealisasi 67 Dok Atau sebesr 83,75% dikarenakan untuk perjalanan Pimpinan disediakan Apabila ada undangan pimpinan pada saat mengikuti Rakor	Akan Membuat Buku Kontrol terkait Pimpinan	
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Musyawarah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**91,56**	**%**	**91,6**	Secara Umum Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Kegiatan	Akan Melakukan Penyesuain Target Pada Tahun 2025	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan , penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lap	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasi sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**90**	**%**	**90,0**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	16	Org	**80,0**	Jumlah Org yang mengikuti bimbingan teknis Target 20 Org dan Terealisasi 16 Org atau 80%. Hal ini disebabkan Kgiatan ini sifatnya disediakan berdasarkan undangan untuk mengikuti bimtek	; Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**90,67**	**%**	**90,7**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	9	%	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	6	6	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Logistik Kantor	yang Disediakan 6 Paket							
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	80	Lap	**72,7**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi**	**100**	**69,17**	**%**	**69,2**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	7	Unit	**70,0**			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	3	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	3	Unit	**37,5**	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainya Yang Disediakan. Target 8 Unit terealisasi 3 unit atau 37,50%. Di karenakan Adanya Efisiensi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**95,24**	**%**	**95,2**	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capian Kinerja tidak mencapai Target.		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21,00	18,00	Lap	**85,7**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**88,32**	**88,32**	**88,3**	Kegiatan ini Telah di Laksanakan Namun Belum Melakukan Perubahan Target Pada Sub Kegiatan Sehingga Realisasi Capian Kinerja tidak mencapai Target.	Menetapkan Target yang spesifik, terukur, dan realistis untuk memperbaiki kinerja. Tujuan ini harus dapat diukur dan memiliki batas waktu yang jelas.	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	11	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190	79	Unit	**41,6**	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaan. Target 190 Unit dan Terealisasi 79 Unit Atau 41,58%	Menetapkan Target yang spesifik, terukur, dan realistis untuk memperbaiki	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								dikarenakan adanya Efisiensi di sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD	kinerja. Tujuan ini harus dapat diukur dan memiliki batas waktu yang jelas.	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6 Unit	6	6	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit	3	3	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	Unit	**100**			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100**	**86,67**	**%**	**86,7**			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35	35	Org/Bulan	**100**			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	35	35	Paket/org	**100**			
		Pelaksanaan Medical	Jumlah Org yang Mengikuti Medical	35	21	Org	**60,0**	Jumlah Pimpinan Dan	Akan selalu	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Check Up DPRD	Check Up DPRD					Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 35 Org Realisasi 21 Org 60% dikarenakan masih padatnya kegiatan pimpinan dan anggota dewan	mengingatkan pimpinan dan anggota dewan untuk MCU	
		Layanan Administrasi DPRD	**persentase layanan administrasi DPRD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			

3.2.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari unsur Keuangan, unsur Perencanaan, unsur Penelitian dan Pengembangan dan unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta Kesatuan Bangsa. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024, untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
	Peningkatan kualitas produk perencanaan	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD**	100	**100**	%	**100**			
	Pengembangan kualitas data dan informasi pembangunan daerah	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Dok Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu**	100	**100**	%	**100**			
	Peningkatan kualitas evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dok Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	**2**	Dok	**100**			
	Memantapkan sistem koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Penelaahan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dok Kebijakan	Jumlah Telaahan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1	**1**	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Lainnya								
	1.Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	**2**	BA	**100**			
	2.Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, asset, dan penyusunan Lap kinerja	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2	**2**	BA	**100**			
	3.Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimtek formal dan fungsional	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	BA	**100**			
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	385	385	Usulan	**100**			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Dok perencanaan yang dianalisis**	95	**95%**	%	**100**			
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dok Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2	1	Dok	**50**			
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Jumlah Org yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	41	41	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pembangunan SKPD								
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	1	Buku	**100**			
		Pengendalian, Evaluasi dan PeLap Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Dok Pengendalian, Evaluasi dan PeLap Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan tepat waktu**	**100**	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	2	Lap	**100**			
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1	1	Sama	**100**			
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Lap Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Lap Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	8	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja**	100	**100**	%	**100**			
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100	100	%	**100**			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan**	100	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pembangunan manusia Persentase perangkat daerah lini koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menerapkan anggaran responsi gender							
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Lap Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Lap Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	pada Bidang Pembangunan Manusia							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Lap Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Lap Hasil Sinkronisasi	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase kesesuaian program perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Lap Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penyusunan Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**95**	**%**	**95,0**			
		Perencanaan,	**Persentase Penyusunan Dok**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**							
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Lap	14	14	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah	**Perangkat Daerah**							
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	13	Org	**65,0**	Efisiensi anggaran		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6	6	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainya	7	7	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	30	Unit	**75,0**	efisiensi anggaran		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	Unit	**50**	Pemeliharaan gedung kantor (perbaikan papan nama kantor) tidak dilaksanakan, karena penetapan perubahan organisasi belum mengalami perubahan terhadap nomenklatur OPD sesuai dengan Perda	Menunggu perubahan nomenklatur OPD sesuai perda dan perbub	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								dan Perbub yang ada		
2	**KEUANGAN**									
	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
	Peningkatan kapasitas SIstem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen keuangan yang terintegrasi	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	97	**99,58**	%	**102,7**			
	Mendorong Peningkatan Kapasitas Pegelola Keuangan	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Waktu penyusunan Rancangan APBD Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020**	11	**11**	Minggu	**100**			
	Menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA PPAS	2	2	Dok	**100**			
	Menguatkan penerapan defisit dan pembiayaan dalam perencanaan anggaran keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	2	Dok	**100**			
	Meningkatkan perencanaan keuangan daerah yang terukur dan transparan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	59	59	Dok	**100**			
	Pengembangan kapasitas sistem pengelolaan keuangan dengan pemutakhiran sistem manajemen aset/ barang milik daerah	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	59	59	Dok	**100**			
	Mendorong peningkatan kapasitas pengelola penatausahaan aset dan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	71	72	Dok	**101,4**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	barang milik daerah									
	menguatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	Dok	**100**			
	Pengembangan sistem Operasional Pelayanan OPD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	5	Dok	**100**			
	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan OPD	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dok Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	25	25	Dok	**100**			
	Optimalisasi sarana Pelayanan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Org yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	236	236	Org	**100**			
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi penatusahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persen 280.397.200**	280.397.200	**280.397.200**	%	**100**			
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	12	Dok	**100**			
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	240	240	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLap Keuangan Daerah	**Persentase akuntansi dan peLap keuangan yang terkoordinasi dan terlaksana**	97	**93,61**	%	**96,5**			
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	12	Lap	**100**			
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	236	236	Dok	**100**			
		Koordinasi Penyusunan Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	18	Lap	**100**			
		Konsolidasi Lap Keuangan SKPD, BLUD dan Lap Keuangan Pemerintah	Jumlah Lap Keuangan SKPD, BLUD dan Lap Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	18	18	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah								
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	Dok	**100**			
		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dok Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Lap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	Dok	**100**			
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	2	Dok	**100**			
		Pembinaan Akuntansi, PeLap dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Org yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLap dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	236	236	Org	**100**			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	**Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah								
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Lap Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3	3	Lap	**100**			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	Lap	**100**			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terkelola Dengan Baik**	91	**91**	%	**100**			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Pengelolaan BMD Perangkat Daerah Yang Tertata Dengan Baik**	59	**59**	Daerah	**100**			
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	2	Dok	**100**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	2	Dok	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	Lap	**100**			
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	1	Lap	**100**			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	2	Lap	**100**			
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	2	Lap	**100**			
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Rekonsiliasi dalam rangka	Jumlah Lap Hasil Rekonsiliasi dalam	118	118	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Lap Barang Milik Daerah	rangka Penyusunan Lap Barang Milik Daerah							
		Penyusunan Lap Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Barang Milik Daerah yang Disusun	1	1	Lap	**100**			
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Org yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	118	118	Org	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**96**	**%**	**96,0**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	Org/b	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						ulan				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	Lap	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**86**	**86**	**86,0**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	Dok	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	375	375	Org	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	49	Org	**81,7**	Dapat kami jelaskan bahwa pada triwulan 4 dilakukan efisiensi	akan lebih cermat dalam penetapan anggaran	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								anggaran		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**99,25**	**%**	**99,3**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 144 Dok	144	136	Dok	**94,4**	Tidak terpenuhinya klaim permintaan pembayaraan dari pihak penyedia tabloid	akan melakukan komunikasi secara berkala dengan pihak penyedia	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Lap	2	2	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175 Lap	175	173	Lap	**98,9**	efisiensi anggaran	lebih cermat dalam penetapan anggaran	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**72,81**	**72,81**	**72,8**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit	10	10	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit	55	21	Unit	**38,2**	menyesuaikan kondisi peralatan yang perlu diperbaiki.	lebih cermat dalam penetapan anggaran	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	1	1	Bangunan	**100**			
	Badan Pendapatan Daerah									
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah**	97,7	**97,7**	%	**100**			
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah**	97,7	**97,7**	%	**100**			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Bapenda	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dok Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4	4	Dok	**100**			
	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bapenda	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dok Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8	8	Dok	**100**			
	Peningkatan Tertib	Penyuluhan dan	Jumlah Lap Pelaksanaan Penyuluhan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Administrasi PeLap Kinerja Bapen	Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Lap Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	Lap	**100**			
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 115.000 Obyek Paja	115.000	115.000	Pajak	**100**			
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dok Ketetapan Pajak Daerah	145	145	Dok	**100**			
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	24	24	Layanan	**100**			
		Penelitian dan Verifikasi Data PeLap Pajak Daerah	Jumlah Data PeLap Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	Dok	**100**			
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	98	98	Dok	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar 96,5**	**96,5**	**94,25**	**%**	**97,7**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah								
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**91,5**	**%**	**91,5**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	27	Org/bulan	**93,1**	Tunjangan Objek Lainnya tidak dapat dibayarkan sepenuhnya di Triwulan III karena tidak mencapai target realisasi sebesar 70 yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**93**	**%**	**93,0**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	450	90	Org	**20,0**	Tidak mencapai target karena kegiatan yang akan dilakukan terkait sosialisasi kepada wajib pajak penganggarannya dipindahkan ke bidang teknis yang terkait		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	27	Org	**93,1**	Efesiensi Perjalanan Dinas		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata - rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**92,79**	**%**	**92,8**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1	Paket	**50**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	14	Paket	**77,8**	Tidak melakukan penyesuain target	Untuk melakukan pencermatan target pada anggaran perubahan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	3	Lap	**75,0**	Tidak melakukan penyesuain target	Untuk melakukan pencermatan target pada anggaran perubahan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160	118	Lap	**73,8**	Tidak melakukan penyesuain target	Untuk melakukan pencermatan target pada anggaran perubahan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**92,79**	**%**	**92,8**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39	39	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	42	42 Unit	**87,5**	Efesiensi Anggaran yang mana pengadaan dianggap tidak mendesak dan tidak mengganggu operasional kantor		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	1	1 Unit	**50**	Efesiensi Anggaran yang mana pengadaan dianggap tidak mendesak dan todak mengganggu operasional kantor		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	**Persentase rata - rata capaian kinerja penunjang urusan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintahan Daerah	**pemerintahan daerah**							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**84,345**	**%**	**84,3**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	6	Unit	**75,0**	Sifatnya disediakan	; Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	18	Unit	**52,9**	Sifatnya disediakan	; Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**	Sifatnya disediakan	; Anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3	**KEPEGAWAIAN**									
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	Pemberian penghargaan terhadap ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat**	98	**100**	%	**102,0**	Dari 5.286 Org ASN Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 yang terdiri dari 3.675 Org PNS dan 1.611 Org PPPK telah memiliki data kepegawaian yang akurat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi Simpeg		
	. Penegakan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (Persen)**	95	**100**	%	**105,3**			
	Penerapan proses kegiatan dan program terencana dari tahap proses awal penyusunan, pelaksanaansampai dengan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dok Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dok Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dok Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase rata - rata capaian pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN (%)**	95	**100**	%	**105,3**			
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	4	Dok	**100**			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	4	Dok	**100**			
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dok Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	1	Dok	**100**			
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase rata-rata capaian Pengembangan Kompetensi ASN**	95	**99,9**	%	**105,2**			
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang mengikuti Assessment (JPT, Adminstrator, Pengawas dan JFU)	2	2	Dok	**100**			
			Jumlah Dok Pengelolaan Assessment Center	4	4	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5	5	Org	**100**			
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1750	1.736	Org	**99,2**	Target Kinerja Sub Kegiatan ini adalah 1.750 orang, namun realisasi yang diiperoleh tidak mencapai target. Permasalahan yang dihadapi adalah saat dilakukan kegiatan pengukuhan sebanyak 3	mengagendakan kembali jadwal pengukuhan/pengambilan sumpah bagi pegawai fungsional yang tidak hadir	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								kali pelaksanaan terdapat beberapa peserta tidak hadir pada saat pengambilan sumpah.		
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase rata - rata capaian Penilaian dan Evauasi Kinerja Aparatur**	95	**102,2**	%	**107,6**			
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4	4	Dok	**100**			
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	84	84	Org	**100**			
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	9	10	Org	**111,1**			
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dok Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Lap Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	1	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar 98**	**98**	**97,07**	**%**	**99,1**	**Terdapat kegiatan yang tidak mencapai 100% sehingga memengaruhi capaian kinerja program penunjang**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 10 Dok	10	10	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**79,17**	**%**	**79,2**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	4	Org	**50**	Terealisasi 4 Org diantaranya 1 Org yang mengikuti kegiatan	Anggaran refocusing dan Silpa akan dikembalikan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								Coaching Clinic Pendampingan sensus/Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk tahun Anggaran 2023, 3 Org yang mengikuti Bimtek penerapan aplikasi sistem pengelolaan BMD (e-BMD)berbasis Permendagri NO. 47 Tahun 2021 Lingkup Pemkab Lutim	ke Kas Daerah	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3	2	Org	**66,7**	Terealisasi 2 org diantaranya 1 Org sosialisasi Permenpan RB RI Nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi dan 1 Org mengikuti sosialisasi pengawasan pemilihan secara tatap muka dengan Pemprov Sulsel dengan tema "Deklarasi Netralitas Kepala Desa Se- Sulsel pada pemilihan serentak tahun 2024	Anggaran refocusing dan Silpa akan dikembalikan ke Kas Daerah	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30	30	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	4	Dok	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('')**	**100**	**91,67**	**91,67**	**91,7**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	2	Unit	**66,7**	Terealisasi 2 unit kendaraan dinas roda dua (Yamaha Aerox). 1 unit kendaraan dinas yang		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								direncanakan direalisasikan pada APBD-P tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya reefocusing anggaran		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59	59	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	11	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76	76	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			
4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	1. Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan diklat	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/Tahun**	40	**58,29**	%	**145,7**			
	2. Pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan bersertifikasi didasarkan prioritas dan hasil analisis kebutuhan diklat manajerial dan fungsional	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM**	100	**91,71**	%	**91,7**	**Terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mencapai 100% sehingga memengaruhi capaian kinerja kegiatan**		
		Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	356	297	Org	**83,4**	Sampai dengan Triwulan IV terdapat 7 jenis	menganggarkan kembali kegiatan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						pengembangan kompetensi teknis yang dilaksanakan dengan mengunanakan anggaran BKPSDM dengan jumlah peserta bimtek sebanyak 297 Org, diantaranya: 1. Bimtek Standarisasi Penyusunan dan Pubikasi Artikel Ilmiah bagi Guru Penggerak sebbanyak 30 Org peserta; 2. Bimtek Smart Farming dengan peserta sebanyak 40 Org; 3. Bimtek Perencanaan dan Penglolaan Keuangan Daerah sebanyak 56 Org peserta; 4. Bimtek Pengembangan Kompetensi Camat dan Lurah sebanyak 30 Org peserta; 5. Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah sebanyak 54 Org peserta; 6. Bimtek Pengelolan Bantuan Operaiona Satuan Pendidikan (BOSP) sebanyak 52 Org peserta; 7. Bimtek Manajemen Kepegawaian sebanyak	bimtek renstra tersebut pada tahun berikutnya	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								50 Org peserta.		
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan PeLap Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dok Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan PeLap Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	6	6	dok	**100**			
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	100	**21,4**	%	**21,4**	Dari 4.786 Org Pejabat Struktural dan Fungsional (Struuktural 400 Org dan Fungsional 4.386 Org) terdapat 1.024 Org yang telah dikembangkan kompetensi manajerial dan fungsionalnya.Jumlah ini berkurang karena adanya pejabat struktural maupun pejabat fungsinla yang Pensiun, meninggal Dunia dan Mutasi keluar daerah. serta Bertambahnya jumlah pejabat fungsional PPPK sebanyak 309 Org di tahun 2024	**menambah kuota peserta diklat fungsional maupun manajerial serta melalukan update data pegawai yang telah mengikuti diklat mandiri**	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								mengakibatkan capaian realisasi ini menurun dari tahun sebelumnya		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	9	9	Kebijakan	**100**			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Lap Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3	3	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
	Pengembangan dan penguatan inovasi daerah	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan didaerah**	20,51	**19,05**	%	**92,9**			
	Peningkatan kualitas data hasil penelitian/ pengembangan		Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	%	**100**			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Dok penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang termanfaatkan**	1	**1**	Dok	**100**			
		Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1	1	Rekomendasi	**100**			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Dok penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang termanfaatkan**	1	**1**	Dok	**100**			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dok Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	Dok	**100**			
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Dok penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang termanfaatkan**	3	**3**	Dok	**100**			
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi,	Jumlah Dok Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha	1	1	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Usaha Kecil dan Menengah	Kecil dan Menengah							
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dok Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1	1	Dok	**100**			
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dok Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1	Dok	**100**			
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi**	100	**100**	%	**100**			
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1	1	Lap	**100**			
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Lap Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Peningkatan kerjasama dengan dengan instansi terkait dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan**	100	**91,66**	%	**91,7**	Kebijakaan terkait peningkatan kesadaran bela negara yang tidak dapat dilaksanakan/diimplementasikan dalam kegiatan karena ada efisiensi anggaran -		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Persentase capaian pelaksanaan koodinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan**	66,2	**66,75**	%	**100,8**			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Org yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60	0	Org	**0,0**	Kegiatan Rapat Kerja Forum Bela Negara dan Peringatan Hari Bela Negara yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya efisiesi anggaran		
		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	70	70	Org	**100**			
	Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada masyarakat	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase capaian Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase capaian peningkatan partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik %**	100	**100**	%	**100**			
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dok Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4	4	Dok	**100**			
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Org yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	20	20	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan PeLap di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Lap Hasil Monitoring, Evaluasi dan PeLap di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	Lap	**100**			
	Melakukan Pembinaan kesadaran politik kepada Masyarakat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi %**	100	**100**	%	**100**			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi**	104	**164**	Ormas	**157,7**			
		Pelaksanaan Monitoring	Jumlah Lap Hasil Monitoring,	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Evaluasi dan PeLap Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan PeLap di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
	Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	**100**	**100**	%	**100**			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta kerukunan umat beragama %**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Org yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	446	346	Org	**77,6**	Kegiatan Expose akhir Pengukuran IKUB tidak dilaksanakan dikarenakan adanya efisiensi anggaran	Dilakukan koordinasi awal dengan pihak LITBANG AGAMA Makassar	
	Peningkatan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini terhadap konflik	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**	**Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		SOSIAL								
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Org Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Org yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Org Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300	300	Org	**100**			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan PeLap di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Org Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lap Hasil Monitoring, Evaluasi dan PeLap di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Org Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	4	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar 97**	**97**	**88,52**	**%**	**91,3**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	14 Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Lap	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang	Jumlah Lap Penatausahaan Barang	4	4	4 Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase lapran data administrasi kepegawaian yang dimuktakhirkan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	6	6 Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**97,14**	**%**	**97,1**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	4	Paket	**80,0**	Pengadaan gorden tidak direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	60	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	4 Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**91,66**	**45,833**	**91,7**			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	4	Unit	**66,7**	Pengadaan dinas roda dua tidak direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	34	34	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	Unit	**100**			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	4	4	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	31	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			

3.2.6 UNSUR PENGAWASAN

Unsur pengawasan terdiri dari inspektorat daerah. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024, untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Unsur Pengawasan
Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
1	**INSPEKTORAT DAERAH**									
	Inspektorat									
	1). Meningkatkan Pengawasan Intern SKPD terhadap Pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan Barang & Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bansos dan bantuan lainnya	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Presentase Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan PKPT**	95	**95**	%	**100**			
	2). Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengawasan di Tingkat SKPD dan Desa	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Presentase pelaksanaan pengawasan internal Presentase pelaksanaan pengawasan internal**	95	**95**	%	**100**			
	1). Menjadi Mitra SKPD, Pemerintah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	212	212	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Desa, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka asistensi, konsultasi dan reviu									
	2). Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan, Optimalisasi Pemberdayaan aset daerah dan desa serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	441	441	Lap	**100**			
	Meningkatkan dan Mengefektifkan sistem pelayanan administrasi Perkantoran	Reviu Lap Kinerja	Jumlah Lap Hasil Reviu Lap Kinerja	3	3	Lap	**100**			
		Reviu Lap Keuangan	Jumlah Lap Hasil Reviu Lap Keuangan	7	7	Lap	**100**			
		Pengawasan Desa	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Desa	125	125	Lap	**100**			
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan	4	4	Kesep	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Internal yang Terbentuk			akatan				
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dok Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	12	Dok	**100**			
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Presentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi Presentase Kasus yang ditangani dan diberikan rekomendasi**	95	**95**	%	**100**			
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Lap Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12	12	Lap	**100**			
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Lap Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	27	27	Lap	**100**			
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Presentase Obrik Pemeriksaan yang dibina**	95	**95**	%	**100**			
		Pendampingan dan Asistensi	**Presentase obrik binaan yang didampingi**	95	**95**	%	**100**			
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	41	daerah	**100**			
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	41	daerah	**100**			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	4	Keg	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**Persentase Penunjang Urusan**	**100**	**94,61**	**%**	**94,6**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu Persen**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 4 Dok	5	5	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lap	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Presentase adminitrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	51	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	19	19	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**79,9**	**%**	**79,9**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	45	41	Org	**91,1**	Terdapat kendala terkait jadwal pelaksanaan yang	Akan dilakukan Penyesuaian diklat	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Pendidikan dan Pelatihan					berpindah-pindah waktu sehingga berdampak pada jadwal pelaksanaan PKPT	bagi APIP sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan PKPT	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200	25	Org	**12,5**	Direncanakan dilaksanakan pada Triwulan 4, Namun BPKP Selaku Narasumber memiliki agenda yang padat sampai dengan akhir tahun	; Akan dilakukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**99,04**	**%**	**99,0**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48	48	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	16	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11000	10.264	Paket	**93,3**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan disesuaikan dengan Jumlah Kebutuhan	; Akan dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja sesuai kebutuhan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	60	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			yang Disediakan 60 Dok							
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69 Lap	69	69	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persen**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1300	1.300	Lap	**100**	Jumlah Penyediaan Surat menyurat disesuaikan dengan kebutuhan	; Akan dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	24	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**91,67**	**%**	**91,7**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	33	Unit	**75,0**	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara disesuaikan dengan kebutuhan yang dalam kondisi rusak dan butuh pemeliharaaan rutin	; Akan dilakukan Penyesuaian Target terhadap Peralatan dan Mesin yang dipelihara	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Unit	**100**			

3.2.7 UNSUR KEWILAYAHAN

Unsur kewilayahan terdiri dari seluruh kecamatan yang ada dikabupaten Luwu Timur yang berjumlah sebelas (11) Kecamatan. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 Tahun Pelaksanaan 2024, untuk Urusan Kewilayahan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Unsur Kewilayahan
Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Unsur Kewilayahan										
1	**KECAMATAN**									
	Kecamatan Burau									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Lap Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**12**	**12**	**Lap**	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	**5**	**5**	**Lembaga**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**12**	**12**	**Lap**	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**4**	**4**	**Lap**	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Umum kecamatan							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (Persentase)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36	36	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18	18	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**99**	**%**	**99,0**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dok perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan	Jumlah Dok perencanaan perangkat	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perangkat Daerah	daerah yang disusun							
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	8	8	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Peraturan Perundang-Undangan							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD**	**100**	**93,75**	**%**	**93,8**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	16	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	53	Dok	**88,3**	Target kinerja Sub Kegiatan ini tidak tercapai disebabkan karena kurangnya examplar koran yang masuk	Akan dilakukan perbaikan langganan koran di tahun berikutnya	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD Pemerintah Daerah penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	20	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	6 Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	24	24 Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1 Unit	**100**			
	Kecamatan Towuti									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perizinan Non Usaha								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan	5	5	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan	**Persentase koordinasi upaya**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**							
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11	11	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**ase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36	36	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**Persentase Penunjang Urusan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	Kali	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16	16	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dok	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Org	5	5	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**70**	**%**	**70,5**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket	1	1	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket	1	1	Paket	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**88,89**	**%**	**88,9**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	13	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1	0	Unit	**0,0**	Tidak Terlaksana di karenakan Konsultan		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan					Memutus kontrak Secara Sepihak		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	15	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	29	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam kondisi baik	1	1	Bangunan	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kecamatan Nuha									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase urusan pemerintaha n yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan Persentase koordinasi kegiatan pemberdaya an desa yang dilaksanakan ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4	4	4	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan yang dilaksanaka n ('%) Persentase koordinasi kegiatan**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			pemberdayaan desa yang dilaksanakan							
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	1	Unit	**100**			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2	Pokmas / Ormas	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelesaian Kasus Ketentraman dan ketertiban umum yang di mediasi (%) Persentase Penyelesaian Kasus Ketentraman dan ketertiban umum yang dimediasi**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanju ti ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase penyelengga raan pemerintaha n desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundanga n yang berlaku ('%) Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	12	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		di Wilayah Kecamatan	Perdesaan di Wilayah Kecamatan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**99**	**%**	**99,0**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggar a dengan baik (') Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3	3	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			SKPD							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah (') Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	6	Org	**120,0**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	9	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	5	5	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan							
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (') Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (') Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**91,91**	**%**	**91,9**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	16	Unit	**80,0**	Karena kurangnya sarana yang rusak	Perencanaan ulang dan strategi baru	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11	9	Unit	**81,8**	Anggaran sifatnya disediakan ketika sarpras membutuhkan rehab	Untuk melakukan penyesuaian target pada perubahan anggaran	
	Kecamatan Wotu									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**16,7**	%	**16,7**	**tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat yang di Laksanakan %**	100	**16,7**	%	**16,7**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Lap Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	2	Lap	**16,7**	Berdasarkan Lap yang diambil pada dinas perizinan pelayan terpadu bahwa untuk tahun ini hanya ada 2 Org yang melakukan pembuatan IMB pada wilayah kecamatan wotu	Agar kiranya kantor dinas perizinan pelayanan terpadu banyak melakukan koordinasi dengan kecamatan serta melakukan peninjauan	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									langsung ke lapangan bersama dengan penegak perda untuk melihat langsung masyarakat yang membangun pada wilayah kecamatan wotu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di Laksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum %**	100	**93,75**	%	**93,8**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan %**	100	**94**	%	**94,0**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	12	11	Lap	**91,7**	Tidak terlaksananya kegiatan rapat, serta permohonan izin	akan melakukan peningkatan terkait monitoring yang	

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					keramaian berdampak pada jumlah realisasi laporan.	berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja	
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	10	Lap	**83,3**	permasalahan terkait sengketa lahan yang masih berproses, serta adanya gangguan ketentraman yang masih ditindaklanjuti	akan melaksanakan pembinaan kepada Anggota Linmas dan berkoordinasi secara intens, serta melakukan peningkatan intensitas patroli bersama dengan Polsek, Koramil serta Satpol PP pengecekan lokasi terkait gangguan sesuai peraturan perundang-undangan.	
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) Persen**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan %**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang di tindaklanjuti %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di Laksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34	34	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17	17	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**87,5**	**%**	**87,5**	**Tidak tercapaianya target kinerja pada Sub kegiatan PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	18	18	Org	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang di Administrasikan sesuai Standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**%**	**0,0**			
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	12	0	Dok	**0,0**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Org yang Mengikuti	4	4	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persenatse Rata-rata Capaian Kinerja Administrsi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	6	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	48	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prsentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang yang Terpenuh**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	3 Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			
	Kecamatan Tomoni									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**0%**	%	**0,0**	**tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang**	100	**0**	%	**0,0**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			dilaksanakan (%) % %							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	24	0	Dok	**0,0**	Kecamatan tidak lagi melayani pelaksanaan perizinan dan untuk sementara pelaksanaan perizinan diambil alih langsung oleh kabupaten	Menyesuaikan kembali indikator sub kegiatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%) persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13	13	Lap	**100**			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	2	Unit	**100**			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2	Ormas	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI	**Persentase Rata-rata capaian**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum %**							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%) persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	12	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan perda dan perkada Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan %**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) %**	42	**42**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36	36	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**96,23**	**%**	**96,2**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (") Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasika n sesuai standar (") Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	0	Dok	**0,0**	Kegiatan ini tidak dilaksanakan sebab pada perubahan anggaran, pagu anggaran dialihkan untuk urusan yang lebih		

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
								urgent		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('') Persentase Rararata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	%	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('') Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**77,5**	**%**	**77,5**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan	2	2	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Tamu							
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520	480	Lap	**92,3**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('') Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (')**	**100**	**75,09**	**%**	**75,1**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	Unit	**0,0**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	0	Unit	**0,0**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (') Persentase Rata- Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500 Lap	1500	1.500	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Lap	8	8	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Lap	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Lap	24	24	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik	**Persentase Barang Milik Daerah**	**100**	**36,36**	**%**	**36,4**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('') Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	0	Unit	**0,0**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	9	Unit	**75,0**			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	3	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	21	Unit	**47,7**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	Unit	**100**			
	Kecamatan Mangkutana									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepda Camat yang Dilaksanakan (%)**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	**Persentase Capaian Kinerja**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan %**							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	10	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8	8	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) Persen**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi	8	8	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan %**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) Persen**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan (%) %**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22	22	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**98,13**	**%**	**98,1**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dok Perencanaan penganggaran dan**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Evaluasi Tepat Waktu							
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan yang Terselenggarakan dengan Baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	18	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja adminidtrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**85**	**%**	**85,0**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	5	Org	**62,5**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	9	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	96	96	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750	750	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	4	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2	2	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Lainnya	Lainnya yang Disediakan							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14	14	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kecamatan Tomoni Timur									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**[deleted] Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	Lap	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan Persentase koordinasi**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%) Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%) Persen %							
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%) Persen %**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan %**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) Persen %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) Persentase**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) Persen % %							
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	8	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**99,9**	**%**	**99,9**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap kinerja yang disusun 7 Dok	7	7	Dok	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (') Persentase rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	4	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**92,55**	**%**	**92,6**			
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12	12	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24	24	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	53	Dok	**88,3**	Dalam Perencanan Bahan Bacaan (Koran) Kec. Burau dianggarkan 60 Exp, namun hanya 53 exp saja yang terealisasi sesuai dengan SPJ	Akan dilakukan penyesuaian dan perbaikan kedepannya	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9	9	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	9	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	1	1	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Baik	21	21	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Kecamatan Kalaena									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) % %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6	6	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%) Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		UMUM	**ketertiban umum %**							
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN	**Persentase penyelengaraan**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku %**							
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) % %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	14	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7	7	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**99,44**	**%**	**99,4**	Realisasi kinerja pada program ini tidak tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan disebabkan karena capaian pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah hanya mencapai 95%	Akan dilakukan perbaikan pada penetapan target kinerja pada tahun-tahun berikutnya	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan Dok perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13	13	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	3	3	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**95**	**%**	**95,0**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	7	7 Org	**87,5**	Target kinerja Sub Kegiatan ini tidak tercapai disebabkan karena Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA yang awalnya direncanakan akan dilaksanakan namun akibat adanya Refocusing anggaran yang dialami oleh SKPD pelaksana kegiatan menyebabkan kegiatan ini batal dilaksanakan dan hal tersebut menjadi faktor utama sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini hanya mencapai 87,50..	Akan dilakukan penyesuaian target capaian pada tahun-tahun berikutnya dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah yang menangani kegiatan Bimtek	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	6 Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12 Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	5 Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	36	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78	78	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	6	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	34	34	Unit	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Lainnya	yang Dipelihara							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			
	Kecamatan Angkona									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan (%) Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang diselesaikan % %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	900	900	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) Persen**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11	11	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan (%) %**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8	8	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**98,11**	**98,11**	**98,1**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pesentase Dok perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Lap keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**100**	**97,45**	**97,45**	**97,5**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			dan termanfatkan							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	18	Lap	**94,7**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase peLap BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	5	Org	**125,0**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kubutuhan umumperangkat daerah yang terpenuhi**	**100**	**100**	**99,79**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	66	Dok	**91,7**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemrintah Daerah yang diadakan**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	Unit	**100**			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	7	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	3	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			yang Disediakan							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD Penunjang Urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	21	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	Unit	**100**			
	Kecamatan Malili									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah urusan pemerintahan yg di limpahkan kepada camat yg di laksanakan**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	4	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	15	Lembaga	**100**			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	Lap	**100**			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yg dilaksanakan %**	100	**100**	%	**100**			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	2	Ormas	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase penyelesaian kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kasus intoleransi sa'ra yang di selesaikan di tingkat kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku %**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)**	**100**	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15	15	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**99,5**	**79,53**	**99,5**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dok perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja PD yg disusun tepat waktu**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil	2	2	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 2 Dok							
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 2 Dok	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lap	10	10	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	21	Org/bulan	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		PeLap Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Lap Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	Dok	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	Dok	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Org yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	5	Org	**100**			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**96,64**	**%**	**96,6**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	12	Paket	**80,0**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	15	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	200	200	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	8	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	200	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	Unit	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD penunjang yang di pelihara**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	17	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	Unit	**100**			
	Kecamatan Wasuponda									
	Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dok Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	4	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	**Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa**	100	**92,5**	%	**92,5**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		KELURAHAN	**dan Kelurahan**							
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)**	100	**92,5**	%	**92,5**			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	140	120	Lembaga	**85,7**	Tidak melakukan penyesuaian target	Untuk mencermati perubahan target saat perubahan anggaran	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	Lap	**100**			
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Lap Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5	5	Lap	**100**			
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) %**	100	**100**	%	**100**			
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Lap Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang	5	5	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan**	100	**100**	%	**100**			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)**	100	**100**	%	**100**			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dok Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	5	Dok	**100**			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku**	100	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) %**	**100**	**100**	%	**100**			
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dok yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	6	Dok	**100**			
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lap Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5	5	Lap	**100**			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar**	**100**	**99,3**	**%**	**99,3**			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar**	**100**	**100**	**%**	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok perencanaan perangkat daerah yang disusun	4	4	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	2	2	Dok	**100**			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (')**	**100**	**94**	**%**	**94,1**			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Org yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	16	Org/bulan	**94,1**			
		Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap	4	4	Lap	**100**			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15	15	Dok	**100**			
		Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Org yang Mengikuti	4	4	Org	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	20	Paket	**100**			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	Paket	**100**			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	Dok	**100**			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	495	495	Lap	**100**			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	878	878	Lap	**100**			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	Unit	**100**			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (')**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000	1000	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Lap Penyediaan Jasa	2	2	Lap	**100**			

No	Arah Kebijakan	Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	satuan	Tingkat Capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Lap	**100**			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**	**100**	**100**	**%**	**100**			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrgan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	9	Unit	**100**			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	Unit	**100**			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit	**100**			

3.3 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, guna memperlancar dan keterpaduan pencapaian dan perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi satuan unit kerja pemerintah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan strategis tersebut diperkuat dengan dasar hukum sehingga penerapannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.9
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak daerah di Kabupaten Luwu Timur.	Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor : KEP-59/PJ.08/2023 Nomor : KEP-24/PK.5/2023 Nomor , 147.543/91/PKS/PEM-LT/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	1 Mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 2 Mengoptimalkan penyampaian data IKD dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional 3 Mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama 4 Mengoptmalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan 5 Meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada PARA PIHAK di bidang perpajakan 6 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang perpajakan. 7 Meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah 8 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perpajakan daerah 9 Mendorong terciptanya sinegritas data antara PARA PIHAK 10 Mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
		Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 054/VIII/Pem.OTDA-KB/2023, Tanggal 28 Agustus 2023	
		1. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Malili Nomor : 147.543/96/PKS/PEM-LT/IX/2023	
		Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Dengan :	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		2. PT. Bank Negara Republik Indonesia , Nomor : 147.543/97/PKS/PEM-LT/IX/2023	
2	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 36/F-05/I/TAHUN 2024,Tanggal 4 Januari 2024 tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Meningkatkan penerimaan PAD yang merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan melakukan upaya intensifikasi dan extensifikasi diantara : 1 Melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2 Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 3 Monitoring dan evaluasi secara kontinu atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penggunaan alat transaksi MPOS guna pencapaian target yang telah ditetapkan dan peningkatan pendapatan daerah; 4 Melakukan peLap atas realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan 5 Melakukan koordinasi ke Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi terkait, Lembaga non Pemerintah dan perOrgan/individu.
3	Optimalisasi penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masing - Masing Desa Tahun Anggaran 2024	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 306/F-05/VIII/Tahun 2024 Tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Besarnya Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masing - Masing Desa Tahun Anggaran 2024	Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Desa
4	Pemberian reward atas kinerja tertentu dalam pemungutan Pajak dan Restribusi Daerah	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 131/F-05/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan kinerja instansi pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, semangat kerja pejabat atau pegawai instansi pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat, maka diberikan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah.
5	Optimalisasi Pemungutan OPSEN Pajak dan Pajak Daerah	Perjanian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota, meningkatkan penerimaan Opsen PKB dan BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	di Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten Luwu Timur ,Nomor : 100.3.7.1/035/IV/Pemotda-PKS/2024, Nomor : 900.1.13.1/251/BAPENDA, Tanggal 19-04-2024	2 Membentuk pola kerjasama dan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan opsen dan bagi hasil.
6	Penyelenggaraan Pajak Daerah	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah Tanggal 6 Desember 2024	Menjalankan perintah peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, yaitu peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah
7	Pengelolaan Retribusi Daerah	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah.tanggal 6 Desember 2024	Dapat memeberikan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan, dan memberi kerangka hukum serta pedoman pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana fungsi dari Perbub yaitu sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri.
8	Mitigasi Bencana Tahun 2024	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana SK Kepala Pelaksana BPBD Nomor 13 Tahun 2024 tentang Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Tahun	Mengantisipasi Bencana Hidrometeorologi
9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Peraturan Kepala Dinas Nomor 400.3/89 DIKBUD Tentang Perubahan atas keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab.Luwu Timur : 400.3/073/DIKBUD Tentang Pengangkatan Guru dan Tenaga Pendidikan Lainnya Sebagai tenaga upah jasa/honorer tingkat SD Tahun 2024	Pemenuhan Ketersediaan dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Peraturan Kepala Dinas Nomor 400.3/89 DIKBUD Tentang Perubahan atas keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kab.Luwu Timur : 400.3/82/DIKBUD Tentang	Pemenuhan Ketersediaan dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tingkat sekolah menengah pertama

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Pengangkatan Guru dan Tenaga Pendidikan Lainnya Sebagai tenaga upah jasa/honorer tingkat SMP Tahun 2024	
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NOMOR 400.3/44.A/ DIKBUD Tentang Daftar rekening guru penerima dana hibah jenjang PAUD(TK SWASTA)Tahun Anggaran 2023	Pemenuhan Ketersediaan dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini
		2.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Nomor :400.3/97/DIKBUD Tentang Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya Sebagai Tenaga Honorer/Upah Jasa Tingkat PAUD Tahun 2024	
12	Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Dasar	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NOMOR 400.3/102 DIKBUD TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Seragam Sekolah	Pemberian Seragam sekolah bagi murid baru tingkat sekolah dasar
13	Pengadaan Perlengkapan Siswa Sekolah Menengah Pertama	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NOMOR 400.3/102 DIKBUD TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Seragam Sekolah	Pemberian Seragam sekolah bagi murid baru tingkat sekolah menengah pertama
14	Pengembangan Kawasan Pengembangan Tambak Udang Windu dan Udang	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024	Meningkatkan pertumbuhan ekspor Udang 8 % per tahun

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Vannamae di Kabupaten Luwu Timur	Penetapan Kawasan Pengembangan Tambak Udang Windu dan Udang Vannamae di Kabupaten Luwu Timur	
15	Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Produksi Pertanian bagi Kelompok Tani	Sk Hibah atas keputusan Bupati Nomor. 129/D-16/III/TAHUN 2024 Tentang Penetapan penerima belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat pada dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2024. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4);	Peningkatan kesejahteraan kelompok tani
16	Peningkatan upaya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024-2028 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 169/D-06/IV/Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Luwu Timur	Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Pemukiman yang nyaman dan tidak kumuh

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
17	Pengelolaan dan Penanganan Lingkungan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Kegiatan Pelayanan dan Penerimaan Jasa Layanan Laboratorium Lingkungan
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim	
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 179/D-10/V/TAHUN 2023 tentang Penetapan Wilayah Usulan Lokasi Program Kampung Iklim Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	
		Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
18	Penanganan sampah	Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/1457/BUP tentang Pengendalian Sampah Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023	Mengurangi jumlah timbulan sampah
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0044/BUP tentang Pelaksanaan Program Eco Office Lingkup Kabupaten Luwu Timur	
		Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/0096/BUP/TAHUN 2023 tentang Pengendalian Sampah Dalam Rangkaian Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 2023	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0042/BUP tentang Kewajiban Menjadi Nasabah Bank Sampah	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 460/0324/BUP tentang Pelaksanaan Program Peduli Ki' Saya Jaga Ki'	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Surat Bupati Luwu Timur Nomor 600.4.15/0273/DLH/XI/2023 tentang Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah dan Fasilitas Pengomposan	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor: 660/0288/BUP/2019 tentang Gerakan Luwu Timur Menangani Sampah Plastik Dengan Ecobrick	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0041/BUP tanggal 26 Januari 2023 tentang Gerakan Luwu Timur membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 188.6/0043/BUP tentang Gerakan Luwu Timur membawa Botol Minum Berkali Pakai (Tumbler)	
		Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 600.4.15.1/0128/BUP tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa Sampah Plastik	
19	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 600.4.20.1/0097/BUP tentang Himbauan Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri
18	Peningkatan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat	1 Menjadi pedoman dalam rangka memfasilitasi tokoh agama/masyarakat dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	
19	Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika didaerah	Perda Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika	1	Menjadi pedoman dalam rangka melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang sangat berbahaya perkembangan SDM dan mengancam kehidupan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur
		Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika didaerah	2	Terlaksananya sosialisasi kepada Pengurus PKK dan Pelajar dalam rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
20	Pemberian Bantuan Hibah pada Program Hibah Air Limbah serta Program Hibah Air Minum dan Sanitasi	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)	1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pengelolaan air limbah dengan pemasangan septic tank pada warga yg membutuhkan
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018	2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pengelolaan air minum dan sanitasi dengan pemasangan sambungan air minum pada warga yg membutuhkan serta perbaikan sistem sanitasi melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781)		

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11)	
		Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 215 / XI /2019 Tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Air Limbah Kabupaten Luwu Timur	
21	Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan melalui pengelolaan Jaringan Doktasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai standar	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Doktasi dan Informasi Hukum Nasional	Memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh Dok produk hukum daerah dan informasi hukum lainnya yang lengkap, akurat, mudah dan cepat;
		Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dok dan Informasi Hukum	
		Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Doktasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024	
22	Pembinaan dan Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007	Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH)	
23	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Memberikan pendampingan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum
24	Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Organisasi Keagamaan.	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, PeLap dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024	1 Memperkuat kerukunan ummat beragama dan emudahkan pelaksanaan kegiatan keagamaan. 2 Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana tempat Ibadah sehingga memudahkan masyarakat untuk melaksanakan Ibadah.
25	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Kesempatan Belajar di Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Daerah Tahun 2024	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Daerah Hasil Seleksi	Untuk membantu Mahasiswa Kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. 1 Untuk memeberikan penghargaan dan Motivasi bagi Mahasiswa Berprestasi agar dapat meraih Prestasi yang lebih tinggi. 2 Untuk memeberikan penghargaan dan Motivasi bagi Mahasiswa Berprestasi agar dapat meraih Prestasi yang lebih tinggi. 3 Untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswa Daerah dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka tugas Akhir Pendidikannya.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
26	Meningkatkan kesadaran kepedulian terhadap sesama melalui Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeolaan Zakat; Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.	Meningkatan kepedulian terhadap sesama

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Dalam Lap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur telah menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2024. Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 di bawah ini;

Tabel 3.10
Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1	Realisasi Indikator Pencapaian Misi, agar dapat dipertahankan, atau lebih dapat ditingkatkan.	Hal tersebut telah ditindaklanjuti dimana pencapaian indikator Misi mengalami peningkatan antara lain ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor unggulan non tambang (pertanian, kehutanan dan perikanan) mengalami peningkatan dari 1,19 persen tahun 2023 menjadi 3,25 persen di Tahun 2024, demikian pun Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 6,55 persen, turun sebesar 0,38 persen poin dibandingkan Maret 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur pada tahun 2024 mencapai 76,44, meningkat 0,60 poin (0,79 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (75,84).	Meningkatkan capaian indikator makro Luwu Timur
2	Capaian indikator Makro yang merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar ditingkatkan, terlebih lebih untuk tingkat kemerataan pendapatan (Gini Ratio) mengingat persatuan dan kesatuan bangsa yang bisa terbangun atas dasar nilai	Hal tersebut telah ditindaklanjuti, yang tercermin dari semakin membaiknya tingkat pemerataan pendapatan, sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan Gini Ratio dari tahun ke tahun, dengan capaian terakhir sebesar 0,393 poin atau turun 0,01 poin dari tahun 2022. Penurunan Ratio Gini ini	Menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	kesetaraan dan nilai keadilan.	menggambarkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur semakin merata, didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah guna memperkuat perekonomian masyarakat.	
3	Capaian realisasi program/kegiatan agar terus ditingkatkan dan terhadap sejumlah program dan kegiatan yang realisasi aktualnya belum mencapai 60 % dan atau belum dilaksanakan, sepanjang masih relevan dengan kondisi obyektif serta memberikan kontribusi terhadap target pencapaian misi serta capaian indkator makro, agar dilaksanakan pada tahun berjalan (2024) mengingat Silpa tahun 2023 masih cukup besar.	Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2024 telah dioptimalkan hingga mencapai rata-rata 92,20 persen. Beberapa capaian yang berhasil ditingkatkan meliputi tingkat partisipasi sekolah untuk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah (100%), penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja (100%), Pelatihan tenaga terampil konstruksi (90,04%), Penataan kawasan kumuh dibawah 10 ha (83,45%) serta peningkatan standar pelayanan publik yang rata-rata telah mencapai 95,45% di seluruh kecamatan.	Mewujudkan Pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien
5	Kendati realisasi Pendapatan dapat dikatakan berhasil baik, Realisasi Belanja dapat dikatakan berhasil, namun masih terdapat Silpa yang cukup besar. Berkenaan dengan hal itu untuk tahun - tahun yang akan datang	Berdasarkan Permendagri No.15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 dinyatakan bahwa penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan	Mewujudkan Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	agar Silpa lebih dapat diminimalisir, sehingga tidak ada alasan sebuah program / kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan kurang atau tidak adanya faktor pembiayaan.	mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemanfaatan Silpa Tahun 2023 telah dioptimalkan untuk membiayai program/kegiatan mendesak dalam Perubahan APBD, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan anggaran. Pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, realisasi pendapatan sejalan dengan realisasi belanja, sehingga Silpa Tahun 2024 lebih rendah dari Tahun 2023.	efisien
6	Setiap proyek daerah maupun proyek nasional, bahkan proyek yang bersifat strategis hendaknya mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah dan benar benar berdasarkan Analisis Dampak Lingungan (AMDAL) dari Perguruan Tinggi sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dalam banyak masyarakat daerah yang harus menanggung akibat negatifnya. Proyek ekstraktif yang semata mata hanya didasarkan pada analisis dan keuntungan	Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan telah ditarik ke pemerintah pusat, diantaranya Kehutanan, Kelautan dan Pertambangan. Hal ini menjadi pembatas dalam pengelolaan proyek, usaha dan kegiatan karena proses perizinan dan syarat atas terbitnya perizinan yang menyentuh urusan tersebut tidak lagi terbit di daerah. Untuk memberikan penguatan pada pengelolaan	Tujuan dari langkah-langkah ini adalah: 1. Untuk melindungi lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta memastikan masyarakat lokal

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
	ekonomi semata mata lebih sering merugikan masyarakat daerah. Contohnya jika penambangan yang dilakukan disekitar danau Towuti tidak mempertimbangkan AMDAL dengan sungguh-sungguh, maka seluruh kegiatan pertanian masyarakat baik petani kebun maupun petani sawah akan mengalami persoalan yang serius, demikian juga disekitar Kota Malili jika penambangan dilakukan di Kecamatan Malili, tidak mempertimbangkan dampak lingkungannya dengan baik, maka ketersediaan sumber daya air bersih diwilayah malili dan sekitarnya serta lahan pertanian masyarakat akan menjadi rusak. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah diminta untuk sungguh-sungguh memperhatikan hal ini.	lingkungan hidup akibat dari usaha dan kegiatan yang dilakukan maka pemerintah Kabupaten Luwu Timur tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tindak lanjut rekomendasi DPRD: 1.Untuk usaha dan kegiatan yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan usaha dan kegiatan yang memiliki izin melaksanakan ketentuan berdasarkan Dok lingkungan yang dimiliki (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL). 2.Melakukan koordinasi secara intens dengan Izin Usaha Pertambangan yang berstatus operasi produksi untuk mematuhi dan memenuhi persyaratan	tidak dirugikan. 2. Meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum dalam pengelolaan proyek, usaha dan kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		perizinan yang diberikan. 3.Berkoordinasi dengan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait aduan yang disampaikan oleh masyarakat terkait potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat usaha dan kegiatan.	
7	Sampah, bukan hanya masalah pelik yang dihadapi oleh kota kota besar, tetapi juga kota kota kecil seperti Luwu Timur. Oleh karena itu DPRD mendorong Pemerintah Daerah tetap mengaktifkan Bank Sampah. karena disamping memberikan nilai kesehatan (kebersihan lingkungan) nilai pendidikan (membiasakan/disiplin membuang sampah pada tempatnya) juga bernilai ekonomi dengan mengolah menjadi pupuk (sampah organik) dan daur ulang untuk sampah non organik.	Pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk mencapai target pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan) maka diterbitkan Peraturan bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Target pengelolaan sampah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 mencakup 30% pengurangan dan 70% penanganan. 1.Mendorong pengurangan sampah hingga mencapai 15% dan penanganan mencapai 56% pada tahun 2023.	Tujuan dari Bank Sampah di Kabupaten Luwu Timur adalah untuk mengurangi timbulan sampah dan langkah ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran, serta mendorong partisipasi berbagai pihak dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		2.Untuk meningkatkan persentase pengelolaan sampah, pemerintah bersama PT Vale Indonesia melakukan rencana pengelolaan sampah melalui sistem RDF (Refuse Derived Fuel) yang diawali dengan Dok perencanaan dan Dok lingkungan (UKL-UPL) pada tahun 2024. Selanjutnya akan dibangun fasilitas pengolahan serta TPS3R di beberapa lokasi berdasarkan kebutuhan desa/kecamatan. 3.Pemerintah Kabupaten Luwu Timur lebih mengaktifkan dan mengoptimalkan peran Bank Sampah yang sudah ada, baik di tingkat induk maupun desa. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat Bank Sampah, memberikan pelatihan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Dengan langkah ini, Bank Sampah di Luwu Timur dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan	

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		kesadaran masyarakat, serta menciptakan nilai ekonomi dari pengolahan sampah.	
8	Mengingat jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan perikanan dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh berada di bawah pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan, kiranya hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan pemerintah daerah, misalnya dengan menstabilkan harga produk pertanian, memberikan subsidi pupuk, kemudahan akses pemasaran. Hal ini penting dilakukan mengingat : (1) Cepat atau lambat deposit tambang akan habis pada waktunya; (2) Kerusakan lingkungan alam sebagai akibat penambangan; (3) Generasi muda tidak tertarik untuk berprofesi sebagai petani dan nelayan, karena dinilai rendah dan tidak menjanjikan perbaikan ekonomi keluarga. ; (4) Kesenjangan pendapatan (Gini Ratio) dan angka kemiskinan akan tetap tinggi.	Pemerintah Daerah menyadari bahwa sektor pertanian dan perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Luwu Timur masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor pertambangan. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor ini melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya tersebut antara lain mencakup kebijakan subsidi pupuk untuk berbagai komoditas, penyelenggaraan pasar murah guna menstabilkan harga produk pertanian, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti benih dan alat mesin pertanian (alsintan). Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung bagi sektor perikanan, memberikan pendampingan pascapanen oleh para penyuluh, serta mengembangkan	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Luwu Timur

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2023	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
		infrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di sektor ini.	
9	Perlu dilakukan evaluasi secara bertahap baik terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi obyektif dan dinilai tidak mampu menjawab atau memecahkan persoalan yang dihadapi rakyat. Setiap Kebijakan, Program dan Kegiatan hendaknya berbasis pada akar masalah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang tidak berbasis pada akar masalah, tidak akan mampu memecahkan masalah, bahkan akan menghabiskan anggaran yang tidak perlu.	Pemerintah daerah berkomitmen untuk senantiasa melakukan evaluasi berbasis data terhadap kebijakan program kegiatan yang dijalankan dengan memastikan relevansi dan efektifitas dalam menjawab permasalahan masyarakat sehingga dapat lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran, disamping itu dalam menyusun kebijakan program kegiatan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui musrenbang, maupun Renja OPD serta membangun kemitraan positif dengan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari Dok perencanaan daerah.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas Pembantuan merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi kepada pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pencapaian tujuan pembangunan yang lebih optimal. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan berupa dana, sumber daya manusia, atau keahlian teknis untuk membantu daerah dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti dalam hal penanggulangan bencana, peningkatan kualitas pelayanan publik, atau pelaksanaan proyek pembangunan strategis. Sementara itu, pemerintah provinsi, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, juga memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada daerah yang lebih kecil, baik dalam bentuk koordinasi, pengawasan, maupun pendampingan teknis. Melalui tugas perbantuan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lebih merata dan efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah

Pada tahun 2024 tugas pembantuan pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 6(enam) Program yang berada pada 2(dua) Perangkat daerah yaitu Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedangkan tugas pembantuan provinsi sebanyak 2(dua) yang berada pada 2(dua) perangkat daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Kesatuan Bangsa.

. Adapun Capaian kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Perkebunan	DIPA PROPINSI DITJEN PERKEBUNAN SP DIPA-018. 05.4.199572/2024 TANGGAL 28 NOP 2023	**BIDANG PERKEBUNAN**	**Kab.Luwu Timur**	**Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur**							
			Alokasi Anggaran			**676,640,000**	**634,896,965**	**93.83**				
			Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			**376,640,000**	**375,340,000**	**99.65**				
			Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar			**376,640,000**	**375,340,000**	**99.65**				
			Loksi : KAB. LUWU TIMUR									
			Sarana Pengembangan Kawasan(Base Line)			**376,640,000**	**375,340,000**	**99.65 Ha**	**100 Ha**	**100**	100	
			Kawasan Kelapa			**376,640,000**	**375,340,000**	**99.65Ha**	**100 Ha**	**100**	100	
			Peremajaan Tanaman Kelapa			**363,000,000**	**362,340,000**	**99.82**				

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam 100 Ha			363,000,000	362,340,000	**99.82**				
			Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	363,000,000	362,340,000	**99.82**				
			(KPPN.058.Palopo)									
			Benih Siap Tanam			275,000,000	274,450,000	**99.80**	11 Btg	11 Btg	100	
			Pupuk Organik			88,000,000	87,890,000	**99.88**	22 Kg	22 Kg		
			Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan			**13,640,000**	**13,000,000**	**95.31**				
			Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam			13,640,000	13,000,000	**95.31**				
			Belanja Bahan	-	-	640	640	**100.00**				
			(KPPN.058.Palopo)									
			ATK dan Bahan Komputer			640	640	**100.00**	1 Paket	1 Paket	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	13,000,000	12,360,000	**95.08**				
			(KPPN.058.Palopo									

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			)									
			Dalam Rangka Identifikasi CP/CL, Koordinasi, Konsultasi Pendampingan dan Monev			13,000,000	12,360,000	**95.08**	52 OP	52 OP	100	
			Program Dukungan Manajemen			**300,000,000**	**259,556,965**	**86.52**				
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			**300,000,000**	**259,556,965**	**86.52**				
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			**300,000,000**	**259,556,965**	**86.52**	**1 Dok**	**1 Dok**	100	
			Lokasi: KAB.LUWU TIMUR									
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran			**300,000,000**	**259,556,965**	**86.52**	**1 Dok**	**1 Dok**	100	
			Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Satker			**300,000,000**	**259,556,965**	**86.52**				
			Honor Pengelola Satker (Luwu Timur)			300,000,000	259,556,965	86.52				

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	61,092,000	48,984,000	80.18				
			Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			14,940,000	10,956,000	73.33	9 OB	9 OB	100	
			Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			2,988,000	2,988,000	100.00	3 OB	3 OB	100	
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			14,490,000	10,626,000	73.33	9 OB	9 OB	100	
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			2,898,000	2,898,000	100.00	3 OB	3 OB	100	
			Honorarium Pejabat Penguji Tagihan; Penandatangan			5,940,000	3,564,000	60.00	9 OB	9 OB	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			SPM (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)									
			Honorarium Pejabat Penguji Tagihan; Penandatangan SPM (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			792	792	100.00	3 OB	3 OB	100	
			Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			5,130,000	3,762,000	73.33	9 OB	9 OB	100	
			Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			1,026,000	1,026,000	100.00	3 OB	3 OB	100	
			Honor Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			7,740,000	7,568,000	97.78	18 OB	18 OB	100	
			Honor Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)			1,548,000	1,204,000	77.78	6 OB	6 OB	100	
			Honorarium					100.00	24 OB	24 OB	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			pengelola sistem akuntansi instansi (SAI)			3,600,000	3,600,000					
			Belanja Bahan	-	-	12,578,000	12,549,850	99.78				
			(KPPN.058.Palopo)	-	-							
			Administrasi, Penggandaan Dokumen, Fotocopy, Pelaporan, Proposal, dll			10,000,000	9,999,850	100.00	1 Tahun	1 Tahun	100	
			Penyusunan Laporan Tahunan			2,578,000	2,550,000	98.91	1 Paket	1 Paket	100	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	12,580,000	12,580,000	100.00				
			(KPPN.058.Palopo)	-	-							
			ATK dan Bahan Komputer			12,580,000	12,580,000	100.00	1 Tahun	1 Tahun	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	213,750,000	185,443,115	86.76				
			Pengawalan ke Kabupaten			10,750,000	10,540,000	98.05	43 OT	43 OT	100	
			Pertemuan Perencanaan			16,000,000	15,980,903	99.88	2 OT	2 OT	100	
			Pertemuan Monev			48,000,000	43,960,210	91.58	6 OT	6 OT	100	
			Pertemuan Keuangan			48,000,000	46,312,706	96.48	6 OT	6 OT	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Menghadiri Hari Perkebunan			16,000,000	15,492,723	96.83	2 OT	2 OT	100	
			Konsultasi ke Pusat			48,000,000	26,159,777	54.50	6 OT	6 OT	100	
			Konsultasi ke Provinsi			27,000,000	26,996,796	99.99	9 OT	9 OT	100	
2	**Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Sarana dan Prasarana**	**DIPA PROPINSI DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN No. 018.08.4.199133/ 2024**	**BIDANG PRASARANA DAN SARANA**									
						2,085,150,000	**2,065,549,800**	**99.06%**				
			Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			**840,000,000**	**840,260,000**	**100%**				
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup [Base Line]			**840,000,000**			7 Unit	7 Unit	100	
			Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah			**840,000,000**						
			Persiapan			**14,000,000**	**5,580,000**					
			LUWU TIMUR									

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						14,000,000						
			Belanja Bahan			**1,500,000**	**1,500,000**		1 Paket	1 Paket	100	
			- Konsumsi Rapat			1,500,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**12,500,000**	**4,080,000**					
			- Rapat Koordinasi			5,500,000						
			- Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan			7,000,000						
			Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan			**815,500,000**	**824,990,000**					
			LUWU TIMUR			**815,500,000**						
			Belanja Bahan			**18,900,000**	**18,900,000**		7 Paket	7 Paket	100	
			- Dokumen Persiapan Rancang Bangun			18,900,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**7,000,000**	**6,800,000**		14 OH	14 OH	100	
			- Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan			7,000,000						
			Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada			**789,600,000**	**789,600,000**		7 Unit	7 Unit	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang									
			- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan			789,600,000						
			Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			**10,500,000**	**9,690,000**					
			LUWU TIMUR			**10,500,000**						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**10,500,000**	**9,690,000**		21 OH	21 OH	100	
			- Monitoring dan Evaluasi			10,500,000						
			- Penyusunan Laporan			-						
			Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			**1,200,000,000**	**1,187,850,000**	**98.99%**				
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			**1,200,000,000**						
			Irigasi Perpipaan			**1,200,000,000**						
			Persiapan			**60,000,000**	**47,950,000**					
			LUWU TIMUR									

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						60,000,000						
			Belanja Bahan			**42,000,000**	**42,000,000**					
			- Dokumen Persiapan Rancang Bangun			42,000,000						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**18,000,000**	**5,950,000**					
			- Penentuan Calon Petani dan Lokasi Kegiatan			6,000,000			12 OH	12 OH	100	
			- Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan			6,000,000			12 OH	12 OH	100	
			- Rapat Koordinasi			6,000,000			12 OH	12 OH	100	
			Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan			**1,128,000,000**	**-**	**-**				
			LUWU TIMUR			**1,128,000,000**						
			Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang			**1,128,000,000**	**1,128,000,000**					
			- Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpipaan			1,128,000,000			12 Unit	12 Unit	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Monitoring dan Pelaporan			**12,000,000**	**11,900,000**					
			LUWU TIMUR			**12,000,000**						
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**12,000,000**	**11,900,000**					
			- Monitoring dan Pelaporan			6,000,000			12 OH	12 OH	100	
			- Penyusunan Laporan			6,000,000			12 Paket	12 Paket	100	
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			**10,000,000**	**8,100,000**	**81.00%**				
			Koordinasi			**10,000,000**			1 Keg	1 Keg	100	
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			**10,000,000**			1 Keg	1 Keg	100	
			Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian			**10,000,000**						
			KABUPATEN LUWU TIMUR			**10,000,000**						
			Belanja Bahan			**1,200,000**	**-**					
			- Pengadaan dokumen			300			1 Paket	1 Paket	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Database/Inventarisasi Alsintan dan UPJA									
			- ATK dan Bahan Komputer			500			1 Paket	1 Paket	100	
			- Pengadaan Petunjuk Pelaksanaan			300						
			- Fotocopy dokumen, surat dll			100,000						
			Belanja Honor Output Kegiatan			**3,600,000**	**3,000,000**					
			- Honor Petugas Input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan			1,800,000			6 Bln	6 Bln	100	
			- Honor Petugas Pemeriksa			1,800,000			6 Bln	6 Bln	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**5,200,000**	**5,100,000**					
			- Monitoring dan pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/informasi Alsintan dan UPJA			4,000,000			10 OH	10 OH	100	
			- Pendampingan,verifikasi/monitoring alsintan dan pembinaan kelembagaan			1,200,000			3 OH	3 OH	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UPJA									
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			-	-					
			- Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis,Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA			-						
			- Koordinasi Penyaluran/BAST dan Laporan Pemanfaatan Alsintan			-						
			- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Pemanfaatan ,Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis,Bisnis dan Manajemen Kelembagaan			-						
			- Perjalanan dalam rangka Koordinas Penyaluran Alsintan/BAST dan Laporan			-						
			Program Dukungan Manajemen			**35,150,000**	**29,339,800**	**83.47%**	10 Dok	10 Dok	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP			**35,150,000**						
			Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]			**35,150,000**						
			Layanan Manajemen Keuangan			**35,150,000**						
			Layanan Manajemen Keuangan			**35,150,000**		-				
			KABUPATEN LUWU TIMUR			**35,150,000**		-				
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			**28,600,000**	22,880,000	-				
			- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen			12,100,000			10 OB	10 OB	100	
			- Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota			4,000,000			10 OB	10 OB	100	
			- Honorarium Pembantu Pelaksanaan			3,000,000			10 OB	10 OB	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kegiatan di Kabupaten/Kota									
			- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu			3,500,000			10 OB	10 OB	100	
			- Honorarium Staf Bendahara Pengeluaran			3,000,000			10 OB	10 OB	100	
			- Honor Staf Penyusun Pelaporan ONLINE			3,000,000			10 OB	10 OB	100	
			Belanja Bahan			**2,350,000**	2,349,800	-				
			- ATK Penyusunan Laporan			500			1 Paket	1 Paket	100	
			- Penyusunan dan Laporan Tahunan Satker			350			1 Paket	1 Paket	100	
			- Pengiriman, Perbanyakan dan Penjilidan			1,500,000			10 Bln	10 Bln	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			**4,200,000**	4,110,000	-				
			- Perjalanan dalam rangka Pembinaan,teknis, administrasi, monitoring dan pelaporan			1,400,000			4 OH	4 OH	100	
			- Perjalanan dalam						4 OP	4 OP	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			rangka Pembinaan Kegiatan lingkup Ditjen, PSP			1,400,000						
			- Perjalanan dalam rangka Konsultasi ke Provinsi			1,400,000			4 OP	4OP	100	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			-	-	-				
			- Perjalanan dalam rangka percepatan, teknis,administrasi , monitoring dan pelaporan Kegiatan			-						
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			-	-	-				
			- Perjalanan dalam rangka percepatan, teknis,administrasi , monitoring dan pelaporan Kegiatan			-						
			Jumlah			**2.761.790.000**	**2.700.446.765**	**97,77**				

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program / Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**	**067.07.4.350289/ 2024 tgl 23 Nov 2023**	**PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN,PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI**	**Kab.Luwu Timur**	**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**	**5.340.625.000**	**5.293.094.315**	**99,11**				
1			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			47.700.000	46.630.000	**97,76**	1 Lembaga	1 Lembaga	100	
2			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			71.100.000	70.850.000	**99,65**	27 Orang	27 Orang	100	
						81.305.000	80.750.880	**99,32**	60 Orang	60 Orang	100	
3			Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga			72.914.000	69.765.000	**95,68**	15 Keluarga	15 Keluarga	100	
4			Bantuan Keluarga			184.150.000	176.047.000	**95,6**	15 Keluarga	15 Keluarga	100	
5			Bantuan Peralatan / Sarana			456.950.000	427.969.600	**93,66**	1 Unit	1 Unit	100	
6			Sarana Pengembangan Kawasan			2.682.631.000	2.679.910.350	**99,9**	33 Unit	33 Unit	100	
7			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			534.800.000	532.471.000	**99,56**	4,2 Km	4,2 Km	100	
8			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)			940.000.000	939.720.500	**99,97**	14 m	14 m	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program / Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
9			Prasarana Pengembangan Kawasan			230.025.000	229.935.650	**99,96**	35 km2, bidang, km, hektar	35 km2, bidang, km, hektar	100	
10			Koordinasi			39.050.000	39.044.335	**99,99**	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
II			**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**			**67.969.000**	**63.811.000**	**93,88**			100	
1			Layanan Dukungan Manajemen Internal			67.969.000	63.811.000	**93,88**	1 Layanan	1 Layanan	100	
			Jumlah			**5.408.594.000**	**5.356.905.315**	**99,04**				

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2024

Tabel 4.2
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**225.000.000**	**67.940.000**	30,20	100%	12 Dokumen	100	
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Selatan	Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 462/5366/DPMD, Tanggal 4 April 2024	**Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yan bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabuapten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah**	Kab.Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur	**225.000.000**	**67.940.000**	30,20	100%	12 Dokumen	100	
01.			**Sub Kegiatan**				**67.940.000**	30,20	12	12	100	

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
01			**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**			**225.000.000**			Dokumen	Dokumen		
			(#) Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga									
			Belanja Natura dan Pakan Natura									
			Bahan Memasak			**184.000.000**	**39.540.000**	21,49				
			Balita			**78.400.000**	**33.600.000**	42,86				
			Makanan Tambahan Lokal @70 orang x 56 hari			78.400.000	**33.600.000**	42,86	3920 Org/hari	56 orng/hr	1,42	
			Bumil			**105.600.000**	**5.940.000**	5,63				
			Makanan Tambahan Lokal @ 40 orang x 120 hari			105.600.000	5.940.000	5,63	4800 Org/hari	9 org/hr	0,18	
			# Peningkatan Derajat									

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
			Pendidikan Perempuan dan Keluarga									
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan			**11.000.000**	**8.400.000**	76,36				
			Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran			**11.000.000**	**8.400.000**	76,36				
			Banner dan Stan			3.500.000	2.450.000	70,00	10 Buah	10	100	
			Baliho			7.500.000	5.950.000	79,33	10 Buah	10	100	
			Belanja Modal			**30.000.000**	**28.400.000**	94,67				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin			**30.000.000**	**28.400.000**	94,67				
			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			**30.000.000**	**28.400.000**	94,67				
			Belanja Modal Alat Kantor			**30.000.000**	**28.400.000**	94,67				
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			**30.000.000**	**28.400.000**	94,67				
			# Papan Nama Rumah Gizi			**14.000.000**	**14.000.000**	100,00				

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
			Bersumber dari BKK									
			Papan Nama Rumah Gizi			14.000.000	14.000.000	100,00	4 Unit	4	100	
			Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			**10.000.000**	**8.800.000**	88,00				
			Meja kerja Petugas Rumah Gizi			10.000.000	8.800.000	88,00	4 Unit	4	100	
			Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat			**6.000.000**	**5.600.000**	93,33				
			Kursi kerja Petugas Rumah Gizi			6.000.000	5.600.000	93,33	4 Unit	4	100	
TOTAL						**225.000.000**	**67.940.000**	**30,20**				

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No:176/II/Tahun 2024	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	Kab.Luwu Timur	Badan Kesatuan Bangsa Kab.Luwu Timur	**15.000.000**	**14.500.000**	**96,67**		**100**		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**15.000.000**	**14.500.000**	**96,67**		**100**		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.000.000	14.500.000	96,67		100		
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			**330.000.000**	**329.000.000**	**99,70**		**100**		
			Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial			**330.000.000**	**329.000.000**	**99,70**		**100**		
			Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan			330.000.000	329.000.000	99,70		100		

NO	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah									
TOTAL BELANJA						**345.000.000**	**343.500.000**	**99,57**				

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2024

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Tabel 4.3
URAIAN CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT DAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	***BIDANG PERKEBUNAN***				
	Alokasi Anggaran	**93.83**			
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	99.65	Adanya peningkatan nilai tambah produksi tanaman perkebunan dengan pertumbuhan subsektor perkebunan namun terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pengolahan hasil perkebunan	Perlu dilakukannya pelatihan atau pendididkan dalam pengembangan keterampilan khususnya pada petani yang berusahatani di sektor perkebunan	**Dinas pertanian dan ketahanan pangan**
	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	99.65			
	Loksi : KAB. LUWU TIMUR				
	Sarana Pengembangan Kawasan(Base Line)	99.65			
	Kawasan Kelapa	99.65			
	Peremajaan Tanaman Kelapa	99.82			
	Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam 100 Ha	99.82			
	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	99.82			
	(KPPN.058.Palopo)				
	Benih Siap Tanam	99.08			
	Pupuk Organik	99.88			
	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	95.31			
	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan	95.31			

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam				
	Belanja Bahan	100			
	(KPPN.058.Palopo)				
	ATK dan Bahan Komputer	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	95.08			
	(KPPN.058.Palopo)				
	Dalam Rangka Identifikasi CP/CL, Koordinasi, Konsultasi Pendampingan dan Monev	95.08			
	Program Dukungan Manajemen	86.52			
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	86.52			
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	86.52			
	Lokasi: KAB.LUWU TIMUR				
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	86.52			
	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Satker	86.52			
	Honor Pengelola Satker (Luwu Timur)	86.52			
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80.18			
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	73.33			
	Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	100			

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	73.33			
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	100			
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan; Penandatangan SPM (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	60			
	Honorarium Pejabat Penguji Tagihan; Penandatangan SPM (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	100			
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	73.33			
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	100			
	Honor Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	97.78			
	Honor Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 M)	77.78			
	Honorarium pengelola sistem akuntansi instansi (SAI)	100			
	Belanja Bahan	99.78			
	(KPPN.058.Palopo)				
	Administrasi, Penggandaan Dokumen, Fotocopy, Pelaporan, Proposal, dll	100			
	Penyusunan Laporan Tahunan	98.91			
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100			

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	(KPPN.058.Palopo)				
	ATK dan Bahan Komputer	100			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.76			
	Pengawalan ke Kabupaten	98.05			
	Pertemuan Perencanaan	99.88			
	Pertemuan Monev	91.58			
	Pertemuan Keuangan	96.48			
	Menghadiri Hari Perkebunan	96.83			
	Konsultasi ke Pusat	54.05			
	Konsultasi ke Provinsi	99.99			
2	**BIDANG PRASARANA DAN SARANA**				
	Alokasi Anggaran	**99.06%**			
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	**100%**	Masih kurangnya alat mesin pertanian (Alsintan) yang dapat digunakan petani dalam berusahatani	Peningkatan Infrastruktur dengan melakukan rehabilitasi dan pememliharaan	
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian				
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup [Base Line]				
	Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah				
	Persiapan				
	LUWU TIMUR				
	Belanja Bahan				

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	- Konsumsi Rapat		Kekurangan sumber air	Dapat melakukan pelatihan bagi petani dan bagi penyuluh lapangan	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Rapat Koordinasi				
	- Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan				
	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan	**100%**			
	LUWU TIMUR		Kerusakan Infrastruktur irigasi	Dapat berkoordinasi antar pemangku kepentingan	
	Belanja Bahan				
	- Dokumen Persiapan Rancang Bangun				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Penentuan Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan				
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang		Biaya operasional untuk pemeliharaan dan pegelolaan sistem irigasi yang sering kali menjadi beban bagi petani.		

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	- Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan				
	Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	**100%**			
	LUWU TIMUR				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Monitoring dan Evaluasi				
	- Penyusunan Laporan				
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	**98.99%**			
	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup				
	Irigasi Perpipaan				
	Persiapan				
	LUWU TIMUR				
	Belanja Bahan				
	- Dokumen Persiapan Rancang Bangun				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Penentuan Calon Petani dan Lokasi Kegiatan				
	- Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan				
	- Rapat Koordinasi				
	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	**-**			
	LUWU TIMUR				
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda				

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	dalam bentuk uang				
	- Pekerjaan Kontruksi Irigasi Perpipaan				
	Monitoring dan Pelaporan				
	LUWU TIMUR				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Monitoring dan Pelaporan				
	- Penyusunan Laporan				
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	**81.00%**			
	Koordinasi				
	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	**-**			
	Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	**-**			
	KABUPATEN LUWU TIMUR				
	Belanja Bahan				
	- Pengadaan dokumen Database/Inventarisasi Alsintan dan UPJA				
	- ATK dan Bahan Komputer				
	- Pengadaan Petunjuk Pelaksanaan				
	- Fotocopy dokumen, surat dll				
	Belanja Honor Output Kegiatan				
	- Honor Petugas Input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan				
	- Honor Petugas Pemeriksa				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	- Monitoring dan pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/informasi Alsintan dan UPJA				
	- Pendampingan,verifikasi/monitoring alsintan dan pembinaan kelembagaan UPJA				
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
	- Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis,Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA				
	- Koordinasi Penyaluran/BAST dan Laporan Pemanfaatan Alsintan				
	- Perjalanan dalam rangka Koordinasi Pemanfaatan ,Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis,Bisnis dan Manajemen Kelembagaan				
	- Perjalanan dalam rangka Koordinas Penyaluran Alsintan/BAST dan Laporan				
	Program Dukungan Manajemen	**83.47%**			
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP				
	Layanan Dukungan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]				
	Layanan Manajemen Keuangan				
	Layanan Manajemen Keuangan	-			
	KABUPATEN LUWU TIMUR	-			

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	_			
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen				
	- Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota				
	- Honorarium Pembantu Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten/Kota				
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu				
	- Honorarium Staf Bendahara Pengeluaran				
	- Honor Staf Penyusun Pelaporan ONLINE				
	Belanja Bahan	_			
	- ATK Penyusunan Laporan				
	- Penyusunan dan Laporan Tahunan Satker				
	- Pengiriman, Perbanyakan dan Penjilidan				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	_			
	- Perjalanan dalam rangka Pembinaan,teknis,administrasi, monitoring dan pelaporan				
	- Perjalanan dalam rangka Pembinaan Kegiatan lingkup Ditjen, PSP				
	- Perjalanan dalam rangka Konsultasi ke				
	Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-			
	- Perjalanan dalam rangka percepatan,				

No	Program/Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	teknis,administrasi, monitoring dan pelaporan Kegiatan				
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-			
	- Perjalanan dalam rangka percepatan, teknis,administrasi, monitoring dan pelaporan Kegiatan				

No	Program/ Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	Dukungan Anggaran Dana TP yang Dari APBN belum Maksimal khususnya terkait pengembangan Fasilitas umum pada Kawasan Transmigrasi Seperti Gedung Sekolah. Pasar serta sarana Ibadah. Disamping itu juga Warga transmigrasi Masih membutuhkan Dukungan bantuan Sarana dan prasarana Pertanian seperti Bantuan alsintan	Pengusulan DED untuk Pembangunan dan pengembangan Fasilitas umum Pada Kawasan Transmigrasi. Melakukan usulan Untuk bantuan Alsintan bagi Warga transmigrant baik melalui Anggaran APBN maupun APBD	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	27 Orang			
		60 Orang			
3	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	15 Keluarga			
4	Bantuan Keluarga	15 Keluarga			
5	Bantuan Peralatan / Sarana	1 Unit			
6	Sarana Pengembangan Kawasan	33 Unit			
7	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	4,2 Km			
8	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	14 m			

No	Program/ Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	(Jembatan)		Dimana sektor pertanian Merupakan sumber Utama pendapatan warga Transmigran		
9	Prasarana Pengembangan Kawasan	35 km2, bidang, km, hektar			
10	Koordinasi	1 Kegiatan			
II	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**				
8	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan			

NO	Program/ Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota**	**100**			**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***100***			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100			
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	**100**			
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	***100***			
	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,	100			

NO	Program/ Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah				

NO	Program/ Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	12 Dokumen	Adanya selisih dalam pemberian makanan tambahan (PMT) kepada sasaran balita Stunting yaitu : Berdasarkan Juknis Pelaksanaan Program Penanganan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk yanag bersumber dari bantuan keuangan Khusus Pemerintah Sulawesi Selatan Tahun 2024, dimana penanganan Stunting di siapkan selama 3 bulan sedangkan yang terlaksana hanya 1 bulan diakibatkan sebagian besar tidak teralisasi, dikarenakan beberapa Dinas yang menangani stunting juga melakukan PMT bagi Balita stunting dan ibu hamil	Perlu pengelompokan sasaran dari para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan target dan capaian program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	**Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yan bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabuapten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah**	12 Dokumen			
01.01	**Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	12 Dokumen			
	(#) Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga				
	Belanja Natura dan Pakan Natura				
	Bahan Memasak				
	Balita				
	Makanan Tambahan Lokal @70 orang x 56 hari	56 orng/hr			
	Bumil				

NO	Program/ Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/Permasalahan	Solusi	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Makanan Tambahan Lokal @ 40 orang x 120 hari	9 org/hr	dalam waktu yang hampir bersamaan dan target anak Stunting dan ibu hamil yang sama.		
	# Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga				
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan				
	Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran				
	Banner dan Stan	10			
	Baliho	10			
	Belanja Modal				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
	Belanja Modal Alat Kantor				
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				
	# Papan Nama Rumah Gizi Bersumber dari BKK				
	Papan Nama Rumah Gizi	4			
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
	Meja kerja Petugas Rumah Gizi	4			
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat				
	Kursi kerja Petugas Rumah Gizi	4			

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2024

BAB V
P E N U T U P

Hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur, disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Luwu Timur Akhir Tahun Anggaran 2024. Harapan terbesar adalah bagaimana proses pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2024 memberi dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Luwu Timur atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi, permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang telah memberikan dukungan dan kerja kerasnya dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan masing-masing.

Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kami menyadari masih ditemukan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas, walaupun telah dengan sungguh-sungguh diupayakan langkah-langkah perbaikan, namun pemerintah akan terus melakukan upaya kongkrit untuk mencapai target yang lebih optimal, tentunya didukung oleh seluruh elemen pemerintahan baik ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Dengan demikian, laporan ini menjadi bahan informasi lengkap bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk menilai sejauh mana proses pembangunan berjalan dan memberi masukan demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai.

Sekian dan Terima kasih.

Malili, 17 Februari 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. Budiman, M.Pd